



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BELU
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023**



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Belu menyusun laporan keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan keuangan pemerintah Kabupaten Belu menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belu Tahun 2024 adalah:

1. Memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Memenuhi akuntabilitas publik, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan mandat yang dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Belu;
3. Menyediakan informasi secara komprehensif yang berguna bagi perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta meningkatkan efektifitas pengendalian atas seluruh aset, utang dan ekuitas;



4. Menyediakan informasi keuangan yang transparan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik; dan
5. Menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

Pelaporan keuangan secara spesifik menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan. Selain itu disampaikan pula informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai aktivitas Pemerintah Kabupaten Belu selama satu periode.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;



3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2024;



17. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Bupati Belu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belu sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Belu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belu.
19. Peraturan Bupati Belu Nomor 57 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Belu Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Belu Nomor 57 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2024;
20. Peraturan Bupati Belu Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belu Nomor 56 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Belu Nomor 46 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2024.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

1. Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

2. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD

2.1 Ekonomi Makro

- 2.1.1 Kebijakan Keuangan
- 2.1.2 Kebijakan Pendapatan Daerah
- 2.1.3 Kebijakan Belanja Daerah
- 2.1.4 Kebijakan Pembiayaan Daerah

2.2 Pencapaian Target Kinerja APBD



3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Anggaran Kinerja Keuangan Secara Umum
- 3.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja APBD Kabupaten Belu menurut Urusan Pemerintah Daerah
- 3.3 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

4. Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Unsur Laporan Keuangan
- 4.2 Entitas Pelaporan
- 4.3 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.5 Kebijakan Akuntansi yang berkaitan dengan Rekening/Akun

5. Penjelasan Akun-Akun Laporan Keuangan

- 5.1 Penjelasan Akun-akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.1.1 Pendapatan - LRA
 - 5.1.2 Belanja
 - 5.1.3 Transfer
 - 5.1.4 Pembiayaan
- 5.2 Penjelasan Akun-akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
- 5.3 Penjelasan Akun-akun Neraca
 - 5.3.1 Aset
 - 5.3.2 Kewajiban
 - 5.3.3 Ekuitas
- 5.4 Penjelasan Akun-akun Laporan Operasional (LO)
 - 5.4.1 Pendapatan - LO
 - 5.4.2 Beban
 - 5.4.3 Surplus/Defisit dari Operasi
 - 5.4.4 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
 - 5.4.5 Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa
 - 5.4.6 Pos Luar Biasa
 - 5.4.7 Surplus/Defisit - LO



5.5 Penjelasan Akun-akun Laporan Arus Kas (LAK)

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

5.5.5 Saldo Akhir Kas

5.6 Penjelasan Akun-akun Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

6. Pengungkapan Informasi Penting Lainnya

6.1 Informasi Non Keuangan Lainnya

6.2 Profil Singkat Kabupaten Belu

6.3 Kejadian-kejadian Setelah Tanggal Neraca (jika ada)

7. Penutup



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro menggambarkan keadaan keseluruhan dari kegiatan perekonomian. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi pemerintah daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Secara umum perkembangan ekonomi nasional dan regional memberikan dampak signifikan terhadap kondisi perekonomian di daerah Kabupaten Belu pada periode tertentu.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 mengacu pada indikator sosial ekonomi tahun 2024 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu yaitu:

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 13,86%;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,41%;
- c. Gini *Ratio* sebesar 0,316%;
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 68,13%;
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 3,97%;
- f. Tingkat Inflasi sebesar 1,19%; dan
- g. Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku (PDRB inflasi ADHB) sebesar Rp5.931.220.000.000,00.

a. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Kabupaten Belu periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan.



Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 2.1
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Belu

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/ (Turun) (%)
1	Kab/Kota (%)	14,84	14,30	13,86	(0,44)
2	Kab/Kota (Ribu Jiwa)	33,98	33,19	32,57	(1,87)
3	Provinsi (%)	20,05	19,96	19,48	(0,48)
4	Nasional (%)	9,57	9,36	8,57	(0,79)
5	Peringkat Provinsi	17	17	17	-
6	Peringkat Nasional	3	3	3	-

Sumber Dokumen: BPS

Persentase penduduk miskin Kabupaten Belu tahun 2024 tercatat 13,86%. Jumlah ini menunjukkan penurunan sebesar (0,44)% jika dibandingkan dengan tahun 2023 atau (0,98%) jika dibandingkan dengan tahun 2022. Penurunan ini hasil dari terobosan yang dilakukan pemerintah melalui program-programnya yang tepat sasaran. Diharapkan pada tahun 2025 jumlah ini dapat lebih ditekan atau dikendalikan. Untuk itu dalam perencanaan penganggaran di tahun-tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Provinsi NTT pada September 2024 tercatat sebesar 19,48%, turun sebesar (0,48)% dibandingkan tahun 2023, presentase penduduk miskin Kabupaten Belu masih di bawah presentase Provinsi NTT.



Tabel 2.2
Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Belu

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/(Turun) (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab/Kota	2,87	2,07	2,26	0,19
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	3,63	3,33	3,41	0,08
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,56	1,53	1,36	(0,17)
4	Peringkat Provinsi	15	17	15	2
5	Peringkat Nasional	450	388	426	(38)

Sumber Dokumen: BPS

Tingkat kedalaman kemiskinan Kabupaten Belu tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,19% jika dibandingkan dengan tahun 2023 atau penurunan sebesar (0,61)% jika dibandingkan dengan tahun 2022. Di mana pada tahun 2024 tingkat kedalaman kemiskinan Kabupaten Belu sebesar 2,26%. Angka tersebut masih di bawah tingkat kedalaman kemiskinan Provinsi sebesar 3,41%. Diharapkan pada tahun 2025, jumlah ini dapat ditekan atau dikendalikan. Untuk itu, perencanaan penganggaran di tahun-tahun mendatang harus mendapat prioritas dalam menekan angka kemiskinan.

Tabel 2.3
Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Belu

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/(Turun) (%)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab/Kota	0,86	0,48	0,51	0,03
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,93	0,80	0,85	0,05
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,38	0,38	0,32	(0,06)
4	Peringkat Provinsi	13	16	16	-
5	Peringkat Nasional	7	4	7	(3)

Sumber Dokumen: BPS

Tingkat keparahan kemiskinan Kabupaten Belu tahun 2024 sebesar 0,51% dan jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 0,03% jika dibandingkan tahun 2023 atau menurun (0,35)% selama periode 3 (tiga) tahun terakhir. Sedangkan tingkat keparahan kemiskinan provinsi tahun 2024 juga mengalami kenaikan 0,05% jika dibandingkan dengan tahun 2024 atau mengalami penurunan sebesar (0,08)% jika dibandingkan dengan tingkat keparahan kemiskinan di tahun 2022. Tingkat keparahan kemiskinan Kabupaten Belu ini masih di bawah tingkat keparahan kemiskinan provinsi yakni 0,85%. Diharapkan pada tahun 2025 jumlah ini dapat ditekan atau dikendalikan. Untuk itu dalam perencanaan penganggaran di tahun-tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

**b. Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Dalam rangka menyesuaikan dengan konsep *International Labour Organization* (ILO), konsep pengangguran terbuka di Indonesia diperluas yaitu disamping mencakup penduduk yang aktif mencari pekerjaan, mencakup pula kelompok penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, dan kelompok penduduk yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan serta kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Belu tahun 2024 dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.4
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Belu

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/(Turun) (%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%)	6,00	5,45	5,41	(0,04)
2	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	3,54	3,14	3,02	(0,12)
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,86	5,32	4,91	(0,41)
4	Peringkat Provinsi	2	2	2	-

Sumber Dokumen: BPS

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Belu tahun 2024 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 5,41%, atau sebanyak 7.329 orang dari jumlah angkatan kerja di Kabupaten Belu. Jika dibandingkan dengan TPT pada tahun 2023 sebesar 5,45%, TPT 2024 turun sebesar (0,04)%, sedangkan jika dibandingkan dengan TPT pada tahun 2022 sebesar 6,00%, TPT 2023 turun sebesar (0,59)%. TPT Kabupaten Belu tahun 2024 masih lebih tinggi jika dibandingkan TPT Provinsi NTT dan TPT Nasional sebesar 3,02% dan 4,91%.

c. Indeks Gini (Gini *Ratio*)

Indeks Gini atau Gini *Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva *Lorenz*, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 di mana:



- 1) Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, di mana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama; dan
- 2) Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, di mana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, realisasi pencapaian Gini *Ratio* tahun 2024 adalah sebesar 0,316 poin sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.5
Gini *Ratio* Provinsi NTT

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/(Turun) (%)
1	Tingkat Provinsi	0,340	0,325	0,316	(2,77)
2	Tingkat Nasional	0,381	0,388	0,381	(1,80)
3	Peringkat Provinsi			16	

Sumber Dokumen: BPS

Pada bulan September tahun 2024, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diukur oleh Gini *Ratio* adalah sebesar 0,316. Angka ini menurun sebesar (0,009) poin atau (2,77)% jika dibandingkan dengan Gini *ratio* tahun 2023 sebesar 0,325 poin. Jika dibandingkan dalam 3 (tiga) tahun terakhir, angka ini menurun (0,024) poin atau (7,06)%. Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur turun sebesar (0,007) poin atau (1,80)% jika dibandingkan tahun 2023 atau tetap jika dibandingkan dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Angka ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Gini *Ratio* Nasional. Hal ini berarti distribusi pendapatan belum merata pada setiap golongan penduduk NTT.

d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang diukur dari 3 (tiga) dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*) yang diukur dengan angka harapan hidup saat lahir, pengetahuan (*knowledge*) yang diukur dengan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah dan standar hidup layak (*decent standart of living*). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- 1) Rendah (< 60);



- 2) Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$);
- 3) Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$); dan
- 4) Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada BPS Kabupaten Belu, realisasi pencapaian IPM Kabupaten Belu tahun 2024 adalah sebesar 68,13 poin dan masuk dalam kategori sedang sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.6
Indeks Pembangunan Manusia

No.	IPM	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/(Turun) (%)
1	Tingkat Kab/Kota	63,22	67,50	68,13	0,63
2	Tingkat Provinsi	65,90	68,40	69,14	0,74
3	Tingkat Nasional	72,91	74,39	75,02	0,63
4	Peringkat Provinsi	14	13	11	2

Sumber Dokumen: BPS

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Belu adalah sebesar 68,13 poin, meningkat sebesar 0,63% jika dibandingkan tahun 2023 atau 4,91% selama 3 (tiga) tahun terakhir. Angka IPM Kabupaten Belu Tahun 2024 lebih rendah dari IPM Provinsi dan Nasional sebesar 69,14 poin dan 75,02 poin.

Umur harapan hidup menurut data BPS Kabupaten Belu tahun 2024 yakni 74,30 tahun, tahun 2023 pada angka 65,63 tahun dan tahun 2022 pada angka 65,28. Kenaikan ini didukung oleh program kesehatan gratis yang dicanangkan pemerintah Kabupaten Belu dengan fasilitas kesehatan yang memadai sehingga masyarakat tidak terbebani dengan biaya berobat ketika sakit dan semakin sadar untuk memeriksakan kesehatan. Tindakan preventif atas penyakit yang diderita masyarakat juga dilakukan oleh Dinas Kesehatan melalui berbagai programnya.

Menurut data BPS tahun 2024, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Belu yakni tahun 2024 berada pada angka 12,32 tahun, tahun 2023 pada angka 12,31 tahun, dan tahun 2022 pada angka 12,30. Ini artinya rata-rata lama sekolah adalah 12 tahun. Angka partisipasi murni menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Belu adalah tingkat SD/MI/Sederajat sebesar 97,15%, SMP/MTs/Sederajat sebesar 61,79% dan SMA/MA/Sederajat sebesar 46,14%. Diharapkan program-program yang dijalankan Pemerintah Pusat maupun Daerah mampu meningkatkan angka partisipasi murni masyarakat dalam mengenyam pendidikan.



Standar hidup layak diukur dari kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Menurut data BPS Kabupaten Belu, pengeluaran rata-rata perkapita per bulan Rp892.890,00 dengan rincian untuk kelompok makanan adalah Rp503.803,00 dan kelompok bukan makanan adalah Rp389.087,00. Angka di tahun 2024 ini lebih besar bila dibandingkan dengan tahun 2023.

e. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan *output*. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi.

Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 2.7
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belu

No.	Uraian	Kabupaten			Provinsi	Nasional
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2024
1	PDRB (harga konstan 2010) (Rp)	3.116.217,55	3.233.471,72	3.361,74	78.044.565,32	13.066.069.803,61
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,19	3,76	3,97	3,73	5,03
3	Peringkat Provinsi	9	9	3	35	-

Sumber Dokumen: BPS

Selama kurun waktu tahun 2022-2024 perekonomian Kabupaten Belu mengalami peningkatan sebesar 0,78% yakni pada angka 3.97%.

Dalam skala provinsi laju pertumbuhan Kabupaten Belu menempati urutan 3 dari laju pertumbuhan kota atau kabupaten lain dalam wilayah Provinsi NTT. Sementara perbandingan laju pertumbuhan secara nasional, NTT sendiri menempati peringkat 35 dari 38 provinsi yang ada. Pertumbuhan ekonomi provinsi dari sisi lapangan usaha tumbuh sebesar 3,73%. Tiga besar pertumbuhan ekonomi terjadi pada lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 11,95%, diikuti oleh



lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 7,97% dan lapangan usaha industri pengolahan sebesar 6,36%. Sedangkan dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,29%. Struktur Ekonomi Provinsi NTT pada tahun 2024 masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kontribusi sebesar 28,87%. Sedangkan dari sisi pengeluaran masih didominasi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yaitu sebesar 66,70%.

Secara umum Ekonomi Indonesia tahun 2024 tumbuh sebesar 5,03 persen, melambat dibandingkan capaian tahun 2023 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,05 persen. Dari sisi produksi, penyumbang utama pertumbuhan ekonomi Tahun 2024 adalah Industri Pengolahan, Konstruksi, dan Perdagangan. Hal ini sejalan dengan peningkatan aktivitas produksi dan permintaan luar negeri. Dari sisi pengeluaran, penyumbang utama pertumbuhan ekonomi Tahun 2024 adalah Konsumsi Rumah Tangga dan PMTB. Hal ini tecermin dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan penambahan barang modal untuk aktivitas produksi. Tiga lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi, yaitu Jasa Lainnya, Transportasi & Pergudangan, serta Akomodasi & Makan Minum. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, Konsumsi LNPRT mengalami pertumbuhan tertinggi. Sepanjang tahun 2024, wilayah Bali & Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, serta Maluku & Papua tumbuh di atas ekonomi nasional.

f. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Belu dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan.

Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) Inflasi Ringan (*Creeping Inflation*), ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun; (ii) Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*), inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar



antara 10-30% setahun; (iii) Inflasi Berat (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan; dan (iv) Hiperinflasi (*Hyper Inflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Tingkat Inflasi Kabupaten Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.8
Tingkat Inflasi Tingkat Provinsi NTT

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/(Turun) (%)
1	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	6,65	2,42	1,19	(1,23)
2	Tingkat Inflasi Nasional (%)	5,51	2,61	1,57	(1,04)

Sumber Dokumen: BPS

Menurut data BPS, tingkat inflasi di Provinsi NTT sebesar 1,19%, dan lebih rendah (0,38)% jika dibandingkan inflasi nasional sebesar 1,57%. Tingkat inflasi di Provinsi NTT tahun 2024 ini menurun (1,23)% jika dibandingkan dengan tingkat inflasi 2023 atau menurun (5,46)% pada 3 (tiga) tahun terakhir.

Inflasi utamanya dipengaruhi oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau yang memiliki andil terbesar dalam pembentukan tingkat inflasi di Provinsi NTT. Pelaksanaan upaya-upaya pengendalian inflasi seperti gerakan pasar murah, sidak pasar, peningkatan produksi pertanian, penerapan GAP, kerja sama antar daerah (KAD) terus diintensifkan dalam rangka pengendalian inflasi.

g. Struktur Perekonomian Kabupaten Belu

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama tiga tahun terakhir (2022-2024) struktur perekonomian Belu didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Jasa Pendidikan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; dan Konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Belu.



Struktur perekonomian Kabupaten Belu dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.9
PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Kabupaten Belu

Dalam miliar rupiah

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	1.136.231,36	1.225.075,96	1.298,73
2	Pertambangan dan Penggalian	100.154,82	105.005,03	109,29
3	Industri Pengolahan	56.397,73	66.251,85	81,29
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3.615,08	4.167,00	4,3
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	1.315,06	1.361,84	1,39
6	Konstruksi	438.604,82	491.409,10	506,23
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	737.597,16	839.554,11	915,08
8	Transportasi dan Pergudangan	245.041,09	275.557,39	323,9
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	18.780,99	21.473,61	24,49
10	Informasi dan Komunikasi	214.509,20	222.802,58	235,19
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	314.219,49	327.149,42	344,34
12	Real Estat	116.277,52	131.771,39	152,33
13	Jasa Perusahaan	2.324,82	2.525,47	2,75
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	621.155,32	645.748,94	758,91
15	Jasa Pendidikan	766.973,04	831.126,22	866,59
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	130.136,31	147.691,16	157,64
17	Jasa Lainnya	133.729,65	141.877,57	148,75
18	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	5.037.063,48	5.480.548,66	5.931,22
19	PDRB Provinsi	118.718,20	75.257.564,75	137.282,48
20	PDRB Nasional	19.588.445,60	20.892.376,70	22.138.964,00
21	Peringkat Provinsi	6	7	7

Sumber Dokumen: BPS

2.1.1 Kebijakan Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belu Tahun 2024 disusun berdasarkan pada Kebijakan Umum APBD Kabupaten Belu Tahun 2024 yang merupakan nota kesepakatan antara Bupati Belu dan DPRD Kabupaten Belu Nomor BPKAD.900/05-AG/VIII/2023 dan Nomor DPRD.900/164/VIII/2024 tanggal 7 Agustus 2023 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2024, yang diperbaharui dengan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun 2024 Nomor 01/900.1.1.1/BPKAD-AG/07-AG/VIII/2024 dan DPRD.900/92/VIII/2024 tanggal 07 Agustus 2024 yang merupakan nota kesepakatan antara Bupati Belu dan DPRD Kabupaten Belu tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2024. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Belu Tahun



2024 merupakan dokumen kebijakan daerah yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum, memuat kondisi ekonomi makro daerah, kebijakan pendapatan, belanja, pembiayaan dan strategi pencapaiannya yang disepakati sebagai pedoman penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2024. KUA disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang merupakan dokumen rencana kerja tahunan daerah yang disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 sebagai upaya mewujudkan visi Kabupaten Belu untuk mencapai “Masyarakat Belu Yang Sehat, Berkarakter dan Kompetitif”.

Sejalan dengan visi Kabupaten Belu maka tema pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Belu Tahun 2024 yaitu “Pembangunan Berpusat Pada Pengembangan Sumber Daya Manusia Menuju Peningkatan Daya Saing Daerah”, difokuskan sesuai arah kebijakan sebagai berikut.

1. Peningkatan pelayanan kesehatan: ketersediaan tenaga kesehatan terampil (terdidik dan terlatih) pada setiap fasilitas kesehatan;
2. Peningkatan kualitas pendidikan: pengembangan kapasitas tenaga pendidik yang mampu memanfaatkan teknologi;
3. Peningkatan perekonomian masyarakat; peningkatan kapasitas wirausaha bagi masyarakat terutama kelompok rentan dan membangun mental petani guna meningkatkan pendapatan;
4. Peningkatan partisipasi angkatan kerja: peningkatan kapasitas angkatan kerja terutama pemuda/pemudi guna menumbuhkan peluang-peluang usaha dalam rangka menciptakan kesempatan kerja;
5. Penyediaan infrastruktur: penguatan kapasitas SDM pengelolaan infrastruktur pelayanan dasar guna meningkatkan pelayanan infrastruktur bagi masyarakat;
6. Peningkatan kualitas pelayanan publik: mengoptimalkan pemanfaatan SDM TIK guna peningkatan kualitas layanan publik berbasis eelektronik (*e-government*); dan
7. Peningkatan ketahanan sosial, ekonomi masyarakat desa: pengembangan kapasitas wirausaha pengelola BUMDES guna menjadikan BUMDES sebagai lembaga ekonomi yang menguntungkan.

Dalam rangka mendorong pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Belu menjalankan arah kebijakan keuangan, yakni:



2.1.2 Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah melalui upaya:

- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
- b. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi; dan
- d. Revisi dan evaluasi peraturan-peraturan daerah yang berhubungan dengan pendapatan daerah.

Kebijakan pendapatan daerah difokuskan untuk memberdayakan potensi pendapatan daerah melalui:

- a. *E-monitoring* pajak daerah yang merupakan monitoring secara elektronik atas data transaksi usaha wajib pajak berupa pemasangan/penerapan alat perekam data transaksi usaha wajib pajak seperti *tapping box* dan sejenisnya;
- b. Peningkatan koordinasi sinergis dan kerjasama antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu dengan membentuk Tim Pelaksana Optimalisasi Penerimaan PAD yang melibatkan Perangkat Daerah pengelola pendapatan, Satpol PP, dan Aparat Penegak Hukum;
- c. Sosialisasi pajak daerah kepada WP melalui media massa, media cetak dan tatap muka;
- d. Implementasi secara bertahap transaksi non tunai untuk pendapatan asli daerah selain pajak daerah;
- e. Membuat SOP pelayanan, pendaftaran, pendataan dan penetapan serta pembayaran, pajak reklame secara *offline* maupun *online*;
- f. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pajak daerah;
- g. Penyusunan kajian potensi pajak dan retribusi daerah;
- h. Melakukan penataan, pemutahiran data, *monitoring* dan evaluasi serta verifikasi lapangan terhadap subjek maupun objek pajak;
- i. Melakukan peningkatan kompetensi pegawai di bidang pajak daerah melalui pengiriman bimtek pajak daerah;
- j. Menambah/mengembangkan fitur-fitur aplikasi pendapatan daerah/simpatda untuk semua objek pajak daerah;



- k. Mengevaluasi dan meninjau kembali Perda-perda terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan kondisi dan perubahan peraturan perundangan, melakukan integrasi data subjek pajak dan objek pajak restoran, hotel, PBB, BPHTB, PPJ non-PLN, pajak air tanah, pajak hiburan, pajak parkir, antara data simpatda di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu dengan aplikasi dinas terkait guna mempercepat proses pelayanan, *update* data, pembayaran pajak daerah lainnya;
- l. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah lebih efisien;
- m. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi pendapatan daerah;
- n. Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) melalui penciptaan *brand image*;
- o. Peningkatan kualitas manajemen aset daerah melalui inventarisasi, setifikasi dan optimalisasi serta pemberdayaan aset daerah;
- p. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak;
- q. Pengiriman usulan DAK kepada Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian terkait; dan
- r. Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah melalui inovasi daerah dalam rangka meraih dana insentif daerah.

2.1.3 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah dialokasikan untuk mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2024 serta digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah dengan mempertimbangkan aspek kemampuan pendapatan daerah. Belanja daerah juga wajib dialokasikan untuk mendanai urusan pemerintah daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Kebijakan belanja daerah tahun 2024 diarahkan untuk:

- a. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Belu melalui berbagai upaya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitasi dengan mengutamakan pencegahan dan penanganan covid;



- b. Upaya meningkatkan layanan pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan dalam masa *pandemic covid* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta mendorong kreativitas tenaga pendidik;
- c. Mendorong pemulihan aktivitas kepariwisataan berbasis budaya dan potensi unggulan daerah dengan adaptasi kebiasaan baru (*new normal*);
- d. Peningkatan *skills* calon tenaga kerja dan calon wirausaha sebagai upaya menurunkan tingkat pengangguran terbuka, perluasan kesempatan kerja dan berusaha melalui berbagai alternatif lapangan kerja dan lapangan usaha baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- e. Peningkatan penyediaan kualitas sarana dan prasarana perkotaan dan lingkungan permukiman;
- f. Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan kondusivitas wilayah guna mendorong investasi dan kesempatan berusaha; dan
- g. Peningkatan ketahanan nasional, ekonomi masyarakat desa, peningkatan kapasitas wirausaha pengelolaan BUMDES guna menjadikan BUMDES sebagai lembaga ekonomi yang menguntungkan.

Belanja daerah Kabupaten Belu disesuaikan dengan permasalahan yang akan dipecahkan dengan pengelolaan yang transparan berbasis kinerja yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan, fungsi dan satuan organisasi, program dan kegiatan, serta berorientasi pada anggaran berbasis kinerja, efisien, efektif, transparan dan akuntabel meliputi antara lain:

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja Operasi terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai diarahkan untuk memenuhi gaji dan tunjangan pegawai yang sifatnya mengikat (*mandatory*);
- 2) Belanja barang dan jasa diarahkan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain;



- 3) Bantuan hibah diarahkan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Pemberian hibah bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah; dan
 - 4) Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan, diarahkan pada sasaran secara selektif, tidak terus menerus, tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- b. Belanja Modal diarahkan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaaan aset tetap dan aset lainnya.
 - c. Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
 - d. Belanja Transfer diarahkan untuk menganggarkan belanja bagi hasil dan bantuan keuangan ke Desa yang diarahkan sebagai salah satu upaya percepatan pembangunan daerah.

2.1.4 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Adapun strategi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Belu Tahun 2024 sebagai berikut.

a. Dari Sisi Sumber Penerimaan Pembiayaan Daerah

Sumber penerimaan Pemerintah Kabupaten Belu pada tahun 2024 dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan sebagai berikut.

- 1) Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya;
- 2) Memperluas dan meningkatkan kerja sama kemitraan dengan swasta dalam pembiayaan pembangunan;



- 3) Meningkatkan pemanfaatan pembiayaan dari sumber *Corporate Social Responsibility* (CSR); dan
- 4) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi APBD.
- b. Dari Sisi Sumber Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Sumber pengeluaran Pemerintah Kabupaten Belu pada tahun 2024 dilaksanakan dalam rangka untuk melaksanakan penyertaan modal.

2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Kebijakan terkait pengalokasian Belanja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang disandingkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Untuk menjamin sinergitas program pembangunan nasional dan daerah, maka arah kebijakan pembangunan daerah sesuai urusan pemerintahan daerah sebagai berikut.

- a. Urusan Pendidikan

Fokus program diarahkan pada terpenuhinya kebutuhan dasar standar pelayanan minimal bidang pendidikan;

- b. Urusan Kesehatan

Fokus program diarahkan pada terpenuhinya standar pelayanan minimal bidang Kesehatan dan peningkatan akses mutu;

- c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Fokus program diarahkan pada tersedianya akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman, terpenuhinya penyelesaian rencana tata ruang dan rencana detail tata ruang, terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang, meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi layak dan aman, meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar, meningkatnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, dan meningkatnya konektivitas wilayah, meningkatnya penyelenggaraan bangunan gedung secara tertib dan andal;

- d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Fokus program diarahkan pada terpenuhinya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat, meningkatnya luasan kawasan kumuh yang ditangani, meningkatnya jumlah rumah layak huni dan meningkatnya penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman;



- e. **Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**
Fokus program diarahkan pada peningkatan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) yang sesuai standar peningkatan pelayanan pemadam kebakaran yang sesuai standar dan peningkatan manajemen bencana yang terintegrasi pada fase pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
- f. **Urusan Sosial**
Fokus program diarahkan pada tersedianya data fakir miskin, penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten/Kota, terpenuhinya standar pelayanan minimal bidang sosial, pencegahan dan perlindungan korban bencana, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
- g. **Urusan Tenaga Kerja**
Fokus program diarahkan pada peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, meningkatnya jumlah tenaga kerja yang ditempatkan, meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-haknya;
- h. **Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
Fokus program diarahkan pada peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan peningkatan pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- i. **Urusan Pangan**
Fokus program diarahkan pada peningkatan ketersediaan pangan strategis dalam negeri dan peningkatan pemanfaatan pangan yang berkualitas dan terjaminnya keamanan, dan terentaskannya kerawanan pangan dan gizi;
- j. **Urusan Lingkungan Hidup**
Fokus program diarahkan pada peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup, peningkatan penanggungjawab usaha yang taat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan, peningkatan pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota, dan penyusunan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD;
- k. **Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
Fokus Program diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan adminduk;
- l. **Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**



Fokus program diarahkan pada peningkatan tata Kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien, berkembangnya status pembangunan desa dan terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), meningkatnya status perkembangan Kawasan Perdesaan, dan terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma);

m. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Fokus program diarahkan pada peningkatan indkes pembangunan keluarga, terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatnya akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana;

n. Urusan Perhubungan

Fokus program diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan perhubungan, terwujudnya konektivitas nasional dan peningkatan keselamatan transportasi;

o. Urusan Komunikasi dan Informatika

Fokus program diarahkan pada tersedianya infrastruktur digital, terlaksananya layanan pemerintah secara digital, peningkatan manfaat teknologi digital untuk pertumbuhan ekonomi, terwujudnya peningkatan kompetensi masyarakat di bidang digital, dan meningkatnya penguatan tata kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di daerah;

p. Urusan Koperasi dan UMKM

Fokus program diarahkan pada terwujudnya koperasi yang berkualitas dan modern dan terwujudnya UMKM dan wirausaha yang berdaya saing dan produktif;

q. Urusan Penanaman Modal

Fokus program diarahkan pada tercapainya target realisasi penanaman modal;

r. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Fokus program diarahkan pada meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga, meningkatnya prestasi olahraga nasional dan internasional, dan meningkatnya kualitas pemuda yang berdaya saing, berbudaya dan berideologi Pancasila;

s. Urusan Kebudayaan

Fokus program diarahkan pada kelestarian cagar budaya, dan pemajuan kebudayaan;



t. Urusan Perpustakaan dan Kearsipan

Fokus program diarahkan pada peningkatan literasi masyarakat, peningkatan kegemaran membaca masyarakat, terwujudnya revitalisasi arsip dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal, penerapan e-arsip terintegrasi, pelaksanaan pengawasan kearsipan di daerah dan rekomendasi hasil pengawasan kearsipan yang ditindaklanjuti;

u. Urusan Kelautan dan Perikanan

Fokus program diarahkan pada peningkatan pengelolaan wilayah pengelolaan perikanan dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut, terwujudnya industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing dan terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif;

v. Urusan Pariwisata

Fokus program diarahkan pada peningkatan kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional;

w. Urusan Pertanian

Fokus program diarahkan pada peningkatan produktivitas pertanian dan terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan;

x. Urusan Perdagangan dan Perindustrian

Fokus program diarahkan pada meningkatnya pertumbuhan ekspor bernilai tambah tinggi, peningkatan jaminan mutu komoditas potensial daerah, mewujudkan iklim usaha yang kondusif, meningkatnya kepastian penyaluran pupuk/pestisida bersubsidi sesuai ketentuan jenis, jumlah, waktu, harga, mutu dan tempat, terwujudnya kecukupan bahan pangan untuk masyarakat dan terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan, terwujudnya implementasi sistem resi gudang dan pasar lelang;

y. Urusan Transmigrasi

Fokus program diarahkan pada peningkatan status kawasan transmigrasi yang direvitalisasi; dan

z. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Fokus program diarahkan pada jumlah Provinsi dengan indeks kinerja Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kategori baik, jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik dan meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Berikut adalah ringkasan Perubahan APBD TA 2024 Kabupaten Belu.

Tabel 2.10
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024

NO. URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	1.014.009.263.930,00	1.027.588.617.705,00	13.579.353.775,00	(1,32)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	120.992.713.640,00	122.953.711.500,00	1.960.997.860,00	(1,59)
4.1.01	Pajak Daerah	30.390.810.812,00	30.390.810.812,00	0,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	11.020.462.000,00	11.063.462.000,00	43.000.000,00	(0,39)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.500.000.000,00	7.460.997.860,00	(39.002.140,00)	0,52
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	72.081.440.828,00	74.038.440.828,00	1.957.000.000,00	(2,64)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	881.953.474.290,00	891.132.538.036,00	9.179.063.746,00	(1,03)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	853.192.148.000,00	850.264.926.970,00	(2.927.221.030,00)	0,34
4.2.01.01	Dana Perimbangan	781.605.021.000,00	776.690.704.970,00	(4.914.316.030,00)	0,63
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	4.072.874.000,00	4.072.874.000,00	0,00	0,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	527.359.875.000,00	533.714.708.000,00	6.354.833.000,00	(1,19)
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	136.241.183.000,00	136.241.183.000,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	113.931.089.000,00	102.661.939.970,00	(11.269.149.030,00)	10,98
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.02.01	DID	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.05	Dana Desa	62.479.966.000,00	64.467.061.000,00	1.987.095.000,00	(3,08)
4.2.01.05.01	Dana Desa	62.479.966.000,00	64.467.061.000,00	1.987.095.000,00	(3,08)
4.2.01.06	Insentif Fiskal	9.107.161.000,00	9.107.161.000,00	0,00	0,00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	9.107.161.000,00	9.107.161.000,00	0,00	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	28.761.326.290,00	40.867.611.066,00	12.106.284.776,00	(29,62)
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	28.761.326.290,00	40.867.611.066,00	12.106.284.776,00	(29,62)
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	28.761.326.290,00	40.867.611.066,00	12.106.284.776,00	(29,62)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	11.063.076.000,00	13.502.368.169,00	2.439.292.169,00	(18,07)
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11.063.076.000,00	13.502.368.169,00	2.439.292.169,00	(18,07)
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	11.063.076.000,00	13.502.368.169,00	2.439.292.169,00	(18,07)
5	BELANJA	1.045.335.815.549,00	1.103.163.801.717,00	57.827.986.168,00	(5,24)
5.1	BELANJA OPERASI	752.365.028.821,00	825.922.908.386,00	73.557.879.565,00	(8,91)
5.1.01	Belanja Pegawai	443.298.827.493,00	439.604.392.114,00	(3.694.435.379,00)	0,84
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	280.068.105.160,00	335.049.342.483,00	54.981.237.323,00	(16,41)
5.1.05	Belanja Hibah	28.998.096.168,00	51.254.173.789,00	22.256.077.621,00	(43,42)
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	28.523.580.000,00	50.760.380.000,00	22.236.800.000,00	(43,81)
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	474.516.168,00	493.793.789,00	19.277.621,00	(3,90)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	(100,00)

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

NO. URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	(100,00)
5.2	BELANJA MODAL	159.469.010.025,00	152.859.682.102,00	(6.609.327.923,00)	4,32
5.2.01	Belanja Modal Tanah	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.603.322.000,00	22.474.948.382,00	8.871.626.382,00	(39,47)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	88.354.950.025,00	63.137.989.880,00	(25.216.960.145,00)	39,94
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	57.205.738.000,00	64.654.613.400,00	7.448.875.400,00	(11,52)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	2.342.130.440,00	2.292.130.440,00	(97,87)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	14.742.029.078,00	3.634.368.604,00	(11.107.660.474,00)	305,63
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	14.742.029.078,00	3.634.368.604,00	(11.107.660.474,00)	305,63
5.4	BELANJA TRANSFER	118.759.747.625,00	120.746.842.625,00	1.987.095.000,00	(1,65)
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.696.667.025,00	2.696.667.025,00	0,00	0,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.971.356.757,00	1.971.356.757,00	0,00	0,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	725.310.268,00	725.310.268,00	0,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	116.063.080.600,00	118.050.175.600,00	1.987.095.000,00	(1,68)
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	116.063.080.600,00	118.050.175.600,00	1.987.095.000,00	(1,68)
	Jumlah Surplus/Defisit	(31.326.551.619,00)	(75.575.184.012,00)	(44.248.632.393,00)	(58,55)
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	31.326.551.619,00	75.575.184.012,00	44.248.632.393,00	(58,55)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	31.066.537.347,00	75.276.167.600,00	44.209.630.253,00	(58,73)
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	260.014.272,00	299.016.412,00	39.002.140,00	(13,04)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	31.326.551.619,00	75.575.184.012,00	44.248.632.393,00	(58,55)
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah (SiLPA)	0,00	0,00	0,00	0,00

**BAB III**
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Anggaran Kinerja Keuangan Secara Umum**

Target Pendapatan Daerah Tahun 2024 sebesar Rp1.027.588.617.705,00, dapat direalisasikan sebesar Rp977.447.317.587,66 atau mencapai 95,12%. Belanja tahun 2024 yang direncanakan sebesar Rp982.416.959.092,00, dapat direalisasikan sebesar Rp890.801.695.780,43 atau mencapai 90,67%. Transfer direncanakan sebesar Rp120.746.842.625,00, dapat direalisasikan sebesar Rp120.742.944.364,00 atau sebesar 100%. Sedangkan di kelompok Pembiayaan pada Penerimaan Pembiayaan yang direncanakan sebesar Rp75.575.184.012,00, realisasinya sebesar Rp75.598.090.031,53 atau mencapai 100,03% dan Pengeluaran Pembiayaan tidak dianggarkan pada tahun 2024. Lebih lanjut diuraikan dalam tabel berikut di bawah ini.

Tabel 3.1
Capaian Kinerja APBD Tahun 2024

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
3	Pendapatan Pajak Daerah	30.390.810.812,00	19.194.087.650,00	63,16	20.563.777.908,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	11.063.462.000,00	4.934.589.739,00	44,60	5.112.694.483,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.460.997.860,00	3.480.688.664,00	46,65	6.529.604.943,00
6	Lain-lain PAD Yang Sah	74.038.440.828,00	60.461.267.222,28	81,66	81.118.712.401,64
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d. 6)	122.953.711.500,00	88.070.633.275,28	71,63	113.324.789.735,64
8	PENDAPATAN TRANSFER				
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
10	Dana Bagi Hasil Pajak	2.786.520.000,00	3.382.792.600,00	121,40	4.099.513.703,00
11	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1.286.354.000,00	1.313.950.400,00	102,15	1.747.566.621,00
12	Dana Alokasi Umum (DAU)	533.714.708.000,00	530.182.469.628,00	99,34	488.297.498.097,00
13	Dana Alokasi Khusus (DAK)	238.903.122.970,00	234.421.531.451,30	98,12	224.334.384.415,31
14	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan (10 s.d.13)	776.690.704.970,00	769.300.744.079,30	99,05	718.478.962.836,31
15	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
16	Dana Insentif Fiskal	9.107.161.000,00	9.107.161.000,00	100,00	0,00
17	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	21.126.761.000,00
18	Dana Desa	64.467.061.000,00	64.463.162.739,00	99,99	64.370.256.000,00
19	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (16 s.d. 18)	73.574.222.000,00	73.570.323.739,00	99,99	85.497.017.000,00
20	TRANSFER ANTAR DAERAH				
21	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	40.867.611.066,00	34.424.775.169,00	84,23	31.481.611.676,00
22	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah (21 s.d. 22)	40.867.611.066,00	34.424.775.169,00	84,23	31.481.611.676,00
24	Jumlah Pendapatan Transfer (14+19+23)	891.132.538.036,00	877.295.842.987,30	98,45	835.457.591.512,31
25	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
26	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	2.977.700.415,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

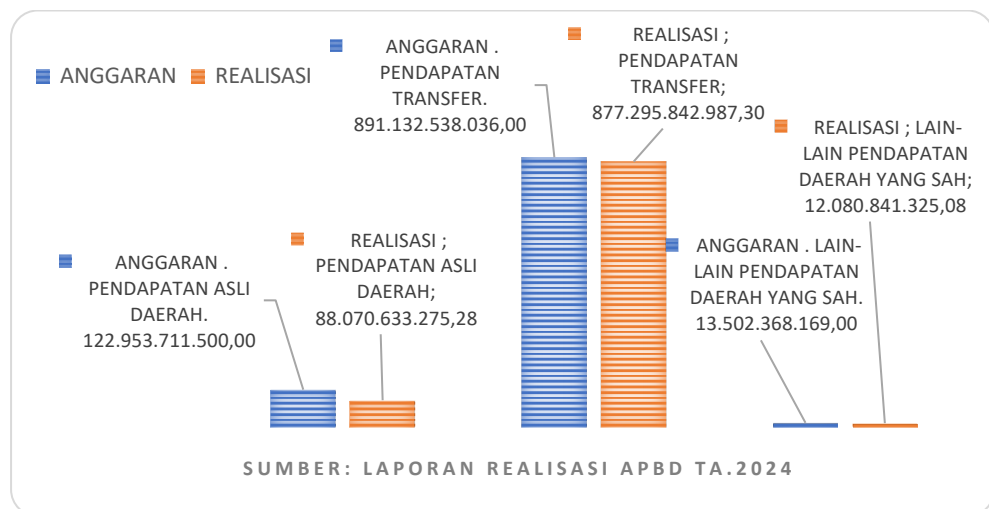
NO.	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
27	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	13.502.368.169,00	12.080.841.325,08	89,47	11.185.399.132,00
28	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah (26 s.d. 28)	13.502.368.169,00	12.080.841.325,08	89,47	14.163.099.547,00
29	JUMLAH PENDAPATAN (7+24+28)	1.027.588.617.705,00	977.447.317.587,66	95,12	962.945.480.794,95
30	BELANJA	BELANJA			
31	BELANJA OPERASI				
32	Belanja Pegawai	439.604.392.114,00	393.788.645.206,30	89,58	347.841.205.142,00
33	Belanja Barang dan Jasa	335.049.342.483,00	301.201.258.829,81	89,90	281.186.397.065,59
34	Belanja Hibah	51.254.173.789,00	51.036.043.518,00	99,57	19.516.633.168,00
35	Belanja Bantuan Sosial	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	236.000.000,00
36	Jumlah Belanja Operasi (31 s.d. 35)	825.922.908.386,00	746.040.947.554,11	90,33	648.780.235.375,59
37	BELANJA MODAL				
38	Belanja Modal Tanah	250.000.000,00	0,00	0,00	393.232.906,00
39	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.474.948.382,00	20.865.441.803,00	92,84	32.106.879.252,55
40	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	63.137.989.880,00	57.919.660.357,02	91,74	40.690.822.560,19
41	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	64.654.613.400,00	63.698.929.366,30	98,52	85.083.708.055,58
42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.342.130.440,00	2.276.716.700,00	97,21	1.794.142.640,00
43	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Jumlah Belanja Modal (38 s.d. 43)	152.859.682.102,00	144.760.748.226,32	94,70	160.068.785.414,32
45	BELANJA TAK TERDUGA				
46	Belanja Tak Terduga	3.634.368.604,00	0,00	0,00	2.566.815.117,00
47	Jumlah Belanja Tak Terduga (46)	3.634.368.604,00	0,00	0,00	2.566.815.117,00
48	JUMLAH BELANJA (36+44+47)	982.416.959.092,00	890.801.685.780,43	90,67	811.415.835.906,91
49	TRANSFER				
50	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA				
51	Transfer - Bagi Hasil Pajak Daerah	1.971.356.757,00	1.971.356.757,00	100,00	1.971.356.757,00
52	Transfer - Bagi Hasil Retribusi Daerah	725.310.268,00	725.310.268,00	100,00	725.310.268,00
53	Transfer - Bantuan Keuangan ke Desa	118.050.175.600,00	118.046.277.339,00	100,00	114.045.147.500,00
54	Transfer - Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Jumlah Transfer Bagi Hasil (51 s.d. 54)	120.746.842.625,00	120.742.944.364,00	100,00	116.741.814.525,00
56	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (48+55)	1.103.163.801.717,00	1.011.544.640.144,43	91,69	928.157.650.431,91
57	SURPLUS / DEFISIT (29-56)	(75.575.184.012,00)	(34.097.322.556,77)	45,12	34.787.830.363,04
58	PEMBIAYAAN				
59	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
60	Penggunaan SILPA	75.276.167.600,00	75.276.180.441,01	100,00	45.017.835.220,49
61	Penerimaan Kembali Piutang	299.016.412,00	321.922.432,00	107,66	470.502.016,00
62	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (60 s.d. 62)	75.575.184.012,00	75.598.102.873,01	100,03	45.488.337.236,49
64	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
65	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00
66	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (65 s.d. 67)	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00
68	PEMBIAYAAN NETTO (63-67)	75.575.184.012,00	75.598.102.873,01	100,03	40.488.337.236,49
69	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (57+68)	0,00	41.500.780.316,24	0,00	75.276.167.599,53



3.1.1 Kebijakan Keuangan

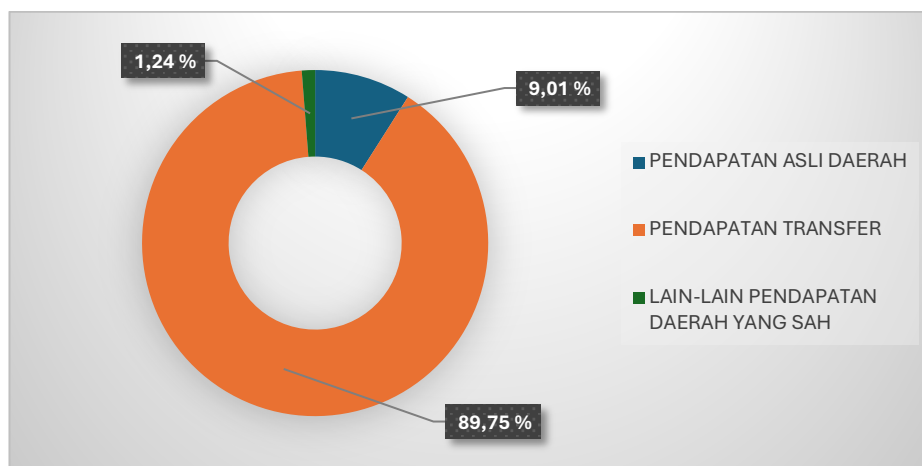
Sumber Pendapatan Pemerintah Kabupaten Belu pada tahun 2024 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada tahun anggaran 2024 jumlah anggaran Pendapatan adalah Rp1.027.588.617.705,00 dapat direalisasikan sebesar Rp977.447.317.587,66 atau menunjukkan kinerja sebesar 95,12% dari yang dianggarkan. Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi sebesar Rp88.070.633.275,28 atau 71,63% dibandingkan anggaran tahun 2024 sebesar Rp122.953.711.500,00. Pendapatan Transfer dapat direalisasikan sebesar Rp877.295.842.987,30 atau mencapai 98,45% dibandingkan anggaran tahun 2024 sebesar Rp891.132.538.036,00. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah direalisasikan sebesar Rp12.080.841.325,08 atau 89,47% dari anggaran 2024 sebesar Rp13.502.368.169,00. Gambar grafik berikut menjelaskan kinerja pendapatan daerah tahun anggaran 2024.

Gambar 3.1
Capaian Kinerja Komponen Pendapatan Daerah TA 2024



Sumber : Laporan Realisasi APBD TA 2024

Gambar 3.2
Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah

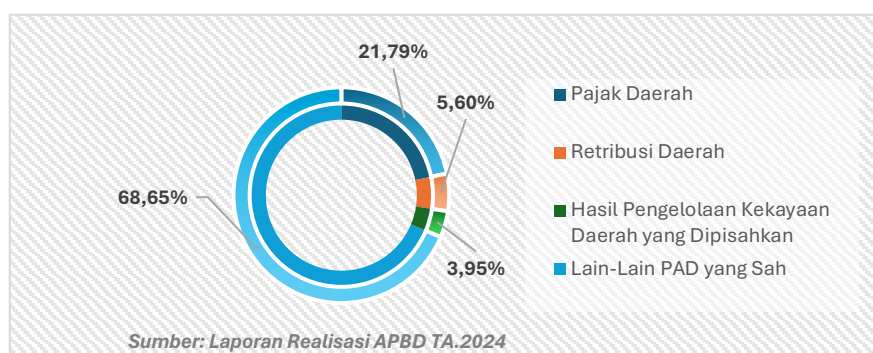


Sumber : Laporan Realisasi APBD TA 2024

Dari Gambar 3.1 dan 3.2 dapat dilihat bahwa Pendapatan Transfer masih merupakan penyumbang terbesar Pendapatan Daerah tahun 2024 yaitu sebesar 89,75%, diikuti Pendapatan Asli Daerah sebesar 9,01% dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah memberikan kontribusi sebesar 1,24%.

Pada Tahun Anggaran 2024, PAD dianggarkan sebesar Rp122.953.711.500,00 dan realisasinya sebesar Rp88.070.633.275,28 atau menunjukkan pencapaian kinerja sebesar 71,63% dari anggaran yang ditetapkan, di mana Pajak Daerah menyumbang Rp19.194.087.650,00 atau 21,79%, Retribusi Daerah memberi kontribusi sebesar Rp4.934.589.739,00 atau 5,60%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp3.480.688.664,00 atau 3,95% dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah menyumbangkan Rp60.461.267.222,28, atau sebesar 68,65%.

Gambar 3.3
Proporsi Realisasi PAD TA 2024



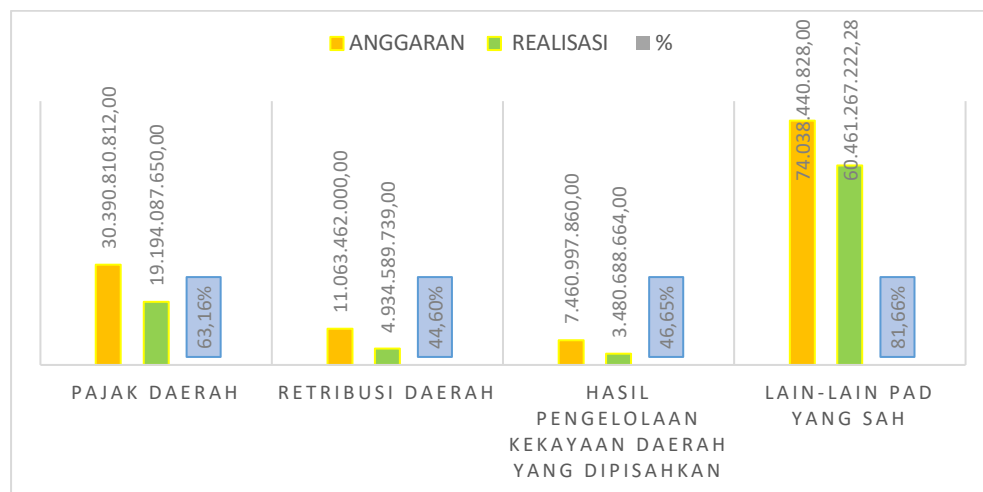
Sumber: Laporan Realisasi APBD TA.2024

Sumber : Laporan Realisasi APBD TA 2024



Secara keseluruhan pencapaian kinerja masing-masing unsur Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber kemampuan fiskal Pemerintah Kabupaten Belu selama tahun anggaran 2024 atas perbandingannya dengan anggaran ditunjukkan dalam gambar 3.4 berikut.

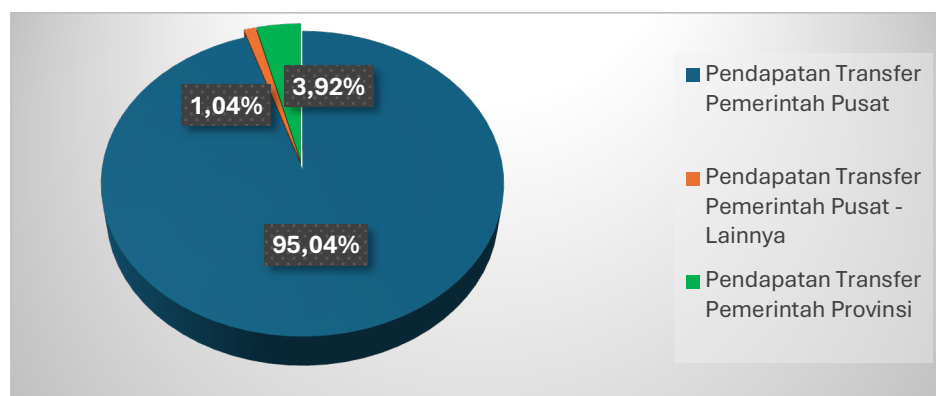
Gambar 3.4
Capaian Kinerja PAD TA 2024



Sumber : Laporan Realisasi APBD TA 2024

Anggaran pendapatan transfer tahun 2024 sebesar Rp891.132.538.036,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp877.295.842.987,30 atau menunjukkan pencapaian kinerja sebesar 98,45% dari anggaran yang ditetapkan. Kontribusi realisasi masing-masing komponen pendapatan transfer atas total realisasi pendapatan transfer di tahun anggaran 2024 terdiri dari: transfer pemerintah pusat sebesar Rp833.763.906.818,30 atau 95,04%, transfer pemerintah pusat-lainnya sebesar Rp9.107.161.000,00 atau sebesar 1,04%, dan transfer pemerintah provinsi sebesar Rp34.424.775.169,00 atau 3,92%.

Gambar 3.5
Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Transfer TA 2024



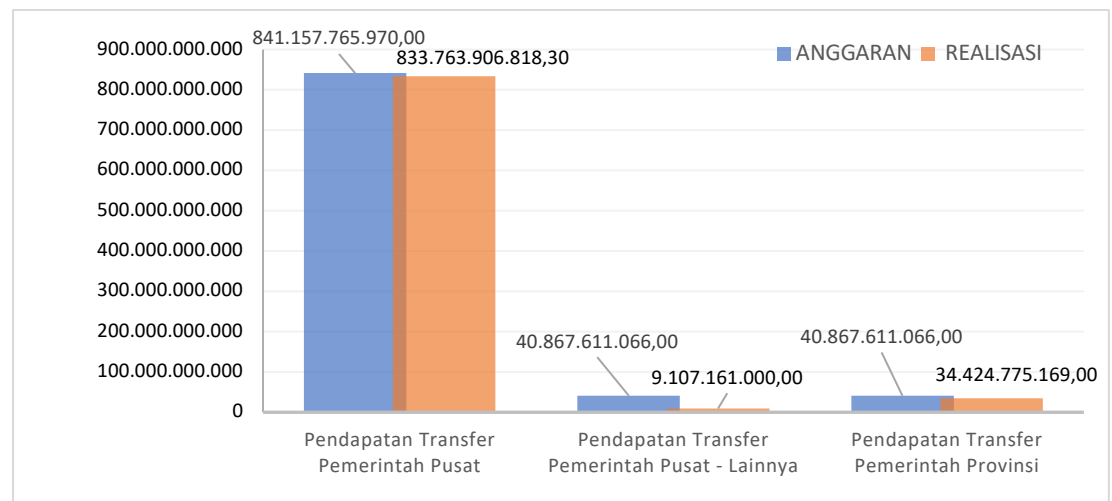
Sumber : Laporan Realisasi APBD TA. 2024



Bila dibandingkan antara anggaran dan realisasinya maka anggaran Transfer Pemerintah Pusat adalah sebesar Rp841.157.765.970,00 dengan realisasi sebesar Rp833.763.906.818,30 atau mencapai kinerja 99,12%. Anggaran Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya adalah sebesar Rp9.107.161.000,00 dengan realisasi Rp9.107.161.000,00 atau mencapai kinerja 100,00%. Sementara anggaran Transfer Pemerintah Provinsi adalah sebesar Rp40.867.611.066,00 dengan realisasi Rp34.424.775.169,00 atau mencapai kinerja 84,23%.

Capaian kinerja pendapatan transfer dijelaskan lebih lanjut dalam gambar grafik berikut.

Gambar 3.6
Capaian Kinerja Pendapatan Transfer TA 2024

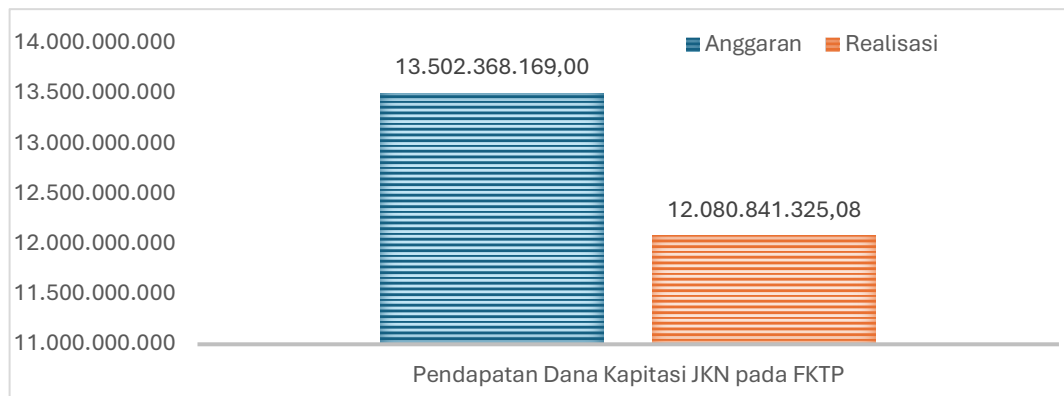


Sumber : Laporan Realisasi APBD TA 2024

Pada tahun anggaran 2024 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan yang berlaku berupa Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dianggarkan sebesar Rp13.502.368.169,00 dengan realisasinya sebesar Rp12.080.841.325,08 atau menunjukkan pencapaian kinerja sebesar 89,47% dari anggaran yang ditetapkan. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat tidak dianggarkan pada tahun 2024.



Gambar 3.7
Capaian Kinerja Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2024



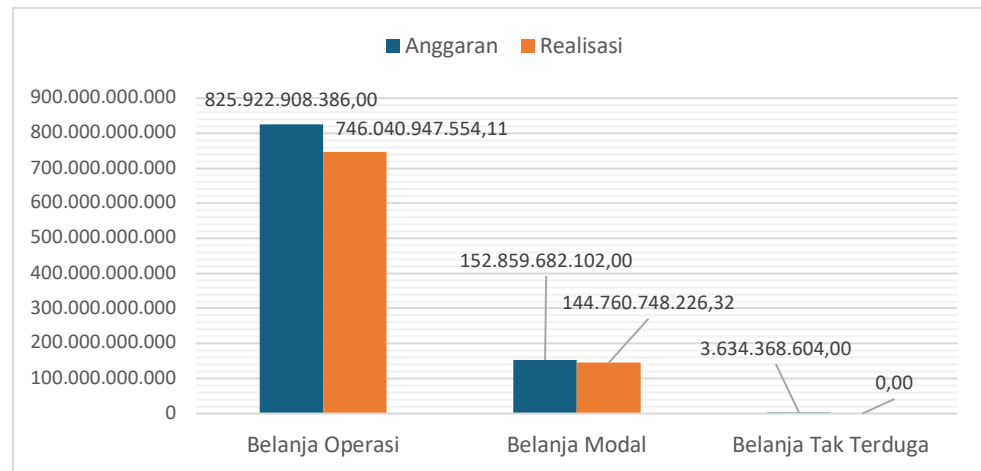
Sumber : Laporan Realisasi APBD TA 2024

3.1.2 Belanja

Pemerintah Kabupaten Belu pada APBD TA 2024 mengalokasikan Belanja Daerah sebesar Rp982.416.959.092,00 dan direalisasikan sebesar Rp890.801.695.780,43, atau mencapai 90,67%. Berdasarkan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga. Anggaran dan realisasi masing-masing bagian belanja adalah sebagai berikut.

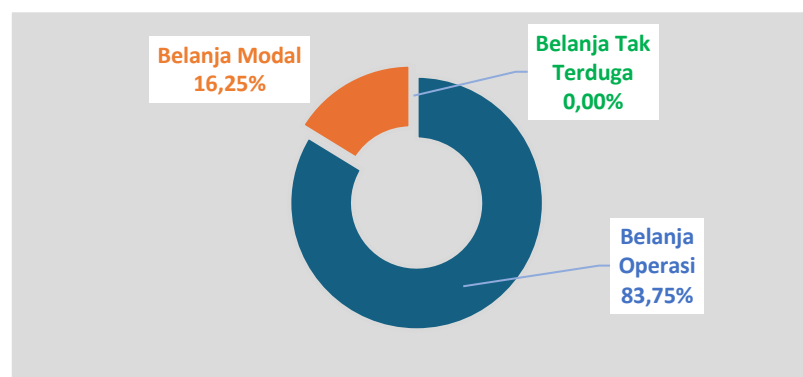
- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp825.922.908.386,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp746.040.947.554,11 atau mencapai 90,33%; dan mendapat persentase 83,75% dari proporsi realisasi belanja daerah TA 2024;
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp152.859.682.102,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp144.760.748.226,32 atau mencapai 94,70%; dan mendapat persentase 16,25% dari proporsi realisasi belanja daerah TA 2024; dan
- Belanja Tak Terduga dianggarkan sebesar Rp3.634.368.604,00 dan direalisasikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dan mendapat persentase 0,00% dari proporsi realisasi belanja daerah TA 2024.

Gambar 3.8
Capaian Kinerja Komponen Belanja Daerah TA 2024



Sumber : Laporan APBD TA 2024

Gambar Grafik 3.9
Proporsi Realisasi Belanja Daerah TA 2024



Sumber : Laporan APBD TA 2024

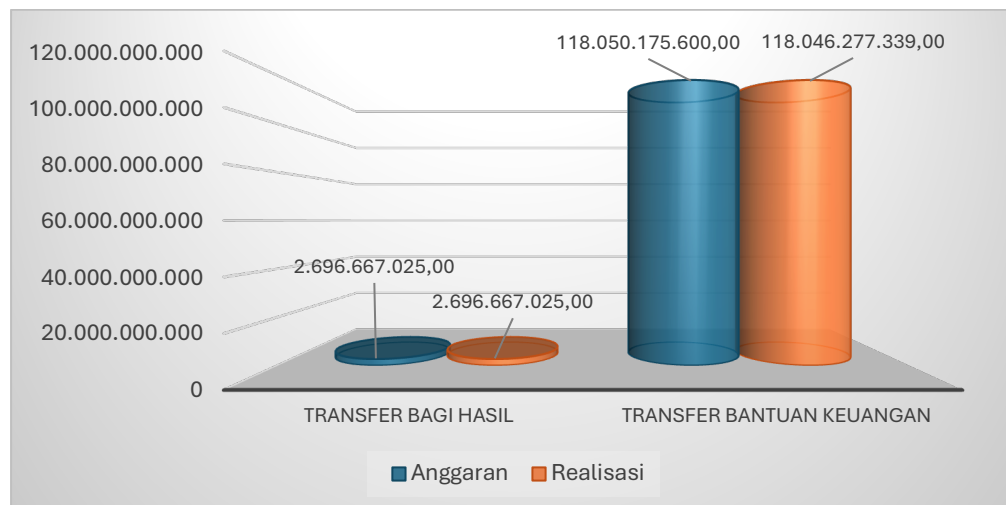
Dari Gambar Grafik 3.9 di atas dapat dijelaskan bahwa belanja operasi mendapat komponen anggaran terbesar dalam APBD tahun anggaran 2024 yakni sebesar 83,75% diikuti belanja modal sebesar 16,25% dan belanja tak terduga 0,00%.

3.1.3 Transfer

Pada tahun anggaran 2024 transfer dianggarkan sebesar Rp120.746.842.625,00 dengan realisasi sebesar Rp120.742.944.364,00 atau mencapai 100,00%. Realisasi transfer terdiri dari Transfer Bagi Hasil dengan proporsi sebesar 2,23% atau sebesar Rp2.696.667.025,00 dan Transfer Bantuan Keuangan ke Desa sebesar Rp118.046.277.339,00 yang memberikan kontribusi terbesar yakni 97,77%. Capaian kinerja dan kontribusi masing-masing komponen ditunjukkan oleh gambar berikut.

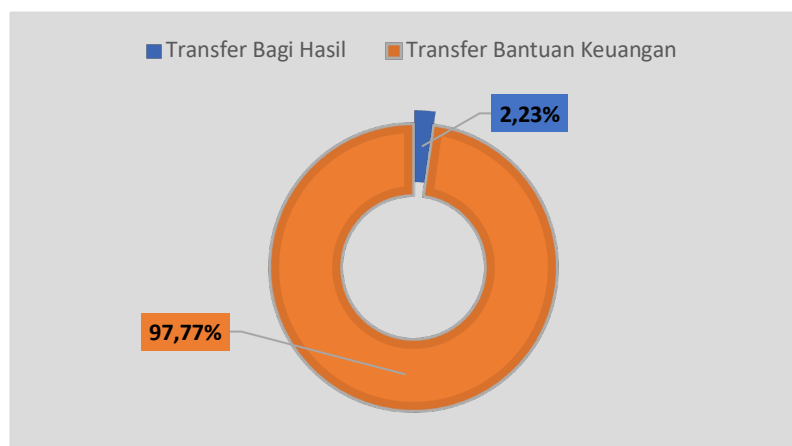


Gambar 3.10
Capaian Kinerja Komponen Transfer TA 2024



Sumber: Laporan APBD TA 2024

Gambar 3.11
Proporsi Realisasi Transfer TA. 2024

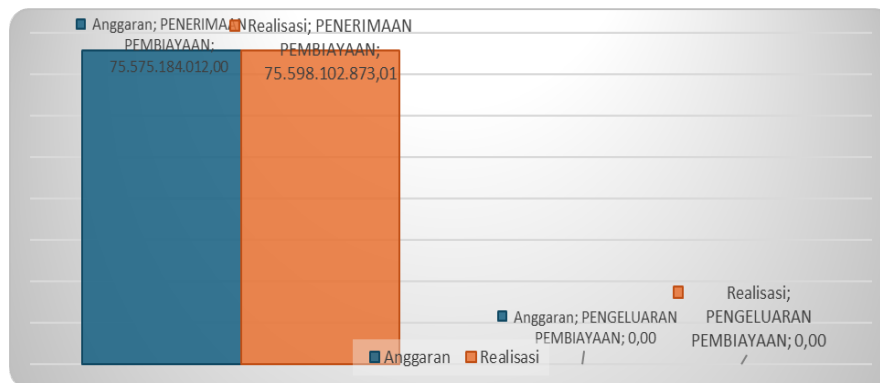


Sumber: Laporan APBD TA 2024

3.1.4 Pembiayaan

Pada tahun anggaran 2024 jumlah anggaran penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp75.575.184.012,00 sedangkan realisasinya mencapai Rp75.598.102.873,01 atau menunjukkan kinerja sebesar 100,03% dari yang dianggarkan. Pengeluaran Pembiayaan daerah tidak dianggarkan pada tahun 2024 atau sebesar 0,00%.

Gambar 3.12
Capaian Kinerja Komponen Pembiayaan TA.2024



Sumber : Laporan APBD TA. 2024

3.1.5 Mandatory Spending dalam Postur APBD

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara/daerah yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Data kinerja *mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah Kabupaten Belu meliputi hal-hal sebagai berikut.

a. *Mandatory Spending* Fungsi Kesehatan

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, besaran alokasi anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji ASN. Tujuan dari *mandatory spending* fungsi kesehatan adalah untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Belu

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi kesehatan di wilayah kabupaten Belu adalah adanya kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan tenaga kesehatan, kegiatan operasional RSUD Mgr Gabriel Manek SVD Atambua dan Puskesmas, rehabilitasi dan renovasi gedung puskesmas, penyediaan obat-obatan dan



penyediaan alat-alat kesehatan di RSUD Mgr Gabriel Manek SVD dan 17 Puskesmas yang tersebar di wilayah Kabupaten Belu.

Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan Dalam APBD Induk TA 2024 Kabupaten Belu dialokasikan senilai Rp265.177.976.395,00 dari total belanja dan transfer daerah diluar gaji atau sebesar **35,33%**. Rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.2
Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan Tahun 2024

No.	Komponen Perhitungan	Jumlah (Rp)	
1	a. Belanja pada Dinas Kesehatan		152.263.611.725,00
	1) Belanja Operasi		119.177.065.207,00
	a. Belanja Pegawai;	37.642.719.591,00	
	b. Belanja Barang dan Jasa;	81.234.345.616,00	
	c. Belanja Hibah;	300.000.000,00	
	d. Belanja Bantuan Sosial	0,00	
	2) Belanja Modal		33.086.546.518,00
	a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.408.333.530,00	
	b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.388.212.988,00	
	c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	290.000.000,00	
	b. Belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:		112.914.364.670,00
	1) Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN pada perangkat daerah RSUD Atambua	23.221.093.426,00	
	2) Sub Kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD pada perangkat daerah RSUD Atambua	9.600.000,00	
	3) Sub kegiatan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD pada perangkat daerah RSUD Atambua	73.234.030.542,00	
	4) Sub kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit pada perangkat daerah RSUD Atambua	1.500.000.000,00	
	5) Sub kegiatan pengembangan rumah sakit pada perangkat daerah RSUD Atambua	13.600.240.702,00	
	6) Sub kegiatan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar pada perangkat daerah RSUD Atambua	1.349.400.000,00	
2	Anggaran Fungsi Kesehatan (a+b)		265.177.976.395,00
3	Total Belanja Daerah		1.082.209.929.417,00
4	Gaji ASN		(331.582.550.055,00)
5	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)		750.627.379.362,00
	Rasio anggaran Kesehatan (2:5) x 100%		35,33

b. Mandatory Spending Fungsi Pendidikan

Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua



puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud disesuaikan dengan program prioritas bidang pendidikan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Mandatory spending fungsi pendidikan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan yang berada di wilayah Kabupaten Belu yang dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan guru, kegiatan operasional sekolah melalui dana BOS, pembangunan gedung sekolah negeri, rehabilitasi dan renovasi gedung sekolah, pembangunan gedung perpustakaan daerah.

Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Dalam Perubahan penjabaran APBD TA 2024 Kabupaten Belu dialokasikan senilai Rp269.972.033.542,00 dari nilai belanja dan transfer daerah senilai Rp1.082.209.929.417,00 atau sebesar 24,95%. Rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.3
Perhitungan Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan Tahun 2024

No.	Komponen Perhitungan	Jumlah (Rp)	
1	a. Belanja pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga		269.972.033.542,00
	1) Belanja Operasi		251.505.604.676,00
	a. belanja pegawai;	187.704.981.365,00	
	b. belanja barang dan jasa;	58.294.023.311,00	
	c. belanja hibah;	5.506.600.000,00	
	d. belanja bantuan sosial	-	
	2) Belanja Modal		18.466.428.866,00
	a. belanja modal peralatan dan mesin	1.947.415.448,00	
	b. belanja modal gedung dan bangunan	14.520.698.778,00	
	c. belanja modal aset tetap lainnya	1.998.314.640,00	
	b. Belanja di luar Dinas Pendidikan yang menunjang Pendidikan,	-	-
2	Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)		269.972.033.542,00
3	Total Belanja Daerah		1.082.209.929.417,00
4	Rasio Alokasi Anggaran fungsi pendidikan (2:3) x 100%		24,95

c. *Mandatory Spending* Fungsi Infrastruktur

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, besaran belanja infrastruktur



pelayanan public minimal 40% dari APBD diluar transfer ke daerah bawahan dan desa.

Tujuan dari *mandatory spending* fungsi infrastruktur adalah meningkatkan infrastruktur yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah yang berada di wilayah Kabupaten Belu.

Sedangkan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Infrastruktur Dalam Perubahan Penjabaran APBD TA 2024 Kabupaten Belu dialokasikan senilai Rp307.444.531.963,00 dari nilai belanja daerah dikurangi transfer senilai Rp963.450.181.792,00 atau sebesar 31,91%. Rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.4
Rekapitulasi Perhitungan Belanja Infrastruktur Daerah
Tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.213.147.504,00
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.179.788.291,00
3	Belanja modal peralatan dan mesin	4.640.141.486,00
4	Belanja modal gedung dan bangunan	77.060.679.886,00
5	Belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	60.698.539.760,00
6	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	73.234.030.542,00
7	Operasional Pelayanan Puskesmas	19.451.924.675,00
8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	1.500.000.000,00
9	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	438.449.100,00
10	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	55.835.000,00
11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	971.639.888,00
12	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	142.062.000,00
13	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	230.743.750,00
14	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	15.860.000,00
15	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	441.054.800,00
16	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	415.700.000,00
17	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	55.916.800,00
18	Pengembangan konten digital untuk Pendidikan	81.473.800,00
19	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	155.115.000,00
20	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	159.037.500,00
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	146.905.600,00
22	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	60.042.000,00
23	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	200.000.000,00
24	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	396.639.800,00
25	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	2.188.357.000,00
26	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1.326.649.402,00
27	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	290.836.400,00
28	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	353.450.000,00
29	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	25.950.000,00
30	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	557.298.000,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
31	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	12.420.289.642,00
32	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2.690.539.800,00
33	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA	201.909.000,00
34	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	20.000.000,00
35	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	8.354.138.962,00
36	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	340.125.000,00
37	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	383.760.000,00
38	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	468.100.000,00
39	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	325.750.000,00
40	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000,00
41	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	470.365.000,00
42	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	150.802.500,00
43	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	52.699.700,00
44	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	266.401.250,00
45	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	200.000.000,00
46	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	150.000.000,00
47	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000,00
48	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	299.913.500,00
49	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	139.000.000,00
50	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	45.000.000,00
51	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	676.500.000,00
52	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	54.000.000,00
53	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	125.605.000,00
54	Pengembangan Kegiatan	-
55	Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan	-
56	Kabupaten/Kota	15.000.000,00
57	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	72.000.000,00
58	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	358.400.000,00
59	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	136.800.000,00
60	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	441.171.750,00
61	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	68.060.000,00
62	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	300.000.000,00
63	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	36.244.000,00
64	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	206.010.000,00
65	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	156.824.000,00
66	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	36.100.000,00
67	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	206.000.000,00
68	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	29.990.000,00
69	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	3.307.784.600,00
70	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	605.000.000,00
71	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	1.000.000,00
72	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	12.900.000,00
73	Pengembangan Bahan Pustaka	121.900.000,00
74	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	80.789.000,00
75	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1.691.811.000,00
76	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	50.130.000,00
77	Penetapan Cagar Budaya	39.608.000,00
78	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	37.500.000,00
79	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	955.000.000,00



No.	Uraian	Jumlah (Rp)
80	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2.582.862.500,00
81	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	1.774.551.075
82	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	3.834.154.000
83	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	265.000.000
84	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	1.852.015.000
85	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	3.472.760.000
86	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	500.000.000
87	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	599.999.700
	TOTAL ALOKASI MANDATORY SPENDING BELANJA INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK (Rp.)	307.444.531.963
	TOTAL BELANJA DAERAH DI LUAR BELANJA TRANSFER (Rp.)	963.450.181.792,00
	PERSENTASE ALOKASI MANDATORY SPENDING BELANJA INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK (MINIMAL 40%)	31,91

d. **Mandatory Spending Fungsi Alokasi Dana Desa (ADD)**

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Tujuan dari *mandatory spending* Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membantu pemerintah desa dalam menjalankan fungsi pelayanan dan bantuan kepada pemerintah desa.

Adapun capaian dari *mandatory spending* ADD di wilayah Kabupaten Belu adalah alokasi dana desa yang digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan para perangkat desa, membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Pada Kabupaten Belu, alokasi *mandatory spending* ADD membantu kelancaran operasional 69 desa dan 18 desa persiapan yang berada di wilayah Kabupaten Belu.

Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja ADD dalam Perubahan TA 2024 Kabupaten Belu dialokasikan senilai Rp53.583.114.600,00 dari nilai Dana Transfer Umum setelah dikurangi Dana Bagi Hasil atau sebesar **9,96%**. Rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.5
Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja ADD Dalam APBD TA 2024

No.	Komponen Perhitungan	Perhitungan Alokasi (Rp)	Perubahan Penjabaran APBD (Rp)	Selisih (Rp)
1	Alokasi Dana Desa	53.778.758.200,00	53.583.114.600,00	195.643.600,00
2	Perhitungan Dana Perimbangan - Dana Alokasi Khusus	537.787.582.000,00	537.787.582.000,00	0,00
3	Persentase Alokasi ADD	10,00%	9,96%	0,04%

**e. DAU *Specific Grant***

DAU yang bersifat *specific grant* merupakan DAU yang ditentukan penggunaannya yang terbagi untuk layanan umum (pendanaan kelurahan dan kebutuhan penggajian PPPK), bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang pekerjaan umum. Pada tahun 2024, Alokasi belanja yang bersumber dari DAU *Specific Grant* sebesar Rp118.660.459.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp115.128.220.628,00 atau 97,02% dari total alokasi dana yang diterima. Rinciannya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.6
Rincian Alokasi DAU *Specific Grant* Dalam APBD TA 2024

No	Uraian	LAK (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
1	Penerimaan Pajak Daerah	19.194.087.650,00	19.194.087.650,00	0,00
2	Penerimaan	4.934.589.739,00	4.934.589.739,00	0,00
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.480.688.664,00	3.480.688.664,00	0,00
4	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	60.452.354.222,28	60.461.267.222,28	(8.913.000,00)
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	3.382.792.600,00	3.382.792.600,00	0,00
6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.313.950.400,00	1.313.950.400,00	0,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Umum	530.182.469.628,00	530.182.469.628,00	0,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	234.421.531.451,30	234.421.531.451,30	0,00
9	Penerimaan Dana Desa	64.463.162.739,00	64.463.162.739,00	0,00
10	Penerimaan Dana Insentif Daerah	-	-	0,00
11	Penerimaan Dana Insentif Fiskal	9.107.161.000,00	9.107.161.000,00	0,00
12	Penerimaan Dana Pendapatan Bagi Hasil Pajak	34.424.775.169,00	34.424.775.169,00	0,00
13	Penerimaan Dana Pendapatan Bagi Hasil Pajak Lainnya	-	-	0,00
14	Penerimaan Bantuan Keuangan	-	-	0,00
15	Penerimaan Hibah	-	-	0,00
16	Penerimaan Lainnya	12.080.841.325,08	12.080.841.325,08	0,00
	Jumlah	977.438.404.587,66	977.447.317.587,66	(8.913.000,00)

f. Dana Insentif Fiskal

Alokasi anggaran Dana Insentif Fiskal tahun 2024 sebesar Rp9.107.161.000,00 dan dapat direalisasikan seluruhnya. Besaran alokasi ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024. Dana Insentif Fiskal ditujukan untuk infrastruktur yakni pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.



Uraianya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.7
Rincian Dana Insentif Fiskal per-SKPD TA 2024

No.	Nama SKPD	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	2.462.862.500,00	2.388.177.250,00	96,97
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Program penyelenggaraan jalan	6.644.298.500,00	6.574.785.780,00	98,95
	Jumlah		9.107.161.000,00	8.962.963.030,00	98,42

3.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja APBD Kabupaten Belu Menurut Urusan Pemerintahan Daerah

3.2.1 Pendapatan

Tabel 3.8
Realisasi Pencapaian Target Kinerja APBD Kabupaten Belu TA 2024 Menurut Urusan Pemerintahan Daerah - Pendapatan

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Lebih/ (Kurang) (Rp)	(%)
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
4					
4.1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	69.242.713.640,00	56.709.742.343,94	(12.532.971.296,06)	81,9
4.1.02	Kesehatan	65.992.713.640,00	55.598.011.343,94	(10.394.702.296,06)	84,25
4.1.02.1.02.01	Dinas Kesehatan	1.250.000.000,00	1.019.330.350,00	(230.669.650,00)	81,55
4.1.02.1.02.02	RSUD Atambua	64.742.713.640,00	54.578.680.993,94	(10.164.032.646,06)	84,3
4.1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.250.000.000,00	1.111.731.000,00	(2.138.269.000,00)	34,21
4.1.03.1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	3.250.000.000,00	1.111.731.000,00	(2.138.269.000,00)	34,21
4.2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	1.809.262.000,00	681.553.000,00	(1.127.709.000,00)	37,67
4.2.05	Lingkungan Hidup	1.809.262.000,00	681.553.000,00	(1.127.709.000,00)	37,67
4.2.05.2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	1.809.262.000,00	681.553.000,00	(1.127.709.000,00)	37,67
4.2.10	Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.10.2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Urusan Pilihan	4.661.200.000,00	2.083.344.200,00	(2.577.855.800,00)	44,7
4.3.02	Pariwisata	100.000.000,00	15.729.000,00	(84.271.000,00)	15,73
4.3.02.3.02.01	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	100.000.000,00	15.729.000,00	(84.271.000,00)	15,73
4.3.03	Pertanian	1.011.200.000,00	505.894.400,00	(505.305.600,00)	50,03
4.3.03.3.03.01	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	300.000.000,00	0,00	(300.000.000,00)	0,00
4.3.03.3.03.02	Dinas Peternakan dan Perikanan	711.200.000,00	505.894.400,00	(205.305.600,00)	71,13
4.3.06	Perdagangan	3.550.000.000,00	1.561.720.800,00	(1.988.279.200,00)	43,99
4.3.06.3.06.01	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.550.000.000,00	1.561.720.800,00	(1.988.279.200,00)	43,99
4.4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	951.875.442.065,00	917.972.678.043,72	(33.902.782.090,28)	96,44
4.4.04	Kuangan	951.875.442.065,00	917.972.678.043,72	(33.902.782.090,28)	96,44
4.4.04.4.04.01	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	921.134.631.253,00	898.631.196.889,72	(22.503.452.432,28)	97,56



Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Lebih/ (Kurang) (Rp)	(%)
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
4.4.04.4.04.02	Badan Pendapatan Daerah	30.740.810.812,00	19.341.481.154,00	(11.399.329.658,00)	62,92
Jumlah		1.027.588.617.705,00	977.447.317.587,66	(50.141.318.186,34)	95,12

Dari tabel Realisasi Pencapaian Target Kinerja APBD Kabupaten Belu TA 2024 Menurut Urusan Pemerintahan Daerah - Pendapatan dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan sebesar Rp1.027.588.617.705,00 yang terealisasi sebesar Rp977.447.299.518,66 atau sebesar 95,12%.

3.2.2 Belanja dan Transfer

Tabel 3.9
Realisasi Pencapaian Target Kinerja APBD Kabupaten Belu TA 2024
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah - Belanja dan Transfer

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Lebih/ (Kurang) (Rp)	(%)
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
5.1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	673.475.228.289,00	622.182.475.939,89	(51.292.752.349,11)	92,38
5.1.01	Pendidikan	288.938.810.842,00	269.733.719.388,97	(19.205.091.453,03)	93,35
5.1.01.1.01.01	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Kebudayaan	288.938.810.842,00	269.733.719.388,97	(19.205.091.453,03)	93,35
5.1.02	Kesehatan	265.177.976.395,00	238.427.624.398,17	(26.750.351.996,83)	89,91
5.1.02.1.02.01	Dinas Kesehatan	152.263.611.725,00	138.171.379.255,00	(14.092.232.470,00)	90,74
5.1.02.1.02.02	RSUD Atambua	112.914.364.670,00	100.256.245.143,17	(12.658.119.526,83)	88,79
5.1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	98.897.553.615,00	95.650.012.554,75	(3.247.541.060,25)	96,72
5.1.03.1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	98.897.553.615,00	95.650.012.554,75	(3.247.541.060,25)	96,72
5.1.04	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	12.251.581.474,00	11.023.708.013,00	(1.227.873.461,00)	89,98
5.1.04.1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja	8.515.298.669,00	7.536.492.470,00	(978.806.199,00)	88,51
5.1.04.1.05.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.736.282.805,00	3.487.215.543,00	(249.067.262,00)	93,33
5.1.05	Sosial	8.209.305.963,00	7.347.411.585,00	(861.894.378,00)	89,5
5.1.05.1.06.01	Dinas Sisoal, Pemberdayaan Masyarakat dan desa	8.209.305.963,00	7.347.411.585,00	(861.894.378,00)	89,5
5.2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	49.179.092.094,00	44.083.809.351,24	(5.095.282.742,76)	89,64
5.2.01	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.769.477.039,00	8.811.042.816,00	(958.434.223,00)	90,19
5.2.01.2.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,	9.769.477.039,00	8.811.042.816,00	(958.434.223,00)	90,19
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
5.2.02	Lingkungan Hidup	13.026.004.446,00	12.156.817.694,00	(869.186.752,00)	93,33
5.2.02.2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	13.026.004.446,00	12.156.817.694,00	(869.186.752,00)	93,33
5.2.03	Administrasi Kependudukan dan Sipil	4.446.208.367,00	4.052.660.239,00	(393.548.128,00)	91,15
5.2.03.2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.446.208.367,00	4.052.660.239,00	(393.548.128,00)	91,15
5.2.04	Komunikasi dan Informatika	2.668.531.712,00	2.327.217.177,00	(341.314.535,00)	87,21
5.2.04.2.10.015.2.05	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.668.531.712,00	2.327.217.177,00	(341.314.535,00)	87,21

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Lebih/ (Kurang) (Rp)	(%)
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
5.2.05.2.11.01	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.108.561.957,00	4.436.901.845,00	(671.660.112,00)	86,85
5.2.06	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.108.561.957,00	4.436.901.845,00	(671.660.112,00)	86,85
5.2.06.2.12.01	Penanaman Modal	11.056.129.893,00	9.474.921.814,24	(1.581.208.078,76)	85,7
5.2.07	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	11.056.129.893,00	9.474.921.814,24	(1.581.208.078,76)	85,7
5.2.07.2.17.01	Perpustakaan	3.104.178.680,00	2.824.247.766,00	(279.930.914,00)	90,98
5.3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.104.178.680,00	2.824.247.766,00	(279.930.914,00)	90,98
5.3.01	Urusan Pilihan	53.431.795.352,00	49.064.242.342,00	(4.367.553.010,00)	91,83
5.3.01.3.02.01	Pariwisata	11.477.757.107,00	10.145.433.118,00	(1.332.323.989,00)	88,39
5.3.02	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	11.477.757.107,00	10.145.433.118,00	(1.332.323.989,00)	88,39
5.3.02.1.03.01	Pertanian	34.375.182.467,00	32.394.079.781,00	(1.981.102.686,00)	94,24
5.3.02.2.03.02	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	21.015.597.199,00	20.528.165.396,00	(487.431.803,00)	97,68
5.3.03	Dinas Peternakan dan Perikanan	13.359.585.268,00	11.865.914.385,00	(1.493.670.883,00)	88,82
5.3.03.1.06.01	Perdagangan	7.578.855.778,00	6.524.729.443,00	(1.054.126.335,00)	86,09
5.4	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	7.578.855.778,00	6.524.729.443,00	(1.054.126.335,00)	86,09
5.4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Pendukung	64.385.612.915,00	61.525.404.944,00	(2.860.207.971,00)	95,56
5.4.01.4.01.01	Administrasi Pemerintahan	32.766.747.088,00	31.295.318.951,00	(1.471.428.137,00)	95,51
5.4.02	Sekretariat Daerah	32.766.747.088,00	31.295.318.951,00	(1.471.428.137,00)	95,51
5.4.02.4.08.01	Sekretariat DPRD	31.618.865.827,00	30.230.085.993,00	(1.388.779.834,00)	95,61
5.5	Sekretariat DPRD	31.618.865.827,00	30.230.085.993,00	(1.388.779.834,00)	95,61
5.5.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	185.452.860.195,00	161.112.398.722,00	(24.340.461.473,00)	86,88
5.5.01.4.03.01	Perencanaan	6.881.003.336,00	6.379.700.537,00	(501.302.799,00)	92,71
5.5.02	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.881.003.336,00	6.379.700.537,00	(501.302.799,00)	92,71
5.5.02.1.04.01	Kuangan	146.740.111.653,00	135.636.750.299,00	(11.103.361.354,00)	92,43
5.5.02.2.04.02	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	141.382.623.886,00	130.675.234.121,00	(10.707.389.765,00)	92,43
5.5.03	Badan Pendapatan Daerah	5.357.487.767,00	4.961.516.178,00	(395.971.589,00)	92,61
5.5.03.1.05.01	Kepegawaian	29.461.636.528,00	16.921.587.185,00	(12.540.049.343,00)	57,44
5.5.04	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	29.461.636.528,00	16.921.587.185,00	(12.540.049.343,00)	57,44
5.5.04.1.10.01	Pengelola Perbatasan Daerah	2.370.108.678,00	2.174.360.701,00	(195.747.977,00)	91,74
5.6	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	2.370.108.678,00	2.174.360.701,00	(195.747.977,00)	91,74
5.6.02	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	6.655.454.083,00	6.242.284.707,00	(413.169.376,00)	93,79
5.6.024.02.01	Pengawasan	6.655.454.083,00	6.242.284.707,00	(413.169.376,00)	93,79
5.7	Inspektorat	6.655.454.083,00	6.242.284.707,00	(413.169.376,00)	93,79
5.7.1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	35.107.013.778,00	32.123.045.381,30	(2.983.968.396,70)	91,5
5.7.1.4.11.01	Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan	35.107.013.778,00	32.123.045.381,30	(2.983.968.396,70)	91,5
5.7.1.4.11.02	Kecamatan Kota Atambua	6.628.565.656,00	6.172.008.766,00	(456.556.890,00)	93,11
5.7.1.4.11.03	Kecamatan Tasifeto Barat	1.817.224.905,00	1.669.958.209,30	(147.266.695,70)	91,9
5.7.1.4.11.04	Kecamatan Tasifeto Timur	2.060.887.685,00	1.962.785.877,00	(98.101.808,00)	95,24
5.7.1.4.11.05	Kecamatan Raihat	1.755.500.151,00	1.433.288.368,00	(322.211.783,00)	81,65



Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Lebih/ (Kurang) (Rp)	(%)
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		
5.7.1.4.11.06	Kecamatan Lamaknen	1.594.866.052,00	1.352.058.098,00	(242.807.954,00)	84,78
5.7.1.4.11.07	Kecamatan Kakuluk Mesak	2.435.283.391,00	2.318.866.514,00	(116.416.877,00)	95,22
5.7.1.4.11.08	Kecamatan Raimanuk	1.905.296.817,00	1.815.676.292,00	(89.620.525,00)	95,3
5.7.1.4.11.09	Kecamatan Lasiolat	1.900.434.815,00	1.610.975.000,00	(289.459.815,00)	84,77
5.7.1.4.11.10	Kecamatan Atambua Selatan	6.452.806.053,00	6.085.658.946,00	(367.147.107,00)	94,31
5.7.1.4.11.11	Kecamatan Atambua Barat	5.354.623.373,00	4.900.045.325,00	(454.578.048,00)	91,51
5.7.1.4.11.12	Kecamatan Lamaknen Selatan	1.811.452.266,00	1.615.653.230,00	(195.799.036,00)	89,19
5.7.1.4.11.13	Kecamatan Nanaet Duabesi	1.390.072.614,00	1.186.070.756,00	(204.001.858,00)	85,32
5.8.	Urusan Pemerintahan Fungsi Umum	35.476.745.011,00	35.210.978.757,00	(265.766.254,00)	99,25
5.8.1	Kesatuan Bangsa dan Politik	35.476.745.011,00	35.210.978.757,00	(265.766.254,00)	99,25
5.8.1.4.11.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	35.476.745.011,00	35.210.978.757,00	(265.766.254,00)	99,25
	Jumlah	1.103.163.801.717,00	1.011.544.640.144,43	(91.619.161.572,57)	91,69

Dari tabel Realisasi Pencapaian Target Kinerja APBD Kabupaten Belu TA 2024, Menurut Urusan Pemerintahan Daerah - Belanja dan Transfer dapat dilihat dari Anggaran Belanja dan Transfer sebesar Rp1.103.163.801.717,00 yang terealisasi sebesar Rp1.011.544.640.144,43 atau sebesar 91,69%.

3.2.3 Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan ditargetkan sebesar Rp75.575.184.012,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp75.598.102.873,01 atau 100,03%.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan tidak dianggarkan pada tahun 2024.

3.3 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

3.3.1 Pendapatan

Secara keseluruhan Realisasi Pendapatan Daerah pada tahun 2024 hampir mencapai target yang ditetapkan dengan pencapaian sebesar 95,12%. PAD mencapai 71,63%, pendapatan transfer sebesar 98,45% dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 89,47%. Namun demikian masih terdapat potensi pendapatan yang belum optimal pencapaian kinerjanya. Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi terkait dengan hal ini antara lain:



- a. Rendahnya potensi pendapatan akibat dari lemahnya infrastruktur sarana dan prasarana umum sumber Pendapatan Asli Daerah;
- b. Tingginya tingkat kebutuhan daerah (*fiscal need*) yang tidak sebanding dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) yang dimiliki daerah;
- c. Belum dilakukan perbaikan regulasi yang mendukung peningkatan pendapatan asli daerah serta pendayagunaan kekayaan atau aset-aset daerah yang *idle* baik secara langsung maupun melalui bentuk kerja sama dengan pihak ketiga;
- d. Pembayaran online untuk pajak daerah belum maksimal diterapkan oleh semua wajib pajak daerah;
- e. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah;
- f. Data objek pajak/retribusi daerah yang belum diperbaharui;
- g. Belum optimalnya beberapa unit usaha daerah sehingga kontribusi terhadap PAD masih rendah; dan
- h. Keterbatasan manajemen sumber daya pengelolaan pajak dan retribusi sehubungan dengan luasnya cakupan objek pajak dan retribusi.

Beberapa strategi dan prioritas yang perlu dilakukan Pemerintah Kabupaten Belu untuk memperbaiki sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah agar mampu meningkatkan pendapatan daerah antara lain:

- 1) Membuat regulasi terkait pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan undang-undang yang berlaku;
- 2) Meningkatkan metode pembayaran non tunai oleh wajib pajak/retribusi;
- 3) Meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayaran retribusi daerah; dan
- 4) Melakukan sosialisasi berkelanjutan tentang pentingnya pajak daerah dan retribusi daerah.

3.3.2 Belanja

Beberapa permasalahan kinerja pengelolaan belanja daerah adalah:

- a. Aparatur pelaksana belum sepenuhnya memahami ketentuan perundang-undangan yang mengatur mekanisme pelaksanaan



belanja daerah serta adanya perubahan regulasi yang belum direspon secara tepat;

- b. Cuaca, curah hujan, bencana alam maupun non alam seringkali mempengaruhi kualitas pekerjaan terutama pekerjaan-pekerjaan fisik konstruksi;
- c. Belanja-belanja yang bersifat pemberdayaan masyarakat belum optimal memberikan hasil karena respon dan dukungan masyarakat terhadap program belum optimal; dan
- d. Tertundanya pencairan dana dari kas daerah sebagai akibat dari keterlambatan penyampaian surat pertanggungjawaban belanja oleh pimpinan perangkat daerah dan keterlambatan transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Strategi dan prioritas APBD yang masih diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan, kendala dan tantangan dalam pencapaian arah dan kebijakan umum belanja antara lain:

- a. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pelaksana melalui pendidikan dan pelatihan;
- b. Penyusunan program dan kegiatan belanja yang sesuai dengan skala prioritas berdasarkan kebijakan umum APBD;
- c. Perbaikan sistem penempatan pegawai pada SKPD khususnya pengelolaan keuangan sehingga mampu mendorong perbaikan dalam hal pelaksanaan kegiatan, pelaporan serta pertanggungjawabannya; dan
- d. Penyusunan program dan kegiatan belanja yang *reliable* untuk mengurangi tingkat risiko dan ketidakpastian yang harus ditanggung.

3.3.3 Pembiayaan

Tidak ada permasalahan dalam penerimaan pembiayaan tahun 2024 karena kewajiban pihak ketiga atas penerimaan kembali piutang sudah lunas.

Dari sisi pengeluaran pembiayaan, target pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal kepada Bank NTT tidak anggarkan dalam APBD tahun 2024 karena keterbatasan fiskal.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah sekaligus merupakan pengejawantahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 merupakan pedoman dan standar bagi daerah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah setempat. Kebijakan akuntansi juga merupakan instrumen penting dalam rangka penerapan akuntansi. Khususnya dalam penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Kebijakan akuntansi ini merupakan dokumen yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah, wajib dijadikan pedoman oleh fungsi-fungsi akuntansi pada PPKD maupun SKPD dan juga pihak Perencana termasuk Tim Anggaran pada Pemerintah Daerah.

Pengungkapan pada kebijakan akuntansi dengan cara mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan metode-metode penerapannya. Hal ini secara material mempengaruhi penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pengungkapan juga harus meliputi pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam memilih prinsip-prinsip yang sesuai. Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan ini mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan SKPD dan PPKD.

4.1 Unsur Laporan Keuangan

4.1.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA memuat informasi mengenai Pendapatan, Belanja, Transfer dan Pembiayaan Daerah. Data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Modal didasarkan pada LRA SKPD dan data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan yang Sah, Belanja Bunga, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga, Transfer dan Pembiayaan (penerimaan dan pengeluaran) didasarkan pada LRA PPKD (BUD).

4.1.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan



dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan SAL terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.

4.1.3 Neraca

Neraca memuat informasi mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Pada Neraca SKPD disajikan mengenai Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Lainnya, Kewajiban, dan Ekuitas. Neraca BLUD menyajikan Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Kewajiban dan Ekuitas. Neraca PPKD (BUD) menyajikan Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Kewajiban dan Ekuitas.

4.1.4 Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam pendapatan - LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

4.1.5 Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris selama satu periode akuntansi.

4.1.6 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit - LO, koreksi dan ekuitas akhir.

4.1.7 Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan dan daftar mengenai nilai suatu akun yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam rangka pengungkapan yang memadai.

4.2 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).



Entitas Pelaporan pada Pemerintah Kabupaten Belu adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Belu yang menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang meliputi: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai entitas akuntansi berkewajiban menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di SKPD selaku pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) agar digabung menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belu meliputi rekening-rekening entitas pemerintah daerah secara keseluruhan yang tidak dipisahkan, termasuk seluruh unit kerja dalam organisasi Pemerintah Kabupaten Belu. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belu merupakan hasil konsolidasi dari laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu selaku entitas akuntansi. Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Belu terdiri dari awalnya berjumlah 44 Perangkat Daerah namun saat ini berjumlah 38 Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belu tidak mengkonsolidasikan rekening-rekening yang merupakan entitas kekayaan Pemerintah Kabupaten Belu yang dipisahkan baik berbentuk Perusahaan Daerah dan Entitas terpisah lainnya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Belu.

Tabel 4.1
Daftar SKPD pada Pemerintah Kabupaten Belu

Kode SKPD	Nama SKPD	Kode SKPD	Nama SKPD
1.01.02	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	5.01.02	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
1.02.01	Dinas Kesehatan	5.02.02	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	5.02.03	Badan Pendapatan Daerah
1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja	5.03.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
1.05.04	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.06.01	Bagian Pengelola Perbatasan Negara
1.06.02	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.01.01	Inspektorat
2.08.02	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	7.01.01	Kecamatan Kota Atambua



Kode SKPD	Nama SKPD	Kode SKPD	Nama SKPD
2.11.02	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	7.01.02	Kecamatan Tasifeto Barat
2.12.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.01.03	Kecamatan Tasifeto Timur
2.16.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.01.04	Kecamatan Raihat
2.17.02	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7.01.05	Kecamatan Lamaknen
2.18.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.01.06	Kecamatan Kakuluk Mesak
2.23.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.01.07	Kecamatan Raimanuk
3.26.01	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	7.01.08	Kecamatan Lasialat
3.27.01	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	7.01.09	Kecamatan Atambua Selatan
3.27.03	Dinas Peternakan dan Perikanan	7.01.10	Kecamatan Atambua Barat
3.30.02	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	7.01.11	Kecamatan Lamaknen Selatan
4.01.01	Sekretariat Daerah	7.01.12	Kecamatan Nanaet Dubesi
4.02.01	Sekretariat DPRD	8.01.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

4.3 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 adalah basis akrual di mana pengakuan pendapatan LO, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Pemerintah Kabupaten Belu didalam penyusunan anggaran dan pelaksanaannya berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas. Hal ini berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di RKUD atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari RKUD atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.



Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Pemerintah Kabupaten Belu menyajikan saldo Akun-Akun tahun 2024 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Audit BPK RI tahun sebelumnya. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam CaLK dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan atas laporan keuangan.

4.4 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban. Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

4.5 Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Rekening/Akun

a. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Definisi dan Klasifikasi Kas dan Setara Kas

- 1) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- 2) Kas terdiri dari:
 - a) Kas di Kas Daerah;
 - b) Kas di Bendahara Penerimaan;
 - c) Kas di Bendahara Pengeluaran;
 - d) Kas di BLUD;
 - e) Kas di Bendahara Dana BOS;
 - f) Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN;



- g) Kas di Bendahara BOS; dan
- h) Kas Lainnya
- 3) Setara Kas adalah Investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan
- 4) Setara Kas terdiri dari :
 - 1. Deposito berjangka yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal penempatan serta tidak dijaminkan;
 - 2. Instrumen pasar uang yang diperoleh dan akan dicairkan dalam jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan; dan
 - 3. Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

Pengakuan Kas dan Setara Kas

- 1) Penerimaan kas bersumber dari pendapatan daerah, antara lain Pendapatan Asli Daerah, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, diakui pada saat:
 - 1. Kas tersebut diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau
 - 2. Kas tersebut diterima di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari BUD; atau
 - 3. Pengesahan atas penerimaan pendapatan.
- 2) Kas yang dikeluarkan untuk belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah.
- 3) Kas yang bersumber dari penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali.
- 4) Kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran pembiayaan.
- 5) Kas bersumber dari transfer diakui pada saat kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan dari entitas pelaporan lain, tanpa kewajiban mengembalikan.
- 6) Pengeluaran transfer diakui pada saat Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran yang tidak akan diterima kembali.

Pengukuran Kas dan Setara Kas

- 1) Kas dan Setara kas dicatat sebesar nilai nominal.



- 2) Kas dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

Penyajian dan Pengungkapan Kas dan Setara Kas

Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Saldo kas dan setara kas disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.
- 2) Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.
- 3) Saldo dan rincian kas dan setara kas baik yang ada di Kas Daerah, di Bendahara Penerimaan, di Bendahara Pengeluaran, di Badan Layanan Umum Daerah dan di Bendahara Dana Kapitasi JKN pada setiap FKTP milik Pemerintah serta Bendahara BOS diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 4) Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepada pihak ketiga berupa Utang PFK (Perhitungan Pihak Ketiga). Oleh karena itu jurnal untuk Utang PFK disatukan dalam jurnal kas daerah.
- 5) Informasi lainnya yang dianggap penting.

b. Kebijakan Akuntansi Piutang

Definisi dan Klasifikasi Piutang

- 1) Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
- 2) Klasifikasi Piutang dibagi atas:
 1. Piutang Pendapatan
 - a) Piutang Pajak Daerah
 - b) Piutang Retribusi
 - c) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah
 - d) Piutang Lain-lain PAD yang Sah
 - e) Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan



- f) Piutang Transfer Pemerintah Lainnya
- g) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
- h) Piutang Pendapatan Lainnya

2. Piutang Lainnya

- a) Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
- b) Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya
- c) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
- d) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
- e) Beban Dibayar di Muka
- f) Piutang Lain-lain

Pengakuan Piutang

- 1) Piutang diakui ketika diterbitkannya surat ketetapan/dokumen yang sah pada saat timbulnya hak tagih Pemerintah Kabupaten Belu antara lain karena adanya penetapan dan/atau tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian daerah serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.
- 2) Piutang pajak dapat diakui sebagai piutang memenuhi kriteria:
 - a) telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
 - b) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan/atau
 - c) telah diterbitkan surat atau dokumen lain yang sah yang dapat dipersamakan dengan surat ketetapan atau surat penagihan.
- 3) Terdapat dua cara yang digunakan untuk pemungutan pajak, yaitu:
 - a) *self assessment*, di mana wajib pajak menaksir serta menghitung pajaknya sendiri; dan
 - b) *official statement*, di mana penetapan dilakukan oleh pemerintah daerah,
- 4) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan diakui saat terbitnya Surat Pemberitahuan Pajak yang Terutang (SPPT).
- 5) Piutang Retribusi diakui apabila SKPD/Unit Kerja telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dokumen dasar yang digunakan dalam pencatatan piutang retribusi adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen sejenis yang sah yang diperlakukan sama dengan SKRD.



6) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Piutang yang termasuk dalam kelompok ini seperti Piutang atas bagian laba BUMD yang diakui apabila pada suatu tahun buku telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dalam RUPS tersebut telah ditetapkan besarnya bagian laba yang disetor ke kas daerah. Apabila persyaratan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan telah dipenuhi, namun sampai dengan tanggal 31 Desember belum diterima pembayarannya, maka pada akhir tahun buku diakui adanya piutang atas bagian laba BUMD.

7) Piutang Lain-lain PAD yang Sah secara umum diakui apabila telah ditetapkan jumlahnya, yang ditandai dengan terbitnya surat penagihan atau ketetapan. Disamping itu apabila pada akhir periode pelaporan masih ada tagihan pendapatan yang belum ada surat penagihannya, SKPD/Unit Kerja dimaksud wajib menghitung besarnya piutang tersebut dan selanjutnya menyiapkan dokumen sebagai dasar untuk menagih. Dokumen inilah yang menjadi dokumen sumber untuk mengakui piutang, untuk disajikan di neraca.

8) Piutang Denda Pajak diakui pada saat diterbitkannya dokumen Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). STPD ini dapat berupa dokumen SKPD/SKPDKB dan/atau SPPT PBB dan/atau Kuitansi Pembayaran dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

9) Pendapatan yang telah memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai pendapatan, namun ketetapan kurang bayar dan penagihan akan ditentukan beberapa waktu kemudian maka pendapatan tersebut dapat diakui sebagai piutang.

10) Piutang Denda Keterlambatan Pekerjaan diakui ketika terjadi keterlambatan pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dan belum dilunasi.

11) Piutang BLUD diakui dengan kriteria:

- a) Telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dengan bukti surat pernyataan tanggung jawab untuk melunasi piutang dan diotorisasi oleh kedua belah pihak dengan membubuhkan tanda tangan pada surat kesepakatan tersebut.
- b) Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
- c) Telah diterbitkan surat penagihan.



- 12) Piutang Penjualan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan diakui ketika berita acara hasil lelang diterbitkan dan belum dilunasi.
- 13) Piutang Hasil dari pengelolaan dana bergulir diakui ketika timbul hak Pemerintah Kabupaten Belu yang belum dipenuhi atas bunga atau bagi hasil dana bergulir yang disepakati oleh pihak penerima dana bergulir berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.
- 14) Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih atas peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan kredit dan kemitraan, dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - a) Didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
 - b) Jumlah piutang dapat diukur dengan andal.
- 15) Terhadap piutang yang penagihannya diserahkan kepada PUPN maka piutang tersebut tetap diakui oleh entitas yang memiliki piutang, berarti tidak terjadi pengalihan pengakuan atas piutang tersebut.
- 16) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer.
- 17) Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran.
- 18) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.
- 19) Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus) atau hak untuk menagih diakui pada saat pemerintah daerah telah mengirim klaim pembayaran kepada Pemerintah Pusat yang belum melakukan pembayaran.
- 20) Piutang transfer lainnya diakui apabila:



- a) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
 - b) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
- 21) Piutang Bagi Hasil dari Provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.
- 22) Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima yang bersangkutan.
- 23) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/ SKP2K/ SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan).

Pengukuran Piutang

- 1) Pengukuran piutang dicatat sebesar nilai nominal atas SKPD/SKRD/dokumen ketetapan lainnya/naskah perjanjian yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun berjalan.
- 2) Pengukuran piutang denda dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam Surat Teguran/Surat Tagihan Pajak Daerah.

Piutang Pajak Daerah

- 1) Pengukuran saat pengakuan
 - 1. Piutang pajak dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar/Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan/Surat Tagihan Pajak Daerah/Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terutang



2. Piutang pajak dicatat sebesar nilai penerimaan pajak yang sudah terlanjur dikembalikan kepada wajib pajak, namun seharusnya tidak dikembalikan kepada wajib pajak sesuai Surat Keputusan Keberatan, Surat Pelaksanaan Putusan Banding atau Surat Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali.

2) Pengukuran setelah pengakuan

Selanjutnya Piutang Pajak dapat berkurang apabila ada pengurangan, pelunasan, dan penghapusan, keputusan keberatan, keputusan non keberatan, putusan banding dan putusan peninjauan kembali yang menyebabkan Piutang Pajak berkurang. Piutang pajak dapat berkurang karena adanya putusan peninjauan kembali yang menyebabkan piutang pajak berkurang.

Piutang Retribusi Daerah

Piutang dicatat sebesar nilai nominal atas SKRD/dokumen ketetapan lainnya/naskah perjanjian yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun berjalan.

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Piutang dicatat sebesar nilai nominal yang besarnya telah ditetapkan dalam hasil RUPS yaitu bagian laba yang disetor ke kas daerah.

Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang dicatat sebesar nilai nominal atas Surat Ketetapan/Surat Tagihan/dokumen ketetapan lainnya/naskah perjanjian yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun berjalan.

Piutang Transfer

- 1) Dana Bagi Hasil dicatat dan disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- 2) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten;
- 3) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat;
- 4) Dana Transfer lainnya disajikan sebesar nilai yang menurut ketentuan perundangan harus ditransfer baik dari pemerintah pusat maupun provinsi ke pemerintah Kabupaten.



Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*)

Pengukuran berikutnya terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Penyisihan Piutang

- 1) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- 2) Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang. Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang.
- 3) Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.
- 4) Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut.
 1. Kualitas Piutang Lancar;
 2. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
 3. Kualitas Piutang Diragukan; dan
 4. Kualitas Piutang Macet.
- 5) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
 1. Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
 2. Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (*official assessment*).
- 6) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - (2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau



- (4)Wajib Pajak likuid; dan/atau
- (5)Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - (2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - (1)Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - (2)Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - (3)Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (4)Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- 7) Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - (1)Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - (2)Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - (3)Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - (4)Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - (1)Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - (2)Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - (3)Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
 - c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - (1)Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (2)Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - (3)Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - (1)Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - (2)Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau



- (3)Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
- (4)Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- 8) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut.
 - a) Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
 - b) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan;
 - c) Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan;
 - d) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.
- 9) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
 - b) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
 - c) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
 - d) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.
- 10) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:
 - a) Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
 - b) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c) Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- 11) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar:
 - a) Kualitas Lancar sebesar 0.5%;



- b) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c) Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- 12) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Bukan Pajak selain Retribusi, ditetapkan sebesar:
- a) 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;
 - b) 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c) 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- 13) Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Penghentian Pengakuan Piutang

- 1) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapusbukuan (*write down*) atau penghapusan bersyarat piutang dan penghapustagihan (*write-off*) atau penghapusan mutlak piutang.
- 2) Tata cara penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang dilakukan mengacu pada Peraturan Kepala Daerah.

Penyajian dan Pengungkapan

- 1) Piutang yang diharapkan pengembaliannya dalam 12 (dua belas) setelah tanggal neraca dikelompokkan dalam Aset Lancar, sedangkan piutang yang pengembaliannya lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah



tanggal neraca dikelompokkan pada Aset Non Lancar yaitu pada Kelompok Aset lain-lain.

- 2) Beban penyisihan piutang disajikan dalam laporan operasional (LO) dan penyisihan piutang tidak tertagih disajikan dalam neraca.
- 3) Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud berupa:
 - a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan, penilaian dan pengukuran piutang;
 - b) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - c) Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di tingkat SKPD/Pemerintah Daerah atau sudah diserahkan penagihannya kepada PUPN;
 - d) Penjelasan terhadap piutang yang penyelesaiannya melalui proses hukum; dan
 - e) Jaminan atau sita jaminan jika ada.

c. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Definisi dan Klasifikasi Persediaan

- 1) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Persediaan merupakan aset yang berwujud:
 - a) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
 - b) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
 - c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah.

Pengakuan Persediaan

- 3) Persediaan diakui pada saat:



- a) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- b) diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah yang didasarkan pada Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen lain yang dipersamakan.

Penilaian dan Pengukuran Persediaan

4) Penilaian persediaan menggunakan metode FIFO (*First In First Out*).

Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.

5) Persediaan disajikan sebesar:

- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Penyajian dan Pengungkapan

6) Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.

7) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:

- a) persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.



b) jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang (kedaluwarsa) dikeluarkan dari persediaan dan dicatat secara ekstrakomptabel.

c) metode penilaian yang digunakan; dan

d) informasi lain yang dianggap penting.

d. Kebijakan Akuntansi Investasi

Definisi dan Klasifikasi Investasi

1) Investasi adalah Aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Belu dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2) Klasifikasi Investasi pemerintah diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Investasi Jangka Pendek; dan

b. Investasi Jangka Panjang.

3) Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan berisiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

4) Investasi jangka pendek terdiri dari:

a) Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, kurang dari 12 (dua belas) bulan;

b) Surat Utang Negara (SUN);

c) Sertifikat Bank Indonesia (SBI); dan

d) Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

Investasi jangka panjang

5) Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan.

6) Investasi jangka panjang terdiri dari :

a) Investasi Non Permanen; dan

b) Investasi Permanen

7) Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

8) Investasi non permanen terdiri dari:

a) Pembelian Surat Utang Negara yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan;



- b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
 - c) Modal kerja yang digulirkan ke masyarakat/kelompok masyarakat atau biasa disebut dengan Dana Bergulir; dan
 - d) Investasi non permanen lainnya.
- 9) Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen terdiri dari:
- a) Penyertaan modal pemerintah pada perusahaan daerah dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah; dan
 - b) Investasi permanen lainnya.

Pengakuan Investasi

- 10) Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut.
- a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Kabupaten Belu; dan
 - b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengukuran Investasi

- 11) Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.

Pengukuran investasi jangka pendek:

- 12) Investasi dalam bentuk surat berharga:
- a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
 - b) Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
- 13) Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.



Pengukuran investasi jangka panjang:

- 14) Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
- 15) Investasi non permanen:
 - a) Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - b) Investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - c) Penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

Penilaian Investasi

- 16) Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:
 - a) Metode biaya

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
 - b) Metode ekuitas

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan.
 - c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode



nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

17) Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut.

- a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
- b) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- d) Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Pengungkapan Investasi

18) Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

- a) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- b) Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan non permanen;
- c) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- d) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- e) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
- f) Perubahan pos investasi.

e. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Definisi dan Klasifikasi Aset Tetap

1) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

2) Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut.

a) Tanah

Tanah yang diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

**b) Peralatan dan Mesin**

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan, memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan serta dalam kondisi siap pakai.

c) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Pengakuan Aset Tetap

- 1) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- 2) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut.
 - a) berwujud;
 - b) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
 - c) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - e) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk dipakai; dan
 - f) merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan



- g) nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut.

Tabel 4.2
Batasan Kapitalisasi untuk Pengadaan

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
I	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
1	Alat-alat Berat	10.000.000
2	Alat-alat Angkutan	
	Belanja Modal Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	5.000.000
	Belanja Modal Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	1.000.000
	Belanja Modal Alat-alat Angkutan di Air Bermotor	5.000.000
	Belanja Modal Alat-alat Angkutan di Air Tidak Bermotor	1.000.000
3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	300.000
4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	
	Alat Pengolahan	300.000
	Alat Pemeliharaan dan Alat Penyimpanan	300.000
5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	Peralatan Kantor	300.000
	Perlengkapan Kantor	300.000
	Komputer	300.000
	Meubelair	250.000
	Peralatan Rumah Tangga	300.000
	Peralatan Dapur	300.000
6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	
	Alat Studio	1.000.000
	Alat Komunikasi	500.000
	Peralatan Pemancar	500.000
7	Alat-alat Kedokteran	
	Alat Kedokteran	500.000
	Alat Kesehatan	500.000
8	Alat-alat Laboratorium	
	Unit Laboratorium	500.000
	Alat Peraga/Praktik Sekolah	300.000
	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	500.000
	Alat Laboratorium Hidrodinamika	500.000
9	Alat Keamanan	500.000
II	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
1	Bangunan Gedung	
	Bangunan Gedung Tempat Kerja	20.000.000
	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	20.000.000
	Bangunan Menara	10.000.000
2	Bangunan Monumen	10.000.000
3	Rambu-Rambu	500.000
III	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
1	Buku dan Perpustakaan	100.000
2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	300.000
3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	
	- Hewan/ternak	500.000
	- Tumbuhan Pohon	300.000
	- Tumbuhan Tanaman Hias	300.000



- 3) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Tanah, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, serta Konstruksi Dalam Pengerjaan, tidak ada nilai satuan minimum kapitalisasi.

Pengukuran Aset Tetap

- 1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh atau /diketahui. Sambil menunggu proses penetapan nilai wajar sebagaimana tersebut diatas tersebut, aset berkenaan tetap dicatat dengan nilai Rp1,00 (satu rupiah).

Komponen Biaya Perolehan

- 1) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- 2) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- 3) Biaya yang dapat kapitalisasi secara langsung adalah:
- a. Biaya konstruksi fisik;
 - b. Biaya perencanaan teknis konstruksi;
 - c. Biaya pengawasan konstruksi; dan
 - d. Biaya pengelolaan kegiatan

Tabel 4.3
Komponen Biaya Perolehan Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	Harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dll.
Peralatan dan Mesin	Harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan



Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Gedung dan Bangunan	Harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai
Aset Tetap Lainnya	Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai

Pengeluaran Setelah Perolehan Awal Aset Tetap

- 1) Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi kedua kriteria huruf a dan b sebagai berikut.
 - a) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - (1) Bertambah ekonomis/efisien; dan/atau
 - (2) Bertambah umur ekonomis; dan/atau
 - (3) Bertambah volume; dan/atau
 - (4) Bertambah kapasitas produktivitas.
 - b) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- 2) Nilai satuan minimum kapitalisasi atas perolehan aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi untuk per satuan jenis aset atau harga per unit atas jenis aset ditetapkan sebagai berikut.

Tabel 4.4
Batasan Kapitalisasi untuk Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, dan Restorasi

Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, Restorasi (Rp)	Keterangan
Peralatan dan Mesin		
Alat-Alat Besar Darat	≥ 5.000.000	untuk yang sifatnya pemeliharaan berat dan pemasangan alat / <i>sparepart</i> baru
Alat-Alat Besar Apung	≥ 5.000.000	-sda-
Alat-Alat Bantu	pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
Alat Angkutan Darat Bermotor	≥ 1.000.000	untuk yang sifatnya pemeliharaan berat dan pemasangan alat / <i>sparepart</i> baru
Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
Alat-Alat Angkutan Apung Bermotor	-sda-	
Alat-Alat Angkutan Apung Tidak Bermotor	-sda-	

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, Restorasi (Rp)	Keterangan
Alat Bengkel Bermesin	pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
Alat Bengkel Tidak Bermesin	-sda-	
Alat Ukur	-sda-	
Alat Pertanian		
Alat Pengolahan	pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
Alat Pemeliharaan Tanaman dan Alat Penyimpanan	-sda-	
Alat Kantor dan Rumah Tangga		
Alat Kantor	pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
Alat Rumah Tangga Termasuk Meubelair	-sda-	
Komputer	-sda-	
Meja dan Kursi/rapat pejabat	-sda-	
Alat Studio dan Komunikasi		
Alat Studio	pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
Alat Komunikasi	-sda-	
Peralatan Pemancar	-sda-	
Alat Kedokteran		
Alat Kedokteran	pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
Alat Kesehatan	-sda-	
Alat Laboratorium		
Unit Laboratorium	pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
Alat Peraga/Praktik Sekolah	-sda-	
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	-sda-	
Alat Laboratorium Hidrodinamika	-sda-	
Alat Persenjataan dan Keamanan		
Senjata api	pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
Persenjataan non Senjata Api	-sda-	
Amunisi	-sda-	
Senjata Sinar	-sda-	
Bangunan dan Gedung		
Bangunan Gedung Tempat Kerja	≥ 10.000.000	untuk yang sifatnya pemeliharaan sedang/berat/menambah umur ekonomis
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	≥ 10.000.000	-sda-
Bangunan Menara	≥ 2.500.000	-sda-
Monumen		
Bangunan Bersejarah	≥ 5.000.000	untuk yang sifatnya pemeliharaan sedang/berat/menambah umur ekonomis
Tugu Peringatan	≥ 5.000.000	-sda-
Candi	≥ 5.000.000	-sda-
Taman (untuk Umum)	≥ 5.000.000	-sda-
Rambu-rambu	pemeliharaan tidak dikapitalisasi	



Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, Restorasi (Rp)	Keterangan
Rambu-Rambu Lalu lintas udara	pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
Aset Lainnya		
Buku	pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
Terbitan Berkala	-sda-	
Barang Perpustakaan	-sda-	
Barang Bercorak Kebudayaan	-sda-	
Alat Olah Raga Lainnya	-sda-	
Hewan Ternak	-sda-	
Tanaman	-sda-	

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

- 1) Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai KDP sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
- 2) Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai KDP.
- 3) Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:
 - a) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan;
 - b) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;
 - c) Sudah ada *Final Hand Over* (FHO)/retensi dibayarkan; dan
 - d) Masa jaminan sudah berakhir.
- 4) Terdapat dua cara yang diperbolehkan dalam penyelesaian pembayaran retensi yakni:
 - a) Menggunakan jaminan bank, jika proyek itu sudah selesai maka dibayarkan secara penuh sesuai dengan berita acara penyerahan pekerjaan. Jaminan pemeliharaan bank berupa jaminan pemeliharaan dari Bank Pemerintah yang sehat atau bank lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Tidak menggunakan jaminan bank, maka pembayaran retensi dapat dilakukan setelah masa pemeliharaan berakhir sesuai berita acara penyerahan pekerjaan tahap kedua (*Final Hand Over*).



- 5) Besaran nilai jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak. jaminan pemeliharaan dikembalikan setelah 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.
- 6) Untuk pelaksanaan kontrak yang telah selesai namun retensi belum dibayarkan perlakuannya adalah diakui pada pos kewajiban jangka pendek dalam akun utang kepada pihak ketiga.

Perolehan Secara Gabungan

- a) Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
- b) Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan (penganggarannya dalam satu dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan/rincian kegiatan) tidak akan dipisahkan harga perolehannya ke masing-masing aset tetap jika harga perolehan salah satu aset tetap tertentu yang diperoleh secara gabungan nilainya mencapai 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan nilai Aset Tetap yang diperoleh secara gabungan dan pengakuan aset tetap tersebut akan diperlakukan sebagai aset tetap yang nilainya mencapai 80% dari keseluruhan nilai perolehan gabungan.

Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

- a) Dalam rangka memenuhi kebutuhan terhadap aset tetap tertentu biasanya pemerintah melakukan pembelian/pengadaan. Namun, karena alasan tidak tersedianya dana dan untuk efisiensi, pemerintah dapat memperoleh suatu aset tetap melalui mekanisme pertukaran (ruislag/tukar guling).
- b) Suatu aset tetap hasil pertukaran dapat diakui apabila kepemilikan atas aset telah berpindah dan nilai perolehan aset hasil pertukaran tersebut dapat diukur dengan andal. Pertukaran aset tetap dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Berdasarkan BAST tersebut, pengguna barang menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penghapusan terhadap aset yang diserahkan. Berdasarkan BAST dan SK Penghapusan, pengelola/pengguna barang mengeluarkan aset tersebut dari neraca maupun dari daftar barang dan membukukan aset tetap pengganti.



Aset Donasi

- 1) Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah daerah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh pengembang (developer) dengan tanpa nilai, yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah/pemerintah daerah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.
- 2) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan, apabila nilai wajar saat perolehan di bawah nilai batas kapitalisasi dicatat secara ekstrakomptabel dan dibebankan sebagai biaya operasional.
- 3) Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui dan dicatat sebagai pendapatan operasional.

Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

- 1) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.
- 2) Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala /terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.



- 3) Renovasi dapat dilakukan terhadap semua barang milik dalam kelompok aset tetap, namun demikian renovasi terhadap akun tanah dan akun aset tetap lainnya jarang ditemukan. Apabila aset tetap yang dimiliki dan/atau dikuasai suatu SKPD direnovasi dan memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap, maka renovasi tersebut dicatat dengan menambah nilai perolehan aset tetap yang bersangkutan.
- 4) Renovasi aset tetap milik sendiri merupakan perbaikan aset tetap dilingkungan satuan kerja pada pemerintah daerah atau SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi. Renovasi semacam ini akan dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahterimakan, maka akan dicatat sebagai KDP.
- 5) Renovasi aset tetap dalam lingkup ini mencakup perbaikan aset tetap bukan milik suatu satuan kerja atau SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi namun masih dalam satu entitas pelaporan.
- 6) Renovasi aset tetap dalam lingkup ini mencakup perbaikan aset tetap bukan milik suatu satuan kerja atau SKPD, di luar entitas pelaporan yang memenuhi syarat kapitalisasi. Lingkup renovasi jenis ini meliputi:
 - a. Renovasi aset tetap milik pemerintah lainnya; dan
 - b. Renovasi aset tetap milik pihak lain, selain pemerintah (swasta, BUMN/D, yayasan, dan lain-lain).

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

Aset Tetap Digunakan Bersama

- 1) Aset yang digunakan bersama oleh beberapa entitas akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh entitas akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.



- 2) Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh entitas akuntansi dan tidak bergantian.

Aset Perjanjian Kerja sama Fasos Fasum

- 1) Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.
- 2) Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

Penyusutan

- 1) Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- 2) Selain tanah, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
- 3) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
- 4) Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight-line method*) dengan masa manfaat dan tarif penyusutan sebagai berikut.

Tabel 4.5
Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)	Proporsi Penyusutan/ Tahun
1	3			ASET TETAP		
1	3	2		Peralatan dan Mesin		
1	3	2	1	Alat-Alat Besar Darat	10	10,00%
1	3	2	2	Alat-Alat Besar Apung	8	12,50%
1	3	2	3	Alat-alat Bantu	7	14,29%
1	3	2	4	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	14,29%
1	3	2	5	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2	50,00%
1	3	2	6	Alat Angkut Apung Bermotor	10	10,00%

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)	Proporsi Penyusutan/ Tahun
1	3	2	7	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3	33,33%
1	3	2	8	Alat Angkut Bermotor Udara	20	5,00%
1	3	2	9	Alat Bengkel Bermesin	10	10,00%
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5	20,00%
1	3	2	11	Alat Ukur	5	20,00%
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4	25,00%
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4	25,00%
1	3	2	14	Alat Kantor	5	20,00%
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5	20,00%
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4	25,00%
1	3	2	17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5	20,00%
1	3	2	18	Alat Studio	5	20,00%
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5	20,00%
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10	10,00%
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5	20,00%
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5	20,00%
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8	12,50%
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktik Sekolah	10	10,00%
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15	6,67%
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15	6,67%
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10	10,00%
1	3	2	28	<i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)</i>	10	10,00%
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7	14,29%
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15	6,67%
1	3	2	31	Senjata Api	10	10,00%
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3	33,33%
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5	20,00%
1	3	3		Gedung dan Bangunan		
1	3	3	1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	2,00%
1	3	3	2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	2,00%
1	3	3	3	Bangunan Menara	40	2,50%
1	3	3	4	Bangunan Bersejarah	50	2,00%
1	3	3	5	Tugu Peringatan	50	2,00%
1	3	3	6	Candi	50	2,00%
1	3	3	7	Monumen/Bangunan Bersejarah	50	2,00%
1	3	3	8	Tugu Peringatan Lain	50	2,00%
1	3	3	9	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50	2,00%
1	3	3	10	Rambu-Rambu	50	2,00%
1	3	3	11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50	2,00%
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
1	3	4	1	Jalan	10	10,00%
1	3	4	2	Jembatan	50	2,00%
1	3	4	3	Bangunan Air Irigasi	50	2,00%
1	3	4	4	Bangunan Air Pasang Surut	50	2,00%
1	3	4	5	Bangunan Air Rawa	25	4,00%
1	3	4	6	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10	10,00%
1	3	4	7	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30	3,33%
1	3	4	8	Bangunan Air Bersih/Baku	40	2,50%
1	3	4	9	Bangunan Air Kotor	40	2,50%



Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)	Proporsi Penyusutan/ Tahun
1	3	4	10	Bangunan Air	40	2,50%
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30	3,33%
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30	3,33%
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10	10,00%
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10	10,00%
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40	2,50%
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40	2,50%
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30	3,33%
1	3	4	18	Instalasi Gas	30	3,33%
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20	5,00%
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30	3,33%
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40	2,50%
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20	5,00%
1	3	4	23	Jaringan Gas	30	3,33%

- 5) Formula penghitungan penyusutan aset tetap/barang milik daerah adalah sebagai berikut.

$$\text{Penyusutan Per Periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

- 6) Aset Tetap berikut tidak disusutkan, yaitu tanah, konstruksi dalam pengerjaan buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman.
- 7) Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
- 8) Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya, berupa :
- a) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
 - b) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- 9) Besarnya penyusutan setiap tahun dicatat dalam neraca dengan menambah nilai akumulasi penyusutan dan mengurangi ekuitas. Neraca menyajikan Akumulasi Penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap sehingga nilai buku aset tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat diketahui.
- 10) Penyusutan disajikan di Neraca sebesar akumulasi nilai penyusutannya.



Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

Penilaian kembali (taksiran terhadap nilai perolehan) atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional, dan atau berdasarkan kebijakan Kepala Daerah dengan alasan dan pertimbangan yang wajar dan dapat diterima secara umum.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

- 1) Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang.
- 2) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Aset Tetap Hilang

- 1) Aset tetap hilang harus dikeluarkan dari neraca setelah diterbitkannya penetapan oleh pimpinan entitas yang bersangkutan berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terhadap aset tetap yang hilang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan proses untuk mengetahui apakah terdapat unsur kelalaian sehingga mengakibatkan adanya tuntutan ganti rugi.
- 2) Aset tetap hilang dikeluarkan dari neraca sebesar nilai buku.

Reklasifikasi Aset Tetap

- 1) Pemindahan kelompok aset tetap ke aset lainnya dalam akuntansi disebut sebagai reklasifikasi aset.
- 2) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya



Koreksi Aset Tetap

- a) Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
- b) Koreksi aset tetap dilakukan dengan menambah atau mengurangi akun aset tetap yang bersangkutan.

Pengungkapan Aset Tetap

- 1) Laporan keuangan harus mengungkapkan masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut.
 - a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - (1) penambahan;
 - (2) pelepasan;
 - (3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai (jika ada); dan
 - (4) mutasi aset tetap lainnya.
 - c) Informasi penyusutan, meliputi:
 - (1) Nilai penyusutan;
 - (2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - (3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - (4) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- 2) Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - c) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap;
 - d) Kebijakan tentang penambahan masa manfaat memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja.
- 3) Selain itu pada akhir periode akuntansi perlu diungkapkan juga informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan, antara lain:
 - a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;



- b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
 - c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
 - d) Uang muka kerja yang diberikan; dan
 - e) Retensi.
- 4) Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali (nilai taksiran perolehan), hal-hal berikut harus diungkapkan:
- a) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 - b) Tanggal efektif penilaian kembali;
 - c) Jika perlu, nama penilai independen;
 - d) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
 - e) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.
- 5) Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

f. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

Definisi dan Klasifikasi Dana Cadangan

- a. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana Cadangan disisihkan dalam beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa datang.
- b. Dana Cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).
- c. Pengelolaan Dana Cadangan adalah penempatan Dana Cadangan sebelum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Portofolio tersebut antara lain Deposito, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Surat Utang Negara (SUN), dan surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah.
- d. Dana cadangan masuk kedalam bagian dari aset. Dana cadangan dapat diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya.



Pengakuan Dana Cadangan

Dana Cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

Pengukuran Dana Cadangan

1. Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan.
2. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal yang diterima.

Penyajian dan Pengungkapan Dana Cadangan

1. Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non Lancar.
2. Hasil pengelolaan Dana Cadangan dicatat dalam Lain-lain PAD yang Sah sebagai Pendapatan LRA dan Pendapatan LO.
3. Pencairan Dana Cadangan disajikan dalam LRA sebagai penerimaan pembiayaan.
4. Pembentukan Dana Cadangan disajikan dalam LRA sebagai Pengeluaran pembiayaan.
5. Pencairan Dana Cadangan disajikan di Laporan Arus Kas (LAK) dalam kelompok arus masuk kas dari aktivitas investasi.
6. Pembentukan Dana Cadangan disajikan di Laporan Arus Kas (LAK) dalam kelompok arus kas keluar dari aktivitas investasi.
7. Pengungkapan Dana Cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut.
 - a) Peraturan daerah pembentukan Dana Cadangan;
 - b) Tujuan pembentukan Dana Cadangan;
 - c) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan;
 - d) Besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening Dana Cadangan;
 - e) Sumber Dana Cadangan; dan
 - f) Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan Dana Cadangan.



g. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Definisi dan Klasifikasi Aset Lainnya

- a. Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
- b. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah:
 - 1) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
 - 2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
 - 3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
 - 4) Aset Tidak Berwujud (diatur dalam kebijakan akuntansi tersendiri); dan
 - 5) Aset Lain-lain.

Pengakuan Aset Lainnya

1. Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:
 - a) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
 - b) Diterima atau kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah.
2. Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat timbulnya penjualan angsuran dan dapat diukur dengan andal.
5. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diakui pada saat ditetapkan Tuntutan Perbendaharaan (TP) atau Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan dapat diukur dengan andal.
6. Aset Kerja sama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerja sama/kemitraan.
7. Aset Kerja sama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSG, diakui pada saat



pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.

Pengukuran Aset Lainnya

- a. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- b. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.
- c. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.
- d. Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
- e. Kerja sama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
- f. Penyerahan/pengembalian aset Bangun, Kelola, Serah (BKS) atau Bangun Guna Serah (BGS) atau *Build, Operate, Transfer* (BOT) oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian sebagai berikut.
- g. Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai Aset Tetap.
- h. Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.
- i. Bangun Serah Kelola (BSK) atau Bangun Serah Guna (BSG) atau *Build, Transfer, Operate* (BTO) dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.



- j. Aset kerja sama/kemitraan selain tanah harus dilakukan penyusutan selama masa kerja sama. Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka Bangun Guna Serah (BGS) melanjutkan masa penyusutan aset sebelum direklasifikasi menjadi aset kemitraan. Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka Bangun Serah Guna (BSG) adalah selama masa kerja sama.
- k. Aset Lainnya yang berasal dari reklasifikasi Aset Tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan Aset Tetap.
- l. Proses penghapusan terhadap aset lain - lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

Penyajian dan Pengungkapan Aset Lainnya

- 1) Aset kerja sama/kemitraan disajikan dalam neraca sebagai aset lainnya.
- 2) Dalam hal sebagian dari luas aset kemitraan (tanah dan atau gedung/bangunan), sesuai perjanjian, digunakan untuk kegiatan operasional Perangkat Daerah, harus diungkapkan dalam CaLK.
- 3) Sehubungan dengan pengungkapan yang lazim untuk aset, pengungkapan berikut harus dibuat untuk aset kerja sama/kemitraan:
 - a) Klasifikasi aset yang membentuk aset kerja sama
 - b) Penentuan biaya perolehan aset kerja sama/kemitraan
 - c) Penentuan depresiasi/penyusutan aset kerja sama/kemitraan.
 - d) Setelah aset diserahkan dan ditetapkan penggunaannya, aset hasil kerja sama disajikan dalam neraca dalam klasifikasi aset tetap.
- 4) Pengungkapan aset lainnya dalam Catatan atas Laporan Keuangan, sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut.
 - a) Rincian aset lainnya;
 - b) Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);
 - c) Informasi lainnya yang penting.

**h. Kebijakan Akuntansi Kewajiban**Definisi dan Klasifikasi Kewajiban

- a) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
- b) Berdasarkan jatuh temponya, kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
- c) Kewajiban berdasarkan sumber dana atau pemberi pinjaman dapat berasal dari dalam negeri dan dari luar negeri. Pinjaman dari dalam negeri akan disajikan dalam kelompok utang dalam negeri. Pinjaman yang diperoleh dari luar negeri tidak diatur dalam kebijakan ini karena merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Pengakuan Kewajiban

- 1) Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
- 2) Kewajiban dapat timbul dari:
 - a) Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
 - b) Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
 - c) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*);
 - d) Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).
- 3) Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.
- 4) Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.
- 5) Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban



mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah, pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

- 6) Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
- 7) Kewajiban jangka pendek diakui pada saat prestasi diterima oleh Pemerintah Daerah namun belum dilakukan pembayaran dan/atau pada saat kewajiban tersebut timbul.
- 8) Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.
- 9) Kewajiban jangka panjang diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.
- 10) Pengakuan terhadap pos-pos kewajiban jangka panjang adalah saat ditanda tangannya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.

Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Penyajian dan Pengungkapan Kewajiban

- 1) Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut.
 - a) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
 - b) Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;



- c) Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- d) Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
- 2) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - a) Pengurangan pinjaman;
 - b) Modifikasi persyaratan utang;
 - c) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - d) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - e) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - f) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
- 3) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
- 4) Biaya pinjaman:
 - a) Perlakuan biaya pinjaman;
 - b) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - c) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

i. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Definisi dan Klasifikasi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

Pengukuran dan Penyajian Ekuitas

- 1) Perubahan Ekuitas.
- 2) Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya
- 3) Saldo ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh surplus/defisit Laporan Operasional dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi aset tetap dan lain-lain.
- 4) Ekuitas Saldo Anggaran Lebih digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja,



Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/ Defisit-LRA.

- 5) Ekuitas untuk Dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup antara lain rekening koran.
- 6) Ekuitas disajikan pada neraca sebesar nilai yang berasal dari ekuitas akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas.

i. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA

Definisi dan Klasifikasi Pendapatan LRA

- 1) Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- 2) Pendapatan LRA adalah semua penerimaan yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Yang termasuk Pendapatan - LRA tidak melalui RKUD adalah Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah, Pendapatan Dana Kapitasi, Pendapatan Dana Bantuan Operasional Kesehatan, Pendapatan Dana Bantuan Operasional Sekolah, Pendapatan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendapatan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan, Pendapatan Dana Program Pengelolaan Penyakit Kronis, Pendapatan Transfer Dana Desa dan Pendapatan Lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- 3) Pendapatan diklasifikasikan sebagai berikut.
 - a) Pendapatan Asli Daerah
 - (1) Pajak Daerah
 - (2) Retribusi Daerah
 - (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - (4) Lain-lain PAD yang Sah
 - b) Pendapatan Dana Perimbangan/ Pendapatan Transfer
 - (1) Bagi Hasil/DAU/DAK/Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
 - (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya



- (3) Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
- (4) Bantuan Keuangan
- c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
 - (1) Pendapatan Hibah
 - (2) Dana Darurat
 - (3) Pendapatan Lainnya

Pengakuan Pendapatan LRA

- 1) Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat:
 - a) Pendapatan telah diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
 - b) Pendapatan telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan ketentuan penerimaan tersebut telah disahkan oleh BUD.
 - c) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan digunakan langsung tanpa disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkan kepada Bendahara Umum Daerah. Kas atas pendapatan tersebut meliputi kas atas pendapatan Badan Layanan Umum Daerah, kas atas Pendapatan Dana Kapitasi, kas atas Pendapatan Dana Bantuan Operasional Kesehatan, kas atas Pendapatan Dana Bantuan Operasional Sekolah, kas atas Pendapatan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, kas atas Pendapatan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan, Pendapatan Dana Program Pengelolaan Penyakit Kronis, dan kas atas Pendapatan Transfer Dana Desa.
 - d) Pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - e) Pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
- 2) Pengakuan pendapatan yang berasal dari kewenangan pemerintah memberikan perijinan tertentu yang jangka waktu perijinannya



melebihi satu periode akuntansi dilakukan satu kali pada saat ijin tersebut.

Pengukuran Pendapatan LRA

- 1) Pendapatan LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 2) Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- 3) Pengecualian asas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada Pemerintah Daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat
- 4) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan LRA

- 1) Pendapatan LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.
- 2) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan LRA adalah:
 - a) penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b) penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - c) penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
 - d) informasi lainnya yang dianggap perlu.

j. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LO

Definisi dan Klasifikasi Pendapatan LO

Pendapatan Laporan Operasional adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pengakuan Pendapatan LO

- 1) Pendapatan Laporan Operasional diakui pada saat:



- a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
 - b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
- 2) Pengakuan pendapatan - LO pada Pemerintah Kabupaten Belu dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:
- a. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;
 - b. Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;
 - c. Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro;
 - d. Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assesment* di mana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan);
 - e. Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemda tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.
- 3) Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.
- 4) Pendapatan - LO berupa hibah barang diakui pada saat barang diterima oleh Pemerintah Daerah dengan disertai Berita Acara Serah Terima Barang.
- 5) Pendapatan atas realisasi dana BOS diakui dan dicatat oleh BUD selaku PPKD berdasarkan pengesahan atas Surat Pengesahan Pendapatan Hibah (SP2H) oleh BUD.
- 6) Pengakuan Pendapatan - LO dibagi menjadi dua yaitu:
- a. Pendapatan - LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan
- Pendapatan - LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat



diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan - LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

b. Pendapatan - LO diakui pada saat penyusunan Laporan Keuangan

1) Pendapatan - LO diakui sebelum penerimaan kas

Pendapatan - LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKPD/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu/Pergub) di mana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

2) Pendapatan - LO diakui setelah penerimaan kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan - LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

Pengukuran Pendapatan LO

- a) Pendapatan - LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan - LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- c) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan LO

- 1) Pendapatan Laporan Operasional disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari



Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

2) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan - LO adalah:

- a. penerimaan Pendapatan Laporan Operasional Tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. penjelasan mengenai Pendapatan Laporan Operasional yang pada Tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. koreksi dan pengembalian pendapatan yang mempengaruhi jumlah Pendapatan Laporan Operasional;
- d. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
- e. penjelasan mengenai pendapatan Laporan Operasional non mekanisme APBD seperti Hibah, Bansos, dan Bantuan Keuangan baik berupa uang atau barang dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, yang langsung ke Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis yang memberikan kontribusi terhadap kinerja Perangkat Daerah dan Pemda; dan
- f. informasi lainnya yang dianggap perlu.

k. Kebijakan Akuntansi Belanja

Definisi dan Klasifikasi Belanja

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Yang termasuk pengeluaran yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah adalah belanja pada Badan Layanan Umum Daerah, belanja Dana Kapitasi, Belanja Dana Bantuan Operasional Kesehatan, belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah, belanja Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, belanja Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesenakaraan, belanja Dana Program Pengelolaan Penyakit Kronis, belanja Transfer Dana Desa dan



belanja Lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

c. Belanja daerah diklasifikasikan menurut:

- 1) Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna Anggaran.
- 2) Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas

Pengakuan Belanja

1. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
3. dalam hal pengeluaran yang sumber dananya berasal dari luar Rekening Kas Umum Daerah seperti pengeluaran melalui bendahara Badan Layanan Umum Daerah, bendahara Dana Kapitasi, Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan, Bendahara Bantuan Operasional Sekolah, Bendahara Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bendahara Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesenak, Bendahara Dana Program Pengelolaan Penyakit Kronis, Kaur Keuangan Desa, belanja diakui pada saat diterbitkan Surat Pengesahan oleh Bendahara Umum Daerah dengan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

Pengukuran Belanja

1. Belanja diukur berdasarkan realisasi belanja menurut klasifikasi yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran.
2. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
3. Penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, pengembalian tersebut dibukukan sebagai pendapatan LRA dalam pos pendapatan lain-lain LRA.
4. Belanja diukur dan disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka



pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Penyajian dan Pengungkapan Belanja

- 1) Realisasi belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
- 2) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja antara lain:
 - a. Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - b. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.
 - c. Penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang diperlukan.

I. Kebijakan Akuntansi Beban

Definisi dan Klasifikasi Beban

- a) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b) Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO).
- c) Klasifikasi ekonomi untuk beban pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

Pengakuan Beban

1. Beban diakui pada:
 - a. Saat timbulnya kewajiban;
 - b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
 - c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
2. Bila dikaitkan dengan saat pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
 - a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
 - b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
 - c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.



Pengukuran Beban

- a. Akuntansi beban dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan beban bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikurangi dengan pengeluaran pajak).
- b. Beban diukur berdasarkan:
 - 1) harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
 - 2) taksiran nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.
- c. Beban diukur dengan menggunakan satuan mata uang rupiah, transaksi dalam mata uang asing dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Penyajian dan Pengungkapan Beban

1. Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
2. Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.
3. Belanja Barang dan Jasa yang pada realisasinya digunakan untuk pengadaan Aset Tetap dengan nilai diatas ketentuan kapitalisasi, tidak dinyatakan sebagai Beban LO, karena Aset Tetap tersebut telah dicatat pada Kartu Inventaris Barang terkait dan dilakukan penyusutan pada tahun berkenaan sebagai beban penyusutan.
4. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:
 - a. Pengeluaran beban tahun berkenaan, disesuaikan dengan Bagan Akun Standar yang ditetapkan.
 - b. Beban lain-lain atas Aset Tetap yang nilainya di bawah batasan kapitalisasi dan dicatat secara ekstrakomptabel, tidak dicatat dalam KIB dan tidak dilakukan penyusutan.
 - c. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja dengan pengakuan beban.
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.



m. Kebijakan Akuntansi Transfer

Definisi dan Klasifikasi Transfer

- 1) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- 2) Transfer diklasifikasikan menurut sumber dan entitas penerimanya, yaitu mengelompokkan transfer berdasarkan sumber transfer untuk pendapatan transfer dan berdasarkan entitas penerima untuk transfer/beban transfer sesuai BAS.

Pengakuan Transfer

- 1) Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
- 2) Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
 - b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)
- 3) Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Transfer Keluar diakui pada saat terjadinya pengeluaran Kas dari Rekening Kas Umum Daerah.
- 5) Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.
- 6) Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah yang menyatakan



kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

- 7) Pengakuan terhadap kurang atau lebih salur transfer ditentukan berdasarkan tanggal diketahuinya. Apabila kurang atau lebih salur diketahui pada periode berjalan, jumlah kurang atau lebih salur dimaksud diakui sebagai penambah atau pengurang beban transfer tahun berjalan.

Pengukuran Transfer

- a) Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b) Pengukuran transfer keluar dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal sebagaimana tercantum dalam dokumen yang sah

Penyajian dan Pengungkapan Transfer

1. Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut.
 - a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya
 - b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya.
 - c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional.
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.
2. Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut.
 - 1) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya.
 - 2) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya.



3) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional.

4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

n. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Definisi dan Klasifikasi Pembiayaan

1) Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

2) Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas:

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengakuan Pembiayaan

- 1) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- 2) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran Pembiayaan

- 1) Pembiayaan dinilai berdasarkan realisasi penerimaan atau pengeluaran kas yang telah diterima atau dikeluarkan.
- 2) Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)
- 3) Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.
- 4) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.



Penyajian dan Pengungkapan Pembiayaan

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:

- 1) Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan.
- 2) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.

o. Kebijakan Akuntansi Bantuan Sosial

Definisi dan Klasifikasi Bantuan Sosial

- 1) Bantuan sosial merupakan pengeluaran dalam bentuk uang maupun barang/jasa kepada masyarakat yang bertujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif.
- 2) Bantuan Sosial dalam arti yang lebih luas, mencakup semua aktivitas dalam rangka kesejahteraan sosial, baik berbentuk rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial dan penanggulangan sosial.
- 3) Belanja Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
- 4) Pemberian bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan.
- 5) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. Anggota/kelompok masyarakat tersebut diatas meliputi:
 - a) individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;



- b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
- 6) Bentuk pemberian sosial berupa uang, barang, atau jasa yang diterima langsung atau tidak langsung oleh penerima bantuan sosial.
- 7) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD. Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD. Jumlah pagu usulan kepala SKPD paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu bantuan sosial yang berdasarkan usulan dari calon penerima. Tata cara pengajuan usulan kepala SKPD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
- 8) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan. Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.

Pengakuan Bantuan Sosial

Pengakuan belanja bantuan sosial dikaitkan dengan pengeluaran kas, sehingga belanja bantuan sosial hanya diakui untuk belanja yang dikeluarkan dalam bentuk uang yang dianggarkan dalam tahun anggaran tersebut atau dalam bentuk barang/jasa yang dianggarkan dan dibeli pada tahun anggaran bersangkutan.

Pengukuran Bantuan Sosial

- 1) Belanja bantuan sosial diukur sebesar nilai belanja bantuan sosial yang direalisasikan. Realisasi belanja bantuan sosial diukur sebesar jumlah pengeluaran untuk pembayaran belanja Bantuan Sosial.
- 2) Beban bantuan sosial diukur sebesar nilai bantuan sosial berupa uang/barang/jasa yang telah diserahkan kepada masyarakat penerima Bantuan Sosial.

Penyajian dan Pengungkapan Bantuan Sosial

- 1) Belanja bantuan sosial disajikan sebagai pengeluaran belanja pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan sebagai beban pada Laporan Operasional (LO).



- 2) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada Laporan Realisasi Anggaran dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- 3) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:
 - a) Belanja bantuan sosial seperti barang atau jasa terkait dengan kejelasan peruntukannya.
 - b) Jenis, jumlah, dan nilai belanja bantuan sosial tidak dicantumkan dalam neraca cukup dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - c) Informasi lain yang dianggap penting.

p. Kebijakan Akuntansi Hibah

Definisi dan Klasifikasi Hibah

- 1) Pendapatan hibah adalah penerimaan daerah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang berasal berharga yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah lain, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan yang tidak perlu dibayar kembali.
- 2) Belanja hibah adalah belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa yang dapat diberikan kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, pemerintah pusat/daerah, perusahaan negara/daerah, kelompok masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- 3) Beban hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
- 4) Hibah barang adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah pusat/pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
- 5) Menurut mekanisme penganggaran, pendapatan hibah, terdiri atas:



- a) Hibah yang direncanakan
- b) Hibah langsung
- 6) Pendapatan hibah menurut sumbernya, yakni:
 - a) Pendapatan hibah dalam negeri yang berasal dari:
 - (1) Pemerintah pusat bila diterima oleh pemerintah daerah;
 - (2) Pemerintah daerah bila diterima oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya;
 - (3) Institusi/lembaga di dalam negeri termasuk masyarakat dan kelompok masyarakat.
 - b) Pendapatan hibah luar negeri yang berasal dari:
 - (1) Negara asing;
 - (2) Lembaga donor multilateral;
 - (3) Lembaga keuangan asing; dan
 - (4) Lembaga non keuangan asing.
- 7) Belanja hibah diklasifikasikan menurut pihak yang menerima hibah, yaitu:
 - a) Belanja hibah kepada pemerintah negara lain atau pemerintah lainnya. Misalnya hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau sebaliknya. Belanja hibah juga dapat diberikan kepada pemerintah negara lain dan pemerintah daerah lainnya;
 - b) Belanja hibah kepada perusahaan negara/daerah;
 - c) Belanja hibah kepada organisasi internasional;
 - d) Belanja hibah kepada kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.
- 8) Seluruh belanja hibah bersifat terencana. Pada pemerintah daerah dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Pagu Anggaran Sementara-APBD. Belanja hibah diberikan oleh unit yang menurut peraturan perundang-undangan diberikan kewenangan pemerintah mengatur mekanisme belanja hibah.

Pengakuan Hibah

- 1. Pendapatan hibah berbasis akrual diakui pada saat:
 - a. Pendapatan tersebut dapat diidentifikasi secara spesifik;
 - b. Besar kemungkinan bahwa sumber daya tersebut dapat ditagih; dan
 - c. Jumlahnya dapat diestimasi secara andal.



2. Pendapatan hibah - LO diakui pada saat dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian hibah.
3. Pengakuan beban pada akuntansi berbasis akrual terjadi pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
4. Beban hibah diakui pada saat dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian hibah.

Pengukuran Hibah

- 1) Pendapatan hibah dalam bentuk kas dicatat sebesar nilai nominal hibah diterima atau menjadi hak. Sedangkan pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai barang/jasa yang diserahkan berdasarkan berita acara serah terima, dan jika data tersebut tidak dapat diperoleh, maka dicatat berdasarkan nilai wajar.
- 2) Hibah yang diterima dalam bentuk barang/jasa dinilai dengan mata uang rupiah pada saat serah terima barang/jasa untuk dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- 3) Hibah yang diterima dalam bentuk surat berharga dinilai dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang disepakati pada saat serah terima oleh pemberi hibah dan pemerintah untuk dicatat di dalam Laporan Keuangan.
- 4) Belanja hibah dicatat sebesar nilai nominal yang dikeluarkan atau menjadi kewajiban hibah.

Penyajian dan Pengungkapan Hibah

1. Pengeluaran hibah selain disajikan di Laporan Realisasi Anggaran sebagai belanja hibah, juga disajikan sebagai beban hibah di Laporan Operasional.
2. Realisasi hibah berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada Laporan Realisasi Anggaran dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Jenis informasi atas transaksi hibah yang dapat dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan, antara lain:
 - a) Kebijakan akuntansi yang digunakan;
 - b) Penjelasan pencapaian transaksi hibah terhadap target yang ditetapkan dalam APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target selama tahun pelaporan;
 - c) Informasi rinci tentang sumber-sumber atau jenis-jenis hibah;



d) Informasi rinci tentang penerima hibah;

e) Informasi penting lainnya.

q. Kebijakan Akuntansi Aset Tak Berwujud (ATB)

Definisi dan Klasifikasi Aset Tak Berwujud

a. Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas.

b. Berdasarkan jenis sumber daya, ATB terdiri dari:

1. *Goodwill*

2. Hak Paten atau Hak Cipta

3. Royalti

4. *Software*

5. Lisensi dan *Franchise*

6. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

7. Aset Tak Berwujud Lainnya

8. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

c. Cara perolehan ATB dapat diperoleh melalui:

1. Pembelian

2. Pengembangan secara internal

3. Pertukaran

4. Kerja sama

5. Donasi/hibah

6. Warisan Budaya/Sejarah (*intangible heritage assets*)

d. Berdasarkan masa manfaatnya, ATB dibedakan atas:

1. ATB dengan umur manfaat terbatas (*finite life*)

2. ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (*indefinite life*)

e. Aset Tidak Berwujud (ATB) harus memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan.



Pengakuan Aset Tak Berwujud

1. Pada pengakuan awal ATB akan diakui sebesar biaya perolehan untuk ATB yang berasal dari transaksi pertukaran atau untuk ATB yang dihasilkan dari internal entitas.
2. Nilai wajar digunakan untuk ATB yang diperoleh melalui transaksi bukan pertukaran.
3. Pengeluaran setelah pengakuan awal diakui sebesar biaya yang dikeluarkan untuk menambah dan mengganti ATB yang memenuhi kriteria pengakuan ATB.
4. Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud *jika dan hanya jika*:
 - a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
 - b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Pengukuran Aset Tak Berwujud

Secara umum, ATB pada awalnya diukur dengan harga perolehan, kecuali ketika ATB diperoleh dengan cara selain pertukaran diukur dengan nilai wajar.

Amortisasi

1. Amortisasi adalah suatu penurunan atau pengurangan nilai Aset Tidak Berwujud (ATB) setiap periode akuntansi.
2. Amortisasi hanya dapat diterapkan atas ATB yang memiliki masa manfaat terbatas dan pada umumnya ditetapkan dalam jumlah yang sama pada periode, atau dengan suatu basis alokasi garis lurus/metode garis lurus.
3. Metode amortisasi yang digunakan pada pemerintah Kabupaten Belu adalah metode garis lurus dan masa manfaat/umur ekonomis ditetapkan selama 5 tahun.
4. ATB dengan masa manfaat tidak terbatas (seperti *goodwill*) tidak boleh diamortisasi.

Penyajian dan Pengungkapan Aset Tak Berwujud

- 1) Aset Tak Berwujud disajikan pada lembar muka Neraca sebagai bagian dari Aset Lainnya sebesar nilai tercatat netto, yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.



- 2) Laporan keuangan harus mengungkapkan hal-hal sebagai berikut untuk setiap golongan aset tak berwujud, dengan membedakan antara aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal dan aset tak berwujud lainnya:
 - a. Masa manfaat atau tingkat amortisasi yang digunakan. Apakah masa manfaatnya terbatas atau tidak terbatas;
 - b. Metode amortisasi yang digunakan, jika aset tak berwujud tersebut terbatas masa manfaatnya;
 - c. Rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;
 - d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;
 - e. ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan (*impaired*);
 - f. Penghentian dan penghapusan ATB; dan
 - g. Rekonsiliasi nilai tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan aset tak berwujud yang terjadi, dengan mengungkapkan secara terpisah penambahan yang berasal dari pengembangan di dalam entitas;
 - 2) Penghentian dan pelepasan aset tak berwujud;
 - 3) Amortisasi yang diakui selama periode berjalan;
 - 4) Perubahan lainnya dalam nilai tercatat selama periode berjalan.
- 3) Disamping informasi-informasi di atas, entitas juga perlu melaporkan perubahan-perubahan terhadap:
 - a. Periode amortisasi;
 - b. Metode amortisasi.
- 4) Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan:
 - a. Alasan penentuan atau faktor-faktor penting penentuan masa manfaat suatu aset tak berwujud;
 - b. Penjelasan, nilai tercatat, dan periode amortisasi yang tersisa dari setiap aset tak berwujud yang material bagi laporan keuangan secara keseluruhan;
 - c. Keberadaan ATB yang dimiliki bersama.
 - d. Laporan Keuangan harus mengungkapkan jumlah keseluruhan pengeluaran riset dan pengembangan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan. Pengeluaran riset dan pengembangan



terdiri atas semua pengeluaran yang dapat dikaitkan secara langsung dengan kegiatan riset dan pengembangan atau yang dapat dialokasikan, secara rasional dan konsisten pada kegiatan-kegiatan tersebut.

- 5) Entitas juga perlu mengungkapkan gambaran mengenai setiap aset tak berwujud yang sudah sepenuhnya diamortisasi yang masih digunakan.

r. Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir

Definisi dan Klasifikasi Dana Bergulir

- 1) Dana bergulir adalah dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.
- 2) Kualitas dana bergulir adalah hampiran atas ketertagihan dana bergulir yang diukur berdasarkan umur dana bergulir dan/atau upaya tagih pemerintah daerah kepada debitur;
- 3) Nilai realisasi bersih (*net realizable value*) dana bergulir adalah jumlah bersih dana bergulir yang diperkirakan dapat ditagih.
- 4) Penghapusbukuan dana bergulir adalah pengurangan dana bergulir dan penyisihan dana bergulir tidak tertagih yang tercatat dalam neraca.
- 5) Penghapustagihan dana bergulir adalah hilangnya hak tagih dan/atau hak menerima tagihan atas dana bergulir.
- 6) Penyaluran Dana Bergulir dilaksanakan sebagai berikut.
 1. Dana bergulir kelola sendiri/langsung;
 2. Dana bergulir dengan *executing agency*; dan
 3. Dana bergulir dengan *chanelling agency*.
- 7) Pengelolaan dana bergulir dapat dilakukan oleh Satuan Kerja di di bawah BUD dan Badan Layanan Umum Daerah/BLUD. Perbedaan pengelolaan dana yang dilakukan oleh Satuan Kerja dan BLUD adalah pada pengelolaan pendapatannya.

Pengakuan Dana Bergulir

- 1) Investasi dana bergulir diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut.



- a) memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
 - b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).
- 2) Pengeluaran dana bergulir berupa hewan ternak yang digulirkan di masyarakat yang dinilai dengan uang, diakui atau dikelompokkan sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas, dicatat sebesar jumlah dana yang dikeluarkan dan disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir.

Pengukuran Dana Bergulir

- 1) Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir.
- 2) Pencatatan pertama kali dana bergulir sebesar dana yang digulirkan ke masyarakat ditambah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk perolehan dana bergulir.
- 3) Harga perolehan dana bergulir dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
- 4) Dana bergulir disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal dana bergulir dengan penyisihan dana bergulir.

Penyisihan Dana Bergulir

- 1) Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan berdasarkan kondisi dana bergulir pada tanggal laporan keuangan.
- 2) Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:
 - a) jatuh tempo dana bergulir; dan/atau
 - b) upaya penagihan.
- 3) Kualitas dana bergulir ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu:
 - a) kualitas lancar;
 - b) kualitas kurang lancar;
 - c) kualitas diragukan; dan
 - d) kualitas macet.



- 4) Penyisihan dana bergulir tidak tertagih, ditetapkan sebesar:
 - a) Kualitas lancar sebesar 0,5%;
 - b) Kualitas kurang lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c) Kualitas diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d) Kualitas macet sebesar 100% (seratus perseratus) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- 5) Pencatatan penyisihan dana bergulir tidak tertagih dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial penyisihan dana bergulir.
- 6) Dana bergulir dapat dihapuskan jika dana bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.
- 7) Penghapusan dana bergulir oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a) Penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir; dan
 - b) Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir.
- 8) Tata cara penghapusan dana bergulir dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyajian dan Pengungkapan Dana Bergulir

Disamping mencantumkan pengeluaran dana bergulir sebagai Pengeluaran Pembiayaan di Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas, dan Dana Bergulir di Neraca, perlu diungkapkan informasi lain dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain:

- 1) Dasar penilaian dana bergulir;
- 2) Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya;
- 3) Besarnya suku bunga yang dikenakan;
- 4) Saldo awal dana bergulir, penambahan/pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir; dan
- 5) Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir.



s. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan

Definisi

- 1) Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
- 2) Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
- 3) Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.
- 4) Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.

Koreksi Kesalahan

- 1) Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - a. Kesalahan yang tidak berulang;
 - b. Kesalahan yang berulang dan sistemik.
- 2) Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
 - b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
- 3) Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang.
- 4) Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan - LRA maupun pendapatan - LO yang bersangkutan.



- 5) Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.
- 6) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
- 7) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan - LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan - LO atau akun beban.
- 8) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan- LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan - LO atau akun beban.
- 9) Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.
- 10) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.
- 11) Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
- 12) Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan



menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Perubahan Estimasi Akuntansi

Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.

Operasi Yang Tidak Dilanjutkan

Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.

Peristiwa Luar Biasa

- 1) Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa entitas pemerintah daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.
- 2) Peristiwa luar biasa harus memenuhi seluruh persyaratan berikut.
 - a) Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
 - b) Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang; dan
 - c) Berada diluar kendali atau pengaruh entitas memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

t. Kebijakan Akuntansi Properti Investasi

Definisi

Properti investasi properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya dan tidak berlaku untuk:

- 1) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administratif atau:
- 2) dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.



Pengakuan

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

- 3) besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset property investasi;
- 4) biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan anda.

Penyajian

Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar dan disajikan secara terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.

Pengungkapan

Pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan mencakup hal-hal sebagai berikut.

- 1) dasar penilaian yang digunakan dalam menentukan nilai tercatat;
- 2) metode penyusutan yang digunakan;
- 3) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
- 4) jumlah tercatat bruto atau akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
- 5) rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode;
- 6) hasil revaluasi properti investasi;
- 7) informasi lain yang dianggap penting.

**BAB V****PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2024 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan masing-masing laporan tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

5.1 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah merupakan laporan yang menjelaskan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Belu yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Dalam penjelasan LRA ini akan disajikan sesuai dengan Struktur APBD yang meliputi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

5.1.1 PENDAPATAN - LRA

2024		2023
Anggaran	Realisasi	Realisasi
Rp1.027.588.617.705,00	Rp977.447.317.587,66	Rp962.945.480.794,95

Jumlah Anggaran Pendapatan - LRA Tahun 2024 sebesar Rp1.027.588.617.705,00 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belu Nomor 46 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belu Tahun 2024. Pendapatan ini dapat dicapai sebesar Rp977.447.317.587,66 atau 95,12% dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan realisasi pendapatan tahun anggaran 2024 tidak mencapai target Anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD sebesar Rp(50.141.300.117,34) atau (4,88)%.



Komposisi pencapaian realisasi pendapatan per kelompok pendapatan disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.1
Realisasi Pendapatan - LRA

No.	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	122.953.711.500,00	88.070.633.275,28	(34.883.078.224,72)	71,63	113.324.789.735,64
2	Pendapatan Transfer	891.132.538.036,00	877.295.842.987,30	(13.836.695.048,70)	98,45	835.457.591.512,31
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	13.502.368.169,00	12.080.841.325,08	(1.421.526.843,92)	89,47	14.163.099.547,00
	Jumlah	1.027.588.617.705,00	977.447.317.587,66	(50.141.300.117,34)	95,12	962.945.480.794,95

Dari informasi tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa pada Tahun Anggaran 2024 pendapatan daerah yang dikelola Pemerintah Kabupaten Belu mendekati target yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024 tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar Rp(34.883.078.224,72) atau kurang sebesar (28,37)%. Realisasi Pendapatan Transfer tidak mencapai target sebesar Rp(13.836.695.048,70) atau (1,55)% dari anggaran tahun 2024. Sementara Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah juga tidak mencapai target sebesar Rp(1.421.526.843,92) atau (10,53)% dari target Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2024.

Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp962.945.480.794,95 realisasi Tahun 2024 ini mengalami peningkatan sebesar Rp14.501.836.792,71 atau 1,51%. Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan sebesar Rp(25.254.156.460,36) Pendapatan Transfer meningkat sebesar Rp41.838.251.474,99 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami penurunan sebesar Rp(2.082.258.221,92).

5.1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA

2024		2023
Anggaran	Realisasi	Realisasi
Rp122.953.711.500,00	Rp88.070.633.275,28	Rp113.324.789.735,64

Akun ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode Tahun Anggaran 2024. Realisasi PAD tahun 2024 sebesar Rp88.070.633.275,28 atau mencapai 71,63% dari target sebesar Rp122.953.711.500,00. Jika dibandingkan dengan



realisasi tahun 2023, realisasi tahun 2024 ini mengalami penurunan sebesar Rp(25.254.156.460,36) atau turun (22,28)%. Penurunan terbesar terlihat pada komponen PAD yaitu Lain-lain PAD Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.2
Realisasi Pendapatan Asli Daerah - LRA

No.	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	30.390.810.812,00	19.194.087.650,00	(11.196.723.162,00)	63,16	20.563.777.908,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	11.063.462.000,00	4.934.589.739,00	(6.128.872.261,00)	44,60	5.112.694.483,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	7.460.997.860,00	3.480.688.664,00	(3.980.309.196,00)	46,65	6.529.604.943,00
4	Lain-Lain PAD yang Sah	74.038.440.828,00	60.461.267.222,28	(13.577.173.605,72)	81,66	81.118.712.401,64
	Jumlah	122.953.711.500,00	88.070.633.275,28	(34.883.078.224,72)	71,63	113.324.789.735,64

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LRA

2024		2023
Anggaran	Realisasi	Realisasi
Rp30.390.810.812,00	Rp19.194.087.650,00	Rp20.563.777.908,00

Pendapatan Pajak Daerah adalah kontribusi Wajib Pajak (WP) kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemungutan pajak daerah tahun 2024 didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. SKPD yang melakukan pengelolaan pendapatan pajak daerah dan pemungutannya pada tahun 2024 adalah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Belu.

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah tahun 2024 sebesar Rp19.194.087.650,00 atau mencapai 63,16% dari target pajak daerah sebesar Rp30.390.810.812,00. Secara keseluruhan, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, realisasi pajak daerah mengalami penurunan sebesar Rp(1.369.690.258,00) atau turun sebesar (6,66)%. Namun terdapat beberapa jenis pajak daerah yang mengalami penurunan signifikan yakni pajak reklame turun (29,02)%, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) turun (32,33)% dan Bea Perolehan atas Hak Tanah dan



Bangunan (BPHTB) turun (21,28%). Rincian pendapatan dari pajak daerah diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.3
Realisasi Pendapatan Pajak Daerah - LRA

No.	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	PBJT-Jasa Perhotelan	850.000.000,00	864.822.388,00	14.822.388,00	101,74	-
2	Pajak Hotel	-	-	-	-	743.601.993,00
3	PBJT- Makanan dan/atau Minuman	4.247.280.000,00	4.413.357.117,00	166.077.117,00	103,91	-
4	Pajak Restoran	-	-	-	-	3.681.221.488,00
5	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	20.500.000,00	34.373.669,00	13.873.669,00	167,68	-
6	Pajak Hiburan	-	-	-	-	9.408.000,00
7	Pajak Reklame	607.000.000,00	234.395.123,00	(372.604.877,00)	38,62	384.375.969,00
8	PBJT- Tenaga Listrik	5.400.000.000,00	5.362.781.905,00	(37.218.095,00)	99,31	-
9	Pajak Penerangan Jalan	-	-	-	-	5.218.947.324,00
10	PBJT- Jasa Parkir	1.000.000,00	398.000,00	(602.000,00)	39,80	-
11	Pajak Parkir	-	-	-	-	99.000,00
12	Pajak Air Tanah	20.000.000,00	13.638.820,00	(6.361.180,00)	68,19	16.849.794,00
13	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	13.574.046.883,00	3.654.662.344,00	(9.919.384.539,00)	26,92	5.400.624.236,00
14	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan	4.120.983.929,00	3.294.223.534,00	(826.760.395,00)	79,94	3.429.965.804,00
15	Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan	1.550.000.000,00	1.321.434.750,00	(228.565.250,00)	85,25	1.678.684.300,00
	Jumlah	30.390.810.812,00	19.194.087.650,00	(11.196.723.162,00)	63,16	20.563.777.908,00

5.1.1.1.1 PBJT-Jasa Perhotelan

Pada Tahun 2024, nomenklatur Pajak Hotel berubah menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-Jasa Perhotelan berdasarkan Peraturan Bupati Belu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sumber PBJT-Jasa Perhotelan di wilayah Kabupaten Belu berasal dari 12 unit hotel melati, 7 unit *homestay* dan 19 unit kost dengan kategori diatas 10 kamar.

Realisasi pendapatan PBJT-Jasa Perhotelan tahun 2024 sebesar Rp864.822.388,00 atau mencapai 101.74% dari target yang ditetapkan sebesar Rp850.000.000,00. Jika dibandingkan realisasi tahun 2023, realisasi jenis pajak ini ditahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp121.220.395,00 atau 16,30%. Rinciannya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4
Realisasi PBJT Jasa Perhotelan - LRA

No.	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Hotel Melati Tiga	0,00	0,00	0,00	0,00	638.453.913,00
2	Rumah Penginapan dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	0,00	55.295.080,00
3	Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 Kamar	0,00	0,00	0,00	0,00	49.853.000,00
4	PBJT-Hotel	750.000.000,00	796.048.708,00	46.048.708,00	106,14	0,00
5	PBJT-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel	100.000.000,00	68.773.680,00	(31.226.320,00)	68,77	0,00
	Jumlah	850.000.000,00	864.822.388,00	14.822.388,00	101,74	743.601.993,00

**5.1.1.1.1.2 PBJT- Makanan dan/atau Minuman**

Pada Tahun 2024, nomenklatur Pajak Restoran berubah menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-Makanan dan/atau Minuman berdasarkan Peraturan Bupati Belu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Realisasi pendapatan PBJT-Makanan dan/atau Minuman tahun 2024 sebesar Rp4.413.357.117,00 atau mencapai 103,91% dari target yang ditetapkan sebesar Rp4.247.280.000,00. Jika dibandingkan realisasi tahun 2023, realisasi jenis pajak ini ditahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp732.153.629,00 atau 19,89%. Rinciannya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.5
Realisasi PBJT Makanan dan/atau Minuman - LRA

No.	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Restoran dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	0,00	697.718.075,00
2	Rumah Makan dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360.966.825,00
3	Warung Dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	0,00	622.536.588,00
4	PBJT-Restoran	4.247.280.000,00	4.413.357.117,00	166.077.117,00	103,91	0,00
	Jumlah	4.247.280.000,00	4.413.357.117,00	166.077.117,00	103,91	3.681.221.488,00

5.1.1.1.1.3 PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan

Pada Tahun 2024, nomenklatur Pajak Hiburan berubah menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-Kesenian dan Hiburan berdasarkan Peraturan Bupati Belu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Realisasi pendapatan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan tahun 2024 sebesar Rp34.373.669,00 atau sebesar 167,68% dari target yang ditetapkan sebesar Rp20.500.000,00. Jika dibandingkan realisasi tahun 2023, realisasi jenis pajak ini di tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp24.965.669,00 atau 265,37%. Rinciannya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.6
Realisasi PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan - LRA

No.	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	0,00	9.408.000,00
3	Permainan Biliar dan Bowling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	20.500.000,00	34.373.669,00	13.873.669,00	167,68	0,00
	Jumlah	20.500.000,00	34.373.669,00	13.873.669,00	167,68	9.408.000,00

**5.1.1.1.1.4 Pajak Reklame**

Pajak reklame di tahun 2024 berhasil direalisasikan sebesar Rp234.395.123,00 dari target sebesar Rp607.000.000,00 atau mencapai 38,62%. Realisasi ini ditopang oleh jenis pajak reklame papan/bilboard/videotron/megatron dengan jumlah sebesar Rp234.395.123,00. Sementara komponen pajak reklame kain dan reklame melekat/stiker tidak memberikan kontribusi atas realisasi atau 0,00%. Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2023 sebesar Rp384.375.969,00, realisasi tahun 2024 ini mengalami penurunan sebesar Rp(149.980.846,00) atau (39,02)%. Rincian realisasi pajak reklame disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.7
Pajak Reklame - LRA

No	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pajak Reklame Papan/ Bill Board/ Videotron/ Megatron	600.000.000,00	234.395.123,00	(365.604.877,00)	39,07	384.375.969,00
2	Pajak Reklame Kain	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	0,00
3	Pajak Reklame Melekat/Stiker	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	0,00
4	Pajak Reklame Berjalan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	607.000.000,00	234.395.123,00	(372.604.877,00)	38,62	384.375.969,00

5.1.1.1.1.5 PBJT-Tenaga Listrik

Pada Tahun 2024, nomenklatur Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain berubah menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)- Tenaga Listrik berdasarkan Peraturan Bupati Belu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan oleh PT PLN berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Belu dengan PT PLN Nomor 03 Tahun 2015 (003/KEU.03.01/Area-Kup/2015) tanggal 10 Maret 2015.

Pada tahun 2024, PBJT-Tenaga Listrik direalisasikan sebesar Rp5.362.781.905,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp5.400.000.000,00 atau mencapai 99,31%. Jika dibandingkan realisasi tahun 2023, realisasi jenis pajak ini di tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp143.834.581,00 atau 2,76%.

Rincian realisasi pajak penerangan jalan disajikan sebagai berikut.



Tabel 5.8
Realisasi PBJT Tenaga Listrik - LRA

No	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	0,00	0,00	0,00	0,00	5.218.947.324,00
2	PBJT-Tenaga Listrik	5.400.000.000,00	5.362.781.905,00	(37.218.095,00)	99,31	0,00
	Jumlah	5.400.000.000,00	5.362.781.905,00	(37.218.095,00)	99,31	5.218.947.324,00

5.1.1.1.1.6 PBJT- Jasa Parkir

Pada Tahun 2024, nomenklatur Pajak Parkir berubah menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-Jasa Parkir berdasarkan Peraturan Bupati Belu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Jenis pajak ini berhasil direalisasikan pada tahun 2024 sebesar Rp398.000,00 atau sebesar 39,80% dari target sebesar Rp1.000.000,00. Pendapatan pajak parkir ini bersumber dari parkir Sukaerlaran. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, pendapatan pajak parkir naik sebesar Rp299.000,00 atau 302,02%. Rincian realisasi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.9
Realisasi PBJT Jasa Parkir - LRA

No	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
2	PBJT-Jasa Parkir	1.000.000,00	398.000,00	(602.000,00)	39,80%	0,00
	Jumlah	1.000.000,00	398.000,00	(602.000,00)	39,80%	99.000,00

5.1.1.1.1.7 Pajak Air Tanah

Realisasi pajak air tanah tahun 2024 sebesar Rp13.638.820,00 dari target sebesar Rp20.000.000,00 atau hanya mampu mencapai 68,19%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, pendapatan pajak air bawah tanah turun sebesar Rp(3.210.974,00) atau (19,06)%. Rincian realisasi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.10
Realisasi Pajak Air Tanah - LRA

No	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pajak Air Bawah Tanah	20.000.000,00	13.638.820,00	(6.361.180,00)	68,19	16.849.794,00
	Jumlah	20.000.000,00	13.638.820,00	(6.361.180,00)	68,19	16.849.794,00

**5.1.1.1.1.8 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan berhasil direalisasikan pada tahun 2024 sebesar Rp3.654.662.344,00 dari target anggarannya sebesar Rp13.574.046.883,00 atau mencapai 26,92%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, pencapaian tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp(1.745.961.892,00) atau turun (32,33)%. Rincian realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.11
Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

No	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pasir dan Kerikil	5.500.000.000,00	1.090.509.849,00	(4.409.490.151,00)	19,83	1.259.555.628,00
2	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	8.074.046.883,00	2.564.152.495,00	(5.509.894.388,00)	31,76	4.141.068.808,00
	Jumlah	13.574.046.883,00	3.654.662.344,00	(9.919.384.539,00)	26,92	5.400.624.436,00

5.1.1.1.1.9 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada tahun 2024 dapat direalisasikan sebesar Rp3.294.223.534,00 dari target sebesar Rp4.120.983.929,00 atau mencapai 79,94%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, pencapaian ini mengalami penurunan sebesar Rp(135.742.270,00) atau turun (3,96)%. Rinciannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.12
Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LRA

No.	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	4.120.983.929,00	3.294.223.534,00	(826.760.395,00)	79,94	3.429.965.804,00
	Jumlah	4.120.983.929,00	3.294.223.534,00	(826.760.395,00)	79,94	3.429.965.804,00

5.1.1.1.1.10 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pada tahun 2024 realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp1.321.434.750,00 dari target sebesar Rp1.550.000.000,00 atau 85,25%. Jika



dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 maka terjadi penurunan sebesar Rp(357.249.550,00) atau turun (21,28)%. Rinciannya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.13
Realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LRA

No	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pajak Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan - Pemindahan Hak	1.390.000.000,00	1.318.187.200,00	(71.812.800,00)	94,83	1.667.784.300,00
2	Pajak Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan - Pemberian Hak Baru	160.000.000,00	3.247.550,00	(156.752.450,00)	2,03	10.900.000,00
	Jumlah	1.550.000.000,00	1.321.434.750,00	(228.565.250,00)	85,25	1.678.684.300,00

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

2024		2023
Anggaran	Realisasi	Realisasi
Rp11.063.462.000,00	Rp4.934.589.739,00	Rp5.112.694.483,00

Pendapatan Retribusi Daerah adalah pendapatan yang terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Belu. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilaksanakan oleh beberapa SKPD sebagai unit penghasil. Pendapatan Retribusi Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah di mana besaran pungutan tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Realisasi pendapatan retribusi daerah tahun anggaran 2024 mencapai 44,60% atau sebesar Rp4.934.589.739,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp11.063.462.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, pencapaian ini mengalami penurunan sebesar Rp(178.104.744,00) atau (3,48)%. Pengelompokan pendapatan retribusi daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.14
Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah - LRA

No	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	5.395.126.638,00	2.229.003.350,00	(3.166.123.288,00)	41,32	1.858.429.650,00
2	Retribusi Jasa Usaha	5.168.035.362,00	2.009.470.389,00	(3.158.564.973,00)	38,88	2.849.021.433,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	500.300.000,00	696.116.000,00	195.816.000,00	139,14	405.243.400,00
	Jumlah	11.063.462.000,00	4.934.589.739,00	(6.128.872.261,00)	44,60	5.112.694.483,00



Penjelasan atas masing-masing komponen pendapatan retribusi adalah sebagai berikut.

5.1.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum

Realisasi Retribusi Jasa Umum pada tahun 2024 sebesar Rp2.229.003.350,00 dari target sebesar Rp5.395.126.638,00 atau mencapai 41,32%. Realisasi ini tidak mencapai target sebesar Rp(3.166.123.288,00). Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, maka terdapat peningkatan sebesar Rp370.573.700,00 atau mencapai 19,94%. Rincian realisasi retribusi jasa umum disajikan pada tabel berikut di bawah ini.

Tabel 5.15
Realisasi Retribusi Jasa Umum - LRA

No	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Bertambah/ (berkurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.316.000.000,00	1.091.772.350,00	(224.227.650,00)	82,96	1.189.443.250,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.000.000.000,00	614.465.000,00	(385.535.000,00)	61,45	463.195.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	400.000.000,00	67.088.000,00	(332.912.000,00)	16,77	53.706.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	1.770.290.000,00	419.898.000,00	(1.350.392.000,00)	23,72	0,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	0,00	0,00
6	Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang	0,00	0,00	0,00	0,00	7.314.000,00
7	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	0,00	98.280.400,00
8	Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus	708.836.638,00	35.780.000,00	(673.056.638,00)	5,05	46.491.000,00
	Jumlah	5.395.126.638,00	2.229.003.350,00	(3.166.123.288,00)	41,32	1.858.429.650,00

Rincian per masing-masing retribusi jasa umum dijelaskan sebagai berikut.

1) Retribusi Pelayanan Kesehatan

Komponen retribusi ini berupa Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis berhasil direalisasi sebesar Rp1.091.772.350,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.316.000.000,00 atau 82,96%. Pencapaian ini tidak mencapai target sebesar Rp(224.227.650,00) atau sebesar (17,04)%. SKPD pengelola retribusi ini adalah Dinas Kesehatan. Retribusi dikenakan kepada pasien umum yang tidak memiliki KTP Belu.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp1.189.443.250,00, realisasi tahun 2024 ini turun sebesar Rp(97.670.900,00) atau (8,21)%.



2) Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada awalnya dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup yang sekarang bergabung dengan Dinas Perhubungan dengan nama Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan. Pada tahun 2024 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dapat direalisasikan sebesar Rp614.465.000,00 atau hanya mencapai 61,45% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000,00. Jika dibandingkan dengan pencapaian di tahun 2023 maka realisasi ini naik sebesar Rp151.270.000,00 atau 32,66%. Salah satu faktor pendukung kenaikan realisasi ini adalah adanya kenaikan tarif retribusi sampah.

3) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada awalnya dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan. Pada tahun 2024, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dapat direalisasikan sebesar Rp67.088.000,00 atau sebesar 16,77% dari target yang ditetapkan sebesar Rp400.000.000,00. Dibanding dengan realisasi tahun 2023, realisasi ini naik yakni sebesar Rp13.382.000,00 atau 24,92%. Pencapaian ini sangat rendah karena belum tertibnya masyarakat dalam membayar retribusi parkir dan kurangnya pengawasan terhadap titik-titik parkir yang telah ditentukan.

4) Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi Pelayanan Pasar dikelola oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Pada tahun 2024 retribusi ini dianggarkan sebesar Rp1.770.290.000,00. Dari anggaran tersebut, telah direalisasikan sebesar Rp419.898.000,00 atau 23,72% dari target. Rendahnya realisasi ini terjadi karena kurang optimalnya penagihan oleh petugas.

5) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada awalnya dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan. Pada tahun 2024 retribusi ini dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00, namun tidak ada realisasi. Hal ini dikarenakan sampai dengan saat



ini Pemerintah Kabupaten Belu belum memiliki alat uji kir sehingga uji kir dilakukan di kabupaten lain di wilayah Provinsi NTT.

6) **Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang**

Retribusi ini dikelola oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Objek retribusi ini berupa pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya. Pada tahun 2024 retribusi ini bukan merupakan obyek retribusi sesuai regulasi yang berlaku.

7) **Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi**

Retribusi ini ditangani oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Pada tahun 2024 retribusi ini tidak dianggarkan karena bukan merupakan obyek retribusi sesuai regulasi yang berlaku.

8) **Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus**

Retribusi ini dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pada tahun 2024 retribusi ini direalisasikan sebesar Rp35.780.000,00 atau mencapai 5,05% dari target anggaran sebesar Rp708.836.638,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, maka terjadi penurunan sebesar Rp(10.711.000,00) atau (23,04)%.

5.1.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha

Realisasi Retribusi Jasa Usaha pada tahun 2024 sebesar Rp2.009.470.389,00 dari target sebesar Rp5.168.035.362,00 atau sebesar 38,88%. Tidak tercapainya target ini disebabkan turunnya penerimaan pada beberapa komponen retribusi. Pencapaian terendah pada retribusi terminal (100)% karena tidak ada realisasi pada retribusi jenis ini. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp2.849.021.433,00, terdapat penurunan sebesar Rp(839.551.044,00) atau (29,47)%. Rincian realisasi retribusi jasa usaha disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.16
Realisasi Retribusi Jasa Usaha - LRA

No	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Bertambah/ (berkurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.549.163.362,00	575.673.989,00	(1.973.489.373,00)	22,58	563.291.233,00
2	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	1.772.710.000,00	1.139.050.000,00	(633.660.000,00)	64,25	1.957.433.200,00
3	Retribusi Terminal	133.962.000,00	0,00	(133.962.000,00)	0,00	47.010.000,00
4	Retribusi Rumah Potong Hewan	257.200.000,00	238.017.400,00	(19.182.600,00)	92,54	214.642.000,00
5	Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga	100.000.000,00	15.729.000,00	(84.271.000,00)	15,73	47.925.000,00
6	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	355.000.000,00	41.000.000,00	(314.000.000,00)	11,55	18.720.000,00
	Jumlah	5.168.035.362,00	2.009.470.389,00	(3.158.564.973,00)	38,88	2.849.021.433,00

Penjelasan masing-masing retribusi jasa usaha dijelaskan sebagai berikut.

1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun 2024 sebesar Rp575.673.989,00 atau mencapai 22,58% dari target yang ditetapkan sebesar 2.549.163.362,00. Jika dibandingkan dengan pencapaian di tahun 2023 maka realisasi ini mengalami peningkatan sebesar Rp12.382.756,00 atau 2,20%. Rincian realisasi retribusi ini dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.17
Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA

No	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Bertambah/ (berkurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Retribusi Penyewaan Tanah Dan Bangunan	100.000.000,00	41.403.989,00	(58.596.011,00)	41,40	115.211.233,00
2	Retribusi Penyewaan Bangunan	144.000.000,00	61.560.000,00	(82.440.000,00)	42,75	46.200.000,00
3	Retribusi Pemakaian Laboratorium	1.590.163.362,00	374.910.000,00	(1.215.253.362,00)	23,58	299.880.000,00
4	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	0,00	4.000.000,00
5	Retribusi Pemakaian Alat	640.000.000,00	97.800.000,00	(542.200.000,00)	15,28	98.000.000,00
	Jumlah	2.549.163.362,00	575.673.989,00	(1.973.489.373,00)	22,58	563.291.233,00

2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dikelola oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Realisasi retribusi ini di tahun 2024 sebesar Rp1.139.050.000,00 dari target sebesar Rp1.772.710.000,00. Realisasi ini tidak mencapai target sebesar Rp(633.660.000,00) atau mencapai 64,25%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp(818.383.200,00) atau (41,81)%. Retribusi ini terdiri dari 2 objek pungutan, yang dijelaskan sebagai berikut.



Tabel 5.18
Realisasi Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan - LRA

No	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Bertambah/ (berkurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	1.772.710.000,00	1.139.050.000,00	(633.660.000,00)	64,25	1.433.440.000,00
2	Penyediaan Fasilitas Pasar/ Perokoan yang Dikontrakan	0,00	0,00	0,00	0,00	523.993.200,00
	Jumlah	1.772.710.000,00	1.139.050.000,00	(633.660.000,00)	64,25	1.957.433.200,00

3) Retribusi Terminal

Retribusi Terminal dengan objek pungutan berupa pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum pada tahun 2024 tidak dapat direalisasikan. Hal ini terjadi karena retribusi terminal bukan merupakan obyek retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

4) Retribusi Rumah Potong Hewan

Retribusi ini pada awalnya dikelola oleh Dinas Peternakan dan Perikanan. Pada tahun 2024, Retribusi Rumah Potong Hewan dapat direalisasikan sebesar Rp238.017.400,00 atau mencapai 92,54% dari target yang ditetapkan sebesar Rp257.200.000,00. Adapun objek retribusi ini berupa pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong. Dibanding dengan realisasi tahun sebelumnya, realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp23.375.400,00 atau naik sebesar 10,89%.

5) Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga

Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga pada awalnya di bawah pengelolaan Dinas Pariwisata yang sekarang berubah nama menjadi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Objek retribusi ini berupa pelayanan tempat pariwisata yang pada tahun 2024 berhasil direalisasikan sebesar Rp15.729.000,00 atau mencapai 15,73% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp100.000.000,00. Realisasi ini tidak mencapai target sebesar Rp(84.271.000,00). Jika dibandingkan tahun 2023, Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga mengalami penurunan sebesar Rp(32.196.000,00) atau (67,18)%.



- 6) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Pemerintah Daerah
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Pemerintah Daerah pada tahun 2024 dapat direalisasikan sebesar Rp41.000.000,00 atau 11,55% dari target yang dianggarkan sebesar Rp355.000.000,00. Dibanding tahun 2023 realisasi ini mengalami peningkatan sebesar Rp22.280.000,00 atau 119,02%. Realisasi ini merupakan retribusi atas hasil penjualan ikan. Retribusi ini dikelola Dinas Peternakan dan Perikanan.

5.1.1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi ini terdiri atas 2 jenis yang dianggarkan pada tahun 2024 yakni Retribusi Izin Trayek untuk Penyediaan Pelayanan Angkutan Umum dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Retribusi Perizinan Tertentu di tahun 2024 mencapai Rp696.116.000,00 atau 139,14% dari target yang ditetapkan sebesar Rp500.300.000,00. Jika dibandingkan pencapaian tahun sebelumnya, kelompok retribusi ini mengalami peningkatan sebesar Rp290.872.600,00 atau 71,78%. Pengelola retribusi ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Rinciannya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.19
Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu - LRA

No	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Bertambah/ (berkurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Retribusi Izin Trayek untuk Penyediaan Pelayanan Angkutan Umum	300.000,00	0,00	(300.000,00)	0,00	0,00
2	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	500.000.000,00	696.116.000,00	196.116.000,00	139,22	405.243.400,00
	Jumlah	500.300.000,00	696.116.000,00	195.816.000,00	139,14	405.243.400,00

Penjelasan realisasi masing-masing komponen retribusi ini adalah sebagai berikut.

- 1) Retribusi Izin Trayek Untuk Penyediaan Pelayanan Angkutan Umum

Retribusi ini dengan objek pungutan berupa pemberian izin trayek kepada orang pribadi tidak ada realisasi dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp300.000,00.

**2) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung**

Realisasi ini sebesar Rp696.116.000,00 atau 139,22% dari target yang ditetapkan sebesar Rp500.000.000,00. Objek retribusi ini berupa pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. Dibanding dengan realisasi tahun sebelumnya, realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp290.872.600,00 atau 71,78%.

5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

2024		2023
Anggaran	Realisasi	Realisasi
Rp7.460.997.860,00	Rp3.480.688.664,00	Rp6.529.604.943,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan PAD yang bersumber dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan tahun 2024 sebesar Rp3.480.688.664,00 atau 46,65% dari target Rp7.460.997.860,00. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri dari:

Tabel 5.20
Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA

No	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Bertambah/ (berkurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	7.460.997.860,00	3.480.688.664,00	(3.980.309.196,00)	46,65	6.529.604.943,00
	Jumlah	7.460.997.860,00	3.480.688.664,00	(3.980.309.196,00)	46,65	6.529.604.943,00

Realisasi tersebut seluruhnya bersumber dari bagian laba atas penyertaan modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (PT BPD NTT) berupa deviden sesuai STS Nomor STS/1439/LLPAD tanggal 27 Juni 2024. Dibandingkan dengan penerimaan deviden tahun 2023 sebesar Rp6.529.604.943,00 deviden tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp(3.048.916.279,00) atau (46,69)%.

**5.1.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

2024		2023
Anggaran	Realisasi	Realisasi
Rp74.038.440.828,00	Rp60.461.267.222,28	Rp81.118.712.401,64

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan PAD dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap/rutin, dengan realisasinya di tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.21
Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA

No	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Bertambah/ (berkurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	100.000.000,00	8.913.000,00	(91.087.000,00)	8,91	0,00
2	Penerimaan Jasa Giro/ Bunga Bank	1.988.727.188,00	777.776.352,54	(1.210.950.835,46)	39,11	667.338.645,60
3	Pendapatan Bunga	1.900.000.000,00	1.169.748.162,99	(730.251.837,01)	61,57	1.240.028.868,10
4	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah (TGR)	3.000.000.000,00	3.010.683.070,29	10.683.070,29	100,36	738.152.001,00
5	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.000.000.000,00	457.399.501,52	(542.600.498,48)	45,74	1.262.518.156,98
6	Pendapatan Denda Pajak Daerah	250.000.000,00	105.989.515,00	(144.010.485,00)	42,40	272.323.680,31
7	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	7.000.000,00	2.772.800,00	(4.227.200,00)	39,61	9.229.000,00
8	Pendapatan Dari Pengembalian	1.050.000.000,00	349.303.826,00	(700.696.174,00)	33,27	476.961.939,00
9	Pendapatan BLUD	64.742.713.640,00	54.578.680.993,94	(10.164.032.646,06)	84,30	76.452.160.110,65
	Jumlah	74.038.440.828,00	60.461.267.222,28	(13.577.173.605,72)	81,66	81.118.712.401,64

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah tahun 2024 sebesar Rp60.461.267.222,28 atau mencapai 81.66% dari target sebesar Rp74.038.440.828,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan ini di tahun 2023 sebesar Rp81.118.712.401,64, maka realisasi tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp(20.657.445.179,36) atau (25,47)%. Penurunan terbesar bersumber dari pendapatan BLUD RSUD yakni Rp(21.873.479.116,71). Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah adalah sebagai berikut.

5.1.1.1.4.1 Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan

Realisasi hasil penjualan BMD yang tidak dapat dipisahkan pada tahun 2024 sebesar Rp8.913.000,00 atau 8,91% dari target yang ditetapkan Rp100.000.000,00. Realisasi ini sangat rendah karena pada tahun 2024 tidak dilaksanakan lelang atas kendaraan dinas.



Rinciannya diuraikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.22
Realisasi Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dapat Dipisahkan - LRA

No.	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Bertambah/ (berkurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dapat Dipisahkan	100.000.000,00	8.913.000,00	(91.087.000,00)	8,91	0,00
	Jumlah	100.000.000,00	8.913.000,00	(91.087.000,00)	8,91	0,00

Realisasi sebesar Rp8.913.000,00 ini berasal dari penjualan material bekas aset tetap gedung dan bangunan serta aset tetap rusak berat, yang terdiri dari:

- 1) Material bekas pemeliharaan aset tetap gedung dan bangunan ruang kelas di SMPN 1 Tasifeto Timur sebesar Rp1.870.000,00;
- 2) Material bekas pemeliharaan aset tetap gedung dan aset tetap gedung dan bangunan rumah jabatan wakil bupati sebesar Rp2.533.000,00;
- 3) Material bekas pembongkaran aset tetap rusak berat bangunan gedung kantor Kecamatan Lamaknen Selatan sebesar Rp2.100.000,00; dan
- 4) Material bekas pembongkaran aset tetap rusak berat berupa bangunan gedung puskesmas pada Puskesmas Atapupu sebesar Rp2.410.000,00.

Atas penerimaan ini tidak mengurangi aset terkait karena nilai penjualan tersebut dihasilkan dari material bekas-pembongkaran yang merupakan sebagian kecil dari nilai aset yang tidak mengurangi masa manfaat aset dan bernilai tidak signifikan terhadap nilai aset secara keseluruhan.

5.1.1.1.4.2 Penerimaan Jasa Giro/Bunga Bank

Realisasi penerimaan jasa giro diperoleh dari jasa giro bendahara dan jasa giro atas rekening-rekening milik SKPD yang terdapat pada PT BPD NTT termasuk jasa giro atas rekening Dana Kapitasi JKN dan jasa giro rekening Dana Bantuan Operasional Kesehatan yang terdapat pada PT BNI. Penerimaan jasa giro berupa pendapatan bunga bank pada rekening Dana BOS sekolah-sekolah sesuai edaran Menteri Dalam Negeri nomor 971-7791 tahun 2019 tanggal 28 September 2019 tentang petunjuk teknis penganggaran,



pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban Dana BOS Satdiknas Negeri yang diselenggarakan oleh kabupaten/kota pada APBD, yang memerintahkan dalam hal terdapat bunga/jasa giro dalam pengelolaan Dana BOS, bunga/jasa giro tersebut dipindahbukukan ke RKUD.

Penerimaan jasa giro yang bersumber dari rekening Dana BOK pada Bank BNI sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pemerintah Daerah.

Realisasi tahun 2024 sebesar Rp777.776.352,54 atau hanya mencapai 39,11% dari target sebesar Rp1.988.727.188,00. Realisasi ini mengalami peningkatan sebesar Rp110.437.706,94 atau 16,55% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yaitu sebesar Rp667.338.645,60. Rincian realisasi penerimaan jasa giro diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.23
Realisasi Penerimaan Jasa Giro / Bunga Bank - LRA

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Jasa Giro RKUD Kab. Belu	605.370.798,38
2	Jasa Giro rekening atas nama Bupati Belu	14.971.760,04
3	Jasa Giro SKPD	73.172.886,50
4	Jasa Giro Dana Kapitasi JKN	12.063.290,87
5	Jasa Giro BOS	17.721.665,44
6	Jasa Giro PAUD dan Kesetaraan	317.440,53
7	Jasa Giro Dana BOK	35.388.294,00
8	Jasa Giro Treasury Deposit Facility (TDF)	6.928.648,00
9	Jasa Giro SD, SMP dan DAK SMA	406.736,60
10	Jasa Giro KPU	11.434.832,18
Jumlah		777.776.352,54

5.1.1.1.4.3 Pendapatan Bunga Deposito

Realisasi pendapatan bunga deposito bersumber dari bunga deposito Pemerintah Kabupaten Belu yang ditempatkan pada bank-bank pemerintah baik yang berstatus BUMD maupun BUMN serta Bunga Pinjaman Daerah Kepada Masyarakat.

Realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.169.748.162,99 atau sebesar 61,57% dari target sebesar Rp1.900.000.000,00. Realisasi tahun 2024 ini berasal dari bunga deposito pada Bank NTT Cabang Atambua sebesar Rp929.062.499,99,



pada Bank BRI Cabang Atambua sebesar Rp125.548.005,00, pada Bank BNI sebesar Rp66.849.314,00, bunga dari pinjaman daerah sebesar Rp48.288.344,00.

Realisasi ini dibanding realisasi penerimaan tahun 2023, mengalami penurunan sebesar Rp(70.280.705,11) atau (5,67)%. Rinciannya diuraikan pada tabel berikut di bawah ini.

Tabel 5.24
Realisasi Pendapatan Bunga Deposito - LRA

No	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Bunga Deposito	1.900.000.000,00	1.169.748.162,99	(730.251.837,01)	61,57	1.240.028.868,10
	Jumlah	1.900.000.000,00	1.169.748.162,99	(730.251.837,01)	61,57	1.240.028.868,10

5.1.1.1.4.4 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah (TGR)

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah (TGR) merupakan jumlah penerimaan yang berasal dari pembebanan berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) terhadap pegawai bukan bendahara dan pejabat lainnya dilingkup Pemerintah Kabupaten Belu. Realisasi tahun 2024 sebesar Rp3.010.683.070,29 atau mencapai 100,36% dari target sebesar Rp3.000.000.000,00. Realisasi ini mengalami peningkatan sebesar Rp2.272.531.069,29 atau 307,87% jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2023. Peningkatan yang signifikan ini terjadi karena dalam akun ini juga tercatat penerimaan pengembalian temuan BPK tahun 2023 atas kekurangan volume pekerjaan. Rincian realisasi tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.25
Realisasi Penerimaan Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah - LRA

No	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Tuntutan Ganti Rugi Daerah	3.000.000.000,00	3.010.683.070,29	10.683.070,29	100,36	738.152.001,00
	Jumlah	3.000.000.000,00	3.010.683.070,29	10.683.070,29	100,36	738.152.001,00



5.1.1.1.4.5 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Realisasi tahun 2024 sebesar Rp457.399.501,52 atau mencapai 45,74% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000,00. Terdapat penurunan sebesar Rp(805.118.655,46) dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.262.518.156,98 atau turun sebesar (63,77)%. Selain denda keterlambatan pekerjaan, akun ini juga mencatat penerimaan lain seperti pengembalian hibah dll karena tidak terdapat akun yang dimaksud dalam aplikasi SIPKD. Uraianya dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.26
Realisasi Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA

No	Uraian	Jumlah
1	Pengembalian Dana Hibah	1.908.500,00
2	Penerimaan uang jaminan bongkar reklame	88.753.295,00
3	Penyetoran retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi an. PT. Dayamitra Telekomunikasi Tahun 2023	81.815.900,00
4	PAD Lain-Lain	14.991.609,94
5	Denda Keterlambatan Pekerjaan	269.930.196,58
	Total	457.399.501,52

5.1.1.1.4.6 Pendapatan Denda Pajak Daerah

Di tahun 2024, pendapatan ini dapat direalisasikan sebesar Rp105.989.515,00 atau mencapai 42,40% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp250.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya maka terdapat penurunan sebesar Rp(166.334.165,31) atau sebesar (61,08)%. Rincian realisasi pendapatan denda pajak daerah disajikan pada tabel berikut di bawah ini.

Tabel 5.27
Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah - LRA

No	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel	1.800.000,00	1.713.514,00	(86.486,00)	95,20	2.518.636,00
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran	70.000.000,00	27.011.270,00	(42.988.730,00)	38,59	67.016.692,00
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	800.000,00	60.439,00	(739.561,00)	7,55	7.200,00
4	Pendapatan Denda Pajak Reklame	7.500.000,00	610.122,00	(6.889.878,00)	8,13	1.060.853,00
5	Pendapatan Denda Mineral Bukan Logam	89.150.000,00	1.213.666,00	(87.936.334,00)	1,36	73.452.614,00
6	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	750.000,00	13.070,00	(736.930,00)	1,74	233.328,00
7	Pendapatan Denda Pajak PBB-P2	80.000.000,00	75.367.434,00	(4.632.566,00)	94,21	128.034.357,31
	Jumlah	250.000.000,00	105.989.515,00	(144.010.485,00)	42,40	272.323.680,31

**5.1.1.1.4.7 Pendapatan Denda Retribusi Daerah**

Pada tahun 2024 terdapat realisasi sebesar Rp2.772.800,00 atau 39,61% dari target yang dianggarkan sebesar Rp7.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp9.229.000,00, tahun ini terjadi penurunan sebesar Rp(6.456.200,00) atau (69,96)%.

5.1.1.1.4.8 Pendapatan dari Pengembalian

Realisasi pendapatan dari pengembalian tahun 2024 sebesar Rp349.303.826,00 atau mencapai 33,27% dari target sebesar Rp1.050.000.000,00. Realisasi tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp(127.658.113,00) atau (26,76)% jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan ini di tahun 2023 yang mencapai Rp476.961.939,00.

Rinciannya diuraikan lebih lanjut pada tabel berikut ini.

Tabel 5.28
Realisasi Pendapatan Dari Pengembalian - LRA

No	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1.000.000.000,00	349.303.826,00	(650.696.174,00)	34,93	476.284.939,00
2	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	366.000,00
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00
	Jumlah	1.050.000.000,00	349.303.826,00	(700.696.174,00)	33,27	476.961.939,00

5.1.1.1.4.9 Pendapatan BLUD

Pendapatan BLUD tahun 2024 direalisasikan sebesar Rp54.578.680.993,94 atau mencapai 84,30% dari target sebesar Rp64.742.713.640,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp76.452.160.110,65, realisasi tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp(21.873.479.116,71) atau (28,61)%. Mutasi penerimaan BLUD disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.29
Realisasi Pendapatan BLUD - LRA

No	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	64.742.713.640,00	54.578.680.993,94	(10.164.032.646,06)	84,30	76.452.160.110,65
	Jumlah	64.742.713.640,00	54.578.680.993,94	(10.164.032.646,06)	84,30	76.452.160.110,65



Rincian pendapatan BLUD tahun 2024 per jenis pendapatan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.30
Rincian Pendapatan BLUD - LRA per Jenis

No	Uraian	2024			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)	%
1	Pendapatan Jasa Layanan Pasien Umum	4.398.057.467,00	2.203.732.270,00	(2.194.325.197,00)	50,11
2	Pendapatan Jasa Layanan Pasien JKN	55.817.722.749,00	42.927.529.039,00	(12.890.193.710,00)	76,91
3	Pendapatan Jasa Layanan Pasien Jasa Raharja	214.879.272,00	439.968.927,00	225.089.655,00	204,75
4	Piutang 2023	4.110.654.688,00	8.725.596.700,00	4.614.942.012,00	212,27
5	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	127.200.000,00	172.153.500,00	44.953.500,00	135,34
6	Lain-lain pendapatan BLUD yang Sah	74.199.464,00	109.700.557,94	35.501.093,94	147,85
	Jumlah	64.742.713.640,00	54.578.680.993,94	(10.164.032.646,06)	84,30

5.1.1.2 PENDAPATAN TRANSFER

2024		2023
Anggaran	Realisasi	Realisasi
Rp891.132.538.036,00	Rp877.295.842.987,30	Rp835.457.591.512,31

Pendapatan Transfer berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya, dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2024 sebesar Rp877.295.842.987,30 atau mencapai 98,45% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp891.132.538.036,00. Realisasi pendapatan transfer tahun 2024 jika dibandingkan realisasi tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp41.838.251.474,99 atau 5,01%. Rinciannya disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.31
Realisasi Pendapatan Transfer - LRA

No.	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	776.690.704.970,00	769.300.744.079,30	(7.389.960.890,70)	99,05	718.478.962.836,31
1.1	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak	2.786.520.000,00	3.382.792.600,00	596.272.600,00	121,40	4.099.513.703,00
1.2	Dana Bagi Hasil (DBH) Bukan Pajak	1.286.354.000,00	1.313.950.400,00	27.596.400,00	102,15	1.747.566.621,00
1.3	Dana Alokasi Umum (DAU)	533.714.708.000,00	530.182.469.628,00	(3.532.238.372,00)	99,34	488.297.498.097,00
1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	238.903.122.970,00	234.421.531.451,30	(4.481.591.518,70)	98,12	224.334.384.415,31
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	73.574.222.000,00	73.570.323.739,00	(3.898.261,00)	99,99	85.497.017.000,00
2.1	Dana Insentif Fiskal	9.107.161.000,00	9.107.161.000,00	0,00	100,00	0,00
2.2	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	21.126.761.000,00
2.3	Dana Desa	64.467.061.000,00	64.463.162.739,00	(3.898.261,00)	99,99	64.370.256.000,00
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	40.867.611.066,00	34.424.775.169,00	(6.442.835.897,00)	84,23	31.481.611.676,00
3.1	Pendapatan Bagi Hasil	40.867.611.066,00	34.424.775.169,00	(6.442.835.897,00)	84,23	31.481.611.676,00
	Jumlah	891.132.538.036,00	877.295.842.987,30	(13.836.695.048,70)	98,45	835.457.591.512,31

**5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan**

2024		2023
Anggaran	Realisasi	Realisasi
Rp776.690.704.970,00	Rp769.300.744.079,30	Rp718.478.962.836,31

Realisasi transfer pemerintah pusat - dana perimbangan tahun 2024 mencapai 99,05% atau sebesar Rp769.300.744.079,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp776.690.704.970,00. Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2023 terdapat peningkatan realisasi sebesar Rp50.821.781.242,99 atau naik sebesar 7,07%.

Rincian transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.32
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
(Dana Perimbangan) - LRA

No.	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak	2.786.520.000,00	3.382.792.600,00	596.272.600,00	121,40	4.099.513.703,00
2	Dana Bagi Hasil (DBH) Bukan Pajak	1.286.354.000,00	1.313.950.400,00	27.596.400,00	102,15	1.747.566.621,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU)	533.714.708.000,00	530.182.469.628,00	(3.532.238.372,00)	99,34	488.297.498.097,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	238.903.122.970,00	234.421.531.451,30	(4.481.591.518,70)	98,12	224.334.384.415,31
Jumlah		776.690.704.970,00	769.300.744.079,30	(7.389.960.890,70)	99,05	718.478.962.836,31

5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak

Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak tahun 2024 sebesar Rp3.382.792.600,00 atau mencapai 121,40% dari target sebesar Rp2.786.520.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp4.099.513.703,00, realisasi tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp(716.721.103,00) atau (17,48)%. Selanjutnya rincian realisasi bagi hasil pajak tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.33
Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak - LRA

No.	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	388.747.000,00	459.046.600,00	70.299.600,00	118,08	999.923.043,00
2	DBH PPh Pasal 21	2.296.170.000,00	2.807.337.000,00	511.167.000,00	122,26	2.944.657.108,00
3	DBH Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT)	101.603.000,00	116.409.000,00	14.806.000,00	114,57	154.933.552,00
Jumlah		2.786.520.000,00	3.382.792.600,00	596.272.600,00	121,40	4.099.513.703,00



Realisasi DBH Pajak tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut.

- 1) Realisasi DBH Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2024 sebesar Rp459.046.600,00 atau 118,08% dari target sebesar Rp388.747.000. Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2023, realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp(540.876.443,00) atau (54,09)%.
- 2) Realisasi DBH PPh Pasal 25, Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN), dan PPh Pasal 21 tahun 2024 sebesar Rp2.807.337.000,00 atau 122,26% dari target sebesar Rp2.296.170.000,00. Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2023, realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp(137.320.108,00) atau (4,66)%.
- 3) Realisasi DBH Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp101.603.000,00 dan terealisasi sebesar Rp116.409.000,00 atau mencapai 114,57%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp154.933.552,00 maka realisasi tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp(38.524.552,00) atau mencapai (24,87)%.

5.1.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) tahun 2024 sebesar Rp1.313.950.400,00 atau 102,15% dari target sebesar Rp1.286.354.000,00. Rinciannya dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.34
Realisasi DBH Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA

No	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	32.343.000,00	53.691.400,00	21.348.400,00	166,01	51.538.850,00
2	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	13.354.000,00	19.602.000,00	6.248.000,00	146,79	29.296.505,00
3	DBH SDA Perikanan	1.240.657.000,00	1.240.657.000,00	0,00	100,00	1.666.731.266,00
	Jumlah	1.286.354.000,00	1.313.950.400,00	27.596.400,00	102,15	1.747.566.621,00

Realisasi ini jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2023, mengalami penurunan sebesar Rp(433.616.221,00) atau (24,81)%.

Realisasi masing-masing komponen pendapatan ini diuraikan sebagai berikut.

- 1) Realisasi DBH SDA pengusahaan panas bumi tahun 2024 sebesar Rp53.691.400,00 atau mampu mencapai 166,01% dari



target anggaran sebesar Rp32.343.000,00. Jika dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp51.538.850,00 maka realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp2.152.550,00 atau 4,18%.

- 2) Realisasi DBH SDA mineral dan batu bara - *royalty* tahun 2024 sebesar Rp19.602.000,00 atau mencapai 146,79% dari target yang ditetapkan sebesar Rp13.354.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp29.296.505,00 realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp(9.694.505,00) atau (33,09)%
- 3) Realisasi DBH SDA Perikanan tahun 2024 sebesar Rp1.240.657.000,00 atau mencapai 100% dari target sebesar Rp1.240.657.000,00. Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2023 sebesar Rp1.666.731.266,00, realisasi tahun 2024 menurun sebesar Rp(426.074.266,00) atau (25,56)%.

5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU)

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2024 sebesar Rp530.182.469.628,00 atau mencapai 99,34% dari target dalam APBD sebesar Rp533.714.708.000,00. Jika dibandingkan realisasi DAU tahun 2023, realisasi tahun ini naik sebesar 8,58% atau Rp41.884.971.531,00. Rinciannya adalah sebagai berikut.

Tabel 5.35
Realisasi Dana Alokasi Umum - LRA

No	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Dana Alokasi Umum	533.714.708.000,00	530.182.469.628,00	(3.532.238.372,00)	99,34	488.297.498.097,00
	Jumlah	533.714.708.000,00	530.182.469.628,00	(3.532.238.372,00)	99,34	488.297.498.097,00

Uraian Realisasi DAU tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.36
Uraian Realisasi Dana Alokasi Umum - LRA

No.	Uraian	Jumlah
1	DAU <i>Block Grant</i>	408.699.416.000,00
2	DAU <i>Specific Grant</i> Bidang Pendidikan	56.600.270.000,00
3	DAU <i>Specific Grant</i> Bidang Kesehatan	37.871.031.000,00
4	DAU <i>Specific Grant</i> Bidang Pekerjaan Umum	6.872.117.000,00
5	DAU <i>Specific Grant</i> Dana Kelurahan	2.400.000.000,00
6	DAU PPPK	11.384.802.628,00
7	Tambahan THR dan Gaji ke-13 untuk guru PNSD	6.354.833.000,00
	Jumlah	530.182.469.628,00

5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2024 sebesar Rp234.421.531.451,30 atau mencapai 98,12% dari target anggaran sebesar Rp238.903.122.970,00. Jika dibanding dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp224.334.384.415,31 maka di tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar



Rp10.087.147.035,99 atau 4,50%. Anggaran, realisasi serta perbandingannya dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.37
Realisasi Dana Alokasi Khusus - LRA

No	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Dana Alokasi Khusus Fisik	136.241.183.000,00	132.084.012.035,00	(4.157.170.965,00)	96,95	124.363.968.363,00
2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	102.661.939.970,00	102.337.519.416,30	(324.420.553,70)	99,68	99.970.416.052,31
	Jumlah	238.903.122.970,00	234.421.531.451,30	(4.481.591.518,70)	98,12	224.334.384.415,31

1) Dana Alokasi Khusus Fisik

Atas Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) tahun 2024, dari anggaran sebesar Rp136.241.183.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp132.084.012.035,00 atau 96,95%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp124.363.968.363,00 terdapat peningkatan sebesar Rp7.720.043.672,00 atau 6,21%. Uraian DAK Fisik tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.38
Dana Alokasi Khusus Fisik- LRA

No.	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	DAK Bidang Pendidikan	10.326.328.000,00	10.010.750.972,00	(315.577.028,00)	96,94	11.193.839.201,00
2	DAK Bidang Kesehatan Dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	142.062.000,00	128.500.000,00	(13.562.000,00)	90,45	9.910.654.736,00
3	DAK Bidang Kesehatan Dan KB-Penugasan-Penguatan Sistem Kesehatan	43.397.846.000,00	41.135.401.398,00	(2.262.444.602,00)	94,79	0,00
4	DAK Bidang Jalan-Reguler-Jalan	38.200.957.000,00	37.539.381.519,00	(661.575.481,00)	98,27	55.613.438.338,00
5	DAK Bidang irigasi-Penugasan	3.510.000.000,00	3.494.475.800,00	(15.524.200,00)	99,56	4.060.257.000,00
6	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum-Reguler	12.940.632.000,00	12.684.621.470,00	(256.010.530,00)	98,02	8.746.537.250,00
7	DAK Bidang Sanitasi-Reguler	7.623.185.000,00	7.621.397.250,00	(1.787.750,00)	99,98	8.378.920.806,00
8	DAK Bidang Transportasi Perdesaan-Affirmasi	11.753.474.000,00	11.640.211.725,00	(113.262.275,00)	99,04	0,00
9	DAK Bidang Pertanian-Penugasan Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	3.019.154.000,00	2.992.622.885,00	(26.531.115,00)	99,12	4.617.431.520,00
10	DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595.500.000,00
11	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	5.327.545.000,00	4.836.649.016,00	(490.895.984,00)	90,79	1.662.060.800,00
12	DAK Fisik-Bidang Perdagangan-Penugasan	0,00	0,00	0,00	0,00	18.585.328.712,00
	Jumlah	136.241.183.000,00	132.084.012.035,00	(4.157.170.965,00)	96,95	124.363.968.363,00

**2) Dana Alokasi Khusus Non Fisik**

Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) tahun 2024 sebesar Rp102.337.519.416,30 atau 99,68% dari target sebesar Rp102.661.939.970,00. Jika dibandingkan dengan realisasi DAK Non Fisik tahun 2023, terjadi peningkatan sebesar Rp2.367.103.363,99 atau 2,37%. Rincian DAK Non Fisik dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.39
Dana Alokasi Khusus Non Fisik- LRA

No.	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Tunjangan Profesi Guru PNSD	36.033.752.000,00	36.033.752.000,00	0,00	100,00	32.963.955.012,00
2	Tambahan Penghasilan Guru	1.727.775.000,00	1.727.775.000,00	0,00	100,00	1.511.250.000,00
3	Bantuan Operasional PAUD	3.936.600.000,00	3.869.634.000,00	(66.966.000,00)	98,30	4.570.317.000,00
4	BOKKB- Akreditasi Puskesmas	15.079.913.442,00	15.079.913.442,00	0,00	100,00	21.171.218.600,00
5	Bantuan Operasional KB	3.761.862.000,00	3.761.862.000,00	0,00	100,00	5.198.869.000,00
6	Tunjangan Khusus Guru	2.150.319.000,00	2.150.319.000,00	0,00	100,00	1.408.196.000,00
7	Peningkatan Kapasitas Koperasi Dan UKM	397.606.000,00	397.606.000,00	0,00	100,00	457.666.500,00
8	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	968.100.000,00	892.410.000,00	(75.690.000,00)	92,18	1.197.600.000,00
9	Fasilitasi Penanaman Modal	546.495.500,00	546.495.500,00	0,00	100,00	485.685.000,00
10	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	717.505.764,00	717.505.764,00	0,00	100,00	1.058.188.496,00
11	DAK Non Fisik-BOS Reguler	34.570.700.000,00	34.388.935.446,30	(181.764.553,70)	99,47	23.748.221.444,31
12	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.375.000.000,00	1.375.000.000,00	0,00	100,00	717.500.000,00
13	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	1.057.470.264,00	1.057.470.264,00	0,00	100,00	890.549.000,00
14	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	338.841.000,00	338.841.000,00	0,00	100,00	591.200.000,00
15	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000.000,00
Jumlah		102.661.939.970,00	102.337.519.416,30	(324.420.553,70)	99,68	99.970.416.052,31

5.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Transfer pemerintah pusat - lainnya berasal dari dana alokasi Pemerintah Pusat kepada Pemkab Belu selain DBH, DAU, dan DAK. Rincian realisasi transfer pemerintah pusat - lainnya tahun 2024 dengan perbandingan tahun 2023 adalah sebagai berikut.

**5.1.1.2.2.1 Dana Insentif Fiskal**

2024		2023
Anggaran	Realisasi	Realisasi
Rp9.107.161.000,00	Rp9.107.161.000,00	Rp0,00

Dana Insentif Fiskal (DIF) adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintah daerah antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar pemerintah. Alokasi Dana Insentif Fiskal berdasarkan Peraturan Menteri keuangan Nomor 125 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya.

Realisasi DIF tahun 2024 sebesar Rp9.107.161.000,00 atau 100% dari target yang ditetapkan. Realisasi ini naik 100% dibandingkan tahun 2023. DIF ditujukan untuk Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian yang dikelola oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp2.462.862.500,00 dan Program Penyelenggaraan Jalan yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp6.644.298.500,00.

Rincian realisasi DIF - LRA dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.40**Realisasi Dana Insentif Fiskal - LRA**

No.	Uraian	2024			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)	%
1	Program Penyediaan dan Pengembangan sarana Pertanian	2.462.862.500,00	2.462.862.500,00	0,00	100,00
1.1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.382.862.500,00	1.382.862.500,00	0,00	100,00
1.2	Pembangunan Prasarana Pertanian	1.080.000.000,00	1.080.000.000,00	0,00	100,00
2	Program Penyelenggaraan Jalan	6.644.298.500,00	6.644.298.500,00	0,00	100,00
2.1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	6.644.298.500,00	6.644.298.500,00	0,00	100,00
	Jumlah	9.107.161.000,00	9.107.161.000,00	0,00	100,00

**5.1.1.2.2.2 Dana Insentif Daerah (DID)**

2024		2023
Anggaran	Realisasi	Realisasi
Rp0,00	Rp0,00	Rp21.126.761.000,00

Realisasi Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2024 sebesar Rp0,00 atau turun 100% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp21.126.761.000,00. Penurunan ini terjadi karena pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Belu tidak memenuhi indikator perhitungan DID.

5.1.1.2.2.3 Dana Desa

2024		2023
Anggaran	Realisasi	Realisasi
Rp64.467.061.000,00	Rp64.463.162.739,00	Rp64.370.256.000,00

Transfer pemerintah pusat-dana desa berupa bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Desa (Dana Desa). Dana desa ditujukan bagi 69 pemerintahan desa yang ada di Kabupaten Belu dan guna mendorong percepatan pembangunan di desa. Dana Desa ditransfer langsung dari Pemerintah Pusat ke rekening Desa tanpa melalui RKUD. Mekanisme pencatatan dan pengakuan pendapatan transfer dana desa pada APBD menggunakan Surat Pengesahan Pendapatan Dana Desa (SP2DD). Rincian SP2DD disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.41
Realisasi Transfer Pemerintah Pusat (Dana Desa) - LRA

NO.	TAHAP	JUMLAH	TANGGAL	BATCH	KETERANGAN	SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DANA DESA (SP2DD)
JUMLAH KESELURUHAN (Rp)					64.463.162.739,00	
TAHAP I						
1	I	2.928.426.400	08 Maret 2024	1	Tahap I batch 1, untuk 14 Desa	SP2DD/Tahap.1/5/V/2024
2	I	2.968.152.600	14 Maret 2024	2	Tahap I batch 2, untuk 14 Desa	SP2DD/Tahap.1/6/V/2024
3	I	6.113.055.600	04 April 2024	3	Tahap I batch 3, untuk 28 Desa	SP2DD/Tahap.1/7/V/2024
4	I	6.282.318.000	04 April 2024	4	Tahap I batch 4, untuk 28 Desa	SP2DD/Tahap.1/8/V/2024
5	I	2.381.277.200	19 April 2024	5	Tahap I batch 5, untuk 11 Desa	SP2DD/Tahap.1/9/V/2024
6	I	2.611.009.800	19 April 2024	6	Tahap I batch 6, untuk 11 Desa	SP2DD/Tahap.1/10/V/2024
7	I	1.408.293.200	13 Mei 2024	7	Tahap I batch 7, untuk 7 Desa	SP2DD/Tahap.1/11/V/2024
8	I	1.583.437.800	13 Mei 2024	8	Tahap I batch 8, untuk 7 Desa	SP2DD/Tahap.1/12/V/2024
9	I	1.941.009.600	29 Mei 2024	9	Tahap I batch 9, untuk 9 Desa	SP2DD/Tahap.1/33/VI/2024
10	I	1.884.968.400	29 Mei 2024	10	Tahap I batch 10, untuk 9 Desa	SP2DD/Tahap.1/34/VI/2024
Jumlah Tahap I (Rp)					30.101.948.600,00	
TAHAP II						
1	II	1.520.288.400	09 Juli 2024	1	Tahap II batch 1, untuk 5 Desa	SP2DD/Tahap.2/56/VII/2024
2	II	629.184.400	09 Juli 2024	2	Tahap II batch 2, untuk 5 Desa	SP2DD/Tahap.2/57/VII/2024
3	II	5.921.188.812	05 Agustus 2024	3	Tahap II batch 3, untuk 18 Desa	SP2DD/Tahap.2/60/VIII/2024

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

NO.	TAHAP	JUMLAH	TANGGAL	BATCH	KETERANGAN	SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DANA DESA (SP2DD)
4	II	2.791.120.000	05 Agustus 2024	4	Tahap II batch 4, untuk 18 Desa	SP2DD/Tahap.2/61/VIII/2024
5	II	3.619.088.568	28 Agustus 2024	5	Tahap II batch 5, untuk 11 Desa	SP2DD/Tahap.2/63/VIII/2024
6	II	1.676.373.600	28 Agustus 2024	6	Tahap II batch 6, untuk 11 Desa	SP2DD/Tahap.2/64/VIII/2024
7	II	3.807.486.110	13 September 2024	7	Tahap II batch 7, untuk 12 Desa	SP2DD/Tahap.2/71/IX/2024
8	II	1.719.240.400	13 September 2024	8	Tahap II batch 8, untuk 12 Desa	SP2DD/Tahap.2/72/IX/2024
9	II	2.693.529.249	03 Oktober 2024	9	Tahap II batch 9, untuk 8 Desa	SP2DD/Tahap.2/77/X/2024
10	II	1.283.031.600	03 Oktober 2024	10	Tahap II batch 10, untuk 8 Desa	SP2DD/Tahap.2/78/X/2024
11	II	2.833.939.600	18 Oktober 2024	11	Tahap II batch 11, untuk 9 Desa	SP2DD/Tahap.2/93/X/2024
12	II	1.306.950.000	18 Oktober 2024	12	Tahap II batch 12, untuk 9 Desa	SP2DD/Tahap.2/94/X/2024
13	II	1.854.622.000	29 Oktober 2024	13	Tahap II batch 13, untuk 14 Desa	SP2DD/Tahap.2/97/XI/2024
14	II	1.180.284.800	08 November 2024	14	Tahap II batch 14, untuk 4 Desa	SP2DD/Tahap.2/100/XI/2024
15	II	500.687.600	08 November 2024	15	Tahap II batch 15, untuk 4 Desa	SP2DD/Tahap.2/101/XI/2024
16	II	132.473.000	01 November 2024	16	Tahap II batch 16, untuk 1 Desa	SP2DD/Tahap.2/98/XI/2024
17	II	578.389.200	20 November 2024	17	Tahap II batch 17, untuk 2 Desa	SP2DD/Tahap.2/109/XII/2024
18	II	313.336.800	20 November 2024	18	Tahap II batch 18, untuk 2 Desa	SP2DD/Tahap.2/110/XII/2024
Jumlah Tahap II (Rp)					34.361.214.139,00	

Realisasi dana desa tahun 2024 sebesar Rp64.463.162.739,00 atau 99,99% dari target yang ditetapkan pada APBD sebesar Rp64.467.061.000,00. Rincian dana desa tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.42
Rincian Dana Desa - LRA

No.	NAMA KECAMATAN & NAMA DESA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/ (KURANG)	%
1	KEC. RAIMANUK :	8.292.574.000,00	8.291.877.847,00	696.153,00	99,99
	- MANDEU RAIMANUS	884.867.000,00	884.867.000,00	0,00	100,00
	- RENRUA	899.351.000,00	899.351.000,00	0,00	100,00
	- DUAKORAN	969.285.000,00	969.285.000,00	0,00	100,00
	- MANDEU	1.014.880.000,00	1.014.880.000,00	0,00	100,00
	- RAFAE	852.612.000,00	852.612.000,00	0,00	100,00
	- FATURIKA	880.137.000,00	880.137.000,00	0,00	100,00
	- LEUNTOLU	1.032.538.000,00	1.032.538.000,00	0,00	100,00
	- TEUN	832.722.000,00	832.722.000,00	0,00	100,00
	- TASAIN	926.182.000,00	925.485.847,00	696.153,00	99,92
2	KEC. TASIFETO BARAT :	8.537.125.000,00	8.537.125.000,00	0,00	100,00
	- TUKUNENO	1.210.432.000,00	1.210.432.000,00	0,00	100,00
	- NAEKASA	1.409.574.000,00	1.409.574.000,00	0,00	100,00
	- LOOKEU	851.598.000,00	851.598.000,00	0,00	100,00
	- DEROKFATURENE	841.783.000,00	841.783.000,00	0,00	100,00
	- BAKUSTULAMA	1.116.802.000,00	1.116.802.000,00	0,00	100,00
	- RINBESIHAT	1.191.184.000,00	1.191.184.000,00	0,00	100,00
	- NAITIMU	1.148.977.000,00	1.148.977.000,00	0,00	100,00
	- LAWALUTOLUS	766.775.000,00	766.775.000,00	0,00	100,00
3	KEC. NANAET DUABESI :	3.531.834.000,00	3.531.728.800,00	105.200,00	99,99
	- DUBESI	1.002.418.000,00	1.002.418.000,00	0,00	100,00
	- NANAET	762.086.000,00	762.086.000,00	0,00	100,00
	- FOHOEKA	955.975.000,00	955.869.800,00	105.200,00	99,99
	- NANAENOE	811.355.000,00	811.355.000,00	0,00	100,00
4	KEC. KAKULUK MESAK :	6.667.532.000,00	6.667.532.000,00	0,00	100,00
	- FATUKETI	889.976.000,00	889.976.000,00	0,00	100,00
	- DUALAUS	1.180.036.000,00	1.180.036.000,00	0,00	100,00
	- JENILU	1.093.733.000,00	1.093.733.000,00	0,00	100,00
	- KENEBIBI	1.077.985.000,00	1.077.985.000,00	0,00	100,00
	- LEOSAMA	1.084.151.000,00	1.084.151.000,00	0,00	100,00
	- KABUNA	1.341.651.000,00	1.341.651.000,00	0,00	100,00
5	KEC. TASIFETO TIMUR :	10.849.027.000,00	10.847.292.163,00	1.734.837,00	99,98
	- SILAWAN	925.947.000,00	925.947.000,00	0,00	100,00
	- TULAKADI	757.568.000,00	757.568.000,00	0,00	100,00
	- SADI	914.205.000,00	914.203.838,00	1.162,00	99,99

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No.	NAMA KECAMATAN & NAMA DESA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/ (KURANG)	%
	- UMAKLARAN	815.370.000,00	815.369.530,00	470,00	99,99
	- MANLETEN	1.182.720.000,00	1.182.720.000,00	0,00	100,00
	- FATUBAA	873.762.000,00	873.762.000,00	0,00	100,00
	- DAFALA	792.093.000,00	791.251.362,00	841.638,00	99,89
	- TAKIRIN	887.860.000,00	887.836.133,00	23.867,00	99,99
	- BAUHO	838.242.000,00	837.639.800,00	602.200,00	99,93
	- SARABAU	954.716.000,00	954.450.500,00	265.500,00	99,97
	- TIALAI	1.014.778.000,00	1.014.778.000,00	0,00	100,00
	- HALIMODOK	891.766.000,00	891.766.000,00	0,00	100,00
6	KEC. RAIHAT :	5.341.694.000,00	5.340.977.459,00	716.541,00	99,99
	- ASUMANU	842.188.000,00	842.188.000,00	0,00	100,00
	- TOHE	1.155.163.000,00	1.155.163.000,00	0,00	100,00
	- MAUMUTIN	1.069.396.000,00	1.068.684.649,00	711.351,00	99,93
	- RAIFATUS	658.025.000,00	658.020.400,00	4.600,00	99,99
	- AITOUN	854.359.000,00	854.359.000,00	0,00	100,00
	- TOHE LETEN	762.563.000,00	762.562.410,00	590,00	99,99
7	KEC. LASIOLAT :	5.414.481.000,00	5.413.881.000,00	600.000,00	99,99
	- LASIOLAT	710.711.000,00	710.111.000,00	600,00	99,92
	- MANEIKUN	709.184.000,00	709.184.000,00	0,00	100,00
	- LAKANMAU	732.444.000,00	732.444.000,00	0,00	100,00
	- DUALASI RAIULUN	717.508.000,00	717.508.000,00	0,00	100,00
	- DUALASI	803.182.000,00	803.182.000,00	0,00	100,00
	- FATULOTU	949.422.000,00	949.422.000,00	0,00	100,00
	- BAUDAOK	792.030.000,00	792.030.000,00	0,00	100,00
8	KEC. LAMAKNEN :	8.203.871.000,00	8.203.828.464,00	42.536,00	99,99
	- KEWAR	833.396.000,00	833.396.000,00	0,00	100,00
	- FULUR	1.023.454.000,00	1.023.454.000,00	0,00	100,00
	- DUARATO	729.210.000,00	729.210.000,00	0,00	100,00
	- MAKIR	957.237.000,00	957.194.464,00	42.536,00	99,99
	- LAMAKSENULU	782.777.000,00	782.777.000,00	0,00	100,00
	- DIRUN	1.154.807.000,00	1.154.807.000,00	0,00	100,00
	- LEOWALU	947.441.000,00	947.441.000,00	0,00	100,00
	- MAUDEMUM	911.535.000,00	911.535.000,00	0,00	100,00
	- MAHUITAS	864.014.000,00	864.014.000,00	0,00	100,00
9	KEC. LAMAKNEN SELATAN :	7.628.923.000,00	7.628.920.006,00	2.994,00	99,99
	- EKIN	1.069.397.000,00	1.069.397.000,00	0,00	100,00
	- LOONUNA	1.204.921.000,00	1.204.921.000,00	0,00	100,00
	- NUALAIN	875.637.000,00	875.637.000,00	0,00	100,00
	- LAKMARAS	727.060.000,00	727.060.000,00	0,00	100,00
	- HENES	796.520.000,00	796.520.000,00	0,00	100,00
	- DEBULULIK	1.035.280.000,00	1.035.280.000,00	0,00	100,00
	- SISI FATUBERAL	939.234.000,00	939.234.000,00	0,00	100,00
	- LUTHARATO	980.874.000,00	980.871.006,00	2.994,00	99,99
	Jumlah	64.467.061.000,00	64.463.162.739,00	3.898.261,00	99,99

5.1.1.2.3 Transfer Antar Daerah

2024		2023
Anggaran	Realisasi	Realisasi
Rp40.867.611.066,00	Rp34.424.775.169,00	Rp31.481.611.676,00

Transfer Antar Daerah seluruhnya berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi NTT. Penganggaran pendapatan ini selain berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 230/KEP/HK/2024 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kabupaten/Kota TA 2024 tanggal 19 Juni 2024, juga memperhitungkan potensi realisasi pendapatan ini di tahun 2024 berdasarkan *trend* penerimaan dari tahun-tahun sebelumnya.



Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi - Pendapatan Bagi Hasil Pajak tahun 2024 mencapai 84,23% atau mencapai Rp34.424.775.169,00 dari target sebesar Rp40.867.611.066,00.

Rincian realisasi Transfer Antar Daerah berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA adalah sebagai berikut.

Tabel 5.43
Realisasi Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA

No	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	9.845.625.075,00	7.280.921.630,00	(2.564.703.445,00)	73,95	4.294.262.184,00
2	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.212.523.512,00	4.126.418.915,00	(1.086.104.597,00)	79,16	3.333.757.529,00
3	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	12.288.280.512,00	10.135.892.549,00	(2.152.387.963,00)	82,48	11.428.127.117,00
4	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan	5.880.559,00	4.882.355,00	(998.204,00)	83,03	4.816.121,00
5	Bagi Hasil Pajak Rokok	13.515.301.408,00	12.876.659.720,00	(638.641.688,00)	95,27	12.420.648.725,00
	Jumlah	40.867.611.066,00	34.424.775.169,00	(6.442.835.897,00)	84,23	31.481.611.676,00

Realisasi ini jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp2.943.163.493,00 atau 9,35%. Peningkatan terbesar pada komponen bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor sebesar Rp2.986.659.446,00 atau 69,55%, selanjutnya bagi hasil dari bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp792.661.386,00, lalu diikuti bagi hasil pajak rokok sebesar Rp456.010.995,00 dan bagi hasil dari pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan sebesar Rp66.234,00. Sementara komponen bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor turun sebesar Rp(1.292.234.568,00) atau (11,31)%.

5.1.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

2024		2023
Anggaran	Realisasi	Realisasi
Rp13.502.368.169,00	Rp12.080.841.325,08	Rp14.163.099.547,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah tahun 2024 mencapai Rp12.080.841.325,08 atau 89,47% dari target sebesar Rp13.502.368.169,00. Realisasi tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp(2.082.258.221,92) atau (14,70)% Jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2023 sebesar Rp14.163.099.547,00.



Rincian realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.44
Realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah - LRA

No	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	2.977.700.415,00
2	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	13.502.368.169,00	12.080.841.325,08	(1.421.526.843,92)	89,47	11.185.399.132,00
	Jumlah	13.502.368.169,00	12.080.841.325,08	(1.421.526.843,92)	89,47	14.163.099.547,00

5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah

Realisasi pendapatan hibah dari pemerintah pusat tahun 2024 sebesar Rp0,00 atau turun (100,00)% dari tahun 2023 sebesar Rp2.977.700.415,00. Hal ini terjadi karena pada tahun 2024 tidak ada lagi dana hibah yang bersumber dari dana hibah *Rural Empowerment and Agricultural Development Scalling up Initiative (READ-SI)*.

5.1.1.3.2 Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan tahun 2024 sebesar Rp12.080.841.325,08 atau 89,47% dari target yang ditetapkan sebesar Rp13.502.368.169,00. Jumlah ini jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp11.185.399.132,00 maka terjadi peningkatan sebesar Rp895.442.193,08 atau sebesar 8,01%. Rinciannya sebagai berikut.

Tabel 5.45
Realisasi Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan - LRA

No	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	13.502.368.169,00	12.080.841.325,08	(1.421.526.843,92)	89,47	11.185.399.132,00
	Jumlah	13.502.368.169,00	12.080.841.325,08	(1.421.526.843,92)	89,47	11.185.399.132,00

Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP tahun 2024 mencapai Rp12.080.841.325,08 atau 89,47% dari target sebesar Rp13.502.368.169,00. Penyaluran Dana Kapitasi JKN tidak melalui RKUD namun langsung masuk ke rekening bendahara Dana Kapitasi JKN masing-masing Puskesmas. Pengesahan atas



pendapatan Dana Kapitasi JKN dilakukan oleh BUD dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan Dana Kapitasi (SP2DK). Rincian SP2DK disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.46**Rincian Surat Pengesahan Pendapatan Dana Kapitasi - LRA**

No.	Nomor SP2DK	Tanggal	Jumlah
1	SP2DK/JKN-JANUARI/43/VI/2024	27 Juni 2024	909.968.778,00
2	SP2DK/JKN-FEBRUARI/44/VI/2024	27 Juni 2024	930.942.315,00
3	SP2DK/JKN-MARET/45/VI/2024	27 Juni 2024	899.355.304,00
4	SP2DK/JKN-APRIL/46/VI/2024	27 Juni 2024	948.553.023,00
5	SP2DK/JKN-MEI/53/VI/2024	27 Juni 2024	1.634.944.746,89
6	SP2DK/JKN-JUNI/67/IX/2024	19 September 2024	1.028.911.067,00
7	SP2DK/JKN-JULI/69/IX/2024	19 September 2024	1.013.567.386,00
8	SP2DK/JKN-AGUSTUS/73/IX/2024	23 September 2024	969.613.867,00
9	SP2DK/JKN-SEPTEMBER/103/XI/2024	18 November 2024	997.245.001,00
10	SP2DK/JKN-OKTOBER/107/XII/2024	04 Desember 2024	900.813.828,00
11	SP2DK/JKN-NOVEMBER/112/XII/2024	18 Desember 2024	819.950.197,00
12	SP2DK/JKN-DESEMBER/118/XII/2024	31 Desember 2024	1.026.975.812,19
Jumlah			12.080.841.325,08

Rincian pendapatan masing-masing puskesmas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.47**Rincian Pendapatan per Puskesmas - LRA**

No.	Nama Puskesmas	Jumlah (Rp)
1	Puskesmas Kota	1.737.487.949,00
2	Puskesmas Atapupu	718.438.836,00
3	Puskesmas Wedomu	769.729.368,00
4	Puskesmas Aululik	363.354.629,00
5	Puskesmas Haekesak	718.207.583,00
6	Puskesmas Weluli	449.526.265,85
7	Puskesmas Nualain	592.713.994,23
8	Puskesmas Halilulik	1.217.755.812,31
9	Puskesmas Webora	431.822.311,80
10	Puskesmas Haliwen	1.131.555.665,00
11	Puskesmas Laktutus	306.917.106,05
12	Puskesmas Umanen	947.463.333,00
13	Puskesmas Ainiba	155.433.022,00
14	Puskesmas Dilulmil	268.748.239,00
15	Puskesmas Atambua Selatan	1.246.403.678,00
16	Puskesmas Silawan	412.977.492,84
17	Puskesmas Rafae	612.306.040,00
Jumlah		12.080.841.325,08

5.1.2 BELANJA

2024		2023
Anggaran	Realisasi	Realisasi
Rp982.416.959.092,00	Rp890.801.695.780,43	Rp.811.415.835.906,91

Pada tahun 2024 realisasi Belanja Daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan



serta pelayanan masyarakat sebesar Rp890.801.695.780,43 atau mencapai 90,67% dari anggaran sebesar Rp982.416.959.092,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, Belanja Daerah mengalami peningkatan sebesar Rp79.385.859.873,52 atau 9,78%. Peningkatan terbesar pada komponen Belanja Operasional sebesar Rp97.260.712.178,52 atau 14,99%. Sedangkan dua komponen belanja lainnya yaitu Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga mengalami penurunan. Rincian Belanja Daerah disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.48
Realisasi Belanja - LRA

No	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Operasi	825.922.908.386,00	746.040.947.554,11	(79.881.960.831,89)	90,33	648.780.235.375,59
2	Belanja Modal	152.859.682.102,00	144.760.748.226,32	(8.098.933.875,68)	94,70	160.068.785.414,32
3	Belanja Tak Terduga	3.634.368.604,00	0,00	(3.634.368.604,00)	0,00	2.566.815.117,00
	Jumlah	982.416.959.092,00	890.801.695.780,43	(91.615.263.311,57)	90,67	811.415.835.906,91

Selanjutnya realisasi masing-masing komponen Belanja Daerah tahun anggaran 2024 diuraikan sebagai berikut.

5.1.2.1 BELANJA OPERASI

2024		2023
Anggaran	Realisasi	Realisasi
Rp825.922.908.386,00	Rp746.040.947.554,11	Rp648.780.235.375,59

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Realisasi belanja operasi tahun 2024 sebesar Rp746.040.947.554,11 atau 90,33% dari target Rp825.922.908.386,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp648.780.235.375,59 realisasi belanja operasi di tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp97.260.712.178,52 atau 14,99%.



Rinciannya disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.49
Realisasi Belanja Operasi - LRA

No	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pegawai	439.604.392.114,00	393.788.645.206,30	(45.815.746.907,70)	89,58	347.841.205.142,00
2	Belanja Barang dan Jasa	335.049.342.483,00	301.201.258.829,81	(33.848.083.653,19)	89,90	281.186.397.065,59
3	Belanja Hibah	51.254.173.789,00	51.036.043.518,00	(218.130.271,00)	99,57	19.516.633.168,00
4	Belanja Bantuan Sosial	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	236.000.000,00
	Jumlah	825.922.908.386,00	746.040.947.554,11	(79.881.960.831,89)	90,33	648.780.235.375,59

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

2024		2023
Anggaran	Realisasi	Realisasi
Rp439.604.392.114,00	Rp393.788.645.206,30	Rp347.841.205.142,00

Belanja Pegawai dapat direalisasikan sebesar Rp393.788.645.206,30 atau mencapai 89,58% dari target anggaran sebesar Rp439.604.392.114,00. Angka ini menunjukkan adanya Belanja Pegawai yang tidak terealisasi sebesar 10,42%. Hal ini disebabkan oleh adanya Belanja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Bulan Januari s.d. Maret 2024 yang tidak terealisasi akibat pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Pemkab Belu yang baru dilakukan di bulan April 2024. Dibandingkan realisasi tahun 2023, terjadi peningkatan Belanja Pegawai sebesar Rp45.947.440.064,30 atau 13,21%. Realisasi Belanja Pegawai tahun 2024 tersebut, dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.50
Realisasi Belanja Pegawai - LRA

No.	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	337.931.776.055,00	299.690.453.065,00	(38.241.322.990,00)	88,68	252.754.648.146,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	28.964.573.539,00	24.928.710.107,30	(4.035.863.431,70)	86,07	24.608.948.545,00
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN	42.167.316.919,00	39.828.137.563,00	(2.339.179.356,00)	94,45	37.454.082.566,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	14.624.507.274,00	14.166.470.081,00	(458.037.193,00)	96,87	13.905.158.772,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	286.321.380,00	197.559.551,00	(88.761.829,00)	69,00	170.031.613,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	510.880.000,00	459.970.000,00	(50.910.000,00)	90,03	510.876.000,00
7	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.637.929.500,00
8	Belanja Pegawai BLUD	15.119.016.947,00	14.517.344.839,00	(601.672.108,00)	96,02	9.799.530.000,00
	Jumlah	439.604.392.114,00	393.788.645.206,30	(45.815.746.907,70)	89,58	347.841.205.142,00



- 1) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN di tahun 2024 dapat direalisasikan sebesar Rp299.690.453.065,00 atau mencapai 88,68% dari target yang ditetapkan sebesar Rp337.931.776.055,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp46.935.804.919,00 atau 18,57% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.51
Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN - LRA

No	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Gaji Pokok ASN	254.030.246.341,00	234.718.763.679,00	(19.311.482.662,00)	92,40	193.651.637.637,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	23.395.721.885,00	19.184.273.652,00	(4.211.448.233,00)	82,00	16.958.542.069,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.216.822.324,00	6.226.314.000,00	(990.508.324,00)	86,28	6.318.839.950,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	10.551.494.612,00	9.805.219.580,00	(746.275.032,00)	92,93	10.002.026.300,00
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	6.170.396.915,00	5.095.870.000,00	(1.074.526.915,00)	82,59	3.814.307.850,00
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	14.628.825.943,00	11.895.488.058,00	(2.733.337.885,00)	81,32	11.100.769.058,00
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.493.011.377,00	274.333.480,00	(1.218.677.897,00)	18,37	88.428.986,00
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	6.776.503,00	3.483.051,00	(3.293.452,00)	51,40	2.821.850,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	12.214.711.379,00	10.644.449.256,00	(1.570.262.123,00)	87,14	9.254.998.712,00
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.732.152.487,00	460.565.817,00	(3.271.586.670,00)	12,34	389.136.777,00
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	4.491.616.289,00	1.381.692.492,00	(3.109.923.797,00)	30,76	1.173.138.957,00
	Jumlah	337.931.776.055,00	299.690.453.065,00	(38.241.322.990,00)	88,68	252.754.648.146,00

- 2) Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan PNS tahun 2024 sebesar Rp24.928.710.107,30 atau 86,07% dari target sebesar Rp28.964.573.539,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar Rp319.761.562,30 atau 1,30% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.52
Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan PNS - LRA

No	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Tambahan Penghasilan PNS Berdasarkan Beban Kerja ASN	28.964.573.539,00	24.928.710.107,30	(4.035.863.431,70)	86,07	24.608.948.545,00
	Jumlah	28.964.573.539,00	24.928.710.107,30	(4.035.863.431,70)	86,07	24.608.948.545,00

- 3) Realisasi Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN adalah sebesar Rp39.828.137.563,00 atau 94,45% dari target yang ditetapkan sebesar Rp42.167.316.919,00. Dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp37.454.082.566,00, realisasi ini di tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Rp2.374.054.997,00 atau 6,34%, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.53
Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan
Pertimbangan Objektif Lainnya ASN - LRA

No	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	588.991.119,00	558.758.521,00	(30.232.598,00)	94,87	37.480.279,00
2	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	184.250.000,00	44.517.630,00	(139.732.370,00)	24,16	250.236.583,00
3	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	37.166.115.700,00	35.639.975.612,00	(1.526.140.088,00)	95,89	32.216.742.500,00
4	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	2.160.810.100,00	2.082.335.800,00	(78.474.300,00)	96,37	1.488.228.200,00
5	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.062.350.000,00	1.497.750.000,00	(564.600.000,00)	72,62	1.308.250.000,00
6	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134.045.004,00
6	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200.000,00
7	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	7.900.000,00
	Jumlah	42.167.316.919,00	39.828.137.563,00	(2.339.179.356,00)	94,45	37.454.082.566,00

- 4) Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD tahun 2024 sebesar Rp14.166.470.081,00 atau 96,87% dari target yang ditetapkan sebesar Rp14.624.507.274,00. Dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp13.905.158.772,00 realisasi ini di tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp261.311.309,00 atau 1,88%. Rinciannya sebagai berikut.

Tabel 5.54
Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD - LRA

No	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Uang Representasi DPRD	671.790.000,00	670.474.456,00	(1.315.544,00)	99,80	665.490.000,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	82.479.600,00	43.341.900,00	(39.137.700,00)	52,55	44.585.100,00
3	Belanja Tunjangan Beras DPRD	104.284.800,00	61.267.320,00	(43.017.480,00)	58,75	63.439.920,00
4	Belanja Uang Paket DPRD	77.582.000,00	57.435.000,00	(20.147.000,00)	74,03	57.109.500,00
5	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	974.095.500,00	971.964.000,00	(2.131.500,00)	99,78	964.960.500,00
6	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	98.561.000,00	62.574.750,00	(35.986.250,00)	63,49	74.358.900,00
7	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	22.015.350,00	9.378.600,00	(12.636.750,00)	42,60	11.144.700,00
8	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.268.000.000,00	2.268.000.000,00	0,00	100,00	2.249.100.000,00
9	Belanja Tunjangan Reses DPRD	567.000.000,00	378.000.000,00	(189.000.000,00)	66,67	560.700.000,00
10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	30.247.760,00	340.191,00	(29.907.569,00)	1,12	411.000,00
11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	44.044,00	0,00	(44.044,00)	0,00	0,00
12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.131.197.220,00	3.055.383.864,00	(75.813.356,00)	97,58	2.946.034.152,00
13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.315.600.000,00	6.313.000.000,00	(2.600.000,00)	99,96	6.263.100.000,00
14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	281.610.000,00	275.310.000,00	(6.300.000,00)	97,76	4.725.000,00
	Jumlah	14.624.507.274,00	14.166.470.081,00	(458.037.193,00)	96,87	13.905.158.772,00

- 5) Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH tahun 2024 sebesar Rp197.559.551,00 atau 69,00% dari target



yang ditetapkan sebesar Rp286.321.380,00. Dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp170.031.613,00 realisasi ini di tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp27.527.938,00 atau 16,19%. Rinciannya sebagai berikut.

Tabel 5.55
Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH - LRA

No.	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	69.723.560,00	54.600.000,00	(15.123.560,00)	78,31	54.600.000,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.024.000,00	3.528.000,00	(4.496.000,00)	43,97	3.528.000,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	109.240.000,00	98.280.000,00	(10.960.000,00)	89,97	98.280.000,00
4	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.476.160,00	3.765.840,00	(4.710.320,00)	44,43	4.055.520,00
5	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	483.900,00	214.928,00	(268.972,00)	44,42	564.550,00
6	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	11.200,00	1.320,00	(9.880,00)	11,79	1.440,00
7	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.362.560,00	5.362.560,00	0,00	100,00	5.362.560,00
8	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	45.000.000,00	31.806.903,00	(13.193.097,00)	70,68	0,00
9	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	0,00	3.639.543,00
	Jumlah	286.321.380,00	197.559.551,00	(88.761.829,00)	69,00	166.392.070,00

- 6) Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH tahun 2024 sebesar Rp459.970.000,00 atau 90,03% dari target yang ditetapkan sebesar Rp510.880.000,00.

Tabel 5.56
Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya DPRD serta KDH/WKDH - LRA

No	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	101.640.000,00	(9.240.000,00)	91,67	110.880.000,00
2	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	358.330.000,00	(41.670.000,00)	89,58	399.996.000,00
	Jumlah	510.880.000,00	459.970.000,00	(50.910.000,00)	90,03	510.876.000,00

- 7) Realisasi Belanja Pegawai Dana BOSP tahun 2024 tidak dicatat pada komponen Belanja Pegawai karena tidak memenuhi klasifikasi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, di mana kode akun belanja pegawai digunakan untuk mencatat kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD dan Pegawai ASN. Hal ini sejalan dengan amanat Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun



Anggaran 2024 yang menyatakan larangan Pemerintah Daerah menganggarkan dalam jenis belanja pegawai untuk tenaga Non ASN dikarenakan belanja pegawai hanya diperuntukkan bagi PNS daerah, PPK daerah, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dan DPRD. Sedangkan berdasarkan petunjuk teknis pengelolaan BOSP, Belanja BOSP digunakan untuk operasional sekolah dan pembayaran jasa guru non ASN sehingga dikelompokkan dalam Belanja Barang dan Jasa BOSP.

Tabel 5.57
Realisasi Belanja Pegawai Dana BOSP - LRA

No	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pegawai BOS SMPN	0,00	0,00	0,00	0,00	3.529.511.000,00
2	Belanja Pegawai BOS SDI/SDN	0,00	0,00	0,00	0,00	5.108.418.500,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	0,00	8.637.929.500,00

- 8) Realisasi belanja pegawai BLUD tahun 2024 sebesar Rp14.517.344.839,00 atau 96,02% dari target yang ditetapkan sebesar Rp15.119.016.947,00. Dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp9.799.530.000,00 realisasi ini di tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp4.717.814.839,00 atau 48,14% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.58
Realisasi Belanja Pegawai BLUD - LRA

No.	Nomor SP2B	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	BPKAD.970/SP2B-BLUD/2/V/2024	1.102.741.710,00	667.600.000,00
2	BPKAD.970/SP2B-BLUD/3/V/2024	1.120.542.928,00	730.600.000,00
3	BPKAD.970/SP2B-BLUD/4/V/2024	1.310.692.928,00	1.002.449.372,00
4	BPKAD.970/SP2B-BLUD/32/VI/2024	1.129.567.928,00	748.066.000,00
5	BPKAD.970/SP2B-BLUD/59/VII/2024	1.041.242.928,00	701.080.645,00
6	BPKAD.970/SP2B-BLUD/62/VIII/2024	1.321.721.148,00	924.449.372,00
7	BPKAD.970/SP2B-BLUD/75/IX/2024	1.208.037.363,00	557.166.667,00
8	BPKAD.970/SP2D-BLUD/95/X/2024	1.345.683.712,00	579.852.400,00
9	BPKAD.970/SP2B-BLUD/106/XII/2024	1.296.457.330,00	1.008.800.972,00
10	BPKAD.970/SP2B-BLUD/114/XII/2024	1.066.176.261,00	841.662.600,00
11	BPKAD.970/SP2B-BLUD/116/XII/2024	2.574.480.603,00	2.037.801.972,00
Jumlah		14.517.344.839,00	9.799.530.000,00

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

2024		2023
Anggaran	Realisasi	Realisasi
Rp335.049.342.483,00	Rp301.201.258.829,81	Rp281.186.397.065,59

Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2024 sebesar Rp301.201.258.829,81 atau mencapai 89,90% dari target yang



ditetapkan sebesar Rp335.049.342.483,00. Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp20.014.861.764,22 atau 7,12% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yang sebesar Rp281.186.397.065,59. Rincian belanja barang dan jasa disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.59
Realisasi Belanja Barang dan Jasa - LRA

No	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Barang	98.186.103.451,00	89.188.244.655,81	(8.997.858.795,19)	90,84	75.664.815.498,59
2	Belanja Jasa	101.643.454.760,00	90.890.849.992,00	(10.752.604.768,00)	89,42	90.665.880.621,00
3	Belanja Pemeliharaan	1.571.842.000,00	1.492.151.646,00	(79.690.354,00)	94,93	2.089.215.936,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	46.659.936.542,00	42.552.744.005,00	(4.107.192.537,00)	91,20	36.659.428.113,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.346.750.000,00	9.308.450.000,00	(38.300.000,00)	99,59	4.262.390.000,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	20.320.099.765,00	20.192.693.137,00	(127.406.628,00)	99,37	12.278.268.199,00
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	57.321.155.965,00	47.576.125.394,00	(9.745.030.571,00)	83,00	59.566.398.698,00
	Jumlah	335.049.342.483,00	301.201.258.829,81	(33.848.083.653,19)	89,90	281.186.397.065,59

5.1.2.1.2.1 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang tahun 2024 sebesar Rp89.188.244.655,81 atau 90,84% dari target yang ditetapkan sebesar Rp98.186.103.451,00. Dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp75.664.815.498,59 realisasi ini di tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp13.523.429.157,22 atau 17,87%. Rincian Belanja Barang sebagai berikut.

Tabel 5.60
Realisasi Belanja Barang - LRA

No	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis	98.001.864.951,00	89.029.783.278,81	(8.972.081.672,19)	90,84	75.663.535.498,59
1	Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.000,00
2	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	184.238.500,00	158.461.377,00	(25.777.123,00)	86,01	0,00
	Jumlah	98.186.103.451,00	89.188.244.655,81	(8.997.858.795,19)	90,84	75.664.815.498,59

- 1) Belanja Barang Pakai Habis tahun 2024 direalisasikan sebesar Rp89.029.783.278,81 atau 90,84% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp98.001.864.951,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya belanja ini mengalami peningkatan sebesar Rp13.366.247.780,22 atau 17,67%.



Rincian Belanja Barang Pakai Habis disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.61
Realisasi Belanja Barang Pakai Habis - LRA

No.	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	847.180.554,00	277.564.443,00	(569.616.111,00)	32,76	748.007.278,00
2	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.970.706.383,00	5.507.405.431,00	(463.300.952,00)	92,24	5.291.004.708,00
3	Belanja Bahan-Bahan Baku	65.268.800,00	64.208.000,00	(1.060.800,00)	98,37	189.111.100,00
4	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	91.173.000,00	90.855.500,00	(317.500,00)	99,65	0,00
5	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	20.230.000,00
6	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	85.027.500,00	74.505.000,00	(10.522.500,00)	87,62	0,00
7	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	6.200.887.518,00	5.442.493.639,00	(758.393.879,00)	87,77	9.433.954.734,60
8	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.161.371.000,00	2.037.315.235,00	(124.055.765,00)	94,26	1.415.047.598,00
9	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	464.647.000,00	458.660.500,00	(5.986.500,00)	98,71	0,00
10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	5.612.300,00	1.403.075,00	(4.209.225,00)	25,00	0,00
11	Belanja Suku Cadang-Alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865.100,00
12	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	176.490,00
13	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	39.068.500,00	39.068.500,00	0,00	100,00	950.000,00
14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.597.130.077,00	1.546.106.853,00	(51.023.224,00)	96,81	1.782.086.055,00
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	121.498.000,00	120.338.500,00	(1.159.500,00)	99,05	177.477.654,00
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.394.189.655,00	2.275.390.678,00	(118.798.977,00)	95,04	1.860.886.013,00
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	113.360.800,00	109.732.000,00	(3.628.800,00)	96,80	116.736.160,00
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	432.180.100,00	418.805.400,00	(13.374.700,00)	96,91	443.586.917,00
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	52.427.550,00	46.434.550,00	(5.993.000,00)	88,57	61.504.000,00
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	349.198.350,00	328.557.384,00	(20.640.966,00)	94,09	270.242.600,00
21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.613.644,00
22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	141.527.800,00	85.872.014,00	(55.655.786,00)	60,68	115.921.215,00
23	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	268.000.000,00
24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	33.127.600,00	32.221.400,00	(906.200,00)	97,26	13.809.500,00
25	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.074.739.322,00	1.431.060.375,00	(1.643.678.947,00)	46,54	1.072.962.059,50
26	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	913.333.093,00	686.820.675,00	(226.512.418,00)	75,20	137.988.616,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
27	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	49.839.662.149,00	46.839.481.882,81	(3.000.180.266,19)	93,98	37.713.694.069,49
28	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	200.000.000,00	199.700.000,00	(300.000,00)	99,85	0,00
29	Belanja Natura dan Pakan-Naturaa	103.200.000,00	44.635.750,00	(58.564.250,00)	43,25	0,00
30	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	1.580.000,00	0,00	(1.580.000,00)	0,00	0,00
31	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	40.250.000,00	40.154.250,00	(95.750,00)	99,76	27.607.125,00
32	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.519.936.700,00	8.877.400.520,00	(642.536.180,00)	93,25	8.842.590.006,00
33	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.185.925.000,00	4.078.074.522,00	(107.850.478,00)	97,42	3.820.765.450,00
34	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	4.431.879.200,00	4.199.694.000,00	(232.185.200,00)	94,76	0,00
35	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.888.445.000,00	2.236.923.700,00	(651.521.300,00)	77,44	1.265.687.800,00
36	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	100,00	0,00
37	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	77.000.000,00	76.800.000,00	(200.000,00)	99,74	73.373.400,00
38	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	135.000.000,00	134.550.000,00	(450.000,00)	99,67	55.564.000,00
39	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	91.700.000,00	78.075.000,00	(13.625.000,00)	85,14	86.361.700,00
40	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	282.180.400,00	278.772.451,00	(3.407.949,00)	98,79	66.300.000,00
41	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	25.500.000,00	25.050.000,00	(450.000,00)	98,24	44.955.000,00
42	Belanja Pakaian Siaga	242.250.000,00	227.823.870,00	(14.426.130,00)	94,04	0,00
43	Belanja Pakaian Adat Daerah	62.320.000,00	62.200.000,00	(120.000,00)	99,81	63.188.000,00
44	Belanja Pakaian Olahraga	290.971.600,00	125.220.000,00	(165.751.600,00)	43,04	63.767.117,00
45	Belanja Pakaian Paskibraka	81.910.000,00	81.908.181,00	(1.819,00)	100,00	112.520.389,00
Jumlah		98.001.864.951,00	89.029.783.278,81	(8.972.081.672,19)	90,84	75.663.535.498,59

- 2) Realisasi Belanja Barang Tak Habis Pakai tahun 2024 Rp0,00 karena tidak dianggarkan. Rincian Belanja Tak Habis Pakai disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.62
Realisasi Belanja Barang Tak Habis Pakai - LRA

No	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
2	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.000,00



- 3) Realisasi Belanja Aset Tetap yang Tidak memenuhi Kriteria Kapitalisasi pada tahun 2024 sebesar Rp158.461.377,00 atau sebesar 86,01% dari target yang ditentukan sebesar Rp184.238.500,00.

Rincian Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.63
Realisasi Belanja Aset Tetap yang
Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi - LRA

No.	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	60.000.000,00	59.996.377,00	(3.623,00)	99,99	0,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	2.400.000,00	450.000,00	(1.950.000,00)	18,75	0,00
3	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi	8.988.500,00	0,00	(8.988.500,00)	0,00	0,00
4	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	100,00	0,00
5	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	11.250.000,00	10.750.000,00	(500.000,00)	95,56	0,00
6	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	28.800.000,00	15.265.000,00	(13.535.000,00)	53,00	0,00
7	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	800.000,00	0,00	(800.000,00)	0,00	0,00
Jumlah		184.238.500,00	158.461.377,00	(25.777.123,00)	86,01	0,00

5.1.2.1.2.2 Belanja Jasa

Realisasi Belanja Jasa tahun 2024 sebesar Rp90.890.849.992,00 atau 89,42% dari target yang ditetapkan Rp101.643.454.760,00.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp224.969.371,00 atau (0,25)%.



Rincian Belanja Jasa tahun 2024 dengan perbandingan tahun 2023 disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.64
Realisasi Belanja Jasa - LRA

No	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Jasa Kantor	69.689.812.500,00	59.789.546.968,00	(9.900.265.532,00)	85,79	63.869.543.071,00
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	27.318.420.560,00	27.041.186.624,00	(277.233.936,00)	98,99	23.821.611.850,00
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	969.466.100,00	691.959.600,00	(277.506.500,00)	71,38	909.856.000,00
4	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	285.550.000,00	219.411.500,00	(66.138.500,00)	76,84	294.500.000,00
5	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	116.100.000,00	101.092.200,00	(15.007.800,00)	87,07	12.400.000,00
6	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.260.223.000,00	1.251.802.100,00	(8.420.900,00)	99,33	1.035.136.700,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	191.228.000,00	191.186.400,00	(41.600,00)	99,98	0,00
8	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	346.500.000,00	346.500.000,00	0,00	100,00	462.000.000,00
9	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.256.229.600,00	1.133.089.600,00	(123.140.000,00)	90,20	260.833.000,00
10	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	209.925.000,00	125.075.000,00	(84.850.000,00)	59,58	0,00
	Jumlah	101.643.454.760,00	90.890.849.992,00	(10.752.604.768,00)	89,42	90.665.880.621,00

- 1) Realisasi Belanja Jasa Kantor tahun 2024 sebesar Rp59.789.546.968,00 atau 85,79% dari target yang ditetapkan Rp69.689.812.500,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp(4.079.996.103,00) atau (6,39)%. Rincian Belanja Jasa Kantor dengan perbandingan tahun 2023 disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.65
Realisasi Belanja Jasa Kantor- LRA

No.	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	307.200.000,00	228.010.000,00	(79.190.000,00)	74,22	404.700.000,00
2	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.753.440.000,00	1.489.655.000,00	(263.785.000,00)	84,96	1.785.406.000,00
4	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	7.385.839.320,00	6.522.290.320,00	(863.549.000,00)	88,31	5.746.690.000,00
5	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	57.500.000,00	52.500.000,00	(5.000.000,00)	91,30	20.000.000,00
6	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	6.004.000,00	0,00	(6.004.000,00)	0,00	0,00
7	Honorarium Rohaniwan	5.950.000,00	3.500.000,00	(2.450.000,00)	58,82	2.550.000,00
8	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
9	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200.000,00
10	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	511.700.000,00	478.800.000,00	(32.900.000,00)	93,57	555.450.000,00
11	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	4.074.000.000,00	3.585.750.000,00	(488.250.000,00)	88,02	6.536.250.000,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
12	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	24.704.271.343,00	19.709.166.227,00	(4.995.105.116,00)	79,78	17.046.430.491,00
13	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	304.021.000,00	16.899.560,00	(287.121.440,00)	5,56	26.914.000,00
14	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	832.572.000,00	832.572.000,00	0,00	100,00	9.270.000,00
15	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	220.500.000,00	220.500.000,00	0,00	100,00	385.000.000,00
16	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	43.750.000,00	43.750.000,00	0,00	100,00	304.500.000,00
17	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	296.250.000,00	296.250.000,00	0,00	100,00	652.225.000,00
18	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	202.500.000,00	30.000.000,00	(172.500.000,00)	14,81	49.000.000,00
19	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.029.000.000,00	1.029.000.000,00	0,00	100,00	8.676.092.704,00
20	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	250.250.000,00	241.500.000,00	(8.750.000,00)	96,50	700.000.000,00
21	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	10.685.079.400,00	9.671.875.000,00	(1.013.204.400,00)	90,52	5.751.665.000,00
22	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.568.825.000,00	1.342.500.000,00	(226.325.000,00)	85,57	560.875.000,00
23	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	3.739.000.000,00	3.711.700.000,00	(27.300.000,00)	99,27	3.595.680.000,00
24	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2.037.400.000,00	1.592.000.000,00	(445.400.000,00)	78,14	1.256.950.000,00
25	Belanja Jasa Tenaga Supir	550.000.000,00	543.000.000,00	(7.000.000,00)	98,73	544.250.000,00
26	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	79.500.000,00	79.500.000,00	0,00	100,00	48.000.000,00
27	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	264.650.000,00	244.400.000,00	(20.250.000,00)	92,35	40.950.000,00
28	Belanja Jasa Tata Rias	11.625.000,00	11.625.000,00	0,00	100,00	9.500.000,00
29	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	66.000.000,00
30	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00	138.107.875,00
31	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	1.236.600.000,00	1.205.140.000,00	(31.460.000,00)	97,46	1.209.025.000,00
32	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	0,00
33	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	34.440.000,00	34.435.000,00	(5.000,00)	99,99	0,00
34	Belanja Jasa Kalibrasi	175.330.000,00	165.575.800,00	(9.754.200,00)	94,44	82.680.000,00
35	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	0,00
36	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	504.950.000,00	432.272.554,00	(72.677.446,00)	85,61	242.200.000,00
37	Belanja Tagihan Telepon	150.039.000,00	120.310.150,00	(29.728.850,00)	80,19	151.095.115,00
38	Belanja Tagihan Air	440.810.000,00	404.637.806,00	(36.172.194,00)	91,79	412.758.500,00
39	Belanja Tagihan Listrik	1.508.990.000,00	1.279.704.578,00	(229.285.422,00)	84,81	1.244.654.722,00
40	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	37.920.000,00	32.857.000,00	(5.063.000,00)	86,65	47.274.000,00
41	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	942.063.000,00	796.310.346,00	(145.752.654,00)	84,53	916.755.392,00
42	Belanja Paket/Pengiriman	58.151.436,00	9.277.800,00	(48.873.636,00)	15,95	12.199.560,00
43	Belanja Penambahan Daya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	0,00
44	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	593.403.001,00	332.291.758,00	(261.111.243,00)	56,00	402.814.547,00
45	Belanja Lembur	2.677.089.000,00	2.656.741.350,00	(20.347.650,00)	99,24	1.706.022.000,00
46	Belanja Medical Check Up	342.000.000,00	276.049.719,00	(65.950.281,00)	80,72	147.908.195,00
47	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363.199.970,00
Jumlah		69.689.812.500,00	59.789.546.968,00	(9.900.265.532,00)	85,79	63.869.543.071,00



- 2) Realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi tahun 2024 sebesar Rp27.041.186.624,00 atau 98,99% dari target yang ditetapkan sebesar Rp27.318.420.560,00. Belanja ini dikelola oleh Dinas Kesehatan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp3.219.574.774,00 atau 13,52%, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.66
Realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi - LRA

No.	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	80.000.000,00	57.283.264,00	(22.716.736,00)	0,00	0,00
2	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Peserta PBPU dan BP di Kelas 3	27.129.531.600,00	26.884.795.000,00	(244.736.600,00)	99,10	23.759.642.800,00
3	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	44.048.152,00	44.048.152,00	0,00	100,00	27.541.800,00
4	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	64.840.808,00	55.060.208,00	(9.780.600,00)	84,92	34.427.250,00
Jumlah		27.318.420.560,00	27.041.186.624,00	(277.233.936,00)	98,99	23.821.611.850,00

Atas realisasi Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Peserta PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan BP (Bukan Pekerja) tahun 2024 sebesar Rp26.884.795.000,00 telah dilakukan rekonsiliasi secara periodik (bulanan) antara Dinas Kesehatan dengan BPJS Kesehatan Cabang Atambua.

- 3) Realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin tahun 2024 sebesar Rp691.959.600,00 atau 71,38% dari target yang ditetapkan sebesar Rp969.466.100,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp(217.896.400,00) atau (23,95)%. Rincian Belanja Sewa Peralatan dan Mesin tahun 2024 dengan perbandingan tahun 2023 disajikan sebagai berikut.



Tabel 5.67
Realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin - LRA

No	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	514.370.000,00	443.662.600,00	(70.707.400,00)	86,25	210.444.000,00
2	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	49.600.000,00	45.600.000,00	(4.000.000,00)	91,94	34.850.000,00
3	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	87.000.000,00	56.000.000,00	(31.000.000,00)	64,37	11.920.000,00
4	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	85.970.000,00
5	Belanja Sewa Peralatan Tukang Kayu	5.310.000,00	5.310.000,00	0,00	100,00	0,00
6	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	52.750.000,00
7	Belanja Sewa Mebel	137.225.000,00	131.812.000,00	(5.413.000,00)	96,06	119.460.000,00
8	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000.000,00
9	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
10	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	22.000.000,00	7.000.000,00	(15.000.000,00)	31,82	5.000.000,00
11	Belanja Sewa Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
12	Belanja Sewa Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.000,00
13	Belanja Sewa Wave Generator and Absorber	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00
14	Belanja Sewa Komputer Jaringan	148.811.100,00	0,00	(148.811.100,00)	0,00	198.000.000,00
15	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan	5.150.000,00	2.575.000,00	(2.575.000,00)	50,00	0,00
16	Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000.000,00
	Jumlah	969.466.100,00	691.959.600,00	(277.506.500,00)	71,38	909.856.000,00

- 4) Realisasi Belanja Sewa Gedung dan Bangunan tahun 2024 sebesar Rp219.411.500,00 atau 76,84% dari target Rp285.550.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp(75.088.500,00) atau (25,50)%. Rincian Belanja Sewa Gedung dan Bangunan tahun 2024 dengan perbandingan tahun 2023 disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.68
Realisasi Belanja Sewa Gedung dan Bangunan - LRA

No	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	76.750.000,00	67.611.500,00	(9.138.500,00)	88,09	61.000.000,00
2	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	207.300.000,00	150.300.000,00	(57.000.000,00)	72,50	226.000.000,00
3	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	0,00
4	Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum	0,00	0,00	0,00	0,00%	7.500.000,00
	Jumlah	285.550.000,00	219.411.500,00	(66.138.500,00)	76,84	294.500.000,00



5) Realisasi Belanja Sewa Aset Tetap lainnya tahun 2024 sebesar Rp101.092.200,00 dari target Rp116.100.000,00 atau sebesar 87,07%. Belanja tersebut berupa Belanja Sewa Musik Lainnya sebesar Rp2.500.000,00, Belanja Sewa Alat Musik sebesar Rp94.992.200,00, dan Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya sebesar Rp3.600.000,00. Jika dibandingkan tahun 2023, Belanja Sewa Aset Tetap lainnya tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp88.692.200,00 atau 715,26%.

6) Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi tahun 2024 sebesar Rp1.251.802.100,00 atau 99,33% dari target Rp1.260.223.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp216.665.400,00 atau 20,93%, yang dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.69
Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi - LRA

No	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektural	0,00	0,00	0,00	0,00	59.673.600,00
2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	20.000.000,00	19.991.100,00	(8.900,00)	99,96	0,00
3	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	0,00	0,00	0,00	0,00	29.980.000,00
4	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	902.498.000,00	894.827.000,00	(7.671.000,00)	99,15	925.486.100,00
5	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	0,00	0,00	0,00	0,00	19.997.000,00
6	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	262.725.000,00	262.725.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	75.000.000,00	74.259.000,00	(741.000,00)	99,01	0,00
Jumlah		1.260.223.000,00	1.251.802.100,00	(8.420.900,00)	99,33	1.035.136.700,00

7) Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi tahun 2024 sebesar Rp191.186.400,00 atau 99,98% dari target Rp191.228.000,00. Belanja ini tidak dianggarkan dan direalisasikan pada tahun sebelumnya. Belanja ini ditujukan untuk jasa konsultansi kegiatan penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan.

8) Realisasi Belanja Beasiswa Pendidikan PNS tahun 2024 sebesar Rp346.500.000,00 atau 100% dari target yang ditetapkan sebesar Rp346.500.000,00. Jika



dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp(115.500.000,00) atau (25,00)%. Beasiswa diberikan kepada 1 orang ASN untuk menempuh pendidikan Sarjana (S1) dan 4 orang ASN untuk menempuh pendidikan magister (S2).

Rincian Belanja Beasiswa Pendidikan PNS tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.70
Realisasi Belanja Beasiswa Pendidikan PNS - LRA

No	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Bertambah/ (berkurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	46.500.000,00	46.500.000,00	0,00	100,00	162.000.000,00
2	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	100,00	300.000.000,00
Jumlah		346.500.000,00	346.500.000,00	0,00	100,00	462.000.000,00

- 9) Realisasi Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan tahun 2024 sebesar Rp1.133.089.600,00 atau 90,20% dari target Rp1.256.229.600,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp872.256.600,00 atau 334,41%. Rinciannya sebagai berikut.

Tabel 5.71
Realisasi Belanja Kursus/Pelatihan - LRA

No	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja kursus singkat/pelatihan	1.006.429.600,00	884.339.600,00	(122.090.000,00)	87,87	260.833.000,00
2	Belanja diklat kepemimpinan	249.800.000,00	248.750.000,00	(1.050.000,00)	99,58	0,00
Jumlah		1.256.229.600,00	1.133.089.600,00	(123.140.000,00)	90,20	260.833.000,00

- 10) Realisasi Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah tahun 2024 sebesar Rp125.075.000,00 atau 59,58% dari target Rp209.925.000,00. Belanja ini tidak dianggarkan dan direalisasikan pada tahun sebelumnya.



Rinciannya sebagai berikut.

Tabel 5.72
Realisasi Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN - LRA

No	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	100,00	0,00
2	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	0,00
3	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	50,00	0,00
4	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.000.000,00	3.500.000,00	(500.000,00)	87,50	0,00
5	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	193.175.000,00	109.325.000,00	(83.850.000,00)	56,59	0,00
Jumlah		209.925.000,00	125.075.000,00	(84.850.000,00)	59,58	0,00

5.1.2.1.2.3 Belanja Pemeliharaan

Realisasi Belanja Pemeliharaan tahun 2024 sebesar Rp1.492.151.646,00 atau 94,93% dari target sebesar Rp 1.571.842.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp2.089.215.936,00, tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp(597.064.290,00) atau (28,58)%. Rincian Belanja Pemeliharaan tahun 2024 dengan perbandingan tahun 2023 disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.73
Belanja Pemeliharaan - LRA

No	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.361.842.000,00	1.283.112.876,00	(78.729.124,00)	94,22	1.739.344.936,00
2	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00
3	Belanja Pemeliharaan Jalan Jaringan, dan Irigasi	210.000.000,00	209.038.770,00	(961.230,00)	99,54	149.871.000,00
Jumlah		1.571.842.000,00	1.492.151.646,00	(79.690.354,00)	94,93	2.089.215.936,00

- 1) Realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin tahun 2024 sebesar Rp1.283.112.876,00 atau 94,22% dari target sebesar Rp1.361.842.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya Rp1.739.344.936,00, tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp(456.232.060,00) atau (26,23)%, yang dapat dirinci sebagai berikut.



Tabel 5.74
Realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - LRA

No.	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	100.000.000,00	99.998.146,00	(1.854,00)	100,00	99.999.552,00
2	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
3	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	205.400.000,00	177.701.970,00	(27.698.030,00)	86,52	147.692.108,00
4	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	184.450.000,00	159.296.500,00	(25.153.500,00)	86,36	702.731.205,00
5	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	50.000.000,00	49.750.000,00	(250.000,00)	99,50	0,00
6	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	80.000.000,00	69.897.500,00	(10.102.500,00)	87,37	147.914.176,00
7	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	100,00	0,00
8	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bemesin-	0,00	0,00	0,00	0,00	3.874.000,00
9	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah	385.000.000,00	384.923.260,00	(76.740,00)	99,98	479.971.895,00
10	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor	47.500.000,00	47.480.000,00	(20.000,00)	99,96	6.691.000,00
11	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	0,00
12	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
13	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat	44.000.000,00	40.075.000,00	(3.925.000,00)	91,08	38.450.000,00
14	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	0,00
15	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500.000,00
16	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	100,00	0,00
17	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	14.250.000,00	12.435.000,00	(1.815.000,00)	87,26	13.521.500,00
18	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	54.800.000,00	45.148.500,00	(9.651.500,00)	82,39	21.382.500,00
19	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00	4.500.000,00
20	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemukiman-Sumur-Sumur Pemboran	53.542.000,00	53.542.000,00	0,00	100,00	0,00
21	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	59.450.000,00	59.415.000,00	(35.000,00)	99,94	30.000.000,00
Jumlah		1.361.842.000,00	1.283.112.876,00	(78.729.124,00)	94,22	1.739.344.936,00



- 2) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan tahun 2024 tidak teralisasi dan tidak dianggarkan.
Rinciannya sebagai berikut.

Tabel 5.75
Realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - LRA

No	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00

- 3) Realisasi belanja pemeliharaan jalan, irigasi dan jaringan (Belanja Pemeliharaan Bangunan Air Irigasi Lainnya) tahun 2024 sebesar Rp209.038.770,00 atau 99,54% dari target Rp210.000.000,00. Realisasi ini mengalami peningkatan sebesar Rp59.167.770,00 atau 39,48% dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp149.871.000,00.

5.1.2.1.2.4 Belanja Perjalanan Dinas

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas tahun 2024 sebesar Rp42.552.744.005,00 atau 91,20% dari target Rp46.659.936.542,00. Realisasi ini mengalami peningkatan sebesar 16,08% atau sebesar Rp5.893.315.892,00 dari pencapaian tahun 2023 sebesar Rp36.659.428.113,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.76
Realisasi Belanja Perjalanan Dinas - LRA

No	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	46.183.602.542,00	42.161.300.205,00	(4.022.302.337,00)	91,29	36.475.065.453,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	476.334.000,00	391.443.800,00	(84.890.200,00)	82,18	184.362.660,00
	Jumlah	46.659.936.542,00	42.552.744.005,00	(4.107.192.537,00)	91,20	36.659.428.113,00

- 1) Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri tahun 2024 sebesar Rp42.161.300.205,00 atau 91,29% dari target Rp46.183.602.542,00. Realisasi ini mengalami peningkatan sebesar 15,59% atau sebesar Rp5.686.234.752,00 dari pencapaian tahun 2023



sebesar Rp36.475.065.453,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.77
Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri - LRA

No	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	42.637.092.542,00	38.852.024.105,00	(3.785.068.437,00)	91,12	31.398.287.371,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.200.000,00	8.416.000,00	(3.784.000,00)	68,98	304.600.000,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.534.310.000,00	3.300.860.100,00	(233.449.900,00)	93,39	4.744.878.082,00
4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300.000,00
	Jumlah	46.183.602.542,00	42.161.300.205,00	(4.022.302.337,00)	91,29	36.475.065.453,00

- 2) Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri tahun 2024 sebesar Rp391.443.800,00 atau 82,18% dari target Rp476.334.000,00. Realisasi ini mengalami peningkatan 112,32% atau sebesar Rp207.081.140,00 dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp184.362.660,00.

5.1.2.1.2.5 Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Realisasi Belanja Uang yang diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2024 sebesar Rp9.308.450.000,00 atau 99,59% dari target Rp9.346.750.000,00. Jika dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp4.262.390.000,00, realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp5.046.060.000,00 atau 118,39%. Rincian Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lainnya/Masyarakat tahun 2024 dengan perbandingan tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.78
Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat - LRA

No	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.127.050.000,00	1.100.300.000,00	(26.750.000,00)	97,63	407.250.000,00
2	Belanja Beasiswa	8.219.700.000,00	8.208.150.000,00	(11.550.000,00)	99,86	3.770.140.000,00
3	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00
	Jumlah	9.346.750.000,00	9.308.450.000,00	(38.300.000,00)	99,59	4.262.390.000,00



Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat per SKPD dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.79
Rincian Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat - LRA

No.	SKPD	Realisasi (Rp)		Realisasi per SKPD (Rp)
		Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Belanja Beasiswa	
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	749.300.000,00	6.844.800.000,00	7.594.100.000,00
2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
4	Bagian Kesejahteraan Rakyat	0,00	1.348.350.000,00	1.348.350.000,00
5	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	341.000.000,00	0,00	341.000.000,00
Jumlah		1.100.300.000,00	8.208.150.000,00	9.308.450.000,00

1) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Belanja Hadiah yang bersifat perlombaan sebesar Rp749.300.000,00 diberikan kepada atlet POPDA VI dan PRA PON XXI sebagai bonus atas prestasi Atlet tahun 2023 dan kegiatan perlombaan lainnya yang dilaksanakan pada tahun 2024.

Belanja Beasiswa sebesar Rp6.844.800.000,00 diberikan kepada 3.068 peserta didik Sekolah Dasar (SD) dan 2.636 peserta didik Sekolah Menengah Pertama (SMP). Atas nilai tersebut, pada tahun 2025 terdapat pengembalian Belanja Beasiswa ke Kas Daerah Pemkab Belu sebesar Rp219.600.000,00 yang terdiri dari:

- Beasiswa SD sebesar Rp127.200.000,00 atas 77 peserta didik; dan
- Beasiswa SMP sebesar Rp92.400.000,00 atas 106 peserta didik.

Pengembalian atas belanja beasiswa ini terjadi karena penerima yang tidak sesuai dengan persyaratan penerima bantuan biaya pendidikan di antaranya telah pindah, meninggal dunia, tidak aktif, nama ganda, dan orang tua ASN. Pengembalian tersebut melalui STS



tanggal 12 Maret 2025 Nomor STS/655/LLPAD sebesar Rp64.800.000,00 dan STS/656/LLPAD sebesar Rp62.400.000,00, serta STS tanggal 22 Mei 2025 Nomor STS/1384/LLPAD sebesar Rp46.800.000,00 dan STS/1385/LLPAD sebesar Rp45.600.000,00, yang seluruhnya diakui di tahun 2025 sebagai lain-lain PAD yang sah. Pengembalian ini telah dicatat mengurangi Beban Beasiswa tahun 2024 pada Laporan Operasional Pemkab Belu tahun 2024.

- 2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memberikan beasiswa sebesar Rp15.000.000,00 kepada dua orang mahasiswa dalam membantu menyelesaikan penelitian tugas akhir mereka.
- 3) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Belanja hadiah yang bersifat perlombaan sebesar Rp10.000.000,00 diberikan kepada empat jenis perlombaan Posyandu tingkat Kabupaten, yakni Lomba Posyandu Tingkat Madya, Tingkat Mandiri, Tingkat Pratama, dan Tingkat Purnama.
- 4) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Belanja Beasiswa sebesar Rp1.348.350.000,00 diberikan kepada 80 mahasiswa.
- 5) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Belanja hadiah yang bersifat perlombaan sebesar Rp341.000.000,00 diberikan kepada juara peserta lomba Pentas Seni Budaya tingkat SD, SMP, dan Sekolah Menengah Atas (SMA), serta perlombaan lainnya.

5.1.2.1.2.6 Belanja Barang dan Jasa BOSP

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOSP tahun 2024 sebesar Rp20.192.693.137,00 atau mencapai 99,37% dari target yang ditetapkan sebesar Rp20.320.099.765,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp12.278.268.199,00, terdapat peningkatan sebesar Rp7.914.424.938,00 atau 64,46% karena penganggaran



dan penggunaan Dana BOSP untuk pembayaran jasa guru non ASN yang pada tahun 2023 dikelompokkan dalam Belanja Pegawai, pada tahun 2024 dikelompokkan dalam Belanja Barang dan Jasa BOSP untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, di mana kode akun belanja pegawai digunakan untuk mencatat kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD dan Pegawai ASN.

Rincian Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagai berikut.

Tabel 5.80
Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOSP - LRA

No.	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	19.648.984.865,00	19.538.175.637,00	(110.809.228,00)	99,44	12.278.268.199,00
2	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	441.878.200,00	425.280.800,00	(16.597.400,00)	96,24	
2	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	74.036.700,00	74.036.700,00	0,00	100,00	
3	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	110.200.000,00	110.200.000,00	0,00	100,00	
4	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	
Jumlah		20.320.099.765,00	20.192.693.137,00	(127.406.628,00)	99,37	12.278.268.199,00

Rincian lebih lanjut untuk tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.81
Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOSP - LRA

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	19.722.312.337,00
1.1	Belanja Barang dan Jasa BOSP - SD	11.883.635.139,00
1.2	Belanja Barang dan Jasa BOSP - SMP	7.654.440.498,00
1.3	Belanja Barang dan Jasa BOSP - PAUD	74.036.700,00
1.4	Belanja Barang dan Jasa BOSP - KESETARAAN	110.200.000,00
2	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	470.380.800,00
2.1	Belanja Barang dan Jasa BOSP - SD	303.929.300,00
2.2	Belanja Barang dan Jasa BOSP - SMP	121.451.500,00
2.3	Belanja Barang dan Jasa BOSP - KESETARAAN	45.000.000,00
	Jumlah	20.192.693.137,00



Realisasi per sekolah disajikan sebagai berikut.

1) Belanja barang dan jasa dana BOS SMPN

Tabel 5.82
Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS SMPN - LRA

NO.	NAMA SEKOLAH	BELANJA BARANG JASA	
		REGULER (Rp)	KINERJA (Rp)
1	SMPN 3 ATAMBUA	340.760.500,00	0,00
2	SMPN KIMBANA	343.644.900,00	0,00
3	SMPN SATU ATAP TALA	68.541.868,00	0,00
4	SMPN RINBESIHAT	114.360.500,00	0,00
5	SMPN TULATUDIK	34.588.500,00	3.182.000,00
6	SMPN SATAP BENEMETA	89.448.000,00	0,00
7	SMPN DEROKMASIN	74.310.000,00	0,00
8	SMPN 1 ATAMBUA	967.816.350,00	51.922.000,00
9	SMPN 1 TASIFETO TIMUR	322.189.750,00	0,00
10	SMPN SILAWAN	232.655.000,00	0,00
11	SMPN DAFALA	72.968.000,00	0,00
12	SMPN SADI	109.889.500,00	0,00
13	SMPN 1 LAMAKNEN	266.416.400,00	0,00
14	SMPN SATAP EKIN II	136.565.400,00	0,00
15	SMPN SATAP KEWAR	92.206.000,00	0,00
16	SMPN 1 TASIFETO BARAT	311.870.910,00	0,00
17	SMPN HALIWEN	294.700.000,00	0,00
18	SMPN AINIBA	92.875.900,00	0,00
19	SMPN 2 TASIFETO TIMUR	279.896.000,00	0,00
20	SMPN SATAP WETEAR	91.663.500,00	7.379.000,00
21	SMPN TURISKAIN	130.700.600,00	0,00
22	SMPN DUAMANU	71.641.800,00	0,00
23	SMPN SATAP OBOR	120.906.700,00	0,00
24	SMPN RAIMANUK	222.630.000,00	0,00
25	SMPN MANDALA	223.633.300,00	0,00
26	SMPN LOROTUAN	179.950.700,00	0,00
27	SMPN LASIOLAT	134.934.700,00	0,00
28	SMPN PIEBULAK	171.418.100,00	0,00
29	SMPN SATAP SABULMIL	89.476.800,00	13.045.000,00
30	SMPN SATAP WEKAKEU	91.334.820,00	39.250.000,00
31	SMPN NUALAIN	93.779.500,00	0,00
32	SMPN UMANEN	191.890.500,00	4.873.500,00
33	SMPN 2 ATAMBUA	739.602.200,00	1.800.000,00
34	SMPN LAKTUTUS	137.525.800,00	0,00
35	SMPN HALIULUN	142.790.000,00	0,00
36	SMPN NOEBITI	107.549.500,00	0,00
37	SMPN HALIBETE	92.645.000,00	0,00
38	SMPN HALITUKU	76.872.000,00	0,00
39	SMPN ASUULUN	113.980.000,00	0,00
40	SMPN SATAP FULUR	92.504.200,00	0,00
41	SMPN KNABU	41.842.900,00	0,00
42	SMPN SATAP TUBAKI	49.464.400,00	0,00
Jumlah		7.654.440.498,00	121.451.500,00



2) Belanja barang dan jasa dana BOS SDI/SDN

Tabel 5.83
Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS SDI/SDN - LRA

NO.	NAMA SEKOLAH	BELANJA BARANG JASA	
		REGULER (Rp)	KINERJA (Rp)
1	SDI HALIBESIN	180.339.350,00	0,00
2	SDI HALIKELLEN	151.474.000,00	0,00
3	SDI KIMBANA	121.708.292,00	0,00
4	SDI HEDANFEHAN	116.821.500,00	0,00
5	SDI AIHUN	59.374.100,00	0,00
6	SDN BENEMETA	108.800.000,00	0,00
7	SDI TALA	125.723.000,00	0,00
8	SDI MEANMANE	107.250.000,00	0,00
9	SDI LOOKEU	65.055.536,00	0,00
10	SDI NUSIKUN	213.657.100,00	0,00
11	SDN BAKUSTULAMA	47.650.000,00	0,00
12	SDN OETFO	141.300.000,00	0,00
13	SDI HALIULUN	182.624.000,00	0,00
14	SDI TANAH MERAH I	450.165.000,00	35.000.000,00
15	SDI TANAH MERAH II	199.700.250,00	7.500.000,00
16	SDI TENUBOT	528.414.000,00	9.800.000,00
17	SDI TENUKIHK	159.030.469,00	8.350.000,00
18	SDI KOTAREN	187.437.000,00	0,00
19	SDN MATITIS-BAUKOEK	74.057.000,00	0,00
20	SDN FATUBAA	84.864.000,00	0,00
21	SDN HAEKRIIT	39.138.000,00	1.113.000,00
22	SDN SIRANI	114.900.000,00	0,00
23	SDI FATUBESI	127.262.300,00	0,00
24	SDI ASULAIT	72.089.000,00	0,00
25	SDI DEBUBOT	105.052.000,00	0,00
26	SDI DEBUKLARAN	67.110.000,00	0,00
27	SDI WEDOMU	246.929.000,00	95.000.000,00
28	SDI MOTAAIN	205.601.100,00	19.300.000,00
29	SDI LALOSUK	164.790.200,00	0,00
30	SDI SALORE	120.817.000,00	0,00
31	SDN AITAMAN	56.086.800,00	0,00
32	SDN RAIBASIN	125.355.560,00	0,00
33	SDN MOTABENAR	60.341.000,00	0,00
34	SDN LIANAIN	59.900.000,00	0,00
35	SDI DUARATO	69.783.000,00	4.928.000,00
36	SDI EKIN II	43.664.000,00	210.800,00
37	SDI EKIN I	68.000.000,00	0,00
38	SDI KEWAR	58.700.000,00	0,00
39	SDI HOLPARA	36.900.000,00	0,00
40	SDI BUILALU	83.463.600,00	0,00
41	SDI BEISURIK	89.911.000,00	0,00
42	SDI MANULOR	37.553.377,00	3.391.000,00
43	SDN SINAR ATUBESI	40.075.300,00	0,00
44	SDN FATUKMETAN	275.100.000,00	0,00
45	SDN HALIWEN	290.002.700,00	0,00
46	SDI FATUATIS	109.018.100,00	0,00
47	SDI AINIBA	169.045.000,00	0,00
48	SDI SUSUK	129.237.800,00	0,00
49	SDI WESASUIT	98.044.200,00	0,00
50	SDN HALIMEA	59.370.000,00	0,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

NO.	NAMA SEKOLAH	BELANJA BARANG JASA	
		REGULER (Rp)	KINERJA (Rp)
51	SDN WELIURAI	70.775.000,00	0,00
52	SDI DEROK	125.795.000,00	0,00
53	SDI BEITAUS	48.583.600,00	0,00
54	SDI WETEAR	70.060.000,00	0,00
55	SDI RUSAN	51.910.000,00	0,00
56	SDN FATUBELAR	32.334.700,00	0,00
57	SDN FATULORO	57.000.000,00	0,00
58	SDN SABURAKA	60.599.000,00	0,00
59	SDN SEKUTREN	209.555.000,00	0,00
60	SDN TURISKAIN	116.179.000,00	0,00
61	SDN WEMORIHAS	185.678.000,00	0,00
62	SDN TALIOAN	98.321.000,00	0,00
63	SDI KNABU	129.601.200,00	0,00
64	SDI BUITAE	108.795.000,00	12.679.800,00
65	SDI BEKOTARUIK	123.788.500,00	0,00
66	SDI SUKABITETEK	204.308.600,00	0,00
67	SDI MOTAMARO	190.194.000,00	0,00
68	SDI OBOR	125.354.000,00	0,00
69	SDN FOHOMANE	63.213.200,00	3.015.000,00
70	SDI TAKARABAT	61.648.000,00	0,00
71	SDI WEHASAN	58.559.000,00	0,00
72	SDI MAULAKAK	80.104.600,00	0,00
73	SDI LOOHALI	81.900.000,00	0,00
74	SDN MOTAAN	25.300.000,00	0,00
75	SDN BAUDAOK	56.832.000,00	7.226.500,00
76	SDI JOILTOI	45.494.000,00	0,00
77	SDI WEKAKEU	76.437.000,00	0,00
78	SDI LOONUNA	96.690.000,00	19.000.000,00
79	SDI SABULMIL	75.600.000,00	10.975.200,00
80	SDI FOHOLULIK	78.129.650,00	0,00
81	SDN HANOWAI	27.380.000,00	4.350.000,00
82	SDN NOKARWEK	81.737.000,00	16.000.000,00
83	SDN WIRASAKTI	377.059.000,00	23.775.000,00
84	SDI TULAMALAE	349.229.700,00	11.465.000,00
85	SDI WEKATIMUN	318.200.000,00	10.850.000,00
86	SDN ONOBOI	159.115.000,00	0,00
87	SDI TINI	534.980.199,00	0,00
88	SDI ASUULUN	234.600.000,00	0,00
89	SDI NUFUAK	150.846.000,00	0,00
90	SDI TUBAKI	95.911.000,00	0,00
91	SDI WEKMUTIS	77.552.156,00	0,00
92	SDI NANAENOE	90.701.400,00	0,00
93	SDN WEHEDAN	48.900.000,00	0,00
Jumlah		11.883.635.139,00	303.929.300,00

5.1.2.1.2.7 Belanja Barang dan Jasa BLUD

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD tahun 2024 sebesar Rp47.576.125.394,00 atau 83,00% dari target yang ditetapkan tahun 2024 sebesar Rp57.321.155.965,00. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar (20,13)% atau



sebesar Rp(11.990.273.304,00) dari tahun 2023 sebesar Rp59.566.398.698,00.

Rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD tahun 2024 dengan perbandingan tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 5.84
Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD - LRA

No.	Nomor Bukti	Realisasi	
		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	RSUD.BLUD/059/445/SP3B/01/II/2024	195.163.958,00	1.117.435.868,00
2	RSUD.BLUD/059/445/SP3B/02/III/2024	3.571.295.020,00	1.069.209.778,00
3	RSUD.BLUD/059/445/SP3B/03/IV/2024	2.474.602.342,00	6.322.806.596,00
4	RSUD.BLUD/059/445/SP3B/04/V/2024	1.892.934.009,00	2.155.376.104,00
5	RSUD.BLUD/059/445/SP3B/05/VI/2024	3.475.239.382,00	2.083.495.089,00
6	RSUD.BLUD/059/445/SP3B/06/VII/2024	3.479.540.148,00	4.885.010.827,00
7	RSUD.BLUD/059/445/SP3B/07/VIII/2024	3.554.036.860,00	7.502.880.475,00
8	RSUD.BLUD/059/445/SP3B/08/IX/2024	5.112.874.508,00	8.397.055.875,00
9	RSUD.BLUD/059/445/SP3B/09/X/2024	4.093.868.461,00	2.303.686.176,00
10	RSUD.BLUD/059/445/SP3B/10/XI/2024	5.884.702.567,00	7.072.120.163,00
11	RSUD.BLUD/059/445/SP3B/11/XII/2024	5.765.337.307,00	2.475.128.462,00
12	RSUD.BLUD/059/445/SP3B/12/XII/2024	8.076.530.832,00	14.182.193.285,00
	Jumlah	47.576.125.394,00	59.566.398.698,00

5.1.2.1.3 Belanja Hibah

2024		2023
Anggaran	Realisasi	Realisasi
Rp51.254.173.789,00	Rp51.036.043.518,00	Rp19.516.633.168,00

Realisasi Belanja Hibah tahun 2024 sebesar Rp51.036.043.518,00 atau mencapai 99,57% dari target sebesar Rp51.254.173.789,00. Jika dibanding tahun 2023 sebesar Rp19.516.633.168,00, realisasi tahun 2024 meningkat Rp31.519.410.350,00 atau 161,50%. Rinciannya sebagai berikut.

Tabel 5.85
Realisasi Belanja Hibah - LRA

No	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Bertambah/ (berkurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	50.760.380.000,00	50.542.249.729,00	(218.130.271,00)	99,57	19.042.117.000,00
2	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	493.793.789,00	493.793.789,00	0,00	100,00	474.516.168,00
	Jumlah	51.254.173.789,00	51.036.043.518,00	(218.130.271,00)	99,57	19.516.633.168,00

**5.1.2.1.3.1 Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**

Realisasi Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia tahun 2024 sebesar Rp50.542.249.729,00 atau mencapai 99,57% dari anggaran sebesar Rp50.760.380.000,00.

Jika dibandingkan realisasi 2023 sebesar Rp19.042.117.000,00, pada tahun 2024 terdapat kenaikan signifikan mencapai Rp31.500.132.729,00 atau 165,42% karena adanya pemberian hibah dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan Legislatif, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) pada tahun 2024. Rincian realisasi Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

Tabel 5.86**Realisasi Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia - LRA**

No	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	48.710.380.000,00	48.492.249.729,00	(218.130.271,00)	99,55	15.261.117.000,00
2	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	100,00	0,00
3	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	0,00	100,00	3.781.000.000,00
4	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	0,00
Jumlah		50.760.380.000,00	50.542.249.729,00	(218.130.271,00)	99,57	19.042.117.000,00

- 1) Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan

Belanja hibah ini ditujukan kepada PAUD Swasta, Kesetaraan, BOS Sekolah Swasta, Pramuka, KPU, KONI, Bawaslu, POLRI, TNI dan DEKRANASDA dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.87****Realisasi Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela Dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan - LRA**

No.	Nama SKPD	2024			%	2023	Keterangan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)		Realisasi (Rp)	
1	Hibah Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)	16.582.900.000,00	16.364.769.729,00	(218.130.271,00)	98,68	5.336.117.000,00	
	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	3.847.800.000,00	3.780.834.000,00	(66.966.000,00)	98,26	4.459.317.000,00	Hibah kepada PAUD Swasta
	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	833.800.000,00	733.210.000,00	(100.590.000,00)	87,94	876.800.000,00	Hibah kepada penyelenggara kesetaraan pakat A,B,C
	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	11.901.300.000,00	11.850.725.729,00	(50.574.271,00)	99,58	0,00	Hibah BOS Sekolah Swasta
2	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	100,00	125.000.000,00	Hibah kepada Pramuka
3	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	100,00	500.000.000,00	Hibah kepada KONI
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12.300.000.000,00	12.300.000.000,00	0,00	100,00	8.200.000.000,00	Hibah kepada KPU
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.500.000.000,00	9.500.000.000,00	0,00	100,00	0,00	Hibah kepada Bawaslu
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00	100,00	0,00	Hibah kepada POLRI
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.202.480.000,00	1.202.480.000,00	0,00	100,00	0,00	Hibah kepada TNI
8	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	100,00	1.000.000.000,00	Hibah kepada DEKRANASDA
9	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	-	100.000.000,00	
Jumlah		48.710.380.000,00	48.492.249.729,00	(218.130.271,00)	99,55	15.261.117.000,00	

Realisasi tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Hibah Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)

Realisasi Belanja Hibah Bantuan Operasional Pendidikan (BOSP) tahun 2024 sebesar Rp16.364.749.729,00 atau 98,68% dari target yang ditetapkan sebesar Rp16.582.900.000,00.

Uraian belanja hibah Bantuan Operasional Pendidikan (BOSP) adalah sebagai berikut.

i. Hibah BOP kepada PAUD Swasta

Hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) kepada PAUD Swasta dimaksudkan dalam rangka meningkatkan peran serta kelompok masyarakat dalam rangka pendidikan anak usia dini di Kabupaten Belu sesuai arah kebijakan pemerintah. Belanja hibah BOP kepada PAUD Swasta tahun 2024 ditujukan kepada 209 PAUD yang ada di Kabupaten Belu. Dana ini bersumber ditransfer langsung dari rekening kas negara ke rekening PAUD Swasta. Realisasi belanja tahun 2024 disahkan oleh BUD dengan menerbitkan



Surat Pengesahan Belanja (SPB) Nomor PAUD SWASTA/400.3/PKO/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024.

Realisasi Belanja Hibah BOP kepada PAUD Swasta pada tahun 2024 sebesar Rp3.780.834.000,00 atau mencapai 98,26% dari target yang ditetapkan sebesar Rp3.847.800.000,00.

Rincian belanja hibah BOP PAUD Swasta tahun 2024 disajikan pada **Lampiran 1**.

ii. Hibah BOP kepada Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, C Swasta

Realisasi Hibah BOP kepada Pendidikan Kesetaraan paket A, B, C Swasta pada tahun 2024 sebesar Rp733.210.000,00 atau mencapai 87,94% dari target sebesar Rp833.800.000,00. Terdiri dari 10 Lembaga Pendidikan Kesetaraan Swasta. Dana ini bersumber ditransfer langsung dari rekening kas negara ke rekening Pendidikan Kesetaraan Swasta. Realisasi belanja disahkan oleh BUD dengan menerbitkan Surat Pengesahan Belanja (SPB) Nomor PAUD KESETARAAN/400.3/PKO/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024.

Rincian belanja hibah BOP kepada Pendidikan Kesetaraan paket A, B, C Swasta disajikan pada **Lampiran 2**.

iii. Hibah BOS kepada Sekolah Swasta

Realisasi Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada SMP dan SD Swasta pada tahun 2024 sebesar Rp11.850.725.729,00 atau 99,58% dari target yang ditetapkan sebesar Rp11.901.300.000,00. Realisasi belanja ini diberikan kepada SMP Swasta sebesar Rp3.005.107.079,00 dengan nomor SP2B SMPS 1/400.3/PKO/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 dan SD Swasta sebesar Rp8.845.618.650,00 dengan Nomor SP2B SDS 1/400.3/PKO/XII/2024.



Rincian Belanja Hibah BOS kepada Sekolah Swasta disajikan pada **Lampiran 3**.

2) Hibah kepada Pramuka Kabupaten Belu

Hibah kepada Pramuka sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 358/400.3/PKO/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 dan Surat Keputusan Bupati Belu Nomor 159/HK/2024 tanggal 01 April 2024.

Realisasi hibah kepada Pramuka tahun 2024 sebesar Rp125.000.000,00 atau 100% dari target yang ditetapkan.

3) Hibah kepada KONI Kabupaten Belu

Hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Belu sesuai NPHD Nomor 358/400.3/PKO/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 dan Surat Keputusan Bupati Belu Nomor 159/HK/2024 tanggal 01 April 2024.

Realisasi hibah kepada KONI dimaksudkan dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga di Kabupaten Belu. Realisasi belanja hibah kepada KONI tahun 2024 sebesar Rp500.000.000,00 atau 100% dari target yang ditetapkan sebesar Rp500.000.000,00.

4) Hibah kepada KPU Kabupaten Belu

Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Belu sesuai NPHD Nomor BKBP-200/274/XI/2023 dan 651/KU.07/PKS/5304/2023 tanggal 10 November 2023. Realisasi hibah tahun 2024 sebesar Rp12.300.000.000,00 atau 100% dari target yang ditetapkan sebesar Rp12.300.000.000,00. Hibah ini ditujukan dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan Legislatif dan Pemilukada serentak tahun 2024.

Sampai dengan 31 Desember 2024 Laporan Pertanggungjawaban Hibah belum diterima oleh Pemkab Belu dari Penerima Hibah karena sesuai dengan NPHD pasal 5 ayat (3) bahwa kewajiban membuat laporan penggunaan dana hibah dilakukan



paling lambat 3 bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada Pemkab Belu.

5) Hibah kepada BAWASLU Kabupaten Belu

Hibah kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) sesuai NPHD Nomor BKBP-200/275/XI/2023 dan Nomor 348/KU.00.01/K.NT-2/11/2023 tanggal 10 November 2023. Realisasi belanja Hibah pada tahun 2024 sebesar Rp9.500.000.000,00 atau 100% dari target yang ditetapkan sebesar Rp9.500.000.000,00. Hibah ini dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan Legislatif dan Pemilukada serentak tahun 2024.

Sampai dengan 31 Desember 2024 Laporan Pertanggungjawaban Hibah belum diterima oleh Pemkab Belu dari Penerima Hibah karena sesuai dengan NPHD pasal 5 ayat (3) bahwa kewajiban membuat laporan penggunaan dana hibah dilakukan paling lambat 3 bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada Pemkab Belu.

6) Hibah kepada POLRI

Hibah kepada POLRI sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor BKBP-200/142/IV/2024 dan B/253/IV/2024/Polres Belu tanggal 30 April 2024.

Realisasi belanja Hibah kepada POLRI pada tahun 2024 sebesar Rp7.000.000.000,00 atau 100% dari target yang ditetapkan sebesar Rp7.000.000.000,00. Hibah ini ditujukan dalam rangka pengamanan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan Legislatif dan Pemilukada serentak tahun 2024.

Sampai dengan 31 Desember 2024 Laporan Pertanggungjawaban Hibah belum diterima oleh Pemkab Belu dari Penerima Hibah karena sesuai dengan NPHD pasal 5 ayat (3) bahwa kewajiban membuat laporan penggunaan dana hibah dilakukan paling lambat 3 bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada Pemkab Belu.

**7) Hibah kepada TNI**

Hibah kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor BKBP-12/140/IV/2024 dan Nomor B/218/2024 tanggal 30 April 2024. Realisasi belanja Hibah kepada TNI pada tahun 2024 sebesar Rp1.202.480.000,00 atau 100% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.202.480.000,00. Hibah ini dilaksanakan dalam rangka pengamanan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan Legislatif dan Pemilukada serentak tahun 2024.

Sampai dengan 31 Desember 2024 Laporan Pertanggungjawaban Hibah belum diterima oleh Pemkab Belu dari Penerima Hibah karena sesuai dengan NPHD pasal 5 ayat (3) bahwa kewajiban membuat laporan penggunaan dana hibah dilakukan paling lambat 3 bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada Pemkab Belu.

8) Hibah kepada DEKRANASDA

Hibah kepada Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) dimaksudkan dalam rangka pembinaan dan pengembangan perekonomian di Kabupaten Belu. Hibah kepada DEKRANASDA tahun 2024 berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Belu dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Belu dengan Nomor Perdagind.530/128/VI/2024 dan Nomor 12/DekranasdaBelu/VI/2024 tentang Penetapan Penerima Hibah, Alamat, Besaran dan Dana Hibah kepada Dewan Kerajinan Nasional Daerah di Kabupaten Belu tahun 2024.

Realisasi Belanja Hibah kepada DEKRANASDA tahun 2024 sebesar Rp1.500.000.000,00 atau 100% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.500.000.000,00.

2) Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar



Realisasi Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar tahun 2024 adalah sebesar Rp450.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran.

Hibah ini ditujukan kepada Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) dan Palang Merah Indonesia (PMI). Hibah kepada IPSI diberika melalui Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp200.000.000,00 sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 394/400.3/PKO/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 dan Surat Keputusan Bupati Nomor 159/HK/2024 tanggal 01 April 2024.

Hibah kepada Palang Merah Indonesia (PMI) melalui Dinas Kesehatan sebesar Rp250.000.000,00 berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Dinas Kesehatan Kabupaten Belu dengan Palang Merah Indonesia Kabupaten Belu Nomor 179/16/KES/II/2024, Nomor 06/PO/03.03.03/II/2024 dan Surat Keputusan Bupati Belu Nomor 50/HK/2024 tentang Penetapan Penerima Hibah, Alamat, Besaran Dana Hibah kepada Palang Merah Indonesia di Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2024.

Rinciannya adalah sebagai berikut.

Tabel 5.88
Realisasi Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela Dan Sosial Yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar- LRA

NO	Nama SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang)	%	Keterangan
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	Hibah kepada Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI)
2	Dinas Kesehatan	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	100,00	Hibah kepada PMI
JUMLAH		450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	100,00	

3) Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan

Realisasi Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan tahun 2024 adalah sebesar Rp1.450.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran.

Hibah ini ditujukan kepada Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, kepada Panitia Penyelenggara Ibadah Haji, Panitia Pembangunan Gereja Motabuik, Panitia Pembangunan Kapela Sukabitetek,



Paroki St. Bonaventura Wilain, Stasi St. Petrus Buanurak, Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Belu, GMT Polycarpus Atambua melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Belu, Hibah kepada Kelompok Tani melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Hibah kepada Komisi Penanggulangan AIDS melalui Dinas Kesehatan. Realisasinya dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.89
Realisasi Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan - LRA

NO	Nama SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang)	%	Keterangan
1	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	100,00	Hibah kepada PKK
2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	Panitia Penyelenggara Ibadah Haji
3	Bagian Kesejahteraan Rakyat	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	Panitia Pembangunan Gereja Motabuk
4	Bagian Kesejahteraan Rakyat	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	Panitia Pembangunan Kapela Sukabitek
5	Bagian Kesejahteraan Rakyat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	Paroki St. Bonaventura Wilain
6	Bagian Kesejahteraan Rakyat	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	Stasi St. Petrus Buanurak
7	Bagian Kesejahteraan Rakyat	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	Dharmawanita Persatuan Kabupaten Belu
8	Bagian Kesejahteraan Rakyat	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	GMT Polycarpus Atambua
9	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	100,00	Hibah kepada kelompok tani
10	Dinas Kesehatan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	Hibah kepada Komisi Penanggulangan AIDS
JUMLAH		1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	0,00	100,00	

- 4) Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar.

Realisasi Hibah ini pada tahun 2024 diberikan kepada Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Belu melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Belu sebesar Rp150.000.000,00 atau 100% dari target yang ditetapkan. Rinciannya sebagai berikut.

Tabel 5.90
Realisasi Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela Dan Sosial Yang telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar- LRA

No.	Nama SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang)	%	Keterangan
1	Bagian Kesejahteraan Rakyat	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	Hibah kepada Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Belu
Jumlah		150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	

5.1.2.1.3.2 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Belanja hibah ini ditujukan kepada 11 Partai Politik di Kabupaten Belu dan dihitung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.



Dari target yang ditetapkan sebesar Rp493.793.789,00 pada tahun 2024 dapat direalisasikan 100% atau sebesar Rp493.793.789,00.

Jika dibandingkan dengan tahun 2023, belanja hibah kepada Partai Politik tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp19.277.621,00 atau 4,06% jika dibandingkan dengan realisasi belanja hibah kepada Partai Politik tahun 2023 sebesar 474.516.168,00.

Rincian belanja hibah masing-masing partai politik disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.91
Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik- LRA

No.	Nama Partai Politik	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	15.804.363,00	15.804.363,00	100,00	23.706.544,00
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	63.693.393,00	63.693.393,00	100,00	55.793.102,00
3	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	60.707.413,00	60.707.413,00	100,00	60.252.244,00
4	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	30.488.746,00	30.488.746,00	100,00	29.599.184,00
5	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	42.311.799,00	42.311.799,00	100,00	41.803.748,00
6	Partai Demokrat	65.568.841,00	65.568.841,00	100,00	66.751.146,00
7	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	54.863.878,00	54.863.878,00	100,00	47.566.070,00
8	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	54.091.414,00	54.091.414,00	100,00	58.195.486,00
9	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	25.474.336,00	25.474.336,00	100,00	23.899.188,00
10	Partai Keadilan Persatuan (PKP)	14.663.608,00	14.663.608,00	100,00	21.995.412,00
11	Partai Amanat Nasional (PAN)	43.611.202,00	43.611.202,00	100,00	44.954.044,00
12	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	6.364.807,00	6.364.807,00	100,00	0,00
13	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	16.149.989,00	16.149.989,00	100,00	0,00
	Jumlah	493.793.789,00	493.793.789,00	100,00	474.516.168,00

5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

2024		2023
Anggaran	Realisasi	Realisasi
Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00	Rp236.000.000,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun 2024 sebesar Rp15.000.000,00 mencapai 100,00% dari target anggarannya sebesar Rp15.000.000,00. Jika dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp236.000.000,00, belanja bantuan sosial tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp(221.000.000,00) atau (93,64)%. Adapun rinciannya sebagai berikut.

Tabel 5.92
Realisasi Belanja Bantuan Sosial - LRA

No	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	236.000.000,00
	Jumlah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	236.000.000,00



Bantuan ini diberikan kepada 5 orang anak korban kekerasan, masing-masing berupa uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 sesuai Surat Keputusan Bupati Belu Nomor 179/HK/2024 tanggal 3 Mei 2024 tentang Penetapan Penerima Bantuan Peralatan Menjahit dan Uang Bagi Peserta Pasca Pelatihan di Panti Sosial Karya Wanita Naibonat Kupang. Uang tersebut digunakan untuk membeli bahan menjahit, dan bukti pembelanjaan diserahkan kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai pengelola program tersebut.

5.1.2.2 BELANJA MODAL

2024		2023
Anggaran	Realisasi	Realisasi
Rp152.859.682.102,00	Rp144.760.748.226,32	Rp160.068.785.414,32

Realisasi Belanja Modal tahun 2024 sebesar Rp144.760.748.226,32 atau mencapai 94,70% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp152.859.682.102,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp160.068.785.414,32, realisasi Belanja Modal tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp(15.308.037.188,00) atau (9,56)%. Rinciannya disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.93
Realisasi Belanja Modal - LRA

No	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Tanah	250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)	0,00%	393.232.906,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.474.948.382,00	20.865.441.803,00	(1.609.506.579,00)	92,84	32.106.879.252,55
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	63.137.989.880,00	57.919.660.357,02	(5.218.329.522,98)	91,74	40.690.822.560,19
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	64.654.613.400,00	63.698.929.366,30	(955.684.033,70)	98,52	85.083.708.055,58
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.342.130.440,00	2.276.716.700,00	(65.413.740,00)	97,21	1.794.142.640,00
	Jumlah	152.859.682.102,00	144.760.748.226,32	(8.098.933.875,68)	94,70	160.068.785.414,32

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

2024		2023
Anggaran	Realisasi	Realisasi
Rp250.000.000,00	Rp0,00	Rp393.232.906,00

Pada tahun 2024 tidak terdapat realisasi Belanja Modal Tanah dari anggaran senilai Rp250.000.000,00. Tidak terealisasinya



Belanja Modal tersebut karena proses balik nama sertifikat pemilik lahan belum selesai dilakukan karena pemilik sertifikat sudah meninggal. Rinciannya sebagai berikut.

Tabel 5.94
Realisasi Belanja Modal Tanah - LRA

No	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Tanah	250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)	0,00	393.232.906,00
	Jumlah	250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)	0,00	393.232.906,00

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

2024		2023
Anggaran	Realisasi	Realisasi
Rp22.474.948.382,00	Rp20.865.441.803,00	Rp32.106.879.252,55

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2024 sebesar Rp20.865.441.803,00 atau mampu mencapai 92,84% dari target sebesar Rp22.474.948.382,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya maka realisasi tahun 2024 menurun sebesar Rp(11.241.437.449,55) atau (35,01)%. Rinciannya sebagai berikut.

Tabel 5.95
Realisasi Belanja Modal Peralatan Dan Mesin - LRA

No	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Alat Besar	2.146.550.000,00	2.085.225.957,00	(61.324.043,00)	97,14	313.006.151,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	1.959.011.650,00	1.891.700.000,00	(67.311.650,00)	96,56	3.673.358.000,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	169.938.992,00	163.600.000,00	(6.338.992,00)	96,27	465.971.898,00
4	Belanja Modal Alat Pertanian	170.000.000,00	163.000.000,00	(7.000.000,00)	95,88	1.560.348.035,00
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.218.983.700,00	1.087.538.332,00	(131.445.368,00)	89,22	1.819.301.065,00
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	995.774.000,00	977.887.428,00	(17.886.572,00)	98,20	97.555.800,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	9.220.442.788,00	8.420.501.836,00	(799.940.952,00)	91,32	16.258.435.166,55
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	0,00	33.539.427,00
9	Belanja Modal Komputer	1.631.682.250,00	1.539.427.222,00	(92.255.028,00)	94,35	923.419.850,00
10	Belanja Modal Alat Produksi Pengolahan, dan Pemurnian	2.103.081.550,00	1.664.387.130,00	(438.694.420,00)	79,14	50.000.000,00
11	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	12418125,00
12	Belanja Modal Alat Peraga	543.450.000,00	540.440.000,00	(3.010.000,00)	99,45	878.600.000,00
13	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	0,00	0,00	0,00	0,00	2.973.321.036,00
14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	1.822.175.822,00	1.845.398.298,00	23.222.476,00	101,27	1.810.664.429,00
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	493.857.630,00	486.335.600,00	(7.522.030,00)	98,48	1.236.940.270,00
	Jumlah	22.474.948.382,00	20.865.441.803,00	1.609.506.579,00	92,84	32.106.879.252,55

- 1) Realisasi Belanja Modal Alat Besar tahun 2024 sebesar Rp2.085.225.957,00 atau mampu mencapai 97,14% dari



target sebesar Rp2.146.550.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp313.006.151,00 maka realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp1.772.219.806,00 atau 566,19%. Rinciannya sebagai berikut.

Tabel 5.96
Realisasi Belanja Modal Alat Besar - LRA

No	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Alat Besar Darat	555.000.000,00	499.668.750,00	(55.331.250,00)	90,03	0,00
2	Belanja Modal Alat Bantu	1.591.550.000,00	1.585.557.207,00	(5.992.793,00)	99,62	313.006.151,00
	Jumlah	2.146.550.000,00	2.085.225.957,00	(61.324.043,00)	97,14	313.006.151,00

- 2) Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan tahun 2024 sebesar Rp1.891.700.000,00 atau mampu mencapai 96,56% dari target sebesar Rp1.959.011.650,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp3.673.358.000,00 maka realisasi tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp(1.781.658.000,00) atau (48,50)%. Rinciannya sebagai berikut.

Tabel 5.97
Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan- LRA

No.	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.959.011.650,00	1.891.700.000,00	(67.311.650,00)	96,56	3.673.358.000,00
	Jumlah	1.959.011.650,00	1.891.700.000,00	(67.311.650,00)	96,56	3.673.358.000,00

- 3) Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur tahun 2024 sebesar Rp163.600.000,00 atau mampu mencapai 96,27% dari target sebesar Rp169.938.992,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya maka realisasi tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp(302.371.898,00) atau (64,89)%. Rinciannya sebagai berikut.

Tabel 5.98
Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur- LRA

No.	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	134.938.992,00	128.600.000,00	(6.338.992,00)	95,30	30.244.281,00
2	Belanja Modal Alat Ukur	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	435.727.617,00
	Jumlah	169.938.992,00	163.600.000,00	(6.338.992,00)	96,27	465.971.898,00



- 4) Realisasi Belanja Modal Pertanian tahun 2024 sebesar Rp163.000.000,00 atau mampu mencapai 95,88% dari target sebesar Rp170.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.560.348.035,00, maka realisasi tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp(1.397.348.035,00) atau (89,55)%. Rinciannya sebagai berikut.

Tabel 5.99
Realisasi Belanja Modal Pertanian - LRA

No.	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Temak	170.000.000,00	163.000.000,00	(7.000.000,00)	95,88	0,00
2	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00	351.828.431,00
3	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	0,00	0,00	0,00	0,00	147.701.484,00
4	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.818.120,00
	Jumlah	170.000.000,00	163.000.000,00	(7.000.000,00)	95,88	1.560.348.035,00

- 5) Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga tahun 2024 sebesar Rp1.087.538.332,00 atau mampu mencapai 89,22% dari target sebesar Rp1.218.983.700,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.819.301.065,00, maka realisasi tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp(731.762.733,00) atau (40,22)%. Rinciannya sebagai berikut.

Tabel 5.100
Realisasi Belanja Modal Alat Kantor Dan Rumah Tangga - LRA

No.	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Alat Kantor	556.252.800,00	527.875.695,00	(28.377.105,00)	94,90	560.027.140,00
2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	662.730.900,00	559.662.637,00	(103.068.263,00)	84,45	1.259.273.925,00
	Jumlah	1.218.983.700,00	1.087.538.332,00	(131.445.368,00)	89,22	1.819.301.065,00

Dari realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp1.087.538.332,00, sebesar Rp176.171.850,00 bersumber dari Dana JKN Puskesmas Tahun 2024 dan sebesar Rp4.000.000,00 bersumber dari Dana BOP Kesetaraan Negeri dan sebesar Rp907.366.482,00 bersumber dari APBD.



- 6) Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar tahun 2024 sebesar Rp977.887.428,00 atau mampu mencapai 98,20% dari target sebesar Rp995.774.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp97.555.800,00, maka realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp880.331.628,00 atau 902,39%. Rinciannya sebagai berikut.

Tabel 5.101
Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar - LRA

No	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Alat Studio	995.774.000,00	977.887.428,00	(17.886.572,00)	98,20	88.164.300,00
2	Belanja Modal Alat Komunikasi	0,00	0,00	0,00	0,00	9.391.500,00
	Jumlah	995.774.000,00	977.887.428,00	(17.886.572,00)	98,20	97.555.800,00

Dari realisasi Belanja Modal Alat Studio sebesar Rp977.887.428,00, sebesar Rp1.901.500,00 bersumber dari Dana BOP PAUD Negeri tahun 2024 dan sisanya sebesar Rp975.985.928,00 bersumber dari APBD.

- 7) Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan tahun 2024 sebesar Rp8.420.501.836,00 atau mampu mencapai 91,32% dari target sebesar Rp9.220.442.788,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp16.258.435.166,55, maka realisasi tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp(7.837.933.330,55) atau (48,21)%. Rinciannya sebagai berikut.

Tabel 5.102
Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran Dan Kesehatan - LRA

No	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Alat Kedokteran	84.837.643,00	0,00	(84.837.643,00)	0,00	820.770.000,00
2	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	9.135.605.145,00	8.420.501.836,00	(715.103.309,00)	92,17	15.437.665.166,55
	Jumlah	9.220.442.788,00	8.420.501.836,00	(799.940.952,00)	91,32	16.258.435.166,55

Dari Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp8.420.501.836,00, sebesar Rp41.585.252,00 bersumber dari Dana JKN Puskesmas Tahun 2024 dan sisanya sebesar Rp8.378.916.584,00 bersumber dari APBD.



- 8) Realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium tahun 2024 Rp0,00 (tidak ada realisasi) dan tidak dianggarkan. Rinciannya adalah sebagai berikut.

Tabel 5.103
Realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium - LRA

No	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	0,00	33.539.427,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	33.539.427,00

- 9) Realisasi Belanja Modal Komputer tahun 2024 sebesar Rp1.539.427.222,00 atau mencapai 94,35% dari target sebesar Rp1.631.682.250,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp923.419.850,00, maka realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp616.007.372,00 atau 66,71%. Rinciannya sebagai berikut.

Tabel 5.104
Realisasi Belanja Modal Komputer - LRA

No	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Komputer Unit	1.367.675.700,00	1.266.674.000,00	(101.001.700,00)	92,62	735.593.550,00
2	Belanja Modal Peralatan Komputer	264.006.550,00	272.753.222,00	8.746.672,00	103,31	187.826.300,00
	Jumlah	1.631.682.250,00	1.539.427.222,00	(92.255.028,00)	94,35	923.419.850,00

Dari realisasi Belanja Modal Komputer sebesar Rp1.539.427.222,00, belanja sebesar Rp467.950.000,00 bersumber dari Dana JKN Puskesmas Tahun 2024 dan sebesar Rp12.761.800,00 dari Dana BOP PAUD Negeri dan sebesar Rp1.058.715.422,00 bersumber dari APBD.

- 10) Realisasi Belanja Modal Alat Produksi Pengolahan, dan Pemurnian (Belanja Modal Sumur Pemboran) tahun 2024 sebesar Rp1.664.387.130,00 atau mampu mencapai 79,14% dari target sebesar Rp2.103.081.550,00.
- 11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja tidak dianggarkan pada tahun 2024, sehingga tidak ada realisasi.
- 12) Realisasi Belanja Modal Alat Peraga tahun 2024 sebesar Rp540.440.000,00 atau mampu mencapai 99,45% dari target sebesar Rp543.450.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp878.600.000,00 realisasi tahun 2024 mengalami



penurunan sebesar Rp(338.160.000,00) atau (38,49)%.

Rinciannya sebagai berikut.

Tabel 5.105
Realisasi Belanja Modal Alat Peraga - LRA

No	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	543.450.000,00	540.440.000,00	(3.010.000,00)	99,45	878.600.000,00
	Jumlah	543.450.000,00	540.440.000,00	(3.010.000,00)	99,45	878.600.000,00

- 13) Realisasi Belanja Modal Peralatan proses/produksi lainnya tahun 2024 tidak direalisasikan karena tidak dianggarkan.

Tabel 5.106
Realisasi Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi Lainnya - LRA

No	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	2.973.321.036,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	2.973.321.036,00

- 14) Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP tahun 2024 sebesar Rp1.845.398.298,00 atau 101,27% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.822.175.822,00. Belanja ini dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 5.107
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS- LRA

No.	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	1.459.361.122,00	1.461.270.198,00	1.909.076,00	100,13	627.829.879,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja	362.814.700,00	384.128.100,00	21.313.400,00	105,87	1.182.834.550,00
	Jumlah	1.822.175.822,00	1.845.398.298,00	23.222.476,00	101,27	1.810.664.429,00

Belanja tahun 2024 yang lebih rinci dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 5.108
Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS- LRA

No	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler - SD	670.749.108,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler - SMP	790.521.090,00
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja - SD	127.235.700,00
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja - SMP	256.892.400,00
	Jumlah	1.845.398.298,00



Realisasi per sekolah disajikan sebagai berikut.

- a) Belanja modal peralatan dan mesin persekolah yang bersumber dari Dana BOS SMPN

Tabel 5.109
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS- LRA

NO.	NAMA SEKOLAH	REALISASI BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	
		REGULER (Rp)	KINERJA (Rp)
1	SMPN 3 ATAMBUA	8.250.000,00	0,00
2	SMPN KIMBANA	31.605.000,00	0,00
3	SMPN SATU ATAP TALA	0,00	0,00
4	SMPN RINBESIHAT	1.800.000,00	0,00
5	SMPN TULATUDIK	8.125.500,00	24.772.500,00
6	SMPN SATAP BENEMETA	11.000.000,00	0,00
7	SMPN DEROKMASIN	1.500.000,00	25.000.000,00
8	SMPN 1 ATAMBUA	125.410.650,00	18.078.000,00
9	SMPN 1 TASIFETO TIMUR	34.656.650,00	0,00
10	SMPN SILAWAN	2.700.000,00	0,00
11	SMPN DAFALA	21.500.000,00	21.075.000,00
12	SMPN SADI	11.450.000,00	0,00
13	SMPN 1 LAMAKNEN	18.410.000,00	0,00
14	SMPN SATAP EKIN II	28.079.600,00	0,00
15	SMPN SATAP KEWAR	501.000,00	0,00
16	SMPN 1 TASIFETO BARAT	34.750.990,00	17.218.000,00
17	SMPN HALIWEN	13.825.000,00	0,00
18	SMPN AINIBA	0,00	0,00
19	SMPN 2 TASIFETO TIMUR	86.339.000,00	0,00
20	SMPN SATAP WETEAR	0,00	21.589.400,00
21	SMPN TURISKAIN	14.642.500,00	0,00
22	SMPN DUAMANU	12.050.000,00	0,00
23	SMPN SATAP OBOR	0,00	0,00
24	SMPN RAIMANUK	11.720.000,00	0,00
25	SMPN MANDALA	47.111.000,00	35.000.000,00
26	SMPN LOROTUAN	21.481.500,00	0,00
27	SMPN LASIOLAT	3.450.000,00	0,00
28	SMPN PIEBULAK	3.250.000,00	0,00
29	SMPN SATAP SABULMIL	11.404.500,00	11.955.000,00
30	SMPN SATAP WEKAKEU	2.031.000,00	30.750.000,00
31	SMPN NUALAIN	0,00	0,00
32	SMPN UMANEN	15.025.000,00	28.254.500,00
33	SMPN 2 ATAMBUA	96.334.000,00	23.200.000,00
34	SMPN LAKTUTUS	3.484.200,00	0,00
35	SMPN HALIULUN	33.250.000,00	0,00
36	SMPN NOEBITI	10.819.000,00	0,00
37	SMPN HALIBETE	12.735.000,00	0,00
38	SMPN HALITUKU	19.000.000,00	0,00
39	SMPN ASUULUN	0,00	0,00
40	SMPN SATAP FULUR	8.250.000,00	0,00
41	SMPN KNABU	11.850.000,00	0,00
42	SMPN SATAP TUBAKI	12.730.000,00	0,00
Jumlah		790.521.090,00	256.892.400,00



b) Belanja modal peralatan dan mesin persekolah yang bersumber dari Dana BOS SDI/SDN

Tabel 5.110
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS- LRA

NO.	NAMA SEKOLAH	REALISASI BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	
		REGULER (Rp)	KINERJA (Rp)
1	SDI HALIBESIN	4.800.650,00	0,00
2	SDI HALIKELLEN	7.614.000,00	0,00
3	SDI KIMBANA	16.742.108,00	0,00
4	SDI HEDANFEHAN	1.725.000,00	0,00
5	SDI AIHUN	0,00	0,00
6	SDN BENEMETA	10.119.000,00	0,00
7	SDI TALA	2.000.000,00	0,00
8	SDI MEANMANE	0,00	0,00
9	SDI LOOKEU	1.500.000,00	0,00
10	SDI NUSIKUN	0,00	0,00
11	SDN BAKUSTULAMA	1.850.000,00	0,00
12	SDN OETFO	0,00	0,00
13	SDI HALIULUN	5.200.000,00	0,00
14	SDI TANAH MERAH I	10.000.000,00	0,00
15	SDI TANAH MERAH II	18.000.000,00	0,00
16	SDI TENUBOT	42.456.000,00	12.700.000,00
17	SDI TENUKIIK	13.609.000,00	0,00
18	SDI KOTAREN	5.890.000,00	0,00
19	SDN MATITIS-BAUKOEK	0,00	0,00
20	SDN FATUBAA	10.150.000,00	0,00
21	SDN HAEKRIIT	0,00	11.209.000,00
22	SDN SIRANI	7.500.000,00	0,00
23	SDI FATUBESI	5.000.000,00	0,00
24	SDI ASULAIT	8.011.000,00	0,00
25	SDI DEBUBOT	14.400.000,00	0,00
26	SDI DEBUKLARAN	0,00	12.900.000,00
27	SDI WEDOMU	4.990.000,00	0,00
28	SDI MOTAAN	3.853.900,00	3.300.000,00
29	SDI LALOSUK	12.575.000,00	0,00
30	SDI SALORE	4.000.000,00	0,00
31	SDN AITAMAN	3.365.000,00	0,00
32	SDN RAIBASIN	8.200.000,00	0,00
33	SDN MOTABENAR	0,00	0,00
34	SDN LIANAIN	1.100.000,00	0,00
35	SDI DUARATO	0,00	17.572.000,00
36	SDI EGIN II	11.236.000,00	9.025.200,00
37	SDI EGIN I	0,00	0,00
38	SDI KEWAR	2.500.000,00	0,00
39	SDI HOLPARA	0,00	0,00
40	SDI BUILALU	9.850.000,00	0,00
41	SDI BEISURIK	0,00	0,00
42	SDI MANULOR	1.500.000,00	10.000.000,00
43	SDN SINAR ATUBESI	8.500.000,00	0,00
44	SDN FATUKMETAN	66.000.000,00	0,00
45	SDN HALIWEN	12.293.300,00	0,00
46	SDI FATUATIS	3.000.000,00	0,00
47	SDI AINIBA	10.330.000,00	0,00
48	SDI SUSUK	3.194.200,00	0,00
49	SDI WESASUIT	12.783.800,00	0,00
50	SDN HALIMEA	9.930.000,00	0,00
51	SDN WELIURAI	5.220.000,00	0,00
52	SDI DEROK	10.035.000,00	0,00
53	SDI BEITAUS	5.009.800,00	0,00
54	SDI WETEAR	0,00	0,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

NO.	NAMA SEKOLAH	REALISASI BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	
		REGULER (Rp)	KINERJA (Rp)
55	SDI RUSAN	1.100.000,00	0,00
56	SDN FATUBELAR	0,00	0,00
57	SDN FATULORO	4.200.000,00	0,00
58	SDN SABURAKA	3.901.000,00	0,00
59	SDN SEKUTREN	16.000.000,00	0,00
60	SDN TURISKAIN	13.551.000,00	0,00
61	SDN WEMORIHAS	7.844.000,00	0,00
62	SDN TALIOAN	1.000.000,00	0,00
63	SDI KNABU	1.300.000,00	0,00
64	SDI BUITAE	16.305.000,00	0,00
65	SDI BEKOTARUIK	0,00	0,00
66	SDI SUKABITETEK	7.010.600,00	0,00
67	SDI MOTAMARO	10.206.000,00	0,00
68	SDI OBOR	6.000.000,00	0,00
69	SDN FOHOMANE	3.384.800,00	7.500.000,00
70	SDI TAKARABAT	0,00	0,00
71	SDI WEHASAN	0,00	0,00
72	SDI MAULAKAK	3.400.000,00	0,00
73	SDI LOOHALI	0,00	0,00
74	SDN MOTAAIN	0,00	0,00
75	SDN BAUDAOK	391.000,00	8.454.500,00
76	SDI JOILTOI	4.000.000,00	0,00
77	SDI WEKAKEU	9.000.000,00	0,00
78	SDI LOONUNA	6.070.000,00	3.500.000,00
79	SDI SABULMIL	0,00	4.000.000,00
80	SDI FOHOLULIK	4.310.350,00	0,00
81	SDN HANOWAI	0,00	11.340.000,00
82	SDN NOKARWEK	1.500.000,00	6.500.000,00
83	SDN WIRASAKTI	39.460.500,00	0,00
84	SDI TULAMALAE	23.847.000,00	9.235.000,00
85	SDI WEKATIMUN	18.280.000,00	0,00
86	SDN ONOBOI	13.247.500,00	0,00
87	SDI TINI	15.280.000,00	0,00
88	SDI ASUULUN	15.000.000,00	0,00
89	SDI NUFUAK	13.117.000,00	0,00
90	SDI TUBAKI	0,00	0,00
91	SDI WEKMUTIS	3.000.000,00	0,00
92	SDI NANAENOE	7.010.600,00	0,00
93	SDN WEHEDAN	6.000.000,00	0,00
Jumlah		670.749.108,00	127.235.700,00

- 15) Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD tahun 2024 sebesar Rp486.335.600,00 atau 98,48% dari target yang ditetapkan sebesar Rp493.857.630,00. Belanja ini berupa Belanja Modal Alat Kesehatan dan Kedokteran yang dibiayai oleh Dana BLUD.

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin per SKPD disajikan pada **Lampiran 4**.

**5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

2024		2023
Anggaran	Realisasi	Realisasi
Rp63.137.989.880,00	Rp57.919.660.357,02	Rp40.690.822.560,19

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2024 sebesar Rp57.919.660.357,02 atau 91,74% dari target sebesar Rp63.137.989.880,00. Realisasi ini jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp40.690.822.560,19, terjadi peningkatan sebesar Rp17.228.837.796,83 atau 42,34%.

Rinciannya jenis Belanja Modal Gedung dan Bangunan dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.111
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan- LRA

No.	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	62.787.989.880,00	57.595.289.357,02	(5.192.700.522,98)	91,73	40.690.822.560,19
2	Belanja Modal Monumen	50.000.000,00	45.800.000,00	(4.200.000,00)	91,60	0,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	300.000.000,00	278.571.000,00	(21.429.000,00)	92,86	0,00
Jumlah		63.137.989.880,00	57.919.660.357,02	(5.218.329.522,98)	91,74	40.690.822.560,19

5.1.2.2.3.1 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung

Realisasi Belanja Modal Gedung tahun 2024 sebesar Rp57.595.289.357,02 atau 91,73% dari target sebesar Rp62.787.989.880,00. Realisasi ini jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, terjadi peningkatan sebesar Rp16.904.466.796,83 atau 41,54%. Rinciannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.112
Realisasi Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung- LRA

No.	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	60.182.455.794,00	55.112.915.936,02	(5.069.539.857,98)	91,58	40.604.822.560,19
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000.000,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	2.605.534.086,00	2.482.373.421,00	(123.160.665,00)	95,27	0,00
Jumlah		62.787.989.880,00	57.595.289.357,02	(5.192.700.522,98)	91,73	40.690.822.560,19



Masing-masing rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan diuraikan sebagai berikut.

1) Pengadaan bangunan gedung tempat kerja

Realisasi pengadaan bangunan gedung tempat kerja tahun 2024 sebesar Rp55.112.915.936,02 atau mencapai 91,58% dari target sebesar Rp60.182.455.794,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp40.604.822.560,19, maka realisasi tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp14.508.093.375,83 atau 35,73%.

Rincian realisasi pengadaan bangunan gedung tempat kerja perjenis tahun 2024 dengan perbandingan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.113
Realisasi Belanja Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja - LRA

No.	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	8.380.609.400,00	6.992.584.120,24	(1.388.025.279,76)	83,44%	668.027.209,00
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium	3.801.665.000,00	3.639.437.278,89	(162.227.721,11)	95,73%	2.384.553.685,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	31.924.862.196,00	29.505.548.588,17	(2.419.313.607,83)	92,42%	2.683.374.874,00
4	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.893.121.992,00	1.567.218.878,00	(325.903.114,00)	82,78%	0,00
5	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	8.042.675.506,00	7.667.381.798,72	(375.293.707,28)	95,33%	19.139.875.709,28
6	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	0,00	0,00	0,00	0,00%	278.058.424,00
7	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Terbuka	676.756.664,00	648.114.000,00	(28.642.664,00)	95,77%	1.460.989.144,00
8	Belanja Modal Bangunan Industri	0,00	0,00	0,00	0,00%	9.017.841.000,00
9	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Peternakan/Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00%	730.127.011,00
10	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	5.141.940.850,00	4.772.795.466,00	(369.145.384,00)	92,82%	1.632.060.800,00
11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan	320.824.186,00	319.835.806,00	(988.380,00)	99,69%	2.609.914.703,91
Jumlah		60.182.455.794,00	55.112.915.936,02	(5.069.539.857,98)	91,58	40.604.822.560,19

2) Pengadaan bangunan gedung tempat tinggal

Realisasi belanja modal bangunan Gedung tempat tinggal tahun 2024 sebesar Rp2.482.373.421,00 atau 95,27% dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.604.534.086,00.

**5.1.2.2.3.2 Belanja Modal Monumen**

Realisasi belanja modal monument (tugu) tahun 2024 sebesar Rp45.800.000,00 atau 91,60% dari target yang ditetapkan sebesar Rp50.000.000,00.

5.1.2.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD

Realisasi belanja modal gedung BLUD tahun 2024 sebesar Rp278.571.000,00 atau 92,86% dari target yang ditetapkan Rp300.000.000,00.

Tabel 5.114
Belanja Pengadaan Pebangunan Gedung BLUD- LRA

No.	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung BLUD	300.000.000,00	278.571.000,00	(21.429.000,00)	92,86	86.000.000,00
	Jumlah	300.000.000,00	278.571.000,00	(21.429.000,00)	92,86	86.000.000,00

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan per SKPD disajikan pada Lampiran 5.

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

2024		2023
Anggaran	Realisasi	Realisasi
Rp64.654.613.400,00	Rp63.698.929.366,30	Rp85.083.708.055,58

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2024 sebesar Rp63.698.929.366,30 atau mencapai 98,52% dari target yang ditetapkan sebesar Rp64.654.613.400,00. Jika dibandingkan dengan pencapaian realisasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp85.083.708.055,58 maka terjadi penurunan sebesar Rp(21.384.778.689,28) atau 25,13%

Rinciannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.115
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan- LRA

No.	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	60.036.550.910,00	59.101.012.040,30	(935.538.869,70)	98,44	80.337.633.695,58
2	Belanja Modal Bangunan Air	4.204.667.490,00	4.184.836.646,00	(19.830.844,00)	99,53	4.731.074.360,00
3	Belanja Modal Instalasi	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
4	Belanja Modal Jaringan	413.395.000,00	413.080.680,00	(314.320,00)	99,92	0,00
	Jumlah	64.654.613.400,00	63.698.929.366,30	(955.684.033,70)	98,52	85.083.708.055,58



Masing-masing rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan selanjutnya diuraikan sebagai berikut.

5.1.2.2.4.1 Belanja Modal Jalan dan Jembatan

Realisasi pengadaan jalan dan jembatan sebesar Rp59.101.012.040,30 atau mencapai 98,44% dari target sebesar Rp60.036.550.910,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 maka realisasi tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp(21.236.621.655,28) atau (26,43)%.

Tabel 5.116
Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan- LRA

No.	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Jalan Kabupaten	41.346.062.085,00	40.605.651.179,00	(740.410.906,00)	98,21	71.361.722.103,00
2	Belanja Modal Jalan Desa	11.637.282.425,00	11.518.688.281,30	(118.594.143,70)	98,98	5.491.951.668,00
3	Belanja Modal Jalan Khusus	6.747.302.000,00	6.672.681.280,00	(74.620.720,00)	98,89	2.629.358.700,00
4	Belanja Modal Jalan Lainnya	305.904.400,00	303.991.300,00	(1.913.100,00)	99,37	854.601.224,58
	Jumlah	60.036.550.910,00	59.101.012.040,30	(935.538.869,70)	98,44	80.337.633.695,58

5.1.2.2.4.2 Belanja Modal Bangunan Air

Belanja modal bangunan air irigasi tahun 2024 direalisasikan sebesar Rp4.184.836.646,00 atau mencapai 99,53% dari target anggarannya sebesar Rp4.204.667.490,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp4.731.074.360,00 maka terdapat penurunan sebesar Rp(546.237.714,00) atau (11,55)%.

Tabel 5.117
Realisasi Belanja Modal Bangunan Air - LRA

No.	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	3.334.600.000,00	3.319.075.800,00	(15.524.200,00)	99,53	4.179.082.000,00
2	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	670.067.490,00	665.837.846,00	(4.229.644,00)	99,37	0,00
3	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	200.000.000,00	199.923.000,00	(77.000,00)	0,00	0,00
4	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	356.384.150,00
5	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	0,00	0,00	0,00	0,00	195.608.210,00
	Jumlah	4.204.667.490,00	4.184.836.646,00	(19.830.844,00)	99,53	4.731.074.360,00

5.1.2.2.4.3 Belanja Modal Instalasi

Tidak terdapat anggaran dan realisasi belanja modal instalasi pada tahun 2024 dan 2023.

Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD disajikan pada **Lampiran 6**.

**5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**

2024		2023
Anggaran	Realisasi	Realisasi
Rp2.342.130.440,00	Rp2.276.716.700,00	Rp1.794.142.640,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2024 sebesar Rp2.276.716.700,00 atau mampu mencapai 97,21% dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.342.130.440,00. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya maka terjadi peningkatan sebesar Rp482.574.060,00 atau 26,90%.

Selanjutnya dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.118
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - LRA

No.	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	123.900.000,00	123.885.000,00	(15.000,00)	99,99	13.294.800,00
2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	2.218.230.440,00	2.152.831.700,00	(65.398.740,00)	97,05	1.780.847.840,00
	Jumlah	2.342.130.440,00	2.276.716.700,00	(65.413.740,00)	97,21	1.794.142.640,00

- 1) Realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan tahun 2024 sebesar Rp123.885.000,00 atau mencapai 99,99% dari target yang ditetapkan sebesar Rp123.900.000,00. Belanja ini merupakan belanja modal buku perpustakaan atas program pengelolaan pendidikan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dan program pembinaan perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- 2) Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP tahun 2024 sebesar Rp2.152.831.700,00 atau mencapai 97,05% dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.218.230.440,00. Realisasi belanja modal aset tetap lainnya BOSP terdapat pada Dana BOS SDN dan SMPN yang dapat diuraikan sebagai berikut.



Tabel 5.119
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP - LRA

No.	Uraian	2024				Realisasi Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	
1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	2.047.923.340,00	1.991.764.600,00	(56.158.740,00)	97,26	1.780.847.840,00
2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Kinerja	170.307.100,00	161.067.100,00	(9.240.000,00)	94,57	
Jumlah		2.218.230.440,00	2.152.831.700,00	(65.398.740,00)	97,05	1.780.847.840,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2024 per jenis Satuan Pendidikan dan jenis Dana BOSP adalah berikut ini.

Tabel 5.120
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP - LRA

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler - SD	813.173.200,00
2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler - SMP	1.178.591.400,00
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Kinerja - SD	124.411.000,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Kinerja - SMP	36.656.100,00
Jumlah		2.152.831.700,00

Realisasi per sekolah disajikan sebagai berikut.

- a. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya persekolah yang bersumber dari Dana BOS SMPN

Tabel 5.121
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP - LRA

NO.	NAMA SEKOLAH	BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	
		REGULER (Rp)	KINERJA (Rp)
1	SMPN 3 ATAMBUA	27.189.500,00	0,00
2	SMPN KIMBANA	105.450.100,00	0,00
3	SMPN SATU ATAP TALA	4.036.400,00	0,00
4	SMPN RINBESIHAT	4.839.500,00	0,00
5	SMPN TULATUDIK	3.486.000,00	7.045.500,00
6	SMPN SATAP BENEMETA	10.652.000,00	0,00
7	SMPN DEROKMASIN	3.390.000,00	0,00
8	SMPN 1 ATAMBUA	358.773.000,00	0,00
9	SMPN 1 TASIFETO TIMUR	43.553.600,00	0,00
10	SMPN SILAWAN	11.045.000,00	0,00
11	SMPN DAFALA	8.932.000,00	3.925.000,00
12	SMPN SADI	13.960.500,00	0,00
13	SMPN 1 LAMAKNEN	12.723.600,00	0,00
14	SMPN SATAP EGIN II	21.255.000,00	0,00
15	SMPN SATAP KEWAR	4.093.000,00	0,00
16	SMPN 1 TASIFETO BARAT	26.278.100,00	17.782.000,00
17	SMPN HALIWEN	21.475.000,00	0,00
18	SMPN AINIBA	8324100,00	0,00
19	SMPN 2 TASIFETO TIMUR	29.900.000,00	0,00
20	SMPN SATAP WETEAR	2936500,00	6.031.600,00
21	SMPN TURISKAIN	10.856.900,00	0,00
22	SMPN DUAMANU	0,00	0,00
23	SMPN SATAP OBOR	8893300,00	0,00
24	SMPN RAIMANUK	15.350.000,00	0,00
25	SMPN MANDALA	26.255.700,00	0,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

NO.	NAMA SEKOLAH	BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	
		REGULER (Rp)	KINERJA (Rp)
26	SMPN LOROTUAN	19.667.800,00	0,00
27	SMPN LASIOLAT	15.615.300,00	0,00
28	SMPN PIEBULAK	10.131.900,00	0,00
29	SMPN SATAP SABULMIL	11.318.700,00	0,00
30	SMPN SATAP WEKAKEU	6.734.200,00	0,00
31	SMPN NUALAIN	5220500,00	0,00
32	SMPN UMANEN	19.684.500,00	1.872.000,00
33	SMPN 2 ATAMBUA	239.863.800,00	0,00
34	SMPN LAKTUTUS	8.590.000,00	0,00
35	SMPN HALIULUN	18.660.000,00	0,00
36	SMPN NOEBITI	1.531.000,00	0,00
37	SMPN HALIBETE	9.020.000,00	0,00
38	SMPN HALITUKU	4.228.000,00	0,00
39	SMPN ASUULUN	10320000,00	0,00
40	SMPN SATAP FULUR	4.845.800,00	0,00
41	SMPN KNABU	5.707.100,00	0,00
42	SMPN SATAP TUBAKI	3.804.000,00	0,00
Jumlah		1.178.591.400,00	36.656.100,00

- b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya persekolah yang bersumber dari Dana BOS SDI/SDN

Tabel 5.122
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP - LRA

NO.	NAMA SEKOLAH	BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	
		REGULER (Rp)	KINERJA (Rp)
1	SDI HALIBESIN	12.860.000,00	0,00
2	SDI HALIKELÉN	4.712.000,00	0,00
3	SDI KIMBANA	2.849.600,00	0,00
4	SDI HEDANFEHAN	8.353.500,00	0,00
5	SDI AIHUN	820.900,00	0,00
6	SDN BENEMETA	4.800.000,00	0,00
7	SDI TALA	13.577.000,00	0,00
8	SDI MEANMANE	0,00	0,00
9	SDI LOOKEU	4.805.000,00	0,00
10	SDI NUSIKUN	2.342.900,00	0,00
11	SDN BAKUSTULAMA	0,00	0,00
12	SDN OETFO	0,00	0,00
13	SDI HALIULUN	16.476.000,00	0,00
14	SDI TANAH MERAH I	30.335.000,00	0,00
15	SDI TANAH MERAH II	4.122.000,00	15.000.000,00
16	SDI TENUBOT	36.630.000,00	0,00
17	SDI TENUKIK	20.060.000,00	14.150.000,00
18	SDI KOTAREN	7.373.000,00	0,00
19	SDN MATITIS-BAUKOEK	0,00	0,00
20	SDN FATUBAA	6.686.000,00	0,00
21	SDN HAEKRIIT	2.262.000,00	5.654.000,00
22	SDN SIRANI	0,00	0,00
23	SDI FATUBESI	2.735.700,00	0,00
24	SDI ASULAIT	0,00	0,00
25	SDI DEBUBOT	5.148.000,00	0,00
26	SDI DEBUKLARAN	5.790.000,00	9.600.000,00
27	SDI WEDOMU	43.181.000,00	0,00
28	SDI MOTAAIN	9.143.000,00	0,00
29	SDI LALOSUK	8.934.800,00	0,00
30	SDI SALORE	2.083.000,00	0,00
31	SDN AITAMAN	3.170.000,00	0,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

NO.	NAMA SEKOLAH	BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	
		REGULER (Rp)	KINERJA (Rp)
32	SDN RAIBASIN	7.744.000,00	0,00
33	SDN MOTABENAR	1.759.000,00	0,00
34	SDN LIANAIN	2.000.000,00	0,00
35	SDI DUARATO	417.000,00	0,00
36	SDI EKIN II	0,00	13.264.000,00
37	SDI EKIN I	4.000.000,00	0,00
38	SDI KEWAR	0,00	0,00
39	SDI HOLPARA	0,00	0,00
40	SDI BUILALU	2.500.000,00	0,00
41	SDI BEISURIK	5.489.000,00	0,00
42	SDI MANULOR	4.807.000,00	9.109.000,00
43	SDN SINAR ATUBESI	2.724.700,00	0,00
44	SDN FATUKMETAN	0,00	0,00
45	SDN HALIWEN	10.604.000,00	0,00
46	SDI FATUATIS	4.981.900,00	0,00
47	SDI AINIBA	1.525.000,00	0,00
48	SDI SUSUK	3.468.000,00	0,00
49	SDI WESASUIT	12.472.000,00	0,00
50	SDN HALIMEA	0,00	0,00
51	SDN WELIURAI	1.505.000,00	0,00
52	SDI DEROK	18.070.000,00	0,00
53	SDI BEITAUS	1.306.600,00	0,00
54	SDI WETEAR	4.640.000,00	0,00
55	SDI RUSAN	9.890.000,00	0,00
56	SDN FATUBELAR	3.665.300,00	0,00
57	SDN FATULORO	0,00	0,00
58	SDN SABURAKA	3.000.000,00	0,00
59	SDN SEKUTREN	22.070.000,00	0,00
60	SDN TURISKAIN	16.070.000,00	0,00
61	SDN WEMORIHAS	12.578.000,00	0,00
62	SDN TALIOAN	3.138.000,00	0,00
63	SDI KNABU	3.533.800,00	0,00
64	SDI BUITAE	0,00	9.820.200,00
65	SDI BEKOTARUIK	14.811.500,00	0,00
66	SDI SUKABITETEK	25.380.800,00	0,00
67	SDI MOTAMARO	0,00	0,00
68	SDI OBOR	7.366.000,00	0,00
69	SDN FOHOMANE	4.402.000,00	11.985.000,00
70	SDI TAKARABAT	3.152.000,00	0,00
71	SDI WEHASAN	4.441.000,00	0,00
72	SDI MAULAKAK	2.020.400,00	0,00
73	SDI LOOHALI	0,00	0,00
74	SDN MOTAAIN	0,00	0,00
75	SDN BAUDAOK	2.177.000,00	6.819.000,00
76	SDI JOILTOI	1.806.000,00	0,00
77	SDI WEKAKEU	7.227.000,00	0,00
78	SDI LOONUNA	5.090.000,00	0,00
79	SDI SABULMIL	0,00	7.524.800,00
80	SDI FOHOLULIK	0,00	0,00
81	SDN HANOWAI	1.420.000,00	6.810.000,00
82	SDN NOKARWEK	3.441.000,00	0,00
83	SDN WIRASAKTI	28.101.000,00	1.225.000,00
84	SDI TULAMALAE	69.525.800,00	1.800.000,00
85	SDI WEKATIMUN	24.720.000,00	11.650.000,00
86	SDN ONOBOI	25.836.000,00	0,00
87	SDI TINI	116.495.000,00	0,00
88	SDI ASUULUN	5.000.000,00	0,00
89	SDI NUFUAK	16.037.000,00	0,00
90	SDI TUBAKI	13.889.000,00	0,00
91	SDI WEKMUTIS	4.538.000,00	0,00
92	SDI NANAENOE	3.088.000,00	0,00



NO.	NAMA SEKOLAH	BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	
		REGULER (Rp)	KINERJA (Rp)
93	SDN WEHEDAN	0,00	0,00
Jumlah		813.173.200,00	124.411.000,00

Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per SKPD disajikan pada **Lampiran 7**.

5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

2024		2023
Anggaran	Realisasi	Realisasi
Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00

Pada tahun 2024 dan 2023 tidak terdapat anggaran dan realisasi belanja aset lainnya.

5.1.2.3 BELANJA TAK TERDUGA

2024		2024
Anggaran	Realisasi	Realisasi
Rp3.634.368.604,00	Rp0,00	Rp2.566.815.117,00

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, atau pengeluaran mendesak lainnya. Pada tahun 2024 realisasi belanja tak terduga sebesar Rp0,00 dari target anggaran sebesar Rp3.634.368.604,00 atau 0,00%. Hal ini menunjukkan pada tahun 2024 tidak terdapat realisasi belanja yang memenuhi kriteria belanja tak terduga.

Jika dibandingkan tahun 2023, realisasi Belanja Tak Terduga tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp(2.566.815.117,00). Realisasi Belanja Tak Terduga tahun 2024 dengan perbandingan tahun 2023 disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.123
Realisasi Belanja Tak Terduga - LRA

No	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Tak Terduga	3.634.368.604,00	0,00	(3.634.368.604,00)	0,00	2.566.815.117,00
Jumlah		3.634.368.604,00	0,00	(3.634.368.604,00)	0,00	2.566.815.117,00

**5.1.3 TRANSFER**

2024		2023
Anggaran	Realisasi	Realisasi
Rp120.746.842.625,00	Rp120.742.944.364,00	Rp116.741.814.525,00

Pada Tahun Anggaran 2024, seluruh realisasi Transfer berasal dari Transfer/Bagi Hasil ke Desa sebesar Rp120.742.944.364,00 atau mencapai 99,99% dari anggaran sebesar Rp120.746.842.625,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp116.741.814.525,00, realisasi Transfer tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp4.001.129.839,00 atau (3,43)%.

5.1.3.1 Transfer/Bagi Hasil ke Desa

Pada Tahun Anggaran 2024, realisasi Transfer/Bagi Hasil ke Desa sebesar Rp120.742.944.364,00 atau mencapai 99,99% dari anggaran sebesar Rp120.746.842.625,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp116.741.814.525,00, realisasi Transfer/Bagi Hasil ke Desa tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp4.001.129.839,00 atau (3,43)%.

Transfer/Bagi Hasil ke Desa tahun 2024 disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.124
Realisasi Transfer/Bagi Hasil ke Desa - LRA

No.	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Bagi Hasil Pajak	1.971.356.757,00	1.971.356.757,00	-	100,00%	1.971.356.757,00
2	Bagi Hasil Retribusi	725.310.268,00	725.310.268,00	-	100,00%	725.310.268,00
3	Transfer Bantuan Keuangan	118.050.175.600,00	118.046.277.339,00	(3.898.261,00)	100,00%	114.045.147.500,00
Jumlah		120.746.842.625,00	120.742.944.364,00	(3.898.261,00)	100,00%	116.741.814.525,00

5.1.3.1.1 Bagi Hasil Pajak

Bagi Hasil Pajak merupakan Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa yang realisasinya pada tahun 2024 sebesar Rp1.971.356.757,00 atau mencapai 100,00% dari anggaran sebesar Rp1.971.356.757,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp1.971.356.757,00, realisasi transfer Bagi Hasil Pajak Daerah tahun 2024 tidak mengalami peningkatan atau penurunan.

Transfer ini ditujukan untuk Bagi Hasil Pajak Daerah ke 69 Desa.



Rinciannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.125
Rincian Bagi Hasil Pajak - LRA

No.	Uraian	2024			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)	%
A	Lamaknen	209.959.750,00	209.959.750,00	0,00	100,00
1	Kewar	24.484.700,00	24.484.700,00	0,00	100,00
2	Fulur	23.586.300,00	23.586.300,00	0,00	100,00
3	Duarato	22.521.200,00	22.521.200,00	0,00	100,00
4	Makir	23.652.550,00	23.652.550,00	0,00	100,00
5	Lamaksenu	23.913.100,00	23.913.100,00	0,00	100,00
6	Dirun	24.817.300,00	24.817.300,00	0,00	100,00
7	Leowalu	22.267.000,00	22.267.000,00	0,00	100,00
8	Maudemu	22.455.500,00	22.455.500,00	0,00	100,00
9	Mahuitas	22.262.100,00	22.262.100,00	0,00	100,00
B	Tasifeto Timur	340.722.100,00	340.722.100,00	0,00	100,00
1	Silawan	28.574.800,00	28.574.800,00	0,00	100,00
2	Tulakadi	24.641.500,00	24.641.500,00	0,00	100,00
3	Sadi	23.854.500,00	23.854.500,00	0,00	100,00
4	Umaklaran	24.286.600,00	24.286.600,00	0,00	100,00
5	Manleten	47.575.800,00	47.575.800,00	0,00	100,00
6	Fatuba'a	24.130.800,00	24.130.800,00	0,00	100,00
7	Dafala	40.131.500,00	40.131.500,00	0,00	100,00
8	Takirin	24.122.800,00	24.122.800,00	0,00	100,00
9	Bauho	27.116.300,00	27.116.300,00	0,00	100,00
10	Sarabau	27.132.600,00	27.132.600,00	0,00	100,00
11	Tialai	25.022.500,00	25.022.500,00	0,00	100,00
12	Halimodok	24.132.400,00	24.132.400,00	0,00	100,00
C	Raihat	173.651.200,00	173.651.200,00	0,00	100,00
1	Asumanu	28.913.800,00	28.913.800,00	0,00	100,00
2	Tohe	48.141.100,00	48.141.100,00	0,00	100,00
3	Maumutin	25.321.100,00	25.321.100,00	0,00	100,00
4	Raifatus	23.842.600,00	23.842.600,00	0,00	100,00
5	Aitoun	23.420.200,00	23.420.200,00	0,00	100,00
6	Tohe Leten	24.012.400,00	24.012.400,00	0,00	100,00
D	Tasifeto Barat	220.370.900,00	220.370.900,00	0,00	100,00
1	Tukuneno	31.942.700,00	31.942.700,00	0,00	100,00
2	Naekasa	33.119.600,00	33.119.600,00	0,00	100,00
3	Lookeu	22.554.900,00	22.554.900,00	0,00	100,00
4	Derokfaturene	22.741.600,00	22.741.600,00	0,00	100,00
5	Bakustulama	27.075.500,00	27.075.500,00	0,00	100,00
6	Rinbesihat	26.362.100,00	26.362.100,00	0,00	100,00
7	Naitimu	33.641.500,00	33.641.500,00	0,00	100,00
8	Lawalutulus	22.933.000,00	22.933.000,00	0,00	100,00
E	Kakuluk Mesak	372.046.200,00	372.046.200,00	0,00	100,00
1	Fatuketi	68.287.800,00	68.287.800,00	0,00	100,00
2	Dualaus	57.720.200,00	57.720.200,00	0,00	100,00
3	Jenilu	62.810.700,00	62.810.700,00	0,00	100,00
4	Kenebibi	59.741.700,00	59.741.700,00	0,00	100,00
5	Leosama	46.897.300,00	46.897.300,00	0,00	100,00
6	Kabuna	76.588.500,00	76.588.500,00	0,00	100,00
F	Raimanuk	213.330.100,00	213.330.100,00	0,00	100,00
1	Mandeu Raimanus	23.066.200,00	23.066.200,00	0,00	100,00
2	Renrua	23.117.700,00	23.117.700,00	0,00	100,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	2024			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)	%
3	Dua Koran	22.767.100,00	22.767.100,00	0,00	100,00
4	Mandeu	24.703.500,00	24.703.500,00	0,00	100,00
5	Rafae	23.221.500,00	23.221.500,00	0,00	100,00
6	Faturika	22.566.100,00	22.566.100,00	0,00	100,00
7	Leuntolu	26.379.800,00	26.379.800,00	0,00	100,00
8	Teun	23.664.600,00	23.664.600,00	0,00	100,00
9	Tasain	23.843.600,00	23.843.600,00	0,00	100,00
G	Lasiolat	168.943.000,00	168.943.000,00	0,00	100,00
1	Lasiolat	24.030.100,00	24.030.100,00	0,00	100,00
2	Maneikun	23.922.800,00	23.922.800,00	0,00	100,00
3	Lakanmau	23.919.800,00	23.919.800,00	0,00	100,00
4	Dualasi Raiulun	23.975.400,00	23.975.400,00	0,00	100,00
5	Dualasi	24.113.600,00	24.113.600,00	0,00	100,00
6	Fatulotu	25.138.700,00	25.138.700,00	0,00	100,00
7	Baudaok	23.842.600,00	23.842.600,00	0,00	100,00
H	Lamaknen Selatan	178.722.207,00	178.722.207,00	0,00	100,00
1	Ekin	22.900.700,00	22.900.700,00	0,00	100,00
2	Loonuna	22.702.600,00	22.702.600,00	0,00	100,00
3	Nualain	24.041.000,00	24.041.000,00	0,00	100,00
4	Lakmaras	21.940.900,00	21.940.900,00	0,00	100,00
5	Henes	21.874.907,00	21.874.907,00	0,00	100,00
6	Debululik	21.865.800,00	21.865.800,00	0,00	100,00
7	Sisi Fatuberal	21.777.500,00	21.777.500,00	0,00	100,00
8	Lutha Rato	21.618.800,00	21.618.800,00	0,00	100,00
I	Nanaet Duabesi	93.611.300,00	93.611.300,00	0,00	100,00
1	Dubesi	22.329.600,00	22.329.600,00	0,00	100,00
2	Nanaet	24.633.200,00	24.633.200,00	0,00	100,00
3	Fohoeke	24.049.500,00	24.049.500,00	0,00	100,00
4	Nanaenoe	22.599.000,00	22.599.000,00	0,00	100,00
	Jumlah	1.971.356.757,00	1.971.356.757,00	0,00	100,00

5.1.3.1.2 Bagi Hasil Retribusi

Bagi Hasil Retribusi merupakan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa yang pada tahun 2024 realisasinya mencapai 100,00% atau sebesar Rp725.310.268,00 dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp725.310.268,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp725.310.268,00, realisasi transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah tahun 2024 tidak mengalami peningkatan maupun penurunan. Transfer ini ditujukan untuk Bagi Hasil Retribusi ke 69 Desa.



Rinciannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.126
Rincian Bagi Hasil Retribusi - LRA

No.	Uraian	2024			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)	%
A	Lamaknen	83.439.961,00	83.439.961,00	0,00	100,00
1	Kewar	8.963.531,00	8.963.531,00	0,00	100,00
2	Fulur	9.513.623,00	9.513.623,00	0,00	100,00
3	Duarato	9.363.061,00	9.363.061,00	0,00	100,00
4	Makir	10.097.765,00	10.097.765,00	0,00	100,00
5	Lamaksenulu	8.876.820,00	8.876.820,00	0,00	100,00
6	Dirun	10.562.041,00	10.562.041,00	0,00	100,00
7	Leowalu	8.360.251,00	8.360.251,00	0,00	100,00
8	Maudemu	9.327.190,00	9.327.190,00	0,00	100,00
9	Mahuitas	8.375.679,00	8.375.679,00	0,00	100,00
B	Tasifeto Timur	148.346.048,00	148.346.048,00	0,00	100,00
1	Silawan	11.353.911,00	11.353.911,00	0,00	100,00
2	Tulakadi	9.246.831,00	9.246.831,00	0,00	100,00
3	Sadi	12.155.601,00	12.155.601,00	0,00	100,00
4	Umaklaran	12.722.211,00	12.722.211,00	0,00	100,00
5	Manleten	18.807.709,00	18.807.709,00	0,00	100,00
6	Fatuba'a	10.387.965,00	10.387.965,00	0,00	100,00
7	Dafala	8.899.011,00	8.899.011,00	0,00	100,00
8	Takirin	11.568.655,00	11.568.655,00	0,00	100,00
9	Bauho	14.707.811,00	14.707.811,00	0,00	100,00
10	Sarabau	13.832.078,00	13.832.078,00	0,00	100,00
11	Tialai	13.255.911,00	13.255.911,00	0,00	100,00
12	Halimodok	11.408.354,00	11.408.354,00	0,00	100,00
C	Raihat	57.991.740,00	57.991.740,00	0,00	100,00
1	Asumanu	9.365.241,00	9.365.241,00	0,00	100,00
2	Tohe	11.267.111,00	11.267.111,00	0,00	100,00
3	Maumutin	9.788.201,00	9.788.201,00	0,00	100,00
4	Raifatus	9.167.034,00	9.167.034,00	0,00	100,00
5	Aitoun	9.154.001,00	9.154.001,00	0,00	100,00
6	Tohe Leten	9.250.152,00	9.250.152,00	0,00	100,00
D	Tasifeto Barat	100.777.544,00	100.777.544,00	0,00	100,00
1	Tukuneno	10.774.991,00	10.774.991,00	0,00	100,00
2	Naekasa	11.276.701,00	11.276.701,00	0,00	100,00
3	Lookeu	9.067.951,00	9.067.951,00	0,00	100,00
4	Derokfaturene	8.585.955,00	8.585.955,00	0,00	100,00
5	Bakustulama	11.153.066,00	11.153.066,00	0,00	100,00
6	Rinbesihat	8.674.933,00	8.674.933,00	0,00	100,00
7	Naitimu	25.663.911,00	25.663.911,00	0,00	100,00
8	Lawalutulus	15.580.036,00	15.580.036,00	0,00	100,00
E	Kakuluk Mesak	80.776.726,00	80.776.726,00	0,00	100,00
1	Fatuketi	11.974.656,00	11.974.656,00	0,00	100,00
2	Dualaus	12.806.811,00	12.806.811,00	0,00	100,00
3	Jenilu	14.613.061,00	14.613.061,00	0,00	100,00
4	Kenebibi	12.848.501,00	12.848.501,00	0,00	100,00
5	Leosama	10.916.811,00	10.916.811,00	0,00	100,00
6	Kabuna	17.616.886,00	17.616.886,00	0,00	100,00
F	Raimanuk	80.463.603,00	80.463.603,00	0,00	100,00
1	Mandeu Raimanus	8.175.967,00	8.175.967,00	0,00	100,00
2	Renrua	8.099.371,00	8.099.371,00	0,00	100,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	2024			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)	%
3	Dua Koran	8.147.841,00	8.147.841,00	0,00	100,00
4	Mandeu	10.066.366,00	10.066.366,00	0,00	100,00
5	Rafae	10.564.141,00	10.564.141,00	0,00	100,00
6	Faturika	8.375.891,00	8.375.891,00	0,00	100,00
7	Leuntolu	9.940.879,00	9.940.879,00	0,00	100,00
8	Teun	8.556.131,00	8.556.131,00	0,00	100,00
9	Tasain	8.537.016,00	8.537.016,00	0,00	100,00
G	Lasiolat	67.399.881,00	67.399.881,00	0,00	100,00
1	Lasiolat	10.360.251,00	10.360.251,00	0,00	100,00
2	Maneikun	8.860.251,00	8.860.251,00	0,00	100,00
3	Lakanmau	9.166.955,00	9.166.955,00	0,00	100,00
4	Dualasi Raiulun	9.147.911,00	9.147.911,00	0,00	100,00
5	Dualasi	10.052.821,00	10.052.821,00	0,00	100,00
6	Fatulotu	10.535.581,00	10.535.581,00	0,00	100,00
7	Baudaok	9.276.111,00	9.276.111,00	0,00	100,00
H	Lamaknen Selatan	66.872.138,00	66.872.138,00	0,00	100,00
1	Ekin	8.365.651,00	8.365.651,00	0,00	100,00
2	Loonuna	8.666.061,00	8.666.061,00	0,00	100,00
3	Nualain	8.176.723,00	8.176.723,00	0,00	100,00
4	Lakmaras	8.308.711,00	8.308.711,00	0,00	100,00
5	Henes	8.287.711,00	8.287.711,00	0,00	100,00
6	Debululik	8.345.111,00	8.345.111,00	0,00	100,00
7	Sisi Fatuberal	8.360.066,00	8.360.066,00	0,00	100,00
8	Lutha Rato	8.362.104,00	8.362.104,00	0,00	100,00
I	Nanaet Duabesi	39.242.627,00	39.242.627,00	0,00	100,00
1	Dubesi	8.617.822,00	8.617.822,00	0,00	100,00
2	Nanaet	11.475.911,00	11.475.911,00	0,00	100,00
3	Fohoeka	10.541.686,00	10.541.686,00	0,00	100,00
4	Nanaenoe	8.607.208,00	8.607.208,00	0,00	100,00
	Jumlah	725.310.268,00	725.310.268,00	0,00	100,00

Kedua transfer bagi hasil tahun 2024 dengan perbandingan tahun 2023 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.127
Belanja Transfer Bagi Hasil - LRA

No.	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.971.356.757,00	1.971.356.757,00	0,00	100,00	1.971.356.757,00
2	Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	725.310.268,00	725.310.268,00	0,00	100,00	725.310.268,00
	Jumlah	2.696.667.025,00	2.696.667.025,00	0,00	100,00	2.696.667.025,00

5.1.3.1.3 Transfer Bantuan Keuangan

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan tahun 2024 sebesar Rp118.046.277.339,00 atau mencapai 100,00% dari target yang



ditetapkan sebesar Rp118.050.175.600,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp114.045.147.500,00, realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp4.001.129.839,00 atau 3,51%.

Rincian Transfer Bantuan Keuangan tahun 2024 dengan perbandingan tahun 2023 disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.128
Realisasi Transfer Bantuan Keuangan - LRA

No	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	118.050.175.600,00	118.046.277.339,00	(3.898.261,00)	100,00	114.045.147.500,00
	Jumlah	118.050.175.600,00	118.046.277.339,00	(3.898.261,00)	100,00	114.045.147.500,00

5.1.3.1.3.1 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa tahun 2024 sebesar Rp118.046.277.339,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan sebesar Rp118.050.175.600,00. Realisasi ini mengalami peningkatan sebesar Rp4.001.129.839,00 atau 3,51% dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp114.045.147.500,00. Peningkatan yang terbesar berasal dari jenis belanja bantuan keuangan khusus Kabupaten/Kota yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang kenaikannya mencapai Rp3.638.223.100,00. Dana ini bersumber dari APBD melalui RKUD dan pencairannya menggunakan SP2D-LS.

Rincian Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa tahun 2024 dengan perbandingan tahun 2023 disajikan sebagai berikut.



Tabel 5.129
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau
Kabupaten/Kota Kepada Desa - LRA

No.	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	100,00	180.000.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	64.467.061.000,00	64.463.162.739,00	(3.898.261,00)	99,99	64.370.256.000,00
3	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	53.133.114.600,00	53.133.114.600,00	0,00	100,00	49.494.891.500,00
	Jumlah	118.050.175.600,00	118.046.277.339,00	(3.898.261,00)	100,00	114.045.147.500,00

Rincian lebih lanjut untuk tahun 2024 dapat disajikan sebagai berikut.

1) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa tahun 2024 sebesar Rp450.000.000,00 atau 100% dari target yang ditetapkan. Belanja ini ditujukan untuk operasional 18 Desa Persiapan di Kabupaten Belu. Rinciannya sebagai berikut.

Tabel 5.130
Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota
kepada Desa - LRA

No.	Nama Kecamatan & Desa	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
A	Lamaknen	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00
a	Fulur	0,00	0,00	0,00	0,00
1	<i>Fulur Backhelin</i>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00
b	Makir	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<i>Hatulou</i>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00
c	Dirun	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<i>Weluli</i>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00
B	Tasifeto Timur	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00
a	Silawan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<i>Tukubesi</i>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00
b	Manleten	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<i>Manleten Barat</i>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00
6	<i>Manleten Timur</i>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00
C	Raihat	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00
a	Tohe	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<i>Tohe Rai Ain</i>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00
8	<i>Tohe Fatukesi</i>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00
D	Tasifeto Barat	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	100,00
a	Tukuneno	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<i>Manuaman Fatukbot</i>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00
10	<i>Manuaman Lidak</i>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Nama Kecamatan & Desa	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
b	Naekasa	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<i>Kubesi</i>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00
12	<i>Banameta</i>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00
13	<i>Raidikur</i>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00
c	Bakustulama	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<i>Makerek Nen</i>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00
d	Naitimu	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<i>Welaka</i>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00
E	Kakuluk Mesak	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00
a	Dualaus	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<i>Lakafehan</i>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00
b	Kabuna	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<i>Fatubesi Lalori</i>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00
F	Lamaknen Selatan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00
a.	Loonuna	0,00	0,00	0,00	0,00
18	<i>Majo Rato</i>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00
	Jumlah	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	100,00

2) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang Bersumber dari Dana Desa

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang Bersumber dari Dana Desa pada tahun 2024 sebesar Rp64.463.162.739,00 atau sebesar 99,99% dari target sebesar Rp64.467.061.000,00. Dana ini berasal dari APBN dan ditransfer langsung ke rekening masing-masing desa. BUD melakukan pengesahan atas belanja tersebut dengan menerbitkan Surat Pengesahan Belanja Dana Desa (SPBDD) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.131
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota Kepada Desa yang Bersumber dari Dana Desa - LRA

NO.	TAHAP	JUMLAH	TANGGAL	BATCH	KETERANGAN	SURAT PENGESAHAN BELANJA DANA DESA (SPBDD)
JUMLAH KESELURUHAN (Rp)					64.463.162.739,00	
TAHAP I						
1	I	2.928.426.400	08 Maret 2024	1	Tahap I batch 1, untuk 14 Desa	SPBDD/Tahap.1/5/V/2024
2	I	2.968.152.600	14 Maret 2024	2	Tahap I batch 2, untuk 14 Desa	SPBDD/Tahap.1/6/V/2024
3	I	6.113.055.600	04 April 2024	3	Tahap I batch 3, untuk 28 Desa	SPBDD/Tahap.1/7/V/2024
4	I	6.282.318.000	04 April 2024	4	Tahap I batch 4, untuk 28 Desa	SPBDD/Tahap.1/8/V/2024
5	I	2.381.277.200	19 April 2024	5	Tahap I batch 5, untuk 11 Desa	SPBDD/Tahap.1/9/V/2024
6	I	2.611.009.800	19 April 2024	6	Tahap I batch 6, untuk 11 Desa	SPBDD/Tahap.1/10/V/2024
7	I	1.408.293.200	13 Mei 2024	7	Tahap I batch 7, untuk 7 Desa	SPBDD/Tahap.1/11/V/2024
8	I	1.583.437.800	13 Mei 2024	8	Tahap I batch 8, untuk 7 Desa	SPBDD/Tahap.1/12/V/2024
9	I	1.941.009.600	29 Mei 2024	9	Tahap I batch 9, untuk 9 Desa	SPBDD/Tahap.1/33/V/2024
10	I	1.884.968.400	29 Mei 2024	10	Tahap I batch 10, untuk 9 Desa	SPBDD/Tahap.1/34/V/2024
Jumlah Tahap I (Rp)					30.101.948.600,00	
TAHAP II						
1	II	1.520.288.400	09 Juli 2024	1	Tahap II batch 1, untuk 5 Desa	SPBDD/Tahap.2/56/V/2024
2	II	629.184.400	09 Juli 2024	2	Tahap II batch 2, untuk 5 Desa	SPBDD/Tahap.2/57/V/2024

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

NO.	TAHAP	JUMLAH	TANGGAL	BATCH	KETERANGAN	SURAT PENGESAHAN BELANJA DANA DESA (SPBDD)
3	II	5.921.188.812	05 Agustus 2024	3	Tahap II batch 3, untuk 18 Desa	SPBDD/Tahap.2/60/VIII/2024
4	II	2.791.120.000	05 Agustus 2024	4	Tahap II batch 4, untuk 18 Desa	SPBDD/Tahap.2/61/VIII/2024
5	II	3.619.088.568	28 Agustus 2024	5	Tahap II batch 5, untuk 11 Desa	SPBDD/Tahap.2/63/VIII/2024
6	II	1.676.373.600	28 Agustus 2024	6	Tahap II batch 6, untuk 11 Desa	SPBDD/Tahap.2/64/VIII/2024
7	II	3.807.486.110	13 September 2024	7	Tahap II batch 7, untuk 12 Desa	SPBDD/Tahap.2/71/IX/2024
8	II	1.719.240.400	13 September 2024	8	Tahap II batch 8, untuk 12 Desa	SPBDD/Tahap.2/72/IX/2024
9	II	2.693.529.249	03 Oktober 2024	9	Tahap II batch 9, untuk 8 Desa	SPBDD/Tahap.2/77/X/2024
10	II	1.283.031.600	03 Oktober 2024	10	Tahap II batch 10, untuk 8 Desa	SPBDD/Tahap.2/78/X/2024
11	II	2.833.939.600	18 Oktober 2024	11	Tahap II batch 11, untuk 9 Desa	SPBDD/Tahap.2/93/X/2024
12	II	1.306.950.000	18 Oktober 2024	12	Tahap II batch 12, untuk 9 Desa	SPBDD/Tahap.2/94/X/2024
13	II	1.854.622.000	29 Oktober 2024	13	Tahap II batch 13, untuk 14 Desa	SPBDD/Tahap.2/97/XI/2024
14	II	1.180.284.800	08 November 2024	14	Tahap II batch 14, untuk 4 Desa	SPBDD/Tahap.2/100/XI/2024
15	II	500.687.600	08 November 2024	15	Tahap II batch 15, untuk 4 Desa	SPBDD/Tahap.2/101/XI/2024
16	II	132.473.000	01 November 2024	16	Tahap II batch 16, untuk 1 Desa	SPBDD/Tahap.2/98/XI/2024
17	II	578.389.200	20 November 2024	17	Tahap II batch 17, untuk 2 Desa	SPBDD/Tahap.2/109/XII/2024
18	II	313.336.800	20 November 2024	18	Tahap II batch 18, untuk 2 Desa	SPBDD/Tahap.2/110/XII/2024
Jumlah Tahap II (Rp)				34.361.214.139 ,00		

Rincian lebih lanjut untuk tahun 2024 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.132
Rincian Belanja Bantuan Keuangan Kusus Kabupaten/Kota Kepada Desa Yang
Bersumber dari Dana Desa - LRA

NO.	NAMA KECAMATAN & DESA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/ (KURANG) (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	KEC. RAIMANUK :	8.292.574.000	8.291.877.847	696.153	99,99
	- MANDEU RAIMANUS	884.867.000	884.867.000	0,00	100,00
	- RENRUA	899.351.000	899.351.000	0,00	100,00
	- DUAKORAN	969.285.000	969.285.000	0,00	100,00
	- MANDEU	1.014.880.000	1.014.880.000	0,00	100,00
	- RAFAE	852.612.000	852.612.000	0,00	100,00
	- FATURIKA	880.137.000	880.137.000	0,00	100,00
	- LEUNTOLU	1.032.538.000	1.032.538.000	0,00	100,00
	- TEUN	832.722.000	832.722.000	0,00	100,00
	- TASAIN	926.182.000	925.485.847	696.153	99,92
2	KEC. TASIFETO BARAT :	8.537.125.000	8.537.125.000	0,00	100,00
	- TUKUNENO	1.210.432.000	1.210.432.000	0,00	100,00
	- NAEKASA	1.409.574.000	1.409.574.000	0,00	100,00
	- LOOKEU	851.598.000	851.598.000	0,00	100,00
	- DEROKFATURENE	841.783.000	841.783.000	0,00	100,00
	- BAKUSTULAMA	1.116.802.000	1.116.802.000	0,00	100,00
	- RINBESIHAT	1.191.184.000	1.191.184.000	0,00	100,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

NO.	NAMA KECAMATAN & DESA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/ (KURANG) (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	- NAITIMU	1.148.977.000	1.148.977.000	0,00	100,00
	- LAWALUTOLUS	766.775.000	766.775.000	0,00	100,00
3	KEC. NANAET DUABESI :	3.531.834.000	3.531.728.800	105.200	99,99
	- DUBESI	1.002.418.000	1.002.418.000	0,00	100,00
	- NANAET	762.086.000	762.086.000	0,00	100,00
	- FOHOEKA	955.975.000	955.869.800	105.200	99,99
	- NANAENOE	811.355.000	811.355.000	0,00	100,00
4	KEC. KAKULUK MESAK :	6.667.532.000	6.667.532.000	0,00	100,00
	- FATUKETI	889.976.000	889.976.000	0,00	100,00
	- DUALAUS	1.180.036.000	1.180.036.000	0,00	100,00
	- JENILU	1.093.733.000	1.093.733.000	0,00	100,00
	- KENEBIBI	1.077.985.000	1.077.985.000	0,00	100,00
	- LEOSAMA	1.084.151.000	1.084.151.000	0,00	100,00
	- KABUNA	1.341.651.000	1.341.651.000	0,00	100,00
5	KEC. TASIFETO TIMUR :	10.849.027.000	10.847.292.163	1.734.837	99,98
	- SILAWAN	925.947.000	925.947.000	0,00	100,00
	- TULAKADI	757.568.000	757.568.000	0,00	100,00
	- SADI	914.205.000	914.203.838	1.162	99,99
	- UMAKLARAN	815.370.000	815.369.530	470	99,99
	- MANLETEN	1.182.720.000	1.182.720.000	0,00	100,00
	- FATUBAA	873.762.000	873.762.000	0,00	100,00
	- DAFALA	792.093.000	791.251.362	841.638	99,89
	- TAKIRIN	887.860.000	887.836.133	23.867	99,99
	- BAUHO	838.242.000	837.639.800	602.200	99,93
	- SARABAU	954.716.000	954.450.500	265.500	99,97
	- TIALAI	1.014.778.000	1.014.778.000	0,00	100,00
	- HALIMODOK	891.766.000	891.766.000	0,00	100,00
6	KEC. RAIHAT :	5.341.694.000	5.340.977.459	716.541	99,99
	- ASUMANU	842.188.000	842.188.000	0,00	100,00
	- TOHE	1.155.163.000	1.155.163.000	0,00	100,00
	- MAUMUTIN	1.069.396.000	1.068.684.649	711.351	99,93
	- RAIFATUS	658.025.000	658.020.400	4.600	99,99
	- AITOUN	854.359.000	854.359.000	0,00	100,00
	- TOHE LETEN	762.563.000	762.562.410	590	99,99
7	KEC. LASIOLAT :	5.414.481.000	5.413.881.000	600.000	99,99
	- LASIOLAT	710.711.000	710.111.000	600.000	99,92
	- MANEIKUN	709.184.000	709.184.000	0,00	100,00
	- LAKANMAU	732.444.000	732.444.000	0,00	100,00
	- DUALASI RAIULUN	717.508.000	717.508.000	0,00	100,00
	- DUALASI	803.182.000	803.182.000	0,00	100,00
	- FATULOTU	949.422.000	949.422.000	0,00	100,00
	- BAUDAOK	792.030.000	792.030.000	0,00	100,00
8	KEC. LAMAKNEN :	8.203.871.000	8.203.828.464	42.536	99,99
	- KEWAR	833.396.000	833.396.000	0,00	100,00
	- FULUR	1.023.454.000	1.023.454.000	0,00	100,00
	- DUARATO	729.210.000	729.210.000	0,00	100,00
	- MAKIR	957.237.000	957.194.464	42.536	99,99
	- LAMAKSENULU	782.777.000	782.777.000	0,00	100,00
	- DIRUN	1.154.807.000	1.154.807.000	0,00	100,00
	- LEOWALU	947.441.000	947.441.000	0,00	100,00
	- MAUDEMUM	911.535.000	911.535.000	0,00	100,00
	- MAHUITAS	864.014.000	864.014.000	0,00	100,00
9	KEC. LAMAKNEN SELATAN :	7.628.923.000	7.628.920.006	2.994	99,99

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

NO.	NAMA KECAMATAN & DESA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/ (KURANG) (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	- EKIN	1.069.397.000	1.069.397.000	0,00	100,00
	- LOONUNA	1.204.921.000	1.204.921.000	0,00	100,00
	- NUALAIN	875.637.000	875.637.000	0,00	100,00
	- LAKMARAS	727.060.000	727.060.000	0,00	100,00
	- HENES	796.520.000	796.520.000	0,00	100,00
	- DEBULULIK	1.035.280.000	1.035.280.000	0,00	100,00
	- SISI FATUBERAL	939.234.000	939.234.000	0,00	100,00
	- LUTHARATO	980.874.000	980.871.006	2.994	99,99
	Jumlah	64.467.061.000	64.463.162.739	3.898.261	99,99

3) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa pada tahun 2024 sebesar Rp53.133.114.600,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan sebesar Rp53.133.114.600,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp49.494.891.500,00, tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp3.638.223.100,00 atau 7,35%. Rincian untuk tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.133
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota Kepada Desa yang Bersumber dari Alokasi Dana Desa - LRA

No.	Uraian	2024			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)	%
A	Lamaknen	6.784.266.078	6.784.266.078	0,00	100,00
1	Kewar	754.256.875	754.256.875	0,00	100,00
2	Fulur	772.848.680	772.848.680	0,00	100,00
3	Duarato	729.208.493	729.208.493	0,00	100,00
4	Makir	771.231.454	771.231.454	0,00	100,00
5	Lamaksenu	745.843.218	745.843.218	0,00	100,00
6	Dirun	777.051.337	777.051.337	0,00	100,00
7	Leowalu	736.125.720	736.125.720	0,00	100,00
8	Maudemu	763.663.305	763.663.305	0,00	100,00
9	Mahuitas	734.036.996	734.036.996	0,00	100,00
B	Tasifeto Timur	9.264.675.449	9.264.675.449	0,00	100,00
1	Silawan	822.999.709	822.999.709	0,00	100,00
2	Tulakadi	747.564.501	747.564.501	0,00	100,00
3	Sadi	757.841.175	757.841.175	0,00	100,00
4	Umaklaran	776.753.842	776.753.842	0,00	100,00
5	Manleten	918.290.820	918.290.820	0,00	100,00
6	Fatuba'a	770.469.386	770.469.386	0,00	100,00
7	Dafala	764.465.782	764.465.782	0,00	100,00
8	Takirin	744.946.913	744.946.913	0,00	100,00
9	Bauho	738.714.633	738.714.633	0,00	100,00
10	Sarabau	738.857.699	738.857.699	0,00	100,00
11	Tialai	729.918.614	729.918.614	0,00	100,00
12	Halimodok	753.852.375	753.852.375	0,00	100,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	2024			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)	%
C	Raihat	4.664.903.146	4.664.903.146	0,00	100,00
1	Asumanu	769.187.623	769.187.623	0,00	100,00
2	Tohe	855.058.196	855.058.196	0,00	100,00
3	Maumutin	806.422.007	806.422.007	0,00	100,00
4	Raifatus	736.026.525	736.026.525	0,00	100,00
5	Aitoun	757.735.987	757.735.987	0,00	100,00
6	Tohe Leten	740.472.808	740.472.808	0,00	100,00
D	Tasifeto Barat	6.278.402.700	6.278.402.700	0,00	100,00
1	Tukuneno	834.747.852	834.747.852	0,00	100,00
2	Naekasa	836.877.776	836.877.776	0,00	100,00
3	Lookeu	740.333.017	740.333.017	0,00	100,00
4	Derokfaturene	765.964.728	765.964.728	0,00	100,00
5	Bakustulama	790.524.175	790.524.175	0,00	100,00
6	Rinbesihat	765.555.083	765.555.083	0,00	100,00
7	Naitimu	783.257.373	783.257.373	0,00	100,00
8	Lawalutulus	761.142.696	761.142.696	0,00	100,00
E	Kakuluk Mesak	4.844.563.419	4.844.563.419	0,00	100,00
1	Fatuketi	805.348.758	805.348.758	0,00	100,00
2	Dualaus	835.016.730	835.016.730	0,00	100,00
3	Jenilu	766.923.401	766.923.401	0,00	100,00
4	Kenebibi	816.622.445	816.622.445	0,00	100,00
5	Leosama	768.371.464	768.371.464	0,00	100,00
6	Kabuna	852.280.621	852.280.621	0,00	100,00
F	Raimanuk	6.988.328.752	6.988.328.752	0,00	100,00
1	Mandeu Raimanus	777.329.827	777.329.827	0,00	100,00
2	Renrua	786.324.121	786.324.121	0,00	100,00
3	Dua Koran	762.538.275	762.538.275	0,00	100,00
4	Mandeu	790.769.355	790.769.355	0,00	100,00
5	Rafae	758.666.165	758.666.165	0,00	100,00
6	Faturika	773.642.616	773.642.616	0,00	100,00
7	Leuntolu	795.218.245	795.218.245	0,00	100,00
8	Teun	779.076.902	779.076.902	0,00	100,00
9	Tasain	764.763.246	764.763.246	0,00	100,00
G	Lasiolat	5.205.715.500	5.205.715.500	0,00	100,00
1	Lasiolat	735.813.675	735.813.675	0,00	100,00
2	Maneikun	742.947.035	742.947.035	0,00	100,00
3	Lakanmau	752.385.141	752.385.141	0,00	100,00
4	Dualasi Raiulun	743.799.012	743.799.012	0,00	100,00
5	Dualasi	737.611.981	737.611.981	0,00	100,00
6	Fatulotu	759.731.195	759.731.195	0,00	100,00
7	Baudaok	733.427.461	733.427.461	0,00	100,00
H	Lamaknen Selatan	6.055.585.531	6.055.585.531	0,00	100,00
1	Ekin	753.805.130	753.805.130	0,00	100,00
2	Loonuna	783.705.658	783.705.658	0,00	100,00
3	Nualain	742.198.791	742.198.791	0,00	100,00
4	Lakmaras	757.908.809	757.908.809	0,00	100,00
5	Henes	738.235.082	738.235.082	0,00	100,00
6	Debululik	773.163.852	773.163.852	0,00	100,00
7	Sisi Fatuberal	751.355.622	751.355.622	0,00	100,00
8	Lutha Rato	755.212.587	755.212.587	0,00	100,00
I	Nanaet Duabesi	3.046.674.025	3.046.674.025	0,00	100,00
1	Dubesi	768.875.610	768.875.610	0,00	100,00
2	Nanaet	761.709.268	761.709.268	0,00	100,00



No.	Uraian	2024			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%
3	Fohoeka	760.000.074	760.000.074	0,00	100,00
4	Nanaenoe	756.089.073	756.089.073	0,00	100,00
	Jumlah	53.133.114.600,00	53.133.114.600,00	0,00	100,00

5.1.4 PEMBIAYAAN

2024		2023
Anggaran	Realisasi	Realisasi
Rp75.575.184.012,00	Rp75.598.102.873,01	Rp40.488.337.236,49

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dalam suatu periode anggaran. Pembiayaan netto tahun 2024 pada Pemkab Belu adalah sebesar Rp75.598.102.873,01 atau 100,03% dari anggaran sebesar Rp75.575.184.012,00. Nilai ini mengalami peningkatan Rp30.109.765.636,52 atau 66,19% dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp40.488.337.236,49.

Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan yang pada tahun 2024 dan 2023 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.134
Realisasi Pembiayaan - LRA

No	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Penerimaan Pembiayaan	75.575.184.012,00	75.598.102.873,01	22.918.861,01	100,03	45.488.337.236,49
2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00
	Jumlah	75.575.184.012,00	75.598.102.873,01	22.918.861,01	100,03	40.488.337.236,49

**5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan**

2024		2023
Anggaran	Realisasi	Realisasi
Rp75.575.184.012,00	Rp75.598.102.873,01	Rp45.488.337.236,49

Realisasi Penerimaan Pembiayaan tahun 2024 sebesar Rp75.598.102.873,01 atau mencapai 100,03% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp75.575.184.012,00. Dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah tahun 2023 sebesar Rp45.488.337.236,49 realisasi di tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp30.109.765.636,52 atau 66,19%. Uraianya adalah sebagai berikut.

Tabel 5.135
Penerimaan Pembiayaan Daerah - LRA

No.	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Penggunaan SILPA	75.276.167.600,00	75.276.180.441,01	12.841,01	100,00	45.017.835.220,49
2	Penerimaan Kembali Piutang	299.016.412,00	321.922.432,00	22.906.020,00	107,66	470.502.016,00
Jumlah		75.575.184.012,00	75.598.102.873,01	22.918.861,01	100,03	45.488.337.236,49

5.1.4.1.1 Penggunaan SiLPA

Realisasi Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya pada tahun 2024 sebesar Rp75.276.180.441,01 atau 100% dari anggaran yang ditetapkan, yang dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 5.136
Penggunaan SiLPA - LRA

No.	Uraian	2024				2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya	75.276.167.600,00	75.276.167.599,53	(0,47)	100,00	45.013.044.988,14
2	Koreksi SiLPA	0,00	12.841,48	0,00	0,00	4.790.232,35
Jumlah		75.276.167.600,00	75.276.180.441,01	12.841,01	100,00	45.017.835.220,49

5.1.4.1.2 Penerimaan Kembali Piutang

Penerimaan Kembali Piutang tahun 2024 dalam bentuk piutang atas pemberian pinjaman kepada pimpinan DPRD Kabupaten Belu untuk pengadaan kendaraan operasional dengan jumlah anggaran awal sebesar Rp1.820.100.000,00 yang direalisasikan pada tahun 2019. Atas pelaksanaan perjanjian tersebut timbul kewajiban untuk melakukan



penyetoran kembali ke kas daerah selama 5 tahun dan telah dilunasi seluruhnya pada tahun 2024.

Dari target anggaran tahun 2024 sebesar Rp299.016.412,00, penerimaan kembali piutang dapat direalisasikan sebesar 321.922.432,00 atau 107,66%. Jika dibanding realisasi tahun 2023 sebesar Rp470.502.016,00, realisasi tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp(148.579.584,00) atau (31,58)%.

5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

2024		2023
Anggaran	Realisasi	Realisasi
Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000.000,00

Pengeluaran Pembiayaan tahun 2024 tidak dianggarkan dan tidak ada realisasi. Dibandingkan realisasi Pengeluaran Pembiayaan tahun 2023 sebesar Rp5.000.000.000,00, realisasi tahun 2024 ini mengalami penurunan 100,00% atau sebesar (Rp5.000.000.000,00)

5.1.4.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah tahun 2024 tidak dianggarkan dan tidak ada realisasi. Dibandingkan realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah tahun 2023 sebesar Rp5.000.000.000,00, realisasi tahun 2024 ini mengalami penurunan (100,00)% atau sebesar Rp(5.000.000.000,00) karena tidak adanya anggaran Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada BUMD pada tahun 2024.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah di tahun 2024 tidak dianggarkan dan tidak terealisasi karena kondisi keterbatasan fiskal daerah.

5.1.5 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN

2024		2023
Anggaran	Realisasi	Realisasi
Rp0,00	Rp41.500.780.316,24	Rp75.276.167.599,53

Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dalam tahun 2024 sebesar Rp41.500.780.316,24 yang merupakan selisih lebih



antara surplus dan defisit dengan pembiayaan netto. Realisasi ini jika dibandingkan dengan SiLPA tahun 2023 sebesar Rp75.276.167.599,53 maka terjadi penurunan sebesar Rp(33.775.387.283,29) atau (44,87)%. Uraianannya adalah sebagai berikut.

Tabel 5.137
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran - LRA

Uraian	2024				2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Realisasi Pendapatan	1.027.588.617.705,00	977.447.317.587,66	(50.141.300.117,34)	95,12	962.945.480.794,95
Realisasi Belanja dan Transfer	1.103.163.801.717,00	1.011.544.640.144,43	(91.619.161.572,57)	91,69	928.157.650.431,91
Surplus/(Defisit)	(75.575.184.012,00)	(34.097.322.556,77)	41.477.861.455,23	45,12	34.787.830.363,04
Pembiayaan					
Penerimaan Pembiayaan	75.575.184.012,00	75.598.102.873,01	22.918.861,01	100,03	45.488.337.236,49
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	75.575.184.012,00	75.598.102.873,01	22.918.861,01	100,03	40.488.337.236,49
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	41.500.780.316,24	41.500.780.316,24	0,00	75.276.167.599,53

SiLPA tahun 2024 berdasarkan sumber dananya dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.138
Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran - LRA

No.	Uraian	31-Des-24 (Rp)
1	SILPA DAU <i>Specific Grant</i>	8.909.000.241,86
	- Pendanaan Kelurahan	33.525.792,00
	- Bidang Pendidikan	5.404.359.784,03
	- Bidang Kesehatan	3.260.812.230,83
	- Bidang Pekerjaan Umum	210.302.435,00
2	SILPA Dana Insentif Fiskal	144.268.838,70
	- Bidang Perumahan	69.583.588,70
	- Bidang Pertanian	74.685.250,00
3	SILPA DAK Fisik	2.641.301.704,00
	DAK Reguler	165.205.426,00
	- Bidang Pendidikan	125.392.562,00
	a. Bidang PAUD	7.614.050,00
	b. Bidang SD	80.866.002,00
	c. Bidang SMP	35.104.110,00
	d. Bidang Kesetaraan	1.808.400,00
	- Bidang Kesehatan dan KB	171.750,00
	- Bidang Sanitasi	2.600.064,00
	- Bidang Jalan	2.531.550,00
	- Bidang Transportasi Perdesaan	1.898.000,00
	- Bidang Air Minum	32.611.500,00
	DAK Penugasan	2.014.000.278,00
	- Bidang Pendidikan	9,00
	- Bidang Kesehatan dan KB	1.254.143.240,00
	- Bidang Perumahan dan Permukiman	6.004.000,00
	- Bidang Jalan	57.417.200,00
	- Bidang Transportasi dan Perdesaan	6.400.000,00
	- Bidang Irigasi	706.402,00
	- Bidang Air Minum	350.315.757,00
	- Bidang Sanitasi	23.503.898,00



No.	Uraian	31-Des-24 (Rp)
	- Bidang Pertanian	315.509.772,00
	DAK Afirmasi	462.096.000,00
	- Bidang Perumahan	462.096.000,00
4	SILPA DAK Non Fisik	4.766.105.190,00
	- TPG PNSD	1.526.140.088,00
	- Tamsil Guru PNSD	564.600.000,00
	- Tunjangan Khusus Guru	78.474.300,00
	- Bantuan Operasional Kesehatan	1.786.047.447,00
	- Pelayanan Administrasi Kependudukan	4.305,00
	- Dana Pelayanan Kepariwisata	35.424.900,00
	- Fasilitas Penanaman Modal	57.438.800,00
	- Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	52.360.340,00
	- Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	665.615.010,00
5	Cukai Hasil Tembakau	15.353.597,00
6	SILPA DAU Block Grant	19.709.477.099,04
7	SILPA PAD	17.021.991,58
8	SILPA BLUD	211.621.063,89
9	SILPA Dana Kapitasi JKN	1.982.366.742,08
10	SILPA Dana BOS	67.205.450,09
11	SILPA Dana BOP PAUD	100.000,00
12	SILPA Dana BOK	3.036.958.398,00
SILPA per 31 Desember 2024		41.500.780.316,24

5.2 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan.

Realisasi Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih tahun 2024 sebesar Rp41.500.780.316,24. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp(33.775.387.283,29) atau (44,87)% jika dibanding realisasi Saldo Anggaran Lebih tahun 2023, yang dapat dirincikan pada tabel berikut.

Tabel 5.139
Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

No.	Uraian	31-Des-2024 (Rp)	31-Des-2023 (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)	%
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	75.276.167.599,53	45.013.044.988,14	30.263.122.611,39	67,23
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	75.276.180.441,01	45.017.835.220,49	30.258.345.220,52	67,21
3	Subjumlah	(12.841,48)	(4.790.232,35)	4.777.390,87	(99,73)
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	41.500.780.316,24	75.276.167.599,53	(33.775.387.283,29)	(44,87)
5	Subjumlah	41.500.767.474,76	75.271.377.367,18	(33.770.609.892,42)	(44,87)
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	12.841,48	4.790.232,35	(4.777.390,87)	(99,73)
7	Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00



No.	Uraian	31-Des-2024 (Rp)	31-Des-2023 (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)	%
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	75.276.167.599,53	45.013.044.988,14	30.263.122.611,39	67,23
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir	41.500.780.316,24	75.276.167.599,53	(33.775.387.283,29)	(44,87)

Laporan Perubahan SAL tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal Rp75.276.167.599,53 merupakan Saldo Anggaran Lebih Akhir tahun 2023 yang terdiri dari:

(Dalam Rupiah)

Kas di Kas Daerah	62.059.839.604,54
Kas di Bendahara Penerimaan	40.114.158,31
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00
Kas di BLUD	8.491.316.902,95
Kas di Bendahara FKTP	1.373.961.823,00
Kas di Bendahara BOSP	115.669.326,31
Kas di Bendahara BOK	3.195.033.558,00
Kas Lainnya	26.080.449,42
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	(8.679.979,00)
Utang Jangka Pendek Lainnya sehubungan dengan Dana Titipan	(17.168.244,00)
Jumlah	75.276.167.599,53

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Jumlah sebesar Rp75.276.180.441,01 merupakan Penerimaan Pembiayaan-Penggunaan SiLPA tahun berjalan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang terdiri dari:

(Dalam Rupiah)

Kas di Kas Daerah	62.059.839.604,54
Kas di Bendahara Penerimaan	40.114.158,31
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00
Kas di BLUD	8.491.316.902,95
Kas di Bendahara FKTP	1.373.961.823,00
Kas di Bendahara BOSP	115.682.167,79
Kas di Bendahara BOK	3.195.033.558,00
Kas Lainnya	26.080.449,42
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	(8.679.979,00)
Utang Jangka Pendek Lainnya sehubungan dengan Dana Titipan	(17.168.244,00)
Jumlah	75.276.180.441,01

**5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)**

Jumlah sebesar Rp41.500.780.316,24 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 atau SiLPA, yang dapat diuraikan sebagai berikut.

	<i>(Dalam Rupiah)</i>
Surplus/Defisit Anggaran	(34.097.322.556,77)
Pembiayaan Netto	75.598.102.873,01
SiLPA/(SiKPA) Tahun Berjalan	41.500.780.316,24

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp12.841,48. Koreksi ini merupakan koreksi tambah SiLPA awal BOSP atas selisih awal saldo rekening giro BOSP pada SDI Asulait sebesar Rp0,86 dan SMPN 1 Tasifeto Timur sebesar Rp12.840,62 sesuai saldo awal rekening koran 1 Januari 2024 kedua Sekolah Negeri.

5.2.5 Lain-lain

Tidak terdapat saldo Lain-lain dalam komponen perhitungan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih tahun 2024.

5.2.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Awal Rp41.500.780.316,24 merupakan Saldo Anggaran Lebih Akhir tahun 2023 yang terdiri dari:

	<i>(Dalam Rupiah)</i>
Kas di Kas Daerah	36.185.506.670,60
Kas di Bendahara Penerimaan	16.242.002,31
Kas di Bendahara Pengeluaran	422.600,00
Kas di BLUD	211.621.063,89
Kas di Bendahara FKTP	1.982.366.742,08
Kas di Bendahara BOSP	67.305.450,09
Kas di Bendahara BOK	3.036.958.398,00
Kas Lainnya	34.652.749,27
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	(34.295.360,00)
Jumlah	41.500.780.316,24



5.3 PENJELASAN AKUN-AKUN NERACA

Dalam penjelasan Akun-akun Neraca ini diuraikan mengenai posisi Neraca untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan perbandingan tanggal 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut.

5.3.1 ASET	31-Des-24	31-Des-23
	Rp1.687.311.886.600,28	Rp1.677.869.223.887,93

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Saldo Aset per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.687.311.886.600,28. Jika dibandingkan dengan saldo aset per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.677.869.223.887,93, maka di tahun ini jumlah aset mengalami kenaikan sebesar Rp9.442.662.712,35 atau 0,56%.

Adapun rinciannya adalah sebagai berikut.

Tabel 5.140
Rincian Aset

No	Uraian	Saldo		Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
		31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)		
1	Aset Lancar	122.915.084.560,44	123.111.843.610,17	(196.759.049,73)	(0,16)
2	Investasi Jangka Panjang	73.871.722.006,00	74.252.466.616,87	(380.744.610,87)	(0,51)
3	Aset Tetap	1.435.306.169.331,88	1.394.553.672.606,05	40.752.496.725,83	2,92
4	Properti Investasi	28.598.400.679,05	27.939.053.513,82	659.347.165,23	2,36
5	Aset Lainnya	26.620.510.022,91	58.012.187.541,02	(31.391.677.518,11)	(54,11)
Jumlah		1.687.311.886.600,28	1.677.869.223.887,93	9.442.662.712,35	0,56

5.3.1.1 ASET	31-Des-24	31-Des-23
LANCAR	Rp122.915.084.560,44	Rp123.111.843.610,17

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp122.915.084.560,44. Jika dibandingkan dengan saldo Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2023, terdapat penurunan sebesar Rp(196.759.049,73) atau (0,16)%.



Saldo Aset Lancar disajikan pada tabel berikut di bawah ini.

Tabel 5.141
Rincian Aset Lancar

No.	Uraian	Saldo		Kenalkan/ (Penurunan) (Rp)	%
		31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)		
1	Kas di Kas Daerah	36.185.506.670,60	62.059.839.604,54	(25.874.332.933,94)	(41,69)
2	Kas di Bendahara Penerimaan	16.242.002,31	40.114.158,31	(23.872.156,00)	(59,51)
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	422.600,00	0,00	422.600,00	0,00
4	Kas di BLUD	211.621.063,89	8.491.316.902,95	(8.279.695.839,06)	(97,51)
5	Kas di Bendahara FKTP	1.982.366.742,08	1.373.961.823,00	608.404.919,08	44,28
6	Kas di Bendahara BOS	67.305.450,09	115.669.326,31	(48.363.876,22)	(41,81)
7	Kas di Bendahara BOK	3.036.958.398,00	3.195.033.558,00	(158.075.160,00)	(4,95)
8	Kas Lainnya	34.652.749,27	26.080.449,42	8.572.299,85	32,87
9	Setara Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Piutang Pajak	16.913.355.467,68	15.430.371.782,68	1.482.983.685,00	9,61
	Penyisihan Piutang Pajak	(13.220.693.712,81)	(12.317.675.922,85)	(903.017.789,96)	7,33
	<i>Piutang Pajak Netto</i>	3.692.661.754,87	3.112.695.859,83	579.965.895,04	18,63
11	Piutang Retribusi	2.907.086.887,69	2.405.882.453,88	501.204.433,81	20,83
	Penyisihan Piutang Retribusi	(2.198.129.487,68)	(1.998.816.358,26)	(199.313.129,42)	9,97
	<i>Piutang Retribusi Netto</i>	708.957.400,01	407.066.095,62	301.891.304,39	74,16
12	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	16.628.974.639,96	12.317.976.521,59	4.310.998.118,37	35,00
	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	(801.047.061,84)	(793.102.142,88)	(7.944.918,96)	1,00
	<i>Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Netto</i>	15.827.927.578,12	11.524.874.378,71	4.303.053.199,41	37,34
13	Piutang Transfer Antar Daerah	2.832.914.508,00	8.202.584.310,00	(5.369.669.802,00)	(65,46)
	Penyisihan Transfer Antar Daerah	0,00	(41.012.921,56)	41.012.921,56	(100,00)
	<i>Piutang Transfer Antar Daerah - Netto</i>	2.832.914.508,00	8.161.571.388,44	(5.328.656.880,44)	(65,29)
14	Belanja Dibayar di Muka	278.304.600,00	0,00	278.304.600,00	0,00
15	Persediaan	58.039.243.043,21	24.603.620.065,04	33.435.622.978,17	135,90
	Jumlah	122.915.084.560,44	123.111.843.610,17	(196.759.049,73)	(0,16)

5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah	31-Des-24	31-Des-23
	Rp36.185.506.670,60	Rp62.059.839.604,54

Kas di Kas

Daerah merupakan uang yang ada di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD). Saldo kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp36.185.506.670,60. Dibandingkan dengan saldo Kas di Kas Daerah tahun 2023, saldo Kas di Kas Daerah tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp(25.874.332.933,94) atau (41,69)%.

Tabel 5.142
Kas di Kas Daerah

No.	Uraian	Saldo		Kenalkan/ (Penurunan) (Rp)	%
		31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)		
1	Kas di Kas Daerah	36.185.506.670,60	62.059.839.604,54	(25.874.332.933,94)	(41,69)
	Jumlah	36.185.506.670,60	62.059.839.604,54	(25.874.332.933,94)	(41,69)



Rekening Kas di Kas Daerah tahun 2024 terdiri atas tiga rekening yakni:

- 1) Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) NTT dengan nomor rekening 003.01.04-000029-0 dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp36.185.506.670,60;
- 2) Rekening Bupati pada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) NTT dengan nomor rekening 003.01.04-000007-3 sebagai rekening penampung PAD dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00; dan
- 3) Rekening penampung pendapatan pajak PBB-P2 pada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) NTT dengan nomor rekening 003.01.04-000067-0 dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

Mutasi Kas di Kas Daerah tahun 2024 terdapat dalam tabel berikut di bawah ini.

Tabel 5.143
Rincian Kas di Kas Daerah

No.	Uraian	Saldo Awal 1-Jan-2024 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir 31-Des-2024 (Rp)	%
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)		
1	RKUD	62.059.839.604,54	913.638.748.111,50	939.513.081.045,44	36.185.506.670,60	(41,69)
2	Bupati Belu	-	255.400.091.792,92	255.400.091.792,92	-	0,00
3	Bupati Belu/PBB P2	-	3.389.758.411,00	3.389.758.411,00	-	0,00
	Jumlah	62.059.839.604,54	1.172.428.598.315,42	1.198.302.931.249,36	36.185.506.670,60	(41,69)

**5.3.1.1.2 Kas di Bendahara
Penerimaan**

31-Des-24
Rp16.242.002,31

31-Des-23
Rp40.114.158,31

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan uang yang ada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 belum disetor ke kas daerah. Per tanggal 31 Desember 2024 terdapat Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp16.242.002,31, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.144
Kas di Bendahara Penerimaan

No.	Uraian	Saldo		Kenalkan/ (Penurunan) (Rp)	%
		31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)		
1	Kas di Bendahara Penerimaan	16.242.002,31	40.114.158,31	(23.872.156,00)	(59,51)
	Jumlah	16.242.002,31	40.114.158,31	(23.872.156,00)	(59,51)



Jumlah ini turun (59,51%) atau sebesar Rp(23.872.156,00) jika dibandingkan dengan saldo pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp40.114.158,31. Rincian sisa kas di bendahara penerimaan per SKPD tahun 2024 disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.145**Rincian Kas di Bendahara Penerimaan**

No.	Nama SKPD	Uraian	31-Des-24 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	Retribusi Non Kapitasi	365.000,00
2	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Retribusi Pelayanan Kesehatan	15.877.000,00
3	Bapenda - 2507357407	Titipan Setoran QRIS BPHTB	1,00
4	Bapenda - 2507357949	Titipan Setoran QRIS Reklame	0,86
5	Bapenda - 2507280628	Titipan Setoran QRIS PBB P2	0,06
6	Bapenda - 2507357647	Titipan Setoran QRIS 6 Setoran Pajak Lainnya	0,39
Jumlah			16.242.002,31

Seluruh saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 telah disetorkan ke Kas Daerah pada tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Saldo kas di Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan Rp365.000,00 telah disetor ke Kas Daerah pada tahun 2025 dengan rincian STS Nomor 139/R/RE/DINKES tanggal 21 Januari 2025 sebesar Rp95.000,00, STS Nomor 449/R/RE/DINKES tanggal 21 Februari 2025 sebesar Rp120.000,00 dan STS Nomor 573/R/RE/DINKES tanggal 4 Maret 2025 sebesar Rp150.000,00;
- 2) Saldo kas di Bendahara Penerimaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Rp15.877.000,00 telah disetor ke Kas Daerah pada tahun 2025 dengan STS Nomor 284/R/RE tanggal 6 Januari 2025;
- 3) Saldo kas di rekening titipan QRIS BPHTB Rp1,00 telah disetor ke Kas Daerah pada tahun 2025 dengan STS Nomor 470/LLPAD tanggal 24 Februari 2025;
- 4) Saldo kas di rekening titipan QRIS Reklame Rp0,86 telah disetor ke Kas Daerah pada tahun 2025 dengan STS Nomor STS/452/LLPAD tanggal 21 Februari 2025;
- 5) Saldo kas di rekening titipan QRIS PBB P2 Rp0,06 telah disetor ke Kas Daerah pada tahun 2025 dengan STS Nomor STS/454/LLPAD tanggal 21 Februari 2025; dan



- 6) Sisa kas di rekening titipan QRIS enam setoran pajak lainnya Rp0,39 telah disetor ke Kas Daerah pada tahun 2025 dengan Nomor STS/453/LLPAD tanggal 21 Februari 2025.

5.3.1.1.3	Kas di Bendahara Pengeluaran	31-Des-24	31-Des-23
		Rp422.600,00	Rp0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan uang yang ada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 belum disetor ke kas daerah. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp422.600,00. Kondisi ini berbeda dengan tahun 2023 yaitu sebesar Rp0,00. Rinciannya disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.146

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

No.	Uraian	Saldo		Kenalkan/ (Penurunan) (Rp)	%
		31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)		
1	Kecamatan Lamaknen Selatan	400.000,00	-	400.000,00	0,00
2	Kelurahan Fatubenao	22.600,00	-	22.600,00	0,00
	Jumlah	422.600,00	-	422.600,00	0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp422.600,00 ini merupakan pengembalian belanja dari SP2D GU dari Kecamatan Lamaknen Selatan dan Kelurahan Fatubenao yang seluruhnya telah disetorkan ke Kas Daerah oleh bendahara pengeluaran pada tanggal 14 Januari 2025 dengan STS Nomor 81/LLPAD sebesar Rp400.000,00 dan pada tanggal 15 Januari 2025 dengan STS Nomor 88/LLPAD sebesar Rp22.600,00.

5.3.1.1.4 Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

31-Des-24	31-Des-23
Rp211.621.063,89	Rp8.491.316.902,95

Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan sisa uang tunai dan saldo di bank yang dimiliki oleh BLUD yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan BLUD s.d. 31 Desember 2024. Saldo kas di BLUD per 31 Desember 2024 sebesar Rp211.621.063,89 dibandingkan dengan saldo Kas di



BLUD tahun 2023 sebesar Rp8.491.316.902,95. Saldo Kas di tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp(8.279.695.839,06) atau (97,51)%.

Kas di BLUD per 31 Desember 2024 terdiri dari kas tunai sebesar Rp2.790.550,00 dan kas di rekening PT BPD NTT dengan Nomor Rekening 003.010.50002151 atas nama RSUD Atambua sebesar Rp208.830.513,89.

Tabel 5.147
Kas di Badan Layanan Umum Daerah

No.	Uraian	Saldo		Kenalkan/ (Penurunan) (Rp)	%
		31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)		
1	Kas di BLUD	211.621.063,89	8.491.316.902,95	(8.279.695.839,06)	(97,51)
	Jumlah	211.621.063,89	8.491.316.902,95	(8.279.695.839,06)	(97,51)

Mutasi saldo kas di Badan Layanan Umum Daerah dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.148
Mutasi Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah

No.	Uraian	Saldo Awal 2024 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir 2024 (Rp)	%
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)		
1	Kas di BLUD	8.491.316.902,95	54.578.680.993,94	62.858.376.833,00	211.621.063,89	(97,51)
	Jumlah	8.491.316.902,95	54.578.680.993,94	62.858.376.833,00	211.621.063,89	(97,51)

5.3.1.1.5	Kas di Bendahara FKTP	31-Des-24	31-Des-23
		<u>Rp1.982.366.742,08</u>	<u>Rp1.373.961.823,00</u>

Saldo Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2024 merupakan akumulasi saldo pada rekening giro 17 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Puskesmas di Kabupaten Belu. Saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.982.366.742,08 dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara FKTP tahun 2023 sebesar Rp1.373.961.823,00, saldo Kas di Bendahara FKTP tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp608.404.919,08 atau mencapai 44,28%. Uraian dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.149
Kas Di Bendahara FKTP

No	Uraian	Saldo		Kenalkan/ (Penurunan) Rp	%
		31-Des-24 Rp	31-Des-23 Rp		
1	Kas di Bendahara FKTP	1.982.366.742,08	1.373.961.823,00	608.404.919,08	44,28
	Jumlah	1.982.366.742,08	1.373.961.823,00	608.404.919,08	44,28



BLUD tahun 2023 sebesar Rp8.491.316.902,95. Saldo Kas di tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp(8.279.695.839,06) atau (97,51)%.

Kas di BLUD per 31 Desember 2024 terdiri dari kas tunai sebesar Rp2.790.550,00 dan kas di rekening PT BPD NTT dengan Nomor Rekening 003.010.50002151 atas nama RSUD Atambua sebesar Rp208.830.513,89.

Tabel 5.147
Kas di Badan Layanan Umum Daerah

No.	Uraian	Saldo		Kenalkan/ (Penurunan) (Rp)	%
		31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)		
1	Kas di BLUD	211.621.063,89	8.491.316.902,95	(8.279.695.839,06)	(97,51)
	Jumlah	211.621.063,89	8.491.316.902,95	(8.279.695.839,06)	(97,51)

Mutasi saldo kas di Badan Layanan Umum Daerah dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.148
Mutasi Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah

No.	Uraian	Saldo Awal 2024 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir 2024 (Rp)	%
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)		
1	Kas di BLUD	8.491.316.902,95	54.578.680.993,94	62.858.376.833,00	211.621.063,89	(97,51)
	Jumlah	8.491.316.902,95	54.578.680.993,94	62.858.376.833,00	211.621.063,89	(97,51)

5.3.1.1.5	Kas di Bendahara FKTP	31-Des-24	31-Des-23
		<u>Rp1.982.366.742,08</u>	<u>Rp1.373.961.823,00</u>

Saldo Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2024 merupakan akumulasi saldo pada rekening giro 17 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Puskesmas di Kabupaten Belu. Saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.982.366.742,08 dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara FKTP tahun 2023 sebesar Rp1.373.961.823,00, saldo Kas di Bendahara FKTP tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp608.404.919,08 atau mencapai 44,28%. Uraianya dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.149
Kas Di Bendahara FKTP

No	Uraian	Saldo		Kenalkan/ (Penurunan) Rp	%
		31-Des-24 Rp	31-Des-23 Rp		
1	Kas di Bendahara FKTP	1.982.366.742,08	1.373.961.823,00	608.404.919,08	44,28
	Jumlah	1.982.366.742,08	1.373.961.823,00	608.404.919,08	44,28



Rincian mutasi kas per masing-masing FKTP/Puskesmas adalah sebagai berikut.

Tabel 5.150
Rincian Kas Di Bendahara FKTP

No	Uraian	No Rekening	Saldo Awal 2024 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir 2024 (Rp)	%
				Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)		
1	Puskesmas Kota	00301.05.000004-1	280.407.481,60	1.737.487.949,00	1.720.165.395,00	297.730.035,60	6,18
2	Puskesmas Atapupu	00301.05.000004-0	43.038.652,00	718.438.836,00	673.701.780,00	87.775.708,00	103,95
3	Puskesmas Wedomu	00301.05.000003-6	13.621.493,90	769.729.368,00	639.460.127,00	143.890.734,90	956,35
4	Puskesmas Aululik	00301.05.000005-6	8.104.525,00	363.354.629,00	331.651.409,00	39.807.745,00	391,18
5	Puskesmas Haekesak	00301.05.000005-5	55.612.555,00	718.207.583,00	672.273.775,00	101.546.363,00	82,60
6	Puskesmas Weluil	00301.05.000003-4	20.388.101,80	449.526.265,85	393.970.848,00	75.943.519,65	272,49
7	Puskesmas Nualain	00301.05.000005-7	83.343.085,50	592.713.994,23	559.421.716,00	116.635.363,73	39,95
8	Puskesmas Hallulik	00301.05.000005-4	152.963.020,50	1.217.755.812,31	1.277.093.367,00	93.625.465,81	(38,79)
9	Puskesmas Webora	00301.05.000004-3	18.866.311,00	431.822.311,80	353.311.586,00	97.377.036,80	416,14
10	Puskesmas Haliwen	00301.05.000003-7	248.707.080,00	1.131.555.665,00	1.116.763.774,00	263.498.971,00	5,95
11	Puskesmas Laktutus	00301.05.000006-2	40.224.374,90	306.917.106,05	261.950.580,00	85.190.900,95	111,79
12	Puskesmas Umanen	00301.05.000003-2	99.986.506,70	947.463.333,00	926.703.074,00	120.746.765,70	20,76
13	Puskesmas Ainiba	00301.05.000005-3	31.528.378,10	155.433.022,00	165.507.016,00	21.454.384,10	(31,95)
14	Puskesmas Dilulmil	00301.05.000005-2	62.168.633,80	268.748.239,00	271.449.706,00	59.467.166,80	(4,35)
15	Puskesmas Atambua Selatan	00301.05.000003-9	140.190.918,40	1.246.403.678,00	1.218.141.801,00	168.452.795,40	20,16
16	Puskesmas Silawan	00301.05.000003-3	27.139.112,30	412.977.492,84	351.446.786,00	88.669.819,14	226,72
17	Puskesmas Rafee	00301.05.000003-8	47.671.592,50	612.306.040,00	539.423.666,00	120.553.966,50	152,88
	Jumlah		1.373.961.823,00	12.080.841.325,08	11.472.436.406,00	1.982.366.742,08	44,28

**5.3.1.1.6 Kas di Bendahara
BOSP**

31-Des-24
Rp67.305.450,09

31-Des-23
Rp115.669.326,31

Saldo Kas di Bendahara BOSP per 31 Desember 2024 sebesar Rp67.305.450,09. Saldo ini merupakan saldo pemakaian dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dari Pemerintah Pusat, terdiri dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) oleh Satuan Pendidikan Negeri di tingkat SD, SMP dan PAUD di Kabupaten Belu selama tahun 2024 yang ditransfer ke rekening BOSP masing-masing Satuan Pendidikan Negeri.

Tabel 5.151
Rincian Kas di Bendahara BOSP

No.	Uraian	Saldo		Kenalkan/ (Penurunan) (Rp)	%
		31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)		
1	Kas di Bendahara BOSP	67.305.450,09	115.669.326,31	(48.363.876,22)	(41,81)
	Jumlah	67.305.450,09	115.669.326,31	(48.363.876,22)	(41,81)



Dibandingkan dengan tahun 2023, saldo Kas di Bendahara BOSP tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp(48.363.876,22) atau (41,81)%. Uraian mutasi Kas di Bendahara BOSP adalah sebagai berikut.

Tabel 5.152
Rincian Kas di Bendahara BOSP

No.	Uraian	Saldo Awal 2024 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir 2024 (Rp)	%
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)		
1	Kas di Bendahara BOSP	115.669.326,31	28.675.266.558,78	28.723.630.435,00	67.305.450,09	(41,81)
	Jumlah	115.669.326,31	28.675.266.558,78	28.723.630.435,00	67.305.450,09	(41,81)

Selanjutnya penjelasan mutasi saldo Kas di Bendahara BOSP berdasarkan jenjang pendidikan adalah sebagai berikut.

Tabel 5.153
Penjelasan Mutasi Kas di Bendahara BOSP

No	Uraian	Saldo Awal 2024 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir 2024 (Rp)	%
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)		
1	Kas di Bendahara BOS SMPN	54.712.550,00	9.997.054.810,62	10.038.552.988,00	13.214.372,62	(75,85)
2	Kas di Bendahara BOS SDI/N	60.956.776,31	13.916.167.748,16	13.923.133.447,00	53.991.077,47	(11,43)
3	Kas di Bendahara TK/PAUD	0,00	3.869.634.000,00	3.869.534.000,00	100.000,00	0,00
4	Kas di Bendahara Kesetaraan	0,00	892.410.000,00	892.410.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	115.669.326,31	28.675.266.558,78	28.723.630.435,00	67.305.450,09	(41,81)

- 1) Kas di Bendahara BOS SMP Negeri (SMPN) per sekolah dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.154
Rincian Kas di Bendahara BOS SMPN

No	Uraian	Saldo Awal 2024 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir 2024 (Rp)	%
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)		
1	SMPN 3 ATAMBUA	3.315.999,00	372.884.001,00	376.200.000,00	0,00	(100,00)
2	SMPN KIMBANA	1.600.000,00	479.112.800,00	480.700.000,00	12.800,00	(99,20)
3	SMPN SATU ATAP TALA	0,00	72.610.550,00	72.578.268,00	32.282,00	0,00
4	SMPN RINBESIHAT	0,00	121.000.000,00	121.000.000,00	0,00	0,00
5	SMPN TULATUDIK	204.674,00	80.995.330,00	81.200.000,00	4,00	(100,00)
6	SMPN SATAP BENEMETA	6.820.000,00	104.280.000,00	111.100.000,00	0,00	(100,00)
7	SMPN DEROKMASIN	0,00	104.200.000,00	104.200.000,00	0,00	0,00
8	SMPN 1 ATAMBUA	0,00	1.522.000.000,00	1.522.000.000,00	0,00	0,00
9	SMPN 1 TASIFETO TIMUR	1.777.250,00	398.730.590,62	400.400.000,00	107.840,62	(93,93)
10	SMPN SILAWAN	0,00	246.400.000,00	246.400.000,00	0,00	0,00
11	SMPN DAFALA	0,00	128.400.000,00	128.400.000,00	0,00	0,00
12	SMPN SADI	0,00	135.300.000,00	135.300.000,00	0,00	0,00
13	SMPN 1 LAMAKNEN	13.450.000,00	284.100.000,00	297.550.000,00	0,00	(100,00)
14	SMPN SATAP EKIN II	8.073.171,00	177.827.000,00	185.900.000,00	171,00	(100,00)
15	SMPN SATAP KEWAR	0,00	96.800.000,00	96.800.000,00	0,00	0,00
16	SMPN 1 TASIFETO BARAT	1.047,00	407.899.400,00	407.900.000,00	447,00	(57,31)
17	SMPN HALIWEN	0,00	330.000.000,00	330.000.000,00	0,00	0,00
18	SMPN AINIBA	0,00	101.200.000,00	101.200.000,00	0,00	0,00
19	SMPN 2 TASIFETO TIMUR	7.858.898,00	391.446.000,00	396.135.000,00	3.169.898,00	(59,66)
20	SMPN SATAP WETEAR	0,00	129.600.000,00	129.600.000,00	0,00	0,00
21	SMPN TURISKAIN	392.402,00	155.807.598,00	156.200.000,00	0,00	(100,00)

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo Awal 2024 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir 2024 (Rp)	%
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)		
22	SMPN DUAMANU	0,00	93.500.000,00	83.691.800,00	9.808.200,00	0,00
23	SMPN SATAP OBOR	23,00	129.800.000,00	129.800.000,00	23,00	0,00
24	SMPN RAIMANUK	0,00	249.700.000,00	249.700.000,00	0,00	0,00
25	SMPN MANDALA	0,00	332.000.000,00	332.000.000,00	0,00	0,00
26	SMPN LOROTUAN	0,00	221.100.000,00	221.100.000,00	0,00	0,00
27	SMPN LASIOLAT	3.750,00	154.000.000,00	154.000.000,00	3.750,00	0,00
28	SMPN PIEBULAK	0,00	184.800.000,00	184.800.000,00	0,00	0,00
29	SMPN SATAP SABULMIL	166.066,00	137.033.934,00	137.200.000,00	0,00	(100,00)
30	SMPN SATAP WEKAKEU	20,00	170.100.000,00	170.100.020,00	0,00	(100,00)
31	SMPN NUALAIN	0,00	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	0,00
32	SMPN UMANEN	75.175,00	261.524.825,00	261.600.000,00	0,00	(100,00)
33	SMPN 2 ATAMBUA	1.691.000,00	1.099.109.782,00	1.100.800.000,00	782,00	(99,95)
34	SMPN LAKTUTUS	7.544.075,00	142.111.000,00	149.600.000,00	55.075,00	(99,27)
35	SMPN HALIULUN	0,00	194.700.000,00	194.700.000,00	0,00	0,00
36	SMPN NOEBITI	0,00	119.900.000,00	119.899.500,00	500,00	0,00
37	SMPN HALIBETE	239.000,00	114.182.000,00	114.400.000,00	21.000,00	(91,21)
38	SMPN HALITUKU	1.500.000,00	98.600.000,00	100.100.000,00	0,00	(100,00)
39	SMPN ASUULUN	0,00	124.300.000,00	124.300.000,00	0,00	0,00
40	SMPN SATAP FULUR	0,00	105.600.000,00	105.600.000,00	0,00	0,00
41	SMPN KNABU	0,00	59.400.000,00	59.400.000,00	0,00	0,00
42	SMPN SATAP TUBAKI	0,00	66.000.000,00	65.998.400,00	1.600,00	0,00
	Jumlah	54.712.550,00	9.997.054.810,62	10.038.552.988,00	13.214.372,62	(75,85)

Saldo akhir Kas di Bendahara BOS SMPN per 31 Desember 2024 Rp13.214.372,62 terdiri dari:

- Saldo kas tunai sebesar Rp9.920.657,00; dan
- Saldo kas bank pada rekening di PT BPD NTT masing-masing SMPN sebesar Rp3.293.715,62.

- Kas di Bendahara BOS SD Inpres/Negeri (SDI/N) per sekolah dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.155
Rincian Kas di Bendahara BOS SD

No	Uraian	Saldo Awal 2024 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir 2024 (Rp)	%
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)		
1	SDI HALIBESIN	0,00	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	0,00
2	SDI HALIKELEN	0,00	163.800.000,00	163.800.000,00	0,00	0,00
3	SDI KIMBANA	0,00	141.300.000,00	141.300.000,00	0,00	0,00
4	SDI HEDANFEHAN	0,00	126.900.000,00	126.900.000,00	0,00	0,00
5	SDI AIHUN	0,00	61.200.000,00	60.195.000,00	1.005.000,00	0,00
6	SDN BENEMETA	59.000,00	125.100.000,00	123.719.000,00	1.440.000,00	2.340,68
7	SDI TALA	600.906,00	140.700.000,00	141.300.000,00	906,00	(99,85)
8	SDI MEANMANE	4.191.000,00	104.259.000,00	107.250.000,00	1.200.000,00	(71,37)
9	SDI LOOKEU	260.536,00	71.100.014,00	71.360.536,00	14,00	(99,99)
10	SDI NUSIKUN	0,00	216.000.000,00	216.000.000,00	0,00	0,00
11	SDN BAKUSTULAMA	0,00	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00
12	SDN OETFO	0,00	141.300.000,00	141.300.000,00	0,00	0,00
13	SDI HALIULUN	0,00	204.300.000,00	204.300.000,00	0,00	0,00
14	SDI TANAH MERAH I	126.700,00	525.500.000,00	525.500.000,00	126.700,00	0,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo Awal 2024 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir 2024 (Rp)	%
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)		
15	SDI TANAH MERAH II	722.250,00	244.712.100,00	244.322.250,00	1.112.100,00	53,98
16	SDI TENUBOT	0,00	630.000.000,00	630.000.000,00	0,00	0,00
17	SDI TENUKIK	735.869,00	214.663.827,00	215.199.469,00	200.227,00	(72,79)
18	SDI KOTAREN	0,00	200.722.611,00	200.700.000,00	22.611,00	0,00
19	SDN MATITIS-BAUKOEK	2.036.000,00	74.747.000,00	74.057.000,00	2.726.000,00	33,89
20	SDN FATUBAA	840.000,00	101.700.000,00	101.700.000,00	840.000,00	0,00
21	SDN HAEKRIIT	300.000,00	63.600.000,00	59.376.000,00	4.524.000,00	1.408,00
22	SDN SIRANI	0,00	122.400.000,00	122.400.000,00	0,00	0,00
23	SDI FATUBESI	0,00	135.000.000,00	134.998.000,00	2.000,00	0,00
24	SDI ASULAIT	15.000,00	80.100.000,86	80.100.000,00	15.000,86	0,01
25	SDI DEBUBOT	65.513,00	125.099.400,00	124.600.000,00	564.913,00	762,29
26	SDI DEBUKLARAN	0,00	95.400.000,00	95.400.000,00	0,00	0,00
27	SDI WEDOMU	2.393.000,00	388.396.000,00	390.100.000,00	689.000,00	(71,21)
28	SDI MOTAAIN	0,00	258.300.000,00	241.198.000,00	17.102.000,00	0,00
29	SDI LALOSUK	3.600.000,00	182.700.000,00	186.300.000,00	0,00	(100,00)
30	SDI SALORE	400.000,00	126.900.000,00	126.900.000,00	400.000,00	0,00
31	SDN AITAMAN	2.968.236,00	62.622.000,00	62.621.800,00	2.968.436,00	0,01
32	SDN RAIBASIN	0,00	141.300.000,00	141.299.560,00	440,00	0,00
33	SDN MOTABENAR	0,00	62.100.000,00	62.100.000,00	0,00	0,00
34	SDN LIANAIN	0,00	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	0,00
35	SDI DUARATO	0,00	92.700.000,00	92.700.000,00	0,00	0,00
36	SDI EKIN II	0,00	77.400.000,00	77.400.000,00	0,00	0,00
37	SDI EKIN I	1.500,00	72.000.000,00	72.000.000,00	1.500,00	0,00
38	SDI KEWAR	64.833,00	61.200.000,00	61.200.000,00	64.833,00	0,00
39	SDI HOLPARA	0,00	36.900.000,00	36.900.000,00	0,00	0,00
40	SDI BUILALU	495.604,00	95.345.316,00	95.813.600,00	27.320,00	(94,49)
41	SDI BEISURIK	0,00	95.400.000,00	95.400.000,00	0,00	0,00
42	SDI MANULOR	23,00	66.360.377,00	66.360.377,00	23,00	0,00
43	SDN SINAR ATUBESI	0,00	51.300.000,00	51.300.000,00	0,00	0,00
44	SDN FATUKMETAN	0,00	341.100.000,00	341.100.000,00	0,00	0,00
45	SDN HALIWEN	9.600.000,00	303.300.000,00	312.900.000,00	0,00	(100,00)
46	SDI FATUATIS	0,00	117.000.000,00	117.000.000,00	0,00	0,00
47	SDI AINIBA	0,00	180.911.300,00	180.900.000,00	11.300,00	0,00
48	SDI SUSUK	0,00	135.900.000,00	135.900.000,00	0,00	0,00
49	SDI WESASUIT	0,00	123.300.000,00	123.300.000,00	0,00	0,00
50	SDN HALIMEA	0,00	69.300.000,00	69.300.000,00	0,00	0,00
51	SDN WELIURAI	20.628,00	78.120.744,00	77.500.000,00	641.372,00	3.009,23
52	SDI DEROK	0,00	153.900.000,00	153.900.000,00	0,00	0,00
53	SDI BEITAUS	500,00	54.900.000,00	54.900.000,00	500,00	0,00
54	SDI WETEAR	0,00	74.700.000,00	74.700.000,00	0,00	0,00
55	SDI RUSAN	81.600,00	62.900.000,00	62.900.000,00	81.600,00	0,00
56	SDN FATUBELAR	325,00	36.000.000,00	36.000.000,00	325,00	0,00
57	SDN FATULORO	0,00	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	0,00
58	SDN SABURAKA	0,00	67.500.000,00	67.500.000,00	0,00	0,00
59	SDN SEKUTREN	8.270.000,00	239.625.000,00	247.625.000,00	270.000,00	(96,74)
60	SDN TURISKAIN	164,00	145.800.000,00	145.800.000,00	164,00	0,00
61	SDN WEMORIHAS	513.358,31	206.100.000,00	206.100.000,00	513.358,31	0,00
62	SDN TALIOAN	2.276.000,00	100.683.000,00	102.459.000,00	500.000,00	(78,03)
63	SDI KNABU	406.282,00	134.600.000,00	134.435.000,00	571.282,00	40,61
64	SDI BUITAE	0,00	147.600.000,00	147.600.000,00	0,00	0,00
65	SDI BEKOTARUIK	23.128,00	138.600.000,00	138.600.000,00	23.128,00	0,00
66	SDI SUKABITETEK	0,00	236.700.000,00	236.700.000,00	0,00	0,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo Awal 2024 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir 2024 (Rp)	%
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)		
67	SDI MOTAMARO	625.000,00	199.775.000,00	200.400.000,00	0,00	(100,00)
68	SDI OBOR	0,00	140.400.000,00	138.720.000,00	1.680.000,00	0,00
69	SDN FOHOMANE	0,00	93.500.000,00	93.500.000,00	0,00	0,00
70	SDI TAKARABAT	0,00	64.800.000,00	64.800.000,00	0,00	0,00
71	SDI WEHASAN	0,00	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	0,00
72	SDI MAULAKAK	96.907,00	85.536.000,00	85.525.000,00	107.907,00	11,35
73	SDI LOOHALI	2.500,00	81.900.000,00	81.900.000,00	2.500,00	0,00
74	SDN MOTAAIN	0,00	33.300.000,00	25.300.000,00	8.000.000,00	0,00
75	SDN BAUDAOK	0,00	81.900.000,00	81.900.000,00	0,00	0,00
76	SDI JOILTOI	0,00	51.300.000,00	51.300.000,00	0,00	0,00
77	SDI WEKAKEU	4.572.000,00	88.092.000,00	92.664.000,00	0,00	(100,00)
78	SDI LOONUNA	499.800,00	131.350.000,00	130.350.000,00	1.499.800,00	200,08
79	SDI SABULMIL	0,00	98.100.000,00	98.100.000,00	0,00	0,00
80	SDI FOHOLULIK	0,00	82.440.000,00	82.440.000,00	0,00	0,00
81	SDN HANOWAI	496,00	51.300.000,00	51.300.000,00	496,00	0,00
82	SDN NOKARWEK	0,00	111.600.000,00	109.178.000,00	2.422.000,00	0,00
83	SDN WIRASAKTI	20.500,00	469.600.000,00	469.620.500,00	0,00	(100,00)
84	SDI TULAMALAE	4.852.050,00	461.078.000,00	465.102.500,00	827.550,00	(82,94)
85	SDI WEKATIMUN	3.900.000,00	379.800.000,00	383.700.000,00	0,00	(100,00)
86	SDN ONOBOI	2.000.000,00	196.200.000,00	198.198.500,00	1.500,00	(99,93)
87	SDI TINI	1.568,00	668.556.902,30	666.755.199,00	1.803.271,30	114.904,55
88	SDI ASUULUN	1.700.000,00	252.900.000,00	254.600.000,00	0,00	(100,00)
89	SDI NUFUAK	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00
90	SDI TUBAKI	214.000,00	109.586.000,00	109.800.000,00	0,00	(100,00)
91	SDI WEKMUTIS	1.404.000,00	83.686.156,00	85.090.156,00	0,00	(100,00)
92	SDI NANAENOE	0,00	100.800.000,00	100.800.000,00	0,00	0,00
93	SDN WEHEDAN	0,00	54.900.000,00	54.900.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	60.956.776,31	13.916.167.748,16	13.923.133.447,00	53.991.077,47	(11,43)

Saldo akhir Kas di Bendahara BOS SDI/N per 31 Desember 2024 Rp53.991.077,47 terdiri dari:

- Saldo kas tunai Rp41.714.350,00; dan
- Saldo kas bank pada rekening di PT BPD NTT masing-masing SDI/N sebesar Rp12.276.727,47.

- Kas di Bendahara BOP PAUD Negeri per penyelenggara PAUD dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.156
Rincian Kas Di Bendahara BOP PAUD

No.	Uraian	Saldo Awal 2024 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir 2024 (Rp)	%
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)		
1	TK NEGERI PEMBINA	0,00	59.400.000,00	59.400.000,00	0,00	0,00
2	TK PEDESAAN TUKUNENO	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00
3	PAUD NEGERI SKB BELU	0,00	22.200.000,00	22.100.000,00	100.000,00	0,00
	Jumlah	0,00	88.800.000,00	88.700.000,00	100.000,00	0,00



Saldo akhir Kas di Bendahara BOP PAUD Negeri per 31 Desember 2024 Rp100.000,00 terdiri dari:

- a) Saldo kas tunai Rp0,00; dan
- b) Saldo kas bank pada rekening di PT BPD NTT di PAUD Negeri SKB Belu Rp100.000,00.

5.3.1.1.7 Kas di Bendahara BOK	31-Des-24	31-Des-23
	Rp3.036.958.398,00	Rp3.195.033.558,00

Saldo Kas di Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) merupakan jumlah uang tunai yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan operasional kesehatan di 17 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Puskesmas di Kabupaten Belu, yang bersumber dari Dana BOK. Saldo Kas di Bendahara BOK per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.036.958.398 atau turun sebesar Rp(158.075.160,00) atau (4,95)% dibandingkan tahun 2023. Hal ini terjadi karena pada tahun anggaran 2024, transfer dana Bantuan Operasional Kesehatan dari Pemerintah Pusat yang langsung ditransfer ke rekening Bendahara BOK Puskesmas.

Rincian Kas di Bendahara BOK per Puskesmas dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.157
Rincian Kas Di Bendahara BOK

No	Nama Puskesmas	Saldo Awal 2024 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir 2024 (Rp)
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
1	Puskesmas Kota	176.840.425,00	1.314.658.575,00	1.357.037.985,00	134.461.015,00
2	Puskesmas Atapupu	152.025.351,00	790.401.649,00	820.955.005,00	121.471.995,00
3	Puskesmas Wedomu	129.279.794,00	981.879.206,00	928.851.610,00	182.307.390,00
4	Puskesmas Aululik	255.339.795,00	662.313.205,00	800.466.899,00	117.186.101,00
5	Puskesmas Haekesak	241.808.170,00	867.559.830,00	947.913.588,00	161.454.412,00
6	Puskesmas Weluli	151.644.999,00	841.689.001,00	766.826.130,00	226.507.870,00
7	Puskesmas Nualain	322.393.262,00	643.333.738,00	764.993.522,00	200.733.478,00
8	Puskesmas Halilulik	133.465.719,00	1.202.994.281,00	1.161.015.799,00	175.444.201,00
9	Puskesmas Webora	369.774.596,00	412.310.404,00	682.199.117,00	99.885.883,00
10	Puskesmas Haliwen	188.181.921,00	1.105.546.079,00	1.136.139.053,00	157.588.947,00
11	Puskesmas Laktutus	167.211.484,00	793.680.516,00	778.922.369,00	181.969.631,00
12	Puskesmas Umanen	119.078.021,00	1.228.386.979,00	1.203.980.466,00	143.484.534,00
13	Puskesmas Ainiba	97.707.740,00	732.160.260,00	612.245.449,00	217.622.551,00
14	Puskesmas Dilulmil	82.017.734,00	875.891.266,00	657.182.983,00	300.726.017,00
15	Puskesmas Atambua Selatan	186.699.557,00	1.173.946.443,00	1.153.582.931,00	207.063.069,00
16	Puskesmas Silawan	172.671.958,00	662.494.042,00	638.067.443,00	197.098.557,00
17	Puskesmas Rafae	248.893.032,00	790.667.968,00	827.608.253,00	211.952.747,00
	JUMLAH	3.195.033.558,00	15.079.913.442,00	15.237.988.602,00	3.036.958.398,00

**5.3.1.1.8 Kas Lainnya**

31-Des-24	31-Des-23
Rp34.652.749,27	Rp26.080.449,42

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp34.652.749,27. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, saldo Kas Lainnya tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp8.572.299,85 atau 32,87%.

Rincian saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2024 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.158
Rincian Kas Lainnya per 31 Desember 2024

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Sisa kas atas jasa giro pada rekening giro BOS	202.286,27
	SDN Lianain	1.755,00
	SDI Kewar	2.019,45
	SDI Builalu	2.133,58
	SDI Loojali	0,05
	SDI Tanah Merah II	178,56
	SDN Fatubaa	3.316,68
	SDI Debuklaran	1.995,41
	SDN Sinar Atubesi	36.991,55
	SDI Bekotaruiik	12.367,36
	SDI Loonuna	90.272,17
	SDN Hanowai	961,64
	SDN Nokarwek	38,73
	SMPN 1 Tasifeto Barat	25.451,57
	SMPN Satap Fulur	24.804,52
2	Kas di rekening Juru Bayar	155.103,00
	Kelurahan Atambua	137.034,00
	Kelurahan Rinbesi	17.100,00
	Kecamatan Atambua Selatan	920,00
	Dinas Kesehatan	49,00
3	Utang PFK pada FKTP	34.295.360,00
	Puskesmas Atapupu	4.289.603,00
	Puskesmas Wedomu	916.529,00
	Puskesmas Haekesak	2.007.786,00
	Puskesmas Welui	2.002.019,00
	Puskesmas Nualain	1.947.697,00
	Puskesmas Halilulik	12.482.366,00
	Puskesmas Umanen	6.873.015,00
	Puskesmas Rafae	3.776.345,00
	Jumlah	34.652.749,27

5.3.1.1.9 Setara Kas

31-Des-24	31-Des-23
Rp0,00	Rp0,00

Saldo Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp0,00. Akun ini mencatat jumlah uang yang ditempatkan di deposito dengan jatuh tempo kurang dari atau sama dengan 12



bulan selama tahun 2024 dan pencairannya. Mutasi setara kas tahun 2024 disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.159
Setara Kas

No	Uraian	Saldo Awal 2024 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir 2024 (Rp)	%
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)		
1	Deposito	0,00	76.750.000.000,00	76.750.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	76.750.000.000,00	76.750.000.000,00	0,00	0,00

Seluruh deposito tahun 2024 telah dicairkan seluruhnya dalam tahun bersangkutan.

5.3.1.1.10	Piutang Pajak Netto	31-Des-24	31-Des-23
		Rp3.692.661.754,87	Rp3.112.695.859,83

Piutang Pajak diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih. Jumlah Piutang Pajak Netto tahun 2024 sebesar Rp3.692.661.754,87. Dibandingkan dengan saldo piutang pajak tahun 2023, piutang netto tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp579.965.895,04 atau 18,63%.

Uraian mutasi piutang pajak dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.160
Piutang Pajak

No.	Uraian	Saldo		Kenalkan/ (Penurunan) (Rp)	%
		31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)		
1	Piutang Pajak	16.913.355.467,68	15.430.371.782,68	1.482.983.685,00	9,61
2	Penyisihan Piutang Pajak	(13.220.693.712,81)	(12.317.675.922,85)	(903.017.789,96)	7,33
	Piutang Pajak Netto	3.692.661.754,87	3.112.695.859,83	579.965.895,04	18,63

Perhitungan untuk mendapatkan nilai piutang pajak yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) adalah sebagai berikut.

5.3.1.1.10.1 Piutang Pajak Bruto

Saldo piutang pajak secara bruto pada tahun 2024 sebesar Rp16.913.355.467,68. Jumlah ini meningkat sebesar Rp1.482.983.685,00 atau 9,61% jika dibandingkan dengan tahun 2023.



Uraian piutang pajak bruto per jenis pendapatan pajak daerah dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.161
Piutang Pajak Bruto

No.	Uraian	Saldo Awal 2024 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir 2024 (Rp)	%
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)		
1	Piutang Pajak Reklame (2011 s.d. 2023)	321.754.241,71	234.395.123,00	234.395.123,00	321.754.241,71	0,00
2	Piutang Pajak PBB P2 tahun 1994 s.d. 2023	14.569.385.781,00	4.731.485.556,00	3.294.223.534,00	16.006.647.803,00	9,86
3	Piutang PBJT-hotel (Kost tahun 2014 s.d. 2024)	10.000.000,00	71.183.680,00	68.373.680,00	12.810.000,00	28,10
4	Piutang PBJT- Hotel	0,00	804.028.658,00	796.448.658,00	7.580.000,00	0,00
5	Piutang PBJT-Makanan dan/Minuman	71.830.807,00	4.447.208.918,00	4.413.357.117,00	105.682.608,00	47,13
6	Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	67.000,00	34.306.669,00	34.373.669,00	0,00	(100,00)
7	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	457.333.952,97	2.654.662.344,00	2.654.662.344,00	457.333.952,97	0,00
8	Piutang Pajak Air Tanah	0,00	1.546.862,00	0,00	1.546.862,00	0,00
	Jumlah	15.430.371.782,68	12.978.817.810,00	11.495.834.125,00	16.913.355.467,68	9,61

5.3.1.1.10.2 Penyisihan Piutang Pajak

Saldo penyisihan piutang pajak pada tahun 2024 sebesar Rp(13.220.693.712,81). Jumlah ini meningkat sebesar Rp(903.017.789,96) atau 7,33% jika dibandingkan dengan tahun 2023. Mutasi saldo penyisihan piutang pajak tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.162
Penyisihan Piutang Pajak

No.	Uraian	Saldo Awal 2024 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir 2024 (Rp)	%
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)		
1	Penyisihan Piutang Pajak Reklame 2011 s.d. 2024	286.951.285,29	22.869.868,57	22.487.307,51	287.333.846,35	0,13
2	Penyisihan Piutang Pajak PBB P2 tahun 1994 s.d. 2024	11.499.660.784,46	975.905.939,21	66.938.823,00	12.408.627.900,67	7,90
3	Penyisihan Piutang PBJT-Hotel (Kost tahun 2014 s.d. 2024)	7.204.750,00	1.359.725,00	1.272.925,00	7.291.550,00	1,20
4	Penyisihan Piutang PBJT-Hotel	0,00	37.900,00	0,00	37.900,00	0,00
5	Penyisihan Piutang PBJT-Makanan dan/Minuman	66.458.150,13	2.686.328,44	9.083.650,06	60.060.828,51	(9,63)
6	Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	(100,00)
7	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	457.333.952,97	0,00	0,00	457.333.952,97	0,00
8	Penyisihan Pajak Air Tanah	0,00	7.734,31	0,00	7.734,31	0,00
	Jumlah	12.317.675.922,85	1.002.867.495,53	99.849.705,57	13.220.693.712,81	7,33



Nilai Piutang dan penyisihannya disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.163

Nilai Piutang dan Penyisihan

No.	Uraian	Nilai Piutang 31-Des-24 (Rp)	Penyisihan Piutang 31-Des-2024 (Rp)	Saldo Piutang 31-Des-2024 (NRV) (Rp)	Saldo Piutang 31-Des-2023 (NRV) (Rp)	%
1	Piutang Pajak Reklame 2011 s.d. 2024	321.754.241,71	287.333.846,35	34.420.395,36	34.802.956,42	(1,10)
2	Piutang Pajak PBB P2 tahun 1994 s.d. 2024	16.006.647.803,00	12.408.627.900,67	3.598.019.902,33	3.069.724.996,54	17,21
3	Piutang PBJT-Hotel (Kost tahun 2014 s.d. 2024)	12.810.000,00	7.291.550,00	5.518.450,00	2.795.250,00	97,42
4	Piutang PBJT-Hotel	7.580.000,00	37.900,00	7.542.100,00	0,00	0,00
5	Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman	105.682.608,00	60.060.828,51	45.621.779,49	5.372.656,87	749,15
6	Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	457.333.952,97	457.333.952,97	0,00	0,00	0,00
8	Piutang Pajak Air Tanah	1.546.862,00	7.734,31	1.539.127,69	0,00	0,00
Jumlah		16.913.355.467,68	13.220.693.712,81	3.692.661.754,87	3.112.695.859,83	18,63

5.3.1.1.10.3 Piutang Pajak Netto (*Net Realizable Value*)

Piutang Pajak Netto merupakan nilai piutang pajak yang dihasilkan setelah dikurangi dengan penyisihan piutang pajak tak tertagih, yang menunjukkan nilai piutang pajak yang diharapkan dapat direalisasikan.

Uraian perhitungan nilai piutang pajak netto per jenis pendapatan pajak daerah per 31 Desember 2024 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.164

Piutang Pajak Netto

No.	Uraian	Saldo		Kenalkan/ (Penurunan) (Rp)	%
		31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)		
1	Piutang Pajak Reklame 2011 s.d. 2024	34.420.395,36	34.802.956,42	(382.561,06)	(1,10)
2	Piutang Pajak PBB P2 tahun 1994 s.d. 2024	3.598.019.902,33	3.069.724.996,54	528.294.905,79	17,21
3	Piutang PBJT-Hotel (Kost tahun 2014 s.d. 2024)	13.060.550,00	2.795.250,00	10.265.300,00	367,24
4	Piutang PBJT-Hotel	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Piutang PBJT-Makanan dan/Minuman	45.621.779,49	5.372.656,87	40.249.122,62	749,15
6	Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Piutang Pajak Air Tanah	1.539.127,69	0,00	1.539.127,69	0,00
Piutang Pajak Netto		3.692.661.754,87	3.112.695.859,83	579.965.895,04	18,63



Penjelasan lebih lanjut mengenai rincian mutasi piutang pajak dan umur piutang disajikan pada **Lampiran 8 s.d. 8-7**.

5.3.1.1.11	Piutang Retribusi Netto	31-Des-2024	31-Des-2023
		Rp708.957.400,01	Rp407.066.095,62

Piutang Retribusi Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 sebesar Rp708.957.400,01. Saldo ini disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih.

Jika dibandingkan dengan saldo piutang retribusi tahun 2023 yang mencapai Rp407.066.095,62, saldo ini mengalami peningkatan sebesar Rp301.891.304,39 atau 74,16%.

Rincian mutasi piutang retribusi adalah sebagai berikut.

Tabel 5.165
Piutang Retribusi

No.	Uraian	Saldo		Kenalkan/ (Penurunan) (Rp)	%
		31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)		
1	Piutang Retribusi (2017-2024)	2.907.086.887,69	2.405.882.453,88	501.204.433,81	20,83
2	Penyisihan Piutang Retribusi	(2.198.129.487,68)	(1.998.816.358,26)	(199.313.129,42)	9,97
Jumlah		708.957.400,01	407.066.095,62	301.891.304,39	74,16

Perhitungan untuk mendapatkan nilai piutang retribusi yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) adalah sebagai berikut.

5.3.1.1.11.1 Piutang Retribusi Bruto

Saldo piutang retribusi secara bruto pada tahun 2024 sebesar Rp2.907.086.887,69. Jumlah ini meningkat sebesar Rp501.204.433,81 atau 20,83% jika dibandingkan dengan tahun 2023. Uraian piutang retribusi bruto per jenis pendapatan retribusi dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.166
Piutang Retribusi Bruto

No	Uraian	Saldo Awal 2024 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir 2024 (Rp)	%
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)		
1	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	294.515.453,88	135.238.422,81	86.953.989,00	342.799.887,69	16,39
2	Piutang Retribusi Pasar Grosir	2.111.367.000,00	1.546.420.000,00	1.093.500.000,00	2.564.287.000,00	21,45
Jumlah		2.405.882.453,88	1.681.658.422,81	1.180.453.989,00	2.907.086.887,69	20,83

Piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp342.799.887,69 terdiri dari



piutang retribusi pada Bapenda sebesar Rp34.085.886,68 dan piutang retribusi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp308.714.001,00. Sedangkan piutang retribusi pasar per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.564.287.000,00 seluruhnya merupakan piutang retribusi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

5.3.1.1.11.2 Penyisihan Piutang Retribusi

Saldo penyisihan piutang retribusi pada tahun 2024 sebesar Rp(2.198.129.487,68). Jumlah ini menurun sebesar Rp299.313.129,42 atau (9,97)% jika dibandingkan dengan tahun 2023. Penurunan ini terjadi karena koreksi atas kesalahan perhitungan penyisihan piutang retribusi tahun sebelumnya.

Mutasi saldo penyisihan piutang retribusi tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.167

Penyisihan Piutang Retribusi

No	Uraian	Nilai Piutang 31-Des-2024 (Rp)	Penyisihan Piutang 31-Des-2024 (Rp)	Saldo Piutang 31-Des-2024 (NRV) (Rp)	Saldo Piutang 31-Des-2023 (NRV) (Rp)	%
1	Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	342.799.887,69	(199.171.941,20)	143.627.946,49	(223.929.358,26)	(11,06)
2	Penyisihan Piutang Retribusi Pasar Grosir	2.564.287.000,00	(1.998.957.546,48)	565.329.453,52	(1.774.887.000,00)	12,62
Jumlah		2.907.086.887,69	(2.198.129.487,68)	708.957.400,01	(1.998.816.358,26)	9,97

Mutasi penyisihan piutang retribusi dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.168

Mutasi Penyisihan Piutang Retribusi

No.	Uraian	Saldo Awal 2024 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir 2024 (Rp)	%
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)		
1	Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	(223.929.358,26)	(8.505.382,94)	33.262.800,00	(199.171.941,20)	(11,06)
2	Penyisihan Piutang Retribusi Pasar Grosir	(1.774.887.000,00)	(616.745.746,48)	392.675.200,00	(1.998.957.546,48)	12,62
Jumlah		(1.998.816.358,26)	(625.251.129,42)	425.938.000,00	(2.198.129.487,68)	9,97

Mutasi bertambah penyisihan piutang retribusi Rp(625.251.129,42) terdiri dari penambahan dari beban penyisihan Rp(59.023.502,94) dan koreksi atas kesalahan perhitungan tahun sebelumnya Rp(566.227.626,58).

Mutasi kurang penyisihan piutang retribusi pada tahun 2024 sebesar Rp425.938.000,00 seluruhnya merupakan koreksi



atas perhitungan ulang penyisihan piutang retribusi asal tahun 2019 s.d. 2023 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

5.3.1.1.11.3 Piutang Retribusi Netto (*Net Realizable Value*)

Piutang retribusi netto merupakan nilai piutang retribusi yang dihasilkan setelah dikurangi dengan penyisihan piutang retribusi tak tertagih, yang menunjukkan nilai piutang retribusi yang diharapkan dapat direalisasikan.

Uraian perhitungan nilai piutang retribusi netto per jenis pendapatan retribusi per 31 Desember 2024 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.169
Piutang Retribusi Netto

No	Uraian	Saldo		Kenalkan/ (Penurunan) (Rp)	%
		31-Des-2024 (Rp)	31-Des-2023 (Rp)		
1	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	143.627.946,49	70.586.095,62	73.041.850,87	50,85
2	Piutang Retribusi Pasar Grosir	565.329.453,52	336.480.000,00	228.849.453,52	40,48
Piutang Retribusi Netto		708.957.400,01	407.066.095,62	301.891.304,39	74,16

Rincian mutasi piutang retribusi dan umur piutang disajikan pada Lampiran 9 s.d. 9-3.

5.3.1.1.12	Piutang Lain-lain PAD yang Sah Netto	31-Des-2024	31-Des-2023
		<u>Rp15.827.927.578,12</u>	<u>Rp11.524.874.378,71</u>

Jumlah Piutang Lain-lain PAD yang Sah Netto per 31 Desember 2024 mencapai Rp15.827.927.578,12. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar Rp4.303.053.199,41 atau 37,34% dibanding tahun 2023.

Rincian mutasinya sebagai berikut.

Tabel 5.170
Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah

No.	Uraian	Saldo		Kenalkan/ (Penurunan) (Rp)	%
		31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)		
1	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	16.628.974.639,96	12.317.976.521,59	4.310.998.118,37	35,00
2	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	(801.047.061,84)	(793.102.142,88)	(7.944.918,96)	1,00
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Netto		15.827.927.578,12	11.524.874.378,71	4.303.053.199,41	37,34



Perhitungan untuk mendapatkan saldo NRV adalah sebagai berikut.

5.3.1.1.12.1 Piutang Lain-lain PAD yang Sah Bruto

Tabel 5.171

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Bruto

No	Uraian	Saldo Awal 2024 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir 2024 (Rp)	%
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)		
1	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) (tahun 2015-2024)	778.213.036,00	2.805.744.320,29	3.010.683.070,29	573.274.286,00	(26,33)
2	Piutang Pendapatan Denda Keterlambatan Pekerjaan (tahun 2016-2024)	61.478.125,00	269.930.196,58	269.930.196,58	61.478.125,00	0,00
3	Piutang Pendapatan Atas Pengembalian (tahun 2016 - 2024)	437.457.760,59	242.273.899,00	349.285.756,63	330.445.902,96	(24,46)
4	Piutang Pendapatan BLUD tahun 2024	11.040.827.600,00	15.663.774.041,00	11.040.827.600,00	15.663.774.041,00	41,87
5	Piutang Pendapatan Bunga	0,00	2.285,00	0,00	2.285,00	0,00
Jumlah		12.317.976.521,59	18.981.724.741,87	14.670.726.623,50	16.628.974.639,96	35,00

Piutang Lain-lain PAD yang Sah terdiri dari:

1) Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)

Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian kepada pegawai negeri akibat suatu perbuatan melanggar hukum atau kelalaian dalam tugas yang mengakibatkan kerugian daerah.

Saldo piutang TGR per 31 Desember 2024 sebesar Rp573.274.286,00 turun sebesar Rp(204.938.750,00) atau (26,33)% dibanding tahun 2023. Mutasinya adalah dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.172

Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

No.	Nama	Saldo Awal (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Adozinda de Araujo	102.833.500,00	0,00	0,00	102.833.500,00
2	Blasius Berek	28.284.100,00	0,00	0,00	28.284.100,00
3	Supardji, SH	103.067.900,00	0,00	0,00	103.067.900,00
4	Yoseph Pareira	197.473.166,00	0,00	7.000.000,00	190.473.166,00
5	Antonio Dos Santos	2.503.400,00	0,00	0,00	2.503.400,00
6	Arnaldo Dasilva Tavares	5.450.500,00	0,00	0,00	5.450.500,00
7	Dominikus Kiik	9.460.200,00	0,00	0,00	9.460.200,00
8	Markus Ndun	16.631.300,00	0,00	0,00	16.631.300,00
9	Paulus B. Samara	4.857.700,00	0,00	0,00	4.857.700,00
10	Pius Maxi Mura	27.775.200,00	0,00	0,00	27.775.200,00
11	Primus Tae Bria	6.121.300,00	0,00	0,00	6.121.300,00
12	Robertus Y. Bere Laka	5.157.400,00	0,00	0,00	5.157.400,00
13	Vinsensia L. D. Klau	177.500,00	0,00	0,00	177.500,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Nama	Saldo Awal (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
14	Emanuel Nahak Seran	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15	Yosef Ama Bere Seran	907.700,00	0,00	0,00	907.700,00
16	Paulus Seran Klau	34.524.120,00	0,00	1.200.000,00	33.324.120,00
17	Yosef Alexander Haleserens	3.360.000,00	0,00	0,00	3.360.000,00
18	Jeremias Manek Seran Junior	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	0,00
19	Marthen Martins Naibuti	5.440.000,00	0,00	5.440.000,00	0,00
20	Theodorus F. Seran Tefa	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	0,00
21	Yacobus Nahak Manek	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
22	Kristoforus Rin Duka	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
23	Marselinus Tallo	2.660.000,00	0,00	0,00	2.660.000,00
24	Maksimus Parera	3.098.400,00	0,00	0,00	3.098.400,00
25	Nikolas Bauk	1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00
26	Jefry H. A. Ferdinand Mau	2.520.000,00	0,00	0,00	2.520.000,00
27	Maria Josefa Mau Luan	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00
28	Ferdinandus Naiaki	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
29	Aloysius M. Fahik	68.795.700,00	0,00	68.795.700,00	0,00
30	Agustinus Bau	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
31	Ignasius I. Bele Bau	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
32	Fabianus Lehang	3.770.000,00	0,00	3.770.000,00	0,00
33	Puskesmas Kota	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
34	Puskesmas Atapupu	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
35	Puskesmas Haekesak	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
36	Viktorius Bere Nahak	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
37	Adrianus P. Bere	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
38	Adriyani Lidia Pareira	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
39	Argentina Moniz	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
40	Francisco Tommy Talo	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
41	Wilfridus Klau Berek	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
42	Yakobus Ulu	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
43	Yohanes Jefri Nahak	900.000,00	0,00	900.000,00	Rp0,00
44	Yoseph Manuael Bau Wili, S.IP	1.920.000,00	0,00	0,00	1.920.000,00
45	Nikolas Nahak Fahik	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
46	Leontinus Asa	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
47	Cyprianus Temu	9.240.000,00	0,00	9.240.000,00	0,00
48	Januaria A. Walde Berek	7.660.000,00	0,00	7.660.000,00	0,00
49	Celestino Zuze Dua Niku	740.000,00	0,00	740.000,00	0,00
50	Elvis D. Pedrosa	840.000,00	0,00	840.000,00	0,00
51	Manek Rofinus	3.640.000,00	0,00	3.640.000,00	0,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Nama	Saldo Awal (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
52	Nini Wendelina Atok	812.000,00	0,00	812.000,00	0,00
53	Yacobus Nahak Manek	3.980.000,00	0,00	3.980.000,00	0,00
54	Jeremias Manek Seran Junior	26.561.950,00	0,00	26.561.950,00	0,00
55	Yohanes Jefri Nahak	10.080.000,00	0,00	10.080.000,00	0,00
56	Aprianus Hale	2.840.000,00	0,00	2.840.000,00	0,00
57	Darius Berek	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
58	Kristina Lina	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
59	Kristoforus Rin Duka	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	0,00
60	Marthen Martins Naibuti	8.900.000,00	0,00	8.900.000,00	0,00
61	Martina Kolo Hale	840.000,00	0,00	840.000,00	0,00
62	Martinus Bere Mau Leto	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
63	Stefanus Ati	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
64	Theodorus M. Djuang	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	0,00
65	Yonathan Hale	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
66	Frans A. Mau,SH	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
67	Laurensius Tisera,SE	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
68	Theodorus F. Seran Tefa	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00
69	Antonius Hale	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
70	Zakaria A. Prabowo,S.Kom	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00
71	Yulius B. Boy Zakarias	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00
72	Jeremias Manek Seran Jr	0,00	12.060.000,00	12.060.000,00	0,00
73	Marthen Martins Nai Buti	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00
74	Melkiyaris Lelo	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
75	Yacobus Nahak Manek	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
76	Aquilina Ili	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00
77	Benedictus J. Halle	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00
78	Cyprianus Temu	0,00	12.320.000,00	12.320.000,00	0,00
79	Edmundus Nuak	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00
80	Elvis Domingos Pedroso	0,00	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00
81	Fransiskus X.Bere	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00
82	Januaria Awalde Berek	0,00	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00
83	Jumadi Manek	0,00	840.000,00	840.000,00	0,00
84	Kristoforus Rin Duka	0,00	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00
85	Manuel Do Carmo Da Silva	0,00	840.000,00	840.000,00	0,00
86	Regina Mau Loe	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00
87	Silvia Celeste Do Amaral	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
88	Theodorus Frederikus Seran Tefa	0,00	3.920.000,00	3.920.000,00	0,00
89	Theodorus Manehitu Djuang	0,00	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00
90	Yohanes Jefri Nahak	0,00	4.760.000,00	4.760.000,00	0,00
91	Yonathan Hale	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Nama	Saldo Awal (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
92	Yulianus Tai Bere	0,00	10.080.000,00	10.080.000,00	0,00
93	Yulius Suri	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00
94	Adriana Kote	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
95	Agustinus Malo,A.Md	0,00	945.000,00	945.000,00	0,00
96	Eusebio Maia Pareira	0,00	1.533.000,00	1.533.000,00	0,00
97	Justina M. Dasidorez	0,00	945.000,00	945.000,00	0,00
98	Martinus Fahik,A.Md	0,00	735.000,00	0,00	735.000,00
99	Melkianus Maukonda,S.Pd	0,00	945.000,00	0,00	945.000,00
100	Stefanus Fandy Kani	0,00	735.000,00	735.000,00	0,00
101	Tarsisius Un Naisali,S.STP	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
102	Viktoria Tere Lonis, S.Kom	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00
103	Virgilia Da Costa	0,00	945.000,00	945.000,00	0,00
104	Apolinaris N. Susar, S.Sos	0,00	1.997.500	1.997.500	0,00
105	Johanes Andes Prihain,SE,Msi	0,00	30.950.000	30.950.000	0,00
106	Drs.Egidius Nurak	0,00	3.055.000	3.055.000	0,00
107	Ester Adelina A.Tae,SE	0,00	380.000	380.000	0,00
108	Fransiskus Gou Uko,S.Sos	0,00	760.000	760.000	0,00
109	Jules C.C.M.A Ando, SE	0,00	2.615.000	2.615.000	0,00
110	Yohanes Sadipun,SE	0,00	850.000	850.000	0,00
111	Maria Deventy Atok, S.Kom,MM	0,00	2.125.000	2.125.000	0,00
112	Nunik W. Wahyuni, SE	0,00	425.000	425.000	0,00
113	Rine Bere Baria, ST	0,00	425.000	425.000	0,00
114	Drs.Egidius Nurak	0,00	340.000	340.000	0,00
115	Nunik W. Wahyuni, SE	0,00	340.000	340.000	0,00
116	Jules C.C.M.A Ando, SE	0,00	340.000	340.000	0,00
117	Maria Deventy Atok, S.Kom,MM	0,00	170.000	170.000	0,00
118	Delviana R.Beni	0,00	170.000	170.000	0,00
119	Kristina Dalores	0,00	6.840.000	6.840.000	0,00
120	Maria Dorothea F. Mau	0,00	6.840.000	6.840.000	0,00
121	Edwinda P.Minggus	0,00	6.840.000	6.840.000	0,00
122	Mariana O. Seubelan	0,00	6.840.000	6.840.000	0,00
123	Dionesius L.Belle	0,00	6.840.000	6.840.000	0,00
124	Dwi Handayani	0,00	6.840.000	6.840.000	0,00
125	Maria P. Widiyanti	0,00	6.120.000	6.120.000	0,00
126	Roswita A. Djadjo	0,00	6.270.000	6.270.000	0,00
127	Falerianus H. Suparman	0,00	6.270.000	6.270.000	0,00
128	Marselus Timo	0,00	4.800.000	4.800.000	0,00
129	Rezha August Mbatu	0,00	6.270.000	6.270.000	0,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Nama	Saldo Awal (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
130	Maria R. R. Anggi Analalo	0,00	6.270.000	6.270.000	0,00
131	Dr.Taolin Agustinus	0,00	2.550.000	2.550.000	0,00
132	Drs.Aloysius Haleserens	0,00	2.550.000	2.550.000	0,00
133	Johanes A. Prihatin, SE,M.Si	0,00	2.550.000	2.550.000	0,00
134	Maria Deventy Atok, S.Kom,MM	0,00	3.570.000	3.570.000	0,00
135	Apolinaris N. Susar, S.Sos	0,00	3.060.000	3.060.000	0,00
136	Drs.Egidius Nurak	0,00	2.125.000	2.125.000	0,00
137	Fransiskus X. Asten, S.Sos	0,00	425.000	425.000	0,00
138	Nunik W. Wahyuni, SE	0,00	3.060.000	3.060.000	0,00
139	Benedito Marvao	0,00	1.767.000	1.767.000	0,00
140	Blasius Yanto Luan	0,00	1.860.000	1.860.000	0,00
141	Ermelinda Pereira,A.Md	0,00	1.767.000	1.767.000	0,00
142	Fransina S. Pandie, A.,Md	0,00	1.767.000	1.767.000	0,00
143	Gaudensiana S. Baba, ST	0,00	1.767.000	1.767.000	0,00
144	Margaretha I.K.D. Binsasi, ST	0,00	1.767.000	1.767.000	0,00
145	Maria Sara Robecca, SH	0,00	1.767.000	1.767.000	0,00
146	Mikhael Da Santo Nana	0,00	1.767.000	1.767.000	0,00
147	Yeremias Kala	0,00	1.860.000	1.860.000	0,00
148	Yoseph G. Taolin, S.STP,M.Tr.IP	0,00	342.000	342.000	0,00
149	Johanes A. Prihatin, SE,M.Si	0,00	9.541.250	9.541.250	0,00
150	Agustinus Remigius Leki, S.Kom	0,00	9.626.250	9.626.250	0,00
151	Gerardus Mbulu, SE	0,00	12.367.500	12.367.500	0,00
152	Dr. David B.W. Pandie,MS	0,00	12.367.500	12.367.500	0,00
153	Dr. Simplexius Asa, SH,MH	0,00	13.822.500	13.822.500	0,00
154	Maria Deventy Atok, S.Kom,MM	0,00	3.400.000	3.400.000	0,00
155	Wempi Nesi,S.Kom,MM	0,00	1.900.000	1.900.000	0,00
156	Yohanes Moruk, S.STP	0,00	952.000	952.000	0,00
157	Drs. Benediktus P. Ngalu	0,00	952.000	952.000	0,00
158	Yohanes Mau Asa, SE	0,00	952.000	952.000	0,00
159	Farida A. Bere Mau, S.Pt	0,00	952.000	952.000	0,00
160	Margaretha I.K.D. Binsasi, ST	0,00	1.064.000	1.064.000	0,00
161	Benedito Marvao	0,00	1.064.000	1.064.000	0,00
162	Gaudensiana S. Baba, ST	0,00	1.064.000	1.064.000	0,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Nama	Saldo Awal (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
163	Ermelinda Pereira,A.Md	0,00	1.064.000	1.064.000	0,00
164	Fransina S. Pandie, A.,Md	0,00	1.064.000	1.064.000	0,00
165	Mikhael Da Santo Nana	0,00	1.064.000	1.064.000	0,00
166	Blasius Yanto Luan	0,00	1.120.000	1.120.000	0,00
167	Johanes Marianum Raga, SH,MH	0,00	1.064.000	1.064.000	0,00
168	Maria Sara Robecca, SH	0,00	1.064.000	1.064.000	0,00
169	Yeremias Kala	0,00	1.120.000	1.120.000	0,00
170	Hermindus N. Seran	0,00	1.120.000	1.120.000	0,00
171	Johanes A. Prihatin, SE,M.Si	0,00	6.991.250,00	6.991.250,00	0,00
172	Agustinus Remigius Leki,S.Kom	0,00	7.713.750,00	7.713.750,00	0,00
173	Gerardus Mbulu, SE	0,00	10.455.000,00	10.455.000,00	0,00
174	Dr. David B.W. Pandie,MS	0,00	10.455.000,00	10.455.000,00	0,00
175	Dr. Simplexius Asa, SH,MH	0,00	10.455.000,00	10.455.000,00	0,00
176	Maria Deventy Atok, S.Kom,MM	0,00	4.887.500,00	4.887.500	0,00
177	Yoseph G. Taolin, S.STP,M.Tr.IP	0,00	4.037.500,00	4.037.500	0,00
178	Margaretha I.K.D. Binsasi, ST	0,00	3.287.000,00	3.287.000	0,00
179	Robertus Meak Mali, S.IP	0,00	3.287.000,00	3.287.000	0,00
180	Wempi Nesi,S.Kom,MM	0,00	3.287.000,00	3.287.000	0,00
181	DR. Severinus Mau	0,00	2.941.000,00	2.941.000	0,00
182	Maria Sara Robecca, SH	0,00	3.287.000,00	3.287.000	0,00
183	Mikhael Da Santo Nana	0,00	3.287.000,00	3.287.000	0,00
184	Fransina S. Pandie, A.,Md	0,00	3.287.000,00	3.287.000	0,00
185	Ermelinda Pereira,A.Md	0,00	3.287.000,00	3.287.000	0,00
186	Blasius Yanto Luan	0,00	3.460.000,00	3.460.000	0,00
187	Grinaldo A. Ximenes, A.Md	0,00	3.287.000,00	3.287.000	0,00
188	Yeremias Kala	0,00	3.460.000,00	3.460.000	0,00
189	Hermindus N. Seran	0,00	3.460.000,00	3.460.000	0,00
190	Dr.Taolin Agustinus	0,00	1.062.500,00	1.062.500,00	0,00
191	Drs.Aloysius Haleserens	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00
192	Johanes A. Prihatin, SE,M.Si	0,00	1.317.500,00	1.317.500,00	0,00
193	Maria Deventy Atok, S.Kom,MM	0,00	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00
194	Drs.Egidius Nurak	0,00	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00
195	Nunik W. Wahyuni, SE	0,00	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00
196	Jules C.C.M.A Ando, SE	0,00	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Nama	Saldo Awal (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
197	Apolinaris N. Susar, S.Sos	0,00	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00
198	Delviana R.Beni	0,00	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00
199	Yohanes Moruk, S.STP	0,00	212.500,00	212.500,00	0,00
200	Yohanes Mau Asa, SE	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00
201	Wempi Nesi, S.Kom, MM	0,00	237.500,00	237.500,00	0,00
202	Flavia M. De Santa Fe	0,00	237.500,00	237.500,00	0,00
203	Manuel De Araujo Mau, S.STP	0,00	237.500,00	237.500,00	0,00
204	Johanes Marianum Raga, SH, MH	0,00	237.500,00	237.500,00	0,00
205	Noberth N.S. Sonbay, S.IP	0,00	237.500,00	237.500,00	0,00
206	Yohanes Theofilus Bou, SH	0,00	237.500,00	237.500,00	0,00
207	Fridiana Anggelina Luan, A.Md	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
208	Maria Sara Robecca, SH	0,00	237.500,00	237.500,00	0,00
209	drg. Yolenta Alina Hale	0,00	1.480.000	1.480.000	0,00
210	Veronika Merika Kedang, S.Gz	0,00	1.780.000	1.780.000	0,00
211	Maria Yovita Bau, A.Md.Kep	0,00	2.220.000	2.220.000	0,00
212	Stefania Hoar, A.Md.kep	0,00	2.160.000	2.160.000	0,00
213	Margaretha Nabutaek, A.Md.Kep	0,00	2.160.000	2.160.000	0,00
214	Demetriana Hoar Nahak, A.Md.Kep	0,00	1.665.000	1.665.000	0,00
215	Siti Lutfia, A.Md.Keb	0,00	1.620.000	1.620.000	0,00
216	Agustinho Gomes, A.Md.Kep	0,00	1.780.000	1.780.000	0,00
217	Sabina Amaral Bianco, A. Md.Kep	0,00	1.665.000	1.665.000	0,00
218	Irma Sri Astuti Henukh, A.Md.Kep	0,00	2.230.000	2.230.000	0,00
219	Ngatwati, A.Md.Keb	0,00	1.745.000	1.745.000	0,00
220	Maria Regina Leto, A.Md.Kep	0,00	1.665.000	1.665.000	0,00
221	Yovita Paru Mali, A. Md. Keb	0,00	1.110.000	1.110.000	0,00
222	Maria Mathilda H. Bere Rin, A.Md.Keb	0,00	1.110.000	1.110.000	0,00
223	Salomi Yohana Yopudara, A.Md.Keb	0,00	1.110.000	1.110.000	0,00
224	Juliana Noronha Dos Santos	0,00	1.110.000	1.110.000	0,00
225	Magdalena Suminah, A.Md.Kep	0,00	1.110.000	1.110.000	0,00
226	Maria Adetjeh Lau, A.Md. Kep	0,00	1.295.000	1.295.000	0,00
227	drg. Maria Anita Atu Wea	0,00	1.500.000	1.500.000	0,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Nama	Saldo Awal (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
228	Sherly Pattipeilohy, A.Md.Kep	0,00	450.000	450.000	0,00
229	Maria Vinensia Wiborada L Luan, A.Md.Kep	0,00	1.260.000	1.260.000	0,00
230	Suri Lebo Paulinus, S.Fil	0,00	4.240.000	4.240.000	0,00
231	Beasiswa 55 orang	0,00	64.800.000	64.800.000	0,00
232	Bagian Umum Setda	0,00	3.359.600,00	3.359.600,00	0,00
233	Dinas Penanaman Modal PTSP	0,00	1.007.500,00	1.007.500,00	0,00
234	Kelurahan Manumutin	0,00	2.415.000,00	2.415.000,00	0,00
235	Kelurahan Fatubenao	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
236	Kecamatan Lamaknen Selatan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
237	Kesbangpol	0,00	12.375.000,00	12.375.000,00	0,00
238	Dinas pendidikan	0,00	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00
239	Dinas pendidikan	0,00	2.090.000,00	2.090.000,00	0,00
240	Kesbangpol	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
241	Bagian Pembangunan	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00
242	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
243	Bagian Perekonomian	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
244	Perjalanan dinas bidang BPKAD	0,00	4.385.000,00	4.385.000,00	0,00
245	Bagian Hukum	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
246	BKPSDMD	0,00	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00
247	Bagian Umum	0,00	6.088.500,00	6.088.500,00	0,00
248	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
249	Dinas Kesehatan	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
250	Dinas Kominfo	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
251	Bapenda	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00
252	Setwan	0,00	3.540.000,00	3.540.000,00	0,00
253	Dinas KB	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
254	Dinas PUPR	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
255	CV Pundi Mas Bahagia	0,00	818.269.236,32	818.269.236,32	0,00
256	CV Gabriel Gabryela	0,00	257.665.496,00	257.665.496,00	0,00
257	CV Perdana	0,00	159.106.575,09	159.106.575,09	0,00
258	CV Super Star	0,00	228.201.984,97	228.201.984,97	0,00
259	CV Blacorji	0,00	36.423.880,93	36.423.880,93	0,00
260	CV Agung Sejahtera Perkasa	0,00	20.861.000,00	20.861.000,00	0,00
261	CV Idheal	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
262	CV Antik Jaya	0,00	10.716.565,83	10.716.565,83	0,00
263	CV Barito	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
264	CV Keysvalta	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
265	CV Monte Cristo	0,00	8.650.000,00	8.650.000,00	0,00
266	CV Tasanne	0,00	10.997.723,98	10.997.723,98	0,00
267	CV Tunas Baru	0,00	15.484.201,28	15.484.201,28	0,00
268	CV Blacorji	0,00	12.212.534,38	12.212.534,38	0,00
269	CV Tunas Baru	0,00	8.217.157,00	8.217.157,00	0,00
270	CV Blacorji	0,00	18.188.181,84	18.188.181,84	0,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Nama	Saldo Awal (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
271	CV Golden Eye	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
272	CV Golden Eye	0,00	8.012.365,48	8.012.365,48	0,00
273	CV Golden Eye	0,00	426.092,48	426.092,48	0,00
274	CV Cahaya Abadi	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
275	CV Putra Sulung	0,00	10.569.540,39	10.569.540,39	0,00
276	CV Putra Sulung	0,00	27.043.980,64	27.043.980,64	0,00
277	CV Lestari Perkasa Jaya	0,00	8.417.081,22	8.417.081,22	0,00
278	CV Berkat Karya	0,00	5.360.604,61	5.360.604,61	0,00
279	CV Cahaya Abadi	0,00	8.454.573,00	8.454.573,00	0,00
280	CV Berkat Karya	0,00	7.173.699,55	7.173.699,55	0,00
281	CV Idheal	0,00	4.250.851,16	4.250.851,16	0,00
282	CV Millenial Konstruksi	0,00	30.376.481,79	30.376.481,79	0,00
283	CV Tunas Baru	0,00	52.908.146,00	52.908.146,00	0,00
284	Temuan Inspektorat:	0,00	0,00	0,00	0,00
285	CV Putra Buana (paket jalan desa Beremuti-Dubesi)	0,00	95.996.208,43	95.996.208,43	0,00
286	CV Berkat Anugrah (pengendalian banjir sungai Kenebibi)	0,00	7.552.203,04	7.552.203,04	0,00
287	CV Ideal Timor Mandiri (pengendalian pengaman sungai Baukama)	0,00	31.476.306,00	31.476.306,00	0,00
288	CV Ideal Timor Mandiri (pengendalian pengaman sungai Lakafehan)	0,00	25.443.000,00	25.443.000,00	0,00
289	Dinas Kesehatan (temuan BBM tahun 2023)	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
290	Kegiatan TMDD Dinas PUPR tahun 2021	0,00	87.915.453,44	87.915.453,44	0,00
291	Kegiatan TMDD Dinas PUPR tahun 2021	0,00	87.915.453,44	87.915.453,44	0,00
292	Pengembangan sumur bor Desa Rinbesihat	0,00	9.264.125,00	9.264.125,00	0,00
293	Pengembangan sumur bor Desa Kabuna	0,00	7.905.018,00	7.905.018,00	0,00
294	Temuan obat Puskesmas	0,00	699.999,00	699.999,00	0,00
295	Perjalanan dinas bidang Kesmas Dinas Kesehatan	0,00	11.822.600,00	11.822.600,00	0,00
296	Dekranasda-perjalanan dinas	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00
297	Eduardus Beni Bone	0,00	9.400.900,00	0,00	9.400.900,00
	Jumlah	778.213.036,00	2.805.744.320,29	3.010.683.070,29	573.274.286,00



2) Piutang Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Piutang ini pada tahun 2024 sebesar Rp61.478.125,00. Jumlah ini sama dengan piutang denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan tahun 2023. Piutang ini merupakan piutang denda keterlambatan yang terjadi pada tahun 2016 dan tahun 2023. Akun ini selain menampung piutang pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, juga menampung akun pengembalian atas belanja hibah, dan pendapatan lainnya. Uraianya disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.173
Rincian Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

No.	Uraian	Saldao Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir
	Tahun 2016				
1	CV Moris Benedetto (Desa Lookeu)	5.885.450,00	0,00	0,00	5.885.450,00
2	CV Moris Benedetto (Desa Bakustulama)	6.209.450,00	0,00	0,00	6.209.450,00
3	CV Moris Benedetto (Desa Tulakadi)	5.617.295,00	0,00	0,00	5.617.295,00
4	CV Moris Benedetto (Desa Halimodok)	4.703.750,00	0,00	0,00	4.703.750,00
5	CV Moris Benedetto (Desa Kabuna)	5.867.180,00	0,00	0,00	5.867.180,00
	Tahun 2023				
	Dinas PKO				
6	CV Pembangunan (RKB SMPN Halibete)	33.195.000,00	0,00	0,00	33.195.000,00
	Tahun 2024				
7	CV Siri Mas	0,00	41.118.125,00	41.118.125,00	0,00
8	PT Sapta Sari Tama	0,00	2.343.000,00	2.343.000,00	0,00
9	CV Arta Sarana Utama	0,00	16.095.800,00	16.095.800,00	0,00
10	CV Arta Sarana Utama	0,00	17.160.000,00	17.160.000,00	0,00
11	Denda RDG SMPN I Tastim	0,00	1.199.502,00	1.199.502,00	0,00
12	CV Irke Junior	0,00	20.750,00	20.750,00	0,00
13	CV Bintang Eleste	0,00	257.400,00	257.400,00	0,00
14	CV Blacorji	0,00	2.061.012,00	2.061.012,00	0,00
15	CV Cahaya Murni	0,00	1.914.238,96	1.914.238,96	0,00
16	CV Mitra Karya Pratama	0,00	60.522.726,00	60.522.726,00	0,00
17	CV Tasanee	0,00	1.109.762,00	1.109.762,00	0,00
18	Denda RDG SDI Maulakak	0,00	2.919.300,00	2.919.300,00	0,00
19	Denda UKS SMPN Laktutus	0,00	2.595.800,00	2.595.800,00	0,00
20	PT Medquest Jaya Global	0,00	15.946.420,00	15.946.420,00	0,00
21	PT Gabriel Gabriela Jaya	0,00	11.932.714,00	11.932.714,00	0,00
22	Denda RKB SMPN Satap Weakeu	0,00	4.163.717,00	4.163.717,00	0,00
23	Denda RDG SDI Sabulmil	0,00	1.054.500,00	1.054.500,00	0,00
24	CV Nim Karya	0,00	1.401.375,00	1.401.375,00	0,00
25	CV Riatha Jaya	0,00	3.170.868,82	3.170.868,82	0,00
26	CV Riatha Jaya	0,00	4.161.187,80	4.161.187,80	0,00
27	CV Fortunio	0,00	4.041.750,00	4.041.750,00	0,00
28	CV Fortunio	0,00	1.997.843,00	1.997.843,00	0,00
29	CV Idheal	0,00	3.885.739,00	3.885.739,00	0,00
30	CV Fortunio	0,00	2.791.096,00	2.791.096,00	0,00
31	CV Idheal	0,00	2.799.187,00	2.799.187,00	0,00
32	CV Tunas Baru	0,00	5.327.462,00	5.327.462,00	0,00
33	CV Gracias	0,00	1.471.962,00	1.471.962,00	0,00
34	CV Neon Timur	0,00	20.487.900,00	20.487.900,00	0,00
35	CV Liber Jaya	0,00	1.976.460,00	1.976.460,00	0,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Saldao Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir
36	CV Kasih Jaya	0,00	799.748,00	799.748,00	0,00
37	CV Milenial Konstruksi	0,00	6.788.650,00	6.788.650,00	0,00
38	CV Murimada	0,00	1.765.410,00	1.765.410,00	0,00
39	CV Berkat Mandiri	0,00	2.007.033,00	2.007.033,00	0,00
40	CV. Manlima Jaya	0,00	1.266.098,00	1.266.098,00	0,00
41	CV Adelweis Permai	0,00	14.583.442,00	14.583.442,00	0,00
42	CV Liber Jaya	0,00	1.994.331,00	1.994.331,00	0,00
43	CV Cahaya Abadi	0,00	4.797.887,00	4.797.887,00	0,00
	Jumlah Denda		269.930.196,58	269.930.196,58	0,00
	Pengembalian Hibah:				
44	Palang Merah Indonesia	0,00	1.778.500,00	1.778.500,00	0,00
45	Dharma Wanita	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
46	Retribusi Menara Telkomsel (PT Dayamitra Telekomunikasi)	0,00	81.815.900,00	81.815.900,00	0,00
47	Lain-Lain PAD	0,00	14.878.210,94	14.878.210,94	0,00
48	Reklasifikasi uang jaminan pembongkaran reklame	0,00	88.753.295,00	88.753.295,00	0,00
49	Kelebihan setoran sisa TU	0,00	100.420,00	100.420,00	0,00
50	Sisa Uang di Rekening Juru Bayar	0,00	12.979,00	12.979,00	0,00
	Jumlah Pendapatan Denda	61.478.125,00	457.399.501,52	457.399.501,52	61.478.125,00

3) Piutang Pendapatan dari Pengembalian

Saldo piutang pendapatan dari pengembalian tahun 2024 sebesar Rp330.445.902,96 atau turun sebesar Rp(107.011.857,63) atau (24,46)% dibanding tahun 2023. Mutasinya disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.174

Piutang Pendapatan dari Pengembalian

No.	Uraian	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir
1	CV Moris Benedetto (septik tank Desa Bakustulama)	57.295.000,00	0,00	0,00	57.295.000,00
2	CV Moris Benedetto (septik tank Desa Tulakadi)	55.674.500,00	0,00	0,00	55.674.500,00
3	CV Moris Benedetto (septik tank Desa Lookeu)	68.355.000,00	0,00	0,00	68.355.000,00
4	Penerimaan dari penjualan kendaraan ke anggota DPR	71.194.380,00	0,00	71.194.380,00	0,00
5	CV Sanjaya (SDI Onoboi)	4.550.391,00	0,00	0,00	4.550.391,00
6	CV Cahaya Murni (SMPN 2 Atambua)	2.306.073,47	0,00	2.306.073,00	0,47
7	CV Berkat Nusantara Teknik (SMPN 3 Atambua)	36.984.006,51	0,00	0,00	36.984.006,51
8	CV Astra Karya (SMPN Haliwen)	18.689.941,38	0,00	0,00	18.689.941,38
	Dinas PUPR tahun 2021				
9	CV Bina Cipta Utama- Dinas PUPR	6.484.000,00	0,00	6.484.000,00	0,00
10	CV Bina Cipta Utama- Dinas PUPR	5.860.000,00	0,00	5.860.000,00	0,00
11	CV Hasta Perkasa Engineering	8.570.000,00	0,00	0,00	8.570.000,00
12	CV Gunatama Designe	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
13	CV Bina Cipta Utama	29.099.562,00	0,00	2.000.000,00	27.099.562,00
14	CV Gunatama Designe	4.962.500,00	0,00	0,00	4.962.500,00
15	CV Duta Teknik Consultan	798.000,00	0,00	0,00	798.000,00
16	CV Hasta Perkasa Engineri	4.437.500,00	0,00	4.437.500,00	0,00
17	CV Gunatama Designe	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
18	CV Gunatama Designe	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
19	CV Gunatama Designe	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00
20	CV Bina Cipta Utama	7.040.000,00	0,00	0,00	7.040.000,00
21	CV Bina Cipta Utama	5.860.000,00	0,00	5.860.000,00	0,00
22	CV Duta Teknik Consultan	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00
23	CV Duta Teknik Consultan	1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir
	Dinas Pendidikan thn 2021				
24	CV Rancang Indah Konsultan	1.292.000,00	0,00	1.292.000,00	0,00
25	CV Konsulindo Inti Teknik	25.637.000,00	0,00	3.500.000,00	22.137.000,00
26	CV Multi Cipta Designe	1.496.000,00	0,00	1.496.000,00	0,00
27	CV Rancang Indah Konsultan	1.292.000,00	0,00	1.292.000,00	0,00
	BPKAD tahun 2021				
28	CV Duta Teknik Consultan	12.360.000,00	0,00	0,00	12.360.000,00
29	CV CRISTAN JAYA	0,80	0,00	0,00	0,80
	Dinas Pendidikan (Temuan thn 2023 atas LKPD thn 2022)				
30	CV WILFRIT	0,80	0,00	0,00	0,80
31	CV TERINA	1.289.904,63	0,00	1.289.904,63	0,00
	Realisasi Pengembalian gaji dan tunjangan		242.273.899,00	242.273.899,00	0,00
	Jumlah Piutang Pengembalian	437.457.760,59	242.273.899,00	349.285.756,63	330.445.902,96

4) Piutang Pendapatan BLUD

Piutang Pendapatan BLUD tahun 2024 sebesar Rp15.663.774.041,00. Jumlah ini naik sebesar Rp4.622.946.441,00 atau (41,87)% dari tahun 2023. Piutang ini terdiri atas piutang jasa layanan pasien BPJS dan layanan pasien Jasaraharja. Uraianannya sebagai berikut.

Tabel 5.175**Piutang Pendapatan BLUD**

No	Uraian	Saldo Awal 2024	Mutasi		Saldo Akhir 2024	%
			Bertambah	Berkurang		
1	Jasa Layanan Pasien BPJS	11.040.827.600,00	15.587.109.914,00	11.040.827.600,00	15.587.109.914,00	41,18
2	Jasa Layanan Pasien Jasaraharja	0,00	76.664.127,00	0,00	76.664.127,00	0,00
	Jumlah	11.040.827.600,00	15.663.774.041,00	11.040.827.600,00	15.663.774.041,00	41,87

5) Piutang Pendapatan Bunga

Piutang pendapatan bunga per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.285,00 merupakan Piutang Remunerasi *Treasury Deposit Facility* (TDF) atas bagi hasil dari Pemerintah Pusat Tahun 2024 kepada Pemkab Belu yang sampai dengan 31 Desember 2024 masih terdapat pada rekening TDF Kabupaten Belu pada Bank Indonesia dan belum ditransfer ke RKUD Pemkab Belu.

**5.3.1.1.12.2 Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah****Tabel 5.176****Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah**

No	Uraian	Nilai Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang 2024 (Rp)	Saldo Piutang 2024 (NRV) (Rp)	Saldo Piutang 2023 (NRV) (Rp)	%
1	Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	573.274.286,00	(483.447.066,00)	89.827.220,00	(502.796.205,75)	(117,87)
2	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Keterlambatan Pekerjaan	61.478.125,00	(31.768.600,00)	29.709.525,00	(28.283.125,00)	0,00
3	Penyisihan Piutang Pendapatan Atas Pengembalian	330.445.902,96	(255.885.201,16)	74.560.701,80	(206.815.284,97)	(136,05)
4	Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	15.663.774.041,00	(29.946.194,68)	15.633.827.846,32	(55.204.138,00)	(28.420,03)
5	Penyisihan Piutang Jasa Giro	2.285,00	0,00	2.285,00	(3.389,16)	(167,42)
Jumlah		16.628.974.639,96	(801.047.061,84)	15.827.927.578,12	(793.102.142,88)	(2.095,70)

Uraian mutasi penyisihan piutang ini adalah sebagai berikut.

Tabel 5.177**Rincian Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah**

No	Uraian	Saldo Awal 2024 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir 2024 (Rp)	%
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)		
1	Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	(502.796.205,75)	(481.430,25)	19.830.570,00	(483.447.066,00)	(3,85)
2	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Keterlambatan Pekerjaan	(28.283.125,00)	(3.485.475,00)	0,00	(31.768.600,00)	12,32
3	Penyisihan Piutang Pendapatan Atas Pengembalian	(206.815.284,97)	(49.069.916,19)	0,00	(255.885.201,16)	23,73
4	Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	(55.204.138,00)	(30.112.169,68)	55.370.113,00	(29.946.194,68)	(45,75)
5	Penyisihan Piutang Jasa Giro	(3.389,16)	0,00	3.389,16	0,00	(100,00)
Jumlah		(793.102.142,88)	(83.148.991,12)	75.204.072,16	(801.047.061,84)	1,00

Koreksi kurang penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah pada tahun 2024 sebesar Rp75.204.072,16 seluruhnya merupakan koreksi atas perhitungan ulang penyisihan piutang asal tahun 2017 s.d. 2023.

5.3.1.1.12.3 Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Netto (*Net Realizable Value*)

Piutang Lain-lain PAD yang Sah netto diperoleh dari piutang bruto dikurangi penyisihan piutangnya. Jumlah Piutang Lain-lain PAD yang sah netto tahun 2024 sebesar Rp15.827.927.578,12 naik sebesar Rp4.303.053.199,41 atau 37,34% jika dibanding dengan jumlah saldo piutang tahun 2023.



Uraian mutasinya adalah sebagai berikut.

Tabel 5.178

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Netto

No.	Uraian	Saldo		Kenalkan/ (Penurunan) (Rp)	%
		31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)		
1	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	89.827.220,00	275.416.830,25	(185.589.610,25)	(67,38)
2	Piutang Pendapatan Denda Keterlambatan Pekerjaan	29.709.525,00	33.195.000,00	(3.485.475,00)	0,00
3	Piutang Pendapatan Atas Pengembalian	74.560.701,80	230.642.475,62	(156.081.773,82)	(67,67)
4	Piutang Pendapatan BLUD	15.633.827.846,32	10.985.623.462,00	4.648.204.384,32	42,31
5	Piutang Pendapatan Jasa Giro	0,00	(3.389,16)	3.389,16	(100,00)
6	Piutang Pendapatan Bunga	2.285,00	0,00	2.285,00	0,00
Jumlah		15.827.927.578,12	11.524.874.378,71	4.303.053.199,41	37,34

5.3.1.1.13	Piutang	31-Des-2024	31-Des- 2023
	Transfer	Rp2.832.914.508,00	Rp8.161.571.388,44
	Antar Daerah Netto		

Saldo Piutang Transfer Antar Daerah merupakan Piutang atas Pendapatan Transfer Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi NTT yang per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.832.914.508,00. Saldo ini turun sebesar Rp(5.328.656.880,44) atau (65,29)% jika dibanding saldo piutang pada tahun 2023. Uraian saldo piutang ini disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.179

Piutang Transfer Antar Daerah - Provinsi

No	Uraian	Saldo		Kenalkan/ (Penurunan) (Rp)	%
		31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)		
1	Piutang Transfer Antar Daerah	2.832.914.508,00	8.202.584.310,00	(5.369.669.802,00)	(65,46)
2	Penyisihan Piutang	0,00	(41.012.921,56)	41.012.921,56	(100,00)
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Netto		2.832.914.508,00	8.161.571.388,44	(5.328.656.880,44)	(65,29)

5.3.1.1.13.1 Piutang Transfer Antar Daerah - Provinsi Bruto

Saldo Piutang Transfer Antar Daerah - Provinsi tahun 2024 sebesar Rp2.832.914.508,00 atau turun sebesar (65,46)% dibanding tahun 2023. Piutang Transfer Pemerintah Provinsi tahun 2024 berdasarkan surat Sekretaris Daerah Provinsi NTT Nomor BU.900.1.14.3/05/BPAD/2025 Tanggal 18 Maret 2025.

Mutasi Piutang Transfer Antar Daerah - Provinsi di tahun 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.180****Piutang Transfer Antar Daerah - Provinsi**

No	Uraian	Saldo Awal 2024 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir 2024 (Rp)
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
1	Dana Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	3.112.443.670,00	4.306.794.867,00	7.280.921.630,00	138.316.907,00
2	Dana Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.549.227.827,00	2.865.829.957,00	4.126.418.915,00	288.638.869,00
3	Dana Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	3.539.025.070,00	9.001.659.959,00	10.135.892.549,00	2.404.792.480,00
4	Dana Bagi Hasil Pajak Rokok	0,00	12.876.659.720,00	12.876.659.720,00	0,00
5	Dana Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.887.743,00	4.160.864,00	4.882.355,00	1.166.252,00
	Total	8.202.584.310,00	29.055.105.367,00	34.424.775.169,00	2.832.914.508,00

Mutasi bertambah sebesar Rp29.055.105.367,00 sesuai keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 230/KEP/HK/2024 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024.

Mutasi berkurang sebesar Rp34.424.775.169,00 terdiri dari:

- 1) Pelunasan piutang transfer Provinsi Rp8.202.584.310,00; dan
- 2) Pembayaran alokasi transfer tahun 2024 Rp26.222.190.859,00

5.3.1.1.13.2 Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - Provinsi

Tidak dilakukan penyisihan piutang transfer Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2024 karena pertimbangan kolektibilitas piutang yang cukup baik dari tahun-tahun sebelumnya dan memiliki kepastian penyelesaian dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nilai tersebut turun (100,00)% dibanding tahun 2023 sebesar Rp(41.012.921,56). Penurunan ini juga terjadi karena piutang transfer pemerintah daerah lainnya tahun 2023 telah dilunasi seluruhnya pada tahun 2024.

5.3.1.1.13.3 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - Provinsi Netto

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - Provinsi Netto pada tahun 2024 sebesar Rp2.832.914.508,00.



5.3.1.1.14 Belanja Dibayar di Muka	31-Des-24	31-Des-23
	Rp278.304.600,00	Rp0,00

Belanja Dibayar di Muka adalah pengeluaran belanja pada tahun berjalan tetapi manfaatnya melampaui tahun berjalan sehingga pada tahun berikutnya masih ada manfaat yang akan diterima akibat pembayaran tersebut. Terdapat kenaikan saldo Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2024 sebesar Rp278.304.600,00 jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2024 sebesar Rp278.304.600,00 seluruhnya berasal dari Belanja Hibah Dibayar Dimuka terkait kegiatan Pemilukada, yang terdiri dari:

- 1) Sisa dana hibah kegiatan Pilkada kepada BAWASLU Kabupaten Belu sesuai NPHD Nomor BKBP-200/275/XI/2023 dan Nomor 348/KU.00.01/K.NT-2/11/2023 tanggal 10 Nopember 2023 yang telah disalurkan pada tahun 2024 sebesar Rp9.500.000.000,00 namun belum digunakan oleh penerima hibah per 31 Desember 2024 sebesar Rp28.304.600,00. Pada tanggal 21 Mei 2025 sisa dana hibah BAWASLU seluruhnya telah disetorkan kembali ke Kas Daerah dengan STS Nomor 1364/LLPAD; dan
- 2) Sisa dana hibah kegiatan Pilkada kepada KPU Kabupaten Belu sesuai NPHD Nomor BKBP-200/274/XI/2023 dan 651/KU.07/PKS/5304/2023 tanggal 10 November 2023 yang telah disalurkan sebesar Rp12.300.000.000,00 pada tahun 2024 namun belum digunakan oleh penerima hibah per 31 Desember 2024 sebesar Rp250.000.000,00. Pada tanggal 15 Mei 2025 sisa dana hibah KPU seluruhnya telah disetorkan kembali ke Kas Daerah dengan STS Nomor 1258/LLPAD.

5.3.1.1.15 Persediaan	31-Des-24	31-Des-23
	Rp58.039.243.043,21	Rp24.603.620.065,04

Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp58.039.243.043,21. Jika dibandingkan dengan saldo Persediaan tahun 2023 sebesar Rp24.603.620.065,04 terjadi peningkatan saldo persediaan sebesar Rp33.435.622.978,17 atau 135,90%.

**Tabel 5.181****Persediaan**

No.	Uraian	Saldo		Kenalkan/ (Penurunan) (Rp)	%
		31-Des-24 (Rp)	31-Des-2023 (Rp)		
1	Persediaan Barang	58.039.243.043,21	24.603.620.065,04	33.435.622.978,17	135,90
Jumlah		58.039.243.043,21	24.603.620.065,04	33.435.622.978,17	135,90

Rincian mutasi Persediaan tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.182**Rincian Mutasi Persediaan**

No.	Uraian	Saldo Awal 2024 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir 2024 (Rp)	%
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)		
1	Alat Tulis Kantor (ATK)	304.735.862,33	198.510.266,00	304.735.862,33	198.510.266,00	(34,86)
2	Alat Listrik dan Elektronik	7.919.804,00	14.648.200,00	7.919.804,00	14.648.200,00	84,96
3	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	48.276.914,00	58.093.970,00	48.276.914,00	58.093.970,00	20,33
4	Bahan Cetakan	392.978.795,00	332.469.890,00	392.978.795,00	332.469.890,00	(15,40)
5	Suku Cadang	147.832,00	47.564.200,00	147.832,00	47.564.200,00	32.074,50
6	Penanganan Covid 19	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00	0,00	(100,00)
7	Obat-obatan	11.155.845.754,37	13.516.513.789,47	11.155.845.754,37	13.516.513.789,47	21,16
8	Bahan Medis Pakai Habis	0,00	3.260.070.306,14	0,00	3.260.070.306,14	0,00
9	Alat Perlengkapan Kantor	605.000,00	198.365.472,40	605.000,00	198.365.472,40	32.687,68
10	Anakan/Bibit/Benih	0,00	102.300.000,00	0,00	102.300.000,00	0,00
11	Alat Medis	3.181.254.918,20	22.050.470,00	3.181.254.918,20	22.050.470,00	(99,31)
12	Persediaan Barang yang Diserahkan ke masyarakat	9.404.431.000,00	40.288.656.479,20	9.404.431.000,00	40.288.656.479,20	328,40
13	Sandang/Pangan	100.674.185,14	0,00	100.674.185,14	0,00	(100,00)
Jumlah		24.603.620.065,04	58.039.243.043,21	24.603.620.065,04	58.039.243.043,21	135,90

Persediaan barang yang diserahkan ke masyarakat per 31 Desember 2024 sebesar Rp40.288.656.479,20 dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Persediaan atas Barang Diserahkan ke Masyarakat pada Dinas PKO, Dinas PUPR, dan Dinas Pertanian yang sampai dengan 31 Desember 2024 masih dalam masa pemeliharaan 180 hari kalender masing-masing sebesar Rp5.422.558.211,75, Rp14.492.700.188,45, dan Rp3.708.436.000,00;
- 2) Sisa persediaan barang diserahkan ke masyarakat yang sampai dengan 31 Desember 2024 belum diserahkan ke penerima pada Dinas PKO dan Dinas PUPR masing-masing sebesar Rp7.892.277.200,00 dan Rp7.900.488.000,00; dan
- 3) Sisa persediaan barang diserahkan ke masyarakat yang merupakan barang dalam rangka berjaga-jaga menghadapi kondisi darurat/bencana sebesar Rp242.437.999,00 pada BPBD dan Rp629.758.880,00.

Rincian Persediaan pada SKPD per 31 Desember 2024 disajikan pada Lampiran 10.

**5.3.1.2 INVESTASI**

JANGKA PANJANG	31-Des-24	31-Des-23
	Rp73.871.722.006,00	Rp74.252.466.616,87

Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran agar memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas. Investasi Jangka Panjang adalah Investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Jumlah investasi jangka panjang pemerintah Kabupaten Belu pada tahun 2024 sebesar Rp73.871.722.006,00 dan jumlah ini turun sebesar Rp(380.744.610,87) atau (0,51)% dibanding tahun 2023. Selanjutnya dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.183

Investasi Jangka Panjang

No	Uraian	Saldo		Kenalkan/ (Penurunan) Rp	%
		31-Des-24 Rp	31-Des-23 Rp		
1	Investasi Jangka Panjang	73.871.722.006,00	74.252.466.616,87	(380.744.610,87)	(0,51)
	Jumlah	73.871.722.006,00	74.252.466.616,87	(380.744.610,87)	(0,51)

Mutasi investasi jangka panjang dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.184

Mutasi Investasi Jangka Panjang

No.	Uraian	Saldo Awal 2024 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir 2024 (Rp)	%
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)		
A	Investasi Non Permanen					
1	Investasi Non Permanen Lainnya	2.872.199.900,00	0,00	0,00	2.872.199.900,00	0,00
2	Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya Dana Bergulir	(2.872.199.900,00)	0,00	0,00	(2.872.199.900,00)	0,00
	Jumlah Investasi Non Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Investasi Permanen					
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	74.252.466.616,87	0,00	380.744.610,87	73.871.722.006,00	(0,51)
	Jumlah Investasi Permanen	74.252.466.616,87	0,00	380.744.610,87	73.871.722.006,00	(0,51)
	Jumlah	74.252.466.616,87	0,00	380.744.610,87	73.871.722.006,00	(0,51)

5.3.1.2.1	Investasi Non Permanen	31-Des-24	31-Des-23
		Rp0,00	Rp0,00

Investasi Non Permanen merupakan nilai netto yang terdiri atas Investasi Non Permanen Lainnya berupa Dana Bergulir dan Penyisihannya yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

**5.3.1.2.1.1 Investasi Non Permanen Lainnya**

31-Des-24	31-Des-23
Rp0,00	Rp0,00

Investasi non permanen lainnya berupa investasi dana bergulir pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana serta Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pada tahun 2024 jumlah netto investasi ini sebesar Rp0,00 karena telah disisihkan seluruhnya per 31 Desember 2024. Nilai ini tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan 31 Desember 2023. Perhitungan investasi non permanen lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.3.1.2.1.1.1 Investasi Non Permanen Lainnya Bruto

Pada tahun 2024 jumlah bruto investasi ini sebesar Rp2.872.199.900,00. Tidak ada mutasi selama tahun 2024. Uraianannya adalah sebagai berikut.

Tabel 5.185

Investasi Non Permanen Lainnya

No.	Uraian	Saldo Awal 2024 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir 2024 (Rp)	%
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)		
1	Dana Bergulir pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	178.982.500,00	0,00	0,00	178.982.500,00	0,00
2	Dana Bergulir pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.693.217.400,00	0,00	0,00	2.693.217.400,00	0,00
Jumlah		2.872.199.900,00	0,00	0,00	2.872.199.900,00	0,00

5.3.1.2.1.1.2 Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya

31-Des-24	31-Des-23
Rp(2.872.199.900,00)	Rp(2.872.199.900,00)

Penyisihan investasi non permanen lainnya berasal dari penyisihan dana bergulir yang per 31 Desember 2024 sebesar Rp(2.872.199.900,00) atas seluruh nilai investasi. Nilai ini tidak mengalami perubahan dari saldo per 31 Desember 2023.



Tabel 5.186

Penyisihan Dana Bergulir

No.	Uraian	Saldo Awal 2024 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir 2024 (Rp)	%
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)		
1	Penyisihan Dana Bergulir pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(178.982.500,00)	0,00	0,00	(178.982.500,00)	0,00
2	Penyisihan Dana Bergulir pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(2.693.217.400,00)	0,00	0,00	(2.693.217.400,00)	0,00
Jumlah		(2.872.199.900,00)	0,00	0,00	(2.872.199.900,00)	0,00

Penyisihan dana bergulir untuk mendapatkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) tahun 2024 disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.187

Rincian Penyisihan Dana Bergulir

No.	Uraian	Nilai Investasi 31-Dec-24 (Rp)	Penyisihan Investasi 31-Dec-24 (Rp)	Saldo Investasi 31-Dec-2024 (NRV) (Rp)	Saldo Investasi 31-Dec-2023 (NRV) (Rp)	%
1	Dana Bergulir pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	178.982.500,00	(178.982.500,00)	0,00	(178.982.500,00)	0,00
2	Dana Bergulir pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.693.217.400,00	(2.693.217.400,00)	0,00	(2.693.217.400,00)	0,00
Jumlah		2.872.199.900,00	(2.872.199.900,00)	0,00	0,00	0,00

5.3.1.2.1.1.3 Investasi Non Permanen Lainnya Netto (*Net Realizable Value*)

Setelah dilakukan penyisihan maka saldo bersih dana bergulir netto di tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.188

Penyisihan Dana Bergulir Netto

No.	Uraian	Saldo Awal 2024 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir 2024 (Rp)	%
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)		
1	Dana Bergulir pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dana Bergulir pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investasi non permanen lainnya berupa dana bergulir dan penyisihannya diuraikan lebih lanjut dalam Lampiran 11-1 s.d. 11-2.

**5.3.1.2.2 Investasi Permanen**

31-Des-24	31-Des-23
Rp73.871.722.006,00	Rp74.252.466.616,87

Investasi permanen pemerintah Kabupaten Belu seluruhnya dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Nilai investasi permanen pada tahun 2024 sebesar Rp73.871.722.006,00 jumlah ini turun sebesar Rp(380.744.610,87) atau (0,51)% dibanding tahun 2023 sebesar Rp74.252.466.616,87. Rinciannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.189**Investasi Permanen - Penyertaan Modal Pemerintah Daerah**

No	Uraian	Saldo Awal 2024 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir 2024 (Rp)	%
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)		
1	PT BPD NTT	73.871.722.006,00	0,00	0,00	73.871.722.006,00	0,00
2	PDAM Kabupaten Belu	380.744.610,87	0,00	380.744.610,87	0,00	(100,00)
3	Perumda Belu Bhakti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	74.252.466.616,87	0,00	380.744.610,87	73.871.722.006,00	(0,51)

Jumlah investasi permanen dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT BPD NTT

Nilai Investasi Permanen berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebesar Rp73.871.722.006,00.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, jumlah penyertaan modal yang harus disertakan pada tahun 2024 sebesar Rp21.279.137.994,00 yakni terdiri dari sisa penyertaan modal tahun 2023 Rp7.500.000.000,00 dan penyertaan modal tahun 2024 Rp13.559.137.994,00. Jumlah tersebut sampai dengan 31 Desember 2024 tidak dapat dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Belu karena keterbatasan fiskal.

Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Belu pada tahun 2024 mewakili 3,03% dari keseluruhan nilai kepemilikan atau sebanyak 7.387.172 lembar saham seri A, sedangkan tahun 2022 sebanyak 6.887.172 lembar saham seri A atau mewakili 3,06% dari keseluruhan nilai kepemilikan saham.



Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) nomor 06 tentang Akuntansi Investasi paragraf 37 menyatakan bahwa kepemilikan kurang dari 20% dan tidak memiliki pengaruh yang signifikan, penilaian investasi pemerintah menggunakan metode biaya. Dengan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi.

Dari data yang berhasil dihimpun, hasil dari investasi dalam bentuk penyertaan modal pada Bank NTT berupa dividen setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini:

Tabel 5.190**Investasi Permanen (PT Bank Pembangunan Daerah NTT)**

Tahun	Nilai Investasi per periode pelaporan (Rp)	Tambahan Investasi Tahun Berjalan (Rp)	Hasil Investasi (Rp)
2005	3.023.110.000,00	0,00	0,00
2006	6.023.110.000,00	3.000.000.000,00	597.489.701,00
2007	10.023.110.000,00	4.000.000.000,00	1.134.059.724,00
2008	10.023.110.000,00	0,00	1.532.100.875,00
2009	10.023.110.000,00	0,00	1.432.004.841,07
2010	11.023.110.000,00	1.000.000.000,00	1.889.679.677,00
2011	11.023.110.000,00	0,00	2.861.616.908,00
2012	16.023.110.000,00	5.000.000.000,00	3.251.870.445,00
2013	18.523.110.000,00	2.500.000.000,00	3.831.655.780,00
2014	18.523.110.000,00	0,00	5.147.512.408,00
2015	42.273.110.000,00	23.750.000.000,00	5.561.685.579,00
2016	42.273.110.000,00	0,00	5.996.676.620,00
2017	42.273.110.000,00	0,00	7.990.350.405,00
2018	42.273.110.000,00	0,00	7.507.271.925,00
2019	42.273.110.000,00	0,00	7.048.979.947,00
2020	51.371.722.006,00	9.098.612.006,00	6.441.724.012,23
2021	56.371.722.006,00	5.000.000.000,00	6.238.725.900,00
2022	68.871.722.006,00	12.500.000.000,00	3.734.076.759,00
2023	73.871.722.006,00	5.000.000.000,00	6.529.604.943,00
2024	73.871.722.006,00	0,00	3.480.688.664,00
Jumlah		70.848.612.006,00	82.207.775.113,30

Dari tabel di atas terlihat bahwa hasil dari investasi pada PT Bank NTT telah mampu melampaui jumlah nilai penyertaan modalnya. Hal ini menunjukkan dari sisi manfaat finansial, investasi penyertaan modal pada PT BPD NTT telah mampu memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Belu namun belum sepenuhnya memberikan akselerasi bagi pertumbuhan ekonomi dari hasil investasinya.



2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Kabupaten Belu

Nilai investasi permanen - Penyertaan modal pada PDAM Kabupaten Belu pada tahun 2024 sebesar 0,00 atau turun 100% dibanding tahun 2023 sebesar Rp380.744.610,87. Berdasarkan hasil Laporan Auditor Independen Nomor 00043/2.0925/AU.2/04/1881-1/1/III/2025 tanggal 20 Maret 2025, terdapat kerugian sebesar Rp(3.372.154.467,00) sehingga nilai investasinya menjadi Rp0,00 (nihil) karena nilai kerugian telah melampaui nilai bersih investasi awal tahun pada 1 Januari 2024 sebesar Rp380.744.610,87 dengan nilai pelampauan Rp(2.991.409.856,13).

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) nomor 6 tentang Akuntansi Investasi paragraph 37 menyatakan bahwa kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas. Dengan metode ekuitas, investasi dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal neraca.

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Belu yang disajikan sesuai dengan kepemilikan 100,00% menggunakan metode ekuitas (*equity*) adalah sebagai berikut.

Tabel 5.191

Investasi Permanen (PDAM Kabupaten Belu)

No.	Uraian	Tahun 2024 Rp	Tahun 2023 Rp	Lebih/ (Kurang) Rp
1	Penyertaan Modal Pemerintah	6.617.560.917,00	6.617.560.917,00	0,00
2	Penyertaan Modal YBD Statusnya	17.664.317.055,00	17.664.317.055,00	0,00
3	Modal Donasi	159.500.000,00	159.500.000,00	0,00
4	Laba/Rugi s/d Tahun 2019	(8.065.885.250,13)	(8.065.885.250,13)	0,00
5	Laba/Rugi Tahun 2020	(4.364.223.509,00)	(4.364.223.509,00)	0,00
6	Laba/Rugi Tahun 2021	(3.468.149.207,00)	(3.468.149.207,00)	0,00
7	Laba/Rugi Tahun 2022	(4.530.424.783,00)	(4.530.424.783,00)	0,00
8	Laba/Rugi Tahun 2023	(3.631.950.612,00)	(3.631.950.612,00)	0,00
9	Laba/Rugi Tahun 2024	(3.372.154.467,00)	0,00	(3.372.154.467,00)
Jumlah		(2.991.409.856,13)	380.744.610,87	(3.372.154.467,00)

Rincian pelampauan nilai bersih investasi atas akumulasi kerugian investasi s.d. 31 Desember 2024 pada PDAM Kabupaten Belu dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 5.192

Rincian Investasi Permanen (PDAM Kabupaten Belu)

No.	Uraian	Nilai Investasi Bersih Tercatat (Rp)	Nilai Laba/(Rugi) (Rp)	Akumulasi Pelampauan Rugi Nilai Investasi (Rp)
1	Penyertaan Modal Pemerintah	6.617.560.917,00	6.617.560.917,00	-



No.	Uraian	Nilai Investasi Bersih Tercatat (Rp)	Nilai Laba/(Rugi) (Rp)	Akumulasi Pelampauan Rugi Nilai Investasi (Rp)
2	Penyertaan Modal YBD Statusnya	24.281.877.972,00	17.664.317.055,00	-
3	Modal Donasi	24.441.377.972,00	159.500.000,00	-
4	Laba/(Rugi) s.d. Tahun 2019	16.375.492.721,87	(8.065.885.250,13)	-
5	Laba/(Rugi) Tahun 2020	12.011.269.212,87	(4.364.223.509,00)	-
6	Laba/(Rugi) Tahun 2021	8.543.120.005,87	(3.468.149.207,00)	-
7	Laba/(Rugi) Tahun 2022	4.012.695.222,87	(4.530.424.783,00)	-
8	Laba/(Rugi) Tahun 2023	380.744.610,87	(3.631.950.612,00)	-
9	Laba/(Rugi) Tahun 2024	-	(3.372.154.467,00)	(2.991.409.856,13)
Jumlah Investasi Bersih		-	(2.991.409.856,13)	(2.991.409.856,13)

3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda Belu Bhakti

Penyertaan modal pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Belu Bhakti per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 sama seperti tahun 2023. Jumlah penyertaan modal pada Perumda Belu Bhakti yang sebelumnya berstatus Perusahaan Dagang (PD) pada tahun 2010 - 2013 Rp400.000.000,00. Pada tahun 2013 s.d. 2021 PD Belu Bhakti tidak beroperasi dan berdasarkan hasil audit auditor independen untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menunjukkan bahwa rugi perusahaan telah melampaui nilai investasi pemerintah. Namun berdasarkan hasil Laporan Auditor Independen Nomor 665/WR.01/KP/RM/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017, PD Belu Bhakti mengalami kerugian sebesar Rp(413.761.708,00). Kerugian ini telah melebihi nilai investasinya sebesar Rp(13.761.708,00) sehingga penyajian nilai investasi pada neraca sebesar Rp0,00 (nihil).

Pada tahun 2022 setelah telah dilakukan penyesuaian bentuk hukum atas PD Belu Bhakti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Belu Bhakti menjadi Perumda Belu Bhakti. Diharapkan dengan adanya perubahan bentuk hukum ini dapat meningkatkan peran dan fungsi BUMD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan potensi PAD guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan pelayanan kebutuhan masyarakat. Belum terdapat tambahan penyertaan modal dari



Pemkab Belu kepada Perumda Belu Bhakti setelah perubahan status tersebut.

Sejak tahun 2023 s.d. 2024 Perumda Belu Bhakti mulai aktif kembali dan membukukan laba bersih sebesar Rp22.695.277,00 untuk tahun 2023 dan rugi bersih sebesar Rp(127.315.770,00) untuk tahun 2024. Namun atas Laporan Keuangan 2023 dan 2024 tersebut sampai dengan 31 Desember 2024 belum diaudit oleh auditor independen.

Rincian pelampauan nilai bersih investasi atas akumulasi kerugian investasi s.d. 31 Desember 2024 pada Perumda Belu Bhakti dengan memperhitungkan laba (rugi) bersih *unaudited* dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 5.193**Rincian Investasi Permanen (Perumda Belu Bhakti)**

No.	Uraian	Nilai Investasi Bersih Tercatat (Rp)	Nilai Laba/(Rugi) (Rp)	Akumulasi Pelampauan Rugi Nilai Investasi (Rp)
1	Penyertaan Modal Pemerintah	400.000.000,00	-	-
2	Laba/(Rugi) s.d. Tahun 2013	93.177.368,00	(306.822.632,00)	-
3	Laba/(Rugi) Tahun 2014	3.043.617,00	(90.133.751,00)	-
4	Koreksi Laba/(Rugi) Tahun 2014	913.617,00	(2.130.000,00)	
5	Laba/(Rugi) Tahun 2015	-	(6.709.700,00)	(5.796.083,00)
6	Laba/(Rugi) Tahun 2016	-	(7.965.625,00)	(13.761.708,00)
7	Laba/(Rugi) Tahun 2017 s.d. 2022	-	-	(13.761.708,00)
8	Laba/(Rugi) Tahun 2023 (<i>unaudited</i>)	8.933.569,00	22.695.277,00	-
9	Laba/(Rugi) Tahun 2024 (<i>unaudited</i>)	-	(127.315.770,00)	(118.382.201,00)
Jumlah Investasi Bersih		-	(518.382.201,00)	(118.382.201,00)

Tabel di atas menunjukkan perhitungan laba/(rugi) s.d. 31 Desember 2024 belum memengaruhi penilaian investasi pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah karena laba/(rugi) Perumda belum menutup akumulasi pelampauan rugi nilai investasi Pemkab Belu.

Laporan Keuangan BUMD PT BPD NTT, PDAM Kabupaten Belu, dan Perumda Belu Bhakti untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 12-1, Lampiran 12-2, dan Lampiran 12-3.**

**5.3.1.3 ASET TETAP**

31-Des-24	31-Des-23
Rp1.435.306.169.331,88	Rp1.394.553.672.606,05

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.435.306.169.331,88 atau naik sebesar Rp40.752.496.725,83 atau 2,92% dibanding tahun 2023. Rinciannya adalah sebagai berikut.

Tabel 5.194**Aset Tetap**

No.	Uraian	Saldo		Kenalkan/ (Penurunan) Rp	%
		31-Des-24 Rp	31-Des-23 Rp		
1	Tanah	150.728.071.996,00	150.842.471.996,00	(114.400.000,00)	(0,08)
2	Peralatan dan Mesin	504.253.346.000,35	481.989.823.997,35	22.263.522.003,00	4,62
3	Gedung dan Bangunan	825.881.045.951,19	782.883.329.149,63	42.997.716.801,56	5,49
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	1.115.151.854.646,13	1.047.604.817.836,77	67.547.036.809,36	6,45
5	Aset Tetap Lainnya	23.806.844.633,00	22.179.865.733,00	1.626.978.900,00	7,34
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	16.697.509.267,66	3.158.852.308,00	13.538.656.959,66	428,59
7	Akumulasi Penyusutan	(1.201.212.503.162,45)	(1.094.105.488.414,70)	(107.107.014.747,75)	9,79
Jumlah		1.435.306.169.331,88	1.394.553.672.606,05	40.752.496.725,83	2,92

Mutasi aset tetap tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.195**Mutasi Aset Tetap**

No	Uraian	Saldo Awal 2024 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir 2024 (Rp)	%
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)		
1	Tanah	150.842.471.996,00	-	114.400.000,00	150.728.071.996,00	(0,08)
2	Peralatan dan Mesin	481.989.823.997,35	25.889.444.008,00	3.625.922.005,00	504.253.346.000,35	4,62
3	Gedung dan Bangunan	782.883.329.149,63	59.428.513.890,19	16.430.797.088,63	825.881.045.951,19	5,49
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	1.047.604.817.836,77	69.388.743.177,30	1.841.706.367,94	1.115.151.854.646,13	6,45
5	Aset Tetap Lainnya	22.179.865.733,00	2.276.716.700,00	649.737.800,00	23.806.844.633,00	7,34
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.158.852.308,00	14.349.639.468,66	810.982.509,00	16.697.509.267,66	428,59
7	Akumulasi Penyusutan	(1.094.105.488.414,70)	(331.769.563.714,51)	(224.662.548.966,76)	(1.201.212.503.162,45)	9,79
Jumlah		1.394.553.672.606,05	(160.436.506.470,36)	(201.189.003.196,19)	1.435.306.169.331,88	2,92

Dalam laporan Neraca terdapat selisih antara Belanja Modal Aset Tetap dengan mutasi Aset Tetap. Selisih tersebut antara lain berasal dari pengadaan secara gabungan, pengukuran setelah perolehan, proses reklasifikasi, kapitalisasi, penghentian dan pelepasan, hibah, maupun koreksi aset tetap.

Mutasi Belanja Modal Aset Tetap pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2024 sebesar Rp144.760.748.226,32 sedangkan mutasi tambah saldo aset tetap sebelum dikurangi penyusutannya pada Neraca sebesar Rp147.859.511.473,58 sehingga terdapat selisih sebesar Rp3.098.763.247,26.



Uraianya sebagai berikut.

Tabel 5.196
Rincian Mutasi Aset Tetap

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Mutasi Aset Neraca	Belanja Modal	Selisih
1	Tanah	(114.400.000,00)	0,00	(114.400.000,00)
2	Peralatan dan Mesin	22.263.522.003,00	20.865.441.803,00	1.398.080.200,00
3	Gedung dan Bangunan	42.997.716.801,56	57.919.660.357,02	(14.921.943.555,46)
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	67.547.036.809,36	63.698.929.366,30	3.848.107.443,06
5	Aset Tetap Lainnya	1.626.978.900,00	2.276.716.700,00	(649.737.800,00)
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	13.538.656.959,66	0,00	13.538.656.959,66
Jumlah		147.859.511.473,58	144.760.748.226,32	3.098.763.247,26

Selisih tersebut di atas selanjutnya dijelaskan pada masing-masing catatan atas masing-masing akun aset tetap. Rincian dan mutasi Aset Tetap per SKPD disajikan pada **Lampiran 13**.

5.3.1.3.1 Tanah

31-Des-24	31-Des-23
<u>Rp150.728.071.996,00</u>	<u>Rp150.842.471.996,00</u>

Saldo aset tetap tanah pada tahun 2024 sebesar Rp150.728.071.996,00 bila dibandingkan dengan saldo aset tetap tanah tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp(114.400.000,00) atau (0,08)%. Penurunan tersebut merupakan hasil koreksi bertambah dan berkurang selama tahun 2024.

Tabel 5.197
Tanah

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
I	Saldo Awal 1 Januari 2024	150.842.471.996,00
II	Mutasi Tambah	
	Belanja Modal	0,00
	Mutasi Antar SKPD	0,00
	Hibah	0,00
	Reklasifikasi dari belanja barang dan	0,00
	Koreksi Saldo	0,00
	Jumlah Mutasi Tambah	0,00
III	Mutasi Kurang	
	Hibah	114.400.000,00
	Koreksi Saldo	0,00
	Mutasi Antar SKPD	0,00
	Jumlah Mutasi Kurang	114.400.000,00
IV	Saldo per 31 Desember 2024	150.728.071.996,00



Penjelasan mutasi aset tetap tanah tahun 2024 sebagai berikut.

- 1) Mutasi bertambah sebesar Rp0,00; dan
- 2) Mutasi berkurang sebesar Rp114.400.000,00 merupakan hibah tanah dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Badan Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Belu dengan Berita Acara Nomor BPKAD.030/01/I/2024 | Nomor PL.03.07.1.01.24.01 tanggal 24 Januari 2024.

Jika dibandingkan antara realisasi belanja modal tahun 2024 sebesar Rp0,00 (nihil) dan penurunan aset tetap tanah sebesar Rp(114.400.000,00) maka terdapat selisih Rp(114.400.000,00). Selisih tersebut bersumber dari mutasi pemberian hibah aset tetap tanah tahun 2024.

Terdapat aset tetap tanah yang dipinjam pakai oleh instansi lain. Adapun perjanjian pinjam pakai aset tanah/dan atau bangunan pemerintah adalah sebagai berikut.

- 1) Perjanjian pinjam pakai pemanfaatan tanah seluas 406.097 m² di Jl. Adisucipto Kelurahan Manumutin Kecamatan Atambua Barat antara Pemerintah Kabupaten Belu dengan Pengelola Bandar Udara A. A. Beretallo yaitu Perjanjian Pinjam Pakai Nomor Nomor BPKAD.028/04/XII/2017/UM.002/1039/XII/ABU/2017 pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diperbaharui terakhir dengan Perjanjian Pinjam Pakai Nomor BPKAD.03/000.2.3.2/BPKAD/III/2024 | Nomor /UM.002/274 /III/ABU/2024;
- 2) Tanah seluas 770m² dan bangunan seluas 210 m² yang dimanfaatkan oleh Sub Detasemen 2 Den A Pelopor Atambua berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai Nomor BPKAD.02/000.2.3/BPKAD/IV/2024 | Nomor B/15/03/2024 Ki 3 Yon A POR;
- 3) Sebagian tanah dan bangunan berupa ruangan pada kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BP4D), yang digunakan sementara untuk kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Belu. Pinjam pakai tersebut telah diikat dengan perjanjian



Nomor BPKAD.05/000.2.3.2/BPKAD/PKS/IV/2024 | Nomor B/41/IV/KA/KP/2014/BNNK Belu tahun 2014;

- 4) Tanah dan bangunan eks Kantor Dinas Pendidikan yang sementara ini dimanfaatkan oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Belu. Atas pemanfaatan tersebut telah ditandatangani perjanjian pinjam pakai Nomor BPKAD.06/000.2.3/BPKAD/PKS/IV/2024.a/XII/201 | Nomor 127/RT.01/K.NT-02/04/2024;
- 5) Tanah dan bangunan gedung Dinas Kesehatan yang dimanfaatkan oleh Palang Merah Indonesia sesuai dengan perjanjian pinjam pakai dengan Nomor 07/000/2.3.2/BPKAD/PKS/V/2024 | Nomor 016/PKSM/03.03.05/V/ 2024; dan
- 6) Tanah seluas 2.000 m² dan bangunan seluas 384 m² di Jl. Hayam Wuruk Kelurahan Beirafu Kec. Atambua Barat yang dimanfaatkan oleh Basarnas Kabupaten Belu sesuai perjanjian Nomor BPKAD/030/01/I/2024 | Nomor PKS01/HK.03/ ISAR/2024.

Sampai dengan 31 Desember 2024, jumlah aset pemerintah Kabupaten Belu yang telah memiliki bukti kepemilikan sebanyak 260 bidang/persil. Terdapat penambahan sertifikat baru sebanyak 6 buah dan pengurangan sebesar 4 buah yakni hibah kepada PLBN sebanyak 3 buah sertifikat dan hibah kepada Balai POM Kabupaten Belu sebanyak 1 buah. Sementara yang belum bersertifikat sebanyak 151 dan tanah di bawah jalan yang belum bersertifikat sebanyak 249 bidang. Tanah-tanah tersebut terus diupayakan pengurusannya dan sebagian dalam proses pengurusan administrasi sebagai persyaratan penerbitan sertifikat.

Daftar aset tetap tanah yang belum bersertifikat disajikan pada **Lampiran 14-1 sd 14-2.**

Terdapat Aset Tetap Tanah Dinas PUPR sebesar Rp12.000.000,00 yang tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) di atas Rumah Dinas Direksi beralamat di Jl. Raya Atambua-Kupang, Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan yang tercatat milik Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksana Jalan sesuai



Nomor Ijin Bangunan dan Nomor Peta Bidang Tanah yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Belu. Atas aset tanah tersebut masih dalam proses koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksana Jalan untuk mengetahui status kepemilikan yang sebenarnya.

Dari sisi pengamanan aset, terdapat 11 bidang tanah seluas 86.337 m² yang belum dilengkapi dengan pengamanan fisik berupa papan tanda kepemilikan pemerintah daerah. Rincian aset tanah yang belum dilengkapi papan tanda kepemilikan adalah sebagai berikut.

Tabel 5.198**Rincian Aset Tanah**

NO.	NAMA SKPD	ASET TANAH	LOKASI	UKURAN (m ²)
1	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Belu	Tanah Rumah Pemotongan Hewan	Kelurahan Tenukiik	4.000
		Tanah Klinik Hewan	Desa Manleten	10.000
		Tanah Klinik Hewan	Desa Tohe	315
		Tanah Rumah Dinas	Desa Dirun	900
2	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belu	Tanah Kantor UPP Jambu Mente III	Kelurahan Manuaman	2.750
		Tanah Rumah Kelapa Jambu Mente	Kelurahan Tulamalae	431
		Tanah Gudang Bibit Benih (Kapok)	Desa Rinbesi	396
		Tanah Kompleks Karantina	Desa Jenilu	26.465
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu	Tanah SDN Wehasan		11.080
		Tanah SMPN Satap II		10.000
		Tanah SMPN Satap Kewar	Desa Lamaknen	20.000
Jumlah				86.337

5.3.1.3.2 Peralatan dan**Mesin****31-Des-24****Rp504.253.346.000,35****31-Des-23****Rp481.989.823.997,35**

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada tahun 2024 sebesar Rp504.253.346.000,35. Bila dibandingkan dengan saldo aset tetap peralatan dan mesin tahun 2023 sebesar Rp481.989.823.997,35, terjadi kenaikan sebesar Rp22.263.522.003,00 atau 4,62%.



Adapun rinciannya adalah sebagai berikut.

Tabel 5.199**Mutasi Peralatan dan Mesin**

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
I	Saldo Awal 1 Januari 2024	481.989.823.997,35
II	Mutasi Tambah	
	Belanja Modal	20.865.441.803,00
	Reklasifikasi dari aset lainnya	0,00
	Aset dari hutang	44.622.000,00
	Reklasifikasi antar aset tetap	560.280.132,00
	Koreksi saldo awal	0,00
	Hibah	3.754.000.073,00
	Mutasi Antar SKPD	665.100.000,00
	Jumlah Mutasi Tambah	25.889.444.008,00
III	Mutasi Kurang	
	Reklas antar aset	1.753.671.330,00
	Reklasifikasi ke aset lain-lain	1.194.746.375,00
	Ekstrakomptabel	12.404.300,00
	Hapus	
	Hibah	
	Mutasi Antar SKPD	665.100.000,00
	Jumlah Mutasi Kurang	3.625.922.005,00
IV	Saldo per 31 Desember 2024	504.253.346.000,35

Penjelasan mutasi aset tetap peralatan dan mesin tahun 2024 sebagai berikut.

- 1) Mutasi bertambah sebesar Rp25.889.444.008,00 terdiri dari:
 - a) Belanja modal
Belanja modal peralatan dan mesin tahun 2024 sebesar Rp20.865.441.803,00.
 - b) Aset yang bersumber dari utang
Aset yang bersumber dari utang asal tahun 2024 sebesar Rp44.622.000,00 yakni pada Dinas Kesehatan atas nama CV Disen Konsultan, atas belanja jasa konsultan pengawasan pembangunan sumur bor - pembelian peralatan sumur bor).
 - c) Reklasifikasi antar aset
Reklasifikasi antar aset tahun 2024 Rp560.280.132,00 terdapat pada:
 - (1) Reklasifikasi dari Bangunan Gedung ke peralatan mesin Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp515.617.932,00; dan
 - (2) Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp44.662.200,00 atas Sumur Air Tanah untuk Dusun Umabeidua Desa Mandeu.



d) Hibah peralatan dan mesin tahun 2024 sebesar Rp3.754.000.073,00 yang terdiri dari:

- (1) Hibah dari *Dropping* Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Nomor KN.01.08/D.V/2024 tanggal 15 Januari 2024 senilai Rp1.999.493.073,00;
- (2) Hibah dari Kementerian Badan Nasional Penanggulangan Bencana senilai Rp495.200.000,00; dan
- (3) Hibah 3 unit tractor roda 4 dari Kementerian Pertanian Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sesuai lampiran Naskah Hibah BMN dan BART No.LPPD-002A/BAP-STHP/TR4/40HP-I/2024 tanggal 6 Mei 2024 Rp1.259.307.000,00.

e) Mutasi antar SKPD

Mutasi aset tetap peralatan dan mesin tahun 2024 sebesar Rp665.100.000,00 dengan rincian:

- (1) Mutasi sebesar Rp193.900.000,00 dari BPKAD ke Bagian Administrasi Pembangunan;
- (2) Mutasi sebesar Rp193.900.000,00 dari BPKAD ke Bagian Umum; dan
- (3) Mutasi sebesar Rp277.300.000,00 dari Bagian Administrasi Pembangunan.

2) Mutasi berkurang sebesar Rp3.625.922.005,00 terdiri dari:

a) Reklasifikasi antar aset

Reklasifikasi antar aset sebesar Rp1.753.671.330,00 yang terdapat pada:

- (1) Reklasifikasi ke aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp1.427.039.700,00 pada Dinas Kesehatan; dan
- (2) Reklasifikasi dari peralatan dan mesin ke JIJ sebesar Rp326.631.630,00 pada Dinas PUPR.

b) Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain

Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain sebesar Rp1.194.746.375,00 yang terdapat pada:

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB sebesar Rp594.684.875,00;
- (2) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Rp304.184.000,00;



(3) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Rp125.292.500,00;

(4) BPKAD sebesar Rp32.635.000,00; dan

(5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Rp137.950.000,00.

c) Ekstrakomptabel

Aset Tetap Peralatan dan Mesin bersumber dari Belanja Modal tahun 2024 di bawah nilai kapitalisasi sebesar Rp12.404.300,00 yang dicatat secara ekstrakomptabel terdapat pada:

(1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Rp699.300,00;

(2) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Rp6.575.000,00; dan

(3) Bagian Umum Rp5.130.000,00.

d) Mutasi Antar SKPD

Mutasi aset tetap peralatan dan mesin antar SKPD tahun 2024 sebesar Rp665.100.000,00 dengan rincian:

(1) Mutasi sebesar Rp193.900.000,00 dari BPKAD ke Bagian Administrasi Pembangunan;

(2) Mutasi sebesar Rp193.900.000,00 dari BPKAD ke Bagian Umum; dan

(3) Mutasi sebesar Rp277.300.000,00 dari Bagian Administrasi Pembangunan ke BPKAD.

Jika dibandingkan antara realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2024 pada laporan realisasi anggaran (LRA) sebesar Rp20.865.441.803,00 dengan penambahan saldo peralatan dan mesin pada Neraca tahun 2024 sebesar Rp22.263.522.003,00 maka terdapat selisih sebesar Rp1.398.080.200,00. Selisih tersebut berasal dari:

1) Reklasifikasi dari aset tetap gedung dan bangunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang berasal dari belanja modal 2024 sebesar Rp515.617.932,00;

2) Reklasifikasi dari aset tetap konstruksi dalam pengerjaan asal tahun 2023 pada Dinas PUPR sebesar Rp44.662.200,00;

3) Penerimaan hibah aset tetap peralatan mesin sebesar Rp3.754.000.073,00;

4) Penambahan aset tetap peralatan dan mesin yang bersumber dari utang belanja asal tahun 2024 sebesar Rp44.622.000,00;

5) Reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp(1.753.671.330,00);



6) Reklasifikasi ke aset lain-lain sebesar Rp(1.194.746.375,00);
dan

7) Belanja Modal 2024 yang dicatat secara ekstrakomptabel
sebesar Rp(12.404.300,00).

Pada tahun 2024 masih terdapat aset peralatan dan mesin berupa kendaraan dinas yang belum dilengkapi dengan bukti kepemilikan/BPKB dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.200

Daftar Kendaraan yang Belum dilengkapi BPKB per 31 Desember 2024

No. Urut Barang	Nama / Jenis Barang	Alamat Lokasi	Volume/ Satuan	Merk	Buatan	Model/ Tipe	Tahun perolehan	Kondisi	Nilai per 31-Des-2024 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Motor Puskesmas Keliling								
01	DH-2713-WR / Sepeda Motor MH1JBK126RK040377 / JBK1E2037909	Pusk. Haekesak	1	Honda	DAK 2024	Revo Vit	2024	Baik	35.700.000,00
02	DH-2703-WR / Sepeda Motor MH1JBK12XRK040379 / JBK1E2037896	Pusk. Atapupu	1	Honda	DAK 2024	Revo Vit	2024	Baik	35.700.000,00
03	DH-2701-WR / Sepeda Motor MH1JBK12XRK037241 / JBK1E2034937	Pusk. Laktutus	1	Honda	DAK 2024	Revo Vit	2024	Baik	35.700.000,00
04	DH-2704-WR / Sepeda Motor MH1JBK120RK040083 / JBK1E2037812	Pusk. Aululik	1	Honda	DAK 2024	Revo Vit	2024	Baik	35.700.000,00
05	DH-2705-WR / Sepeda Motor MH1JBK121RK040917 / JBK1E2038514	Pusk. Haliwen	1	Honda	DAK 2024	Revo Vit	2024	Baik	35.700.000,00
06	DH-2706-WR / Sepeda Motor MH1JBK121RK037242 / JBK1E2034933	Pusk. Webora	1	Honda	DAK 2024	Revo Vit	2024	Baik	35.700.000,00
07	DH-2714-WR / Sepeda Motor MH1JBK127RK040081 / JBK1E2037808	Pusk. Weluli	1	Honda	DAK 2024	Revo Vit	2024	Baik	35.700.000,00
08	DH-2707-WR / Sepeda Motor MH1JBK122RK037234 / JBK1E2034871	Pusk. Kota	1	Honda	DAK 2024	Revo Vit	2024	Baik	35.700.000,00
09	DH-2717-WR / Sepeda Motor /MH1JBK128RK04090 1 / JBK1E2038555	Dinkes	1	Honda	DAK 2024	Revo Vit	2024	Baik	35.700.000,00
10	DH-2710-WR / Sepeda Motor MH1JBK124RK040894 / JBK1E2038524	Pusk. Umanen	1	Honda	DAK 2024	Revo Vit	2024	Baik	35.700.000,00
11	DH-2709-WR / Sepeda Motor MH1JBK124RK037235 / JBK1E2034945	Pusk. Rafae	1	Honda	DAK 2024	Revo Vit	2024	Baik	35.700.000,00
12	DH-2716-WR / Sepeda Motor MH1JBK127RK040386 / JBK1E2037912	Pusk. Halilulik	1	Honda	DAK 2024	Revo Vit	2024	Baik	35.700.000,00
13	DH-2715-WR / Sepeda Motor MH1JBK127RK040078 / JBK1E2037815	Pusk. Wedomu	1	Honda	DAK 2024	Revo Vit	2024	Baik	35.700.000,00
14	DH-2708-WR / Sepeda Motor MH1JBK124RK040393 / JBK1E2037882	Pusk. Dilumil	1	Honda	DAK 2024	Revo Vit	2024	Baik	35.700.000,00
15	DH-2712-WR / Sepeda Motor MH1JBK126RK040914 / JBK1E2038513	Pusk. Atsel	1	Honda	DAK 2024	Revo Vit	2024	Baik	35.700.000,00
16	DH-2702-WR / Sepeda Motor MH1JBK12XRK040396 / JBK1E2037993	Pusk. Ainiba	1	Honda	DAK 2024	Revo Vit	2024	Baik	35.700.000,00
17	DH-2711-WR / Sepeda Motor MH1JBK125RK040886 / JBK1E2038548	Pusk. Silawan	1	Honda	DAK 2024	Revo Vit	2024	Baik	35.700.000,00
18	DH-2718-WR / Sepeda Motor MH1JBK129RK040874 / JBK1E2038545	Pusk. Nualain	1	Honda	DAK 2024	Revo Vit	2024	Baik	35.700.000,00
	Pengadaan Ambulance								

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No. Urut Barang	Nama / Jenis Barang	Alamat Lokasi	Volume/ Satuan	Merk	Buatan	Model/ Tipe	Tahun perolehan	Kondisi	Nilai per 31-Des-2024 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Mobil Ambulans DH - 1132 - WR / MHFJW8EM8R241412 8 / 1TRB226065	Pusk. Atapupu	1	Toyota	DAK 2024	Kijang Inova 2.0 G M/T	2024	Baik	546.700.000,00
	Jumlah		19						1.189.300.000,00

Kendaraan tersebut belum dilengkapi dengan bukti kepemilikan karena pengadaan dilakukan di bulan Desember 2024 dan bukti kepemilikan (BPKB) baru akan diterbitkan setelah 3 (tiga) bulan pengadaan yakni di bulan Maret 2025.

Selain itu, pada tahun 2024 terdapat pinjam pakai kendaraan yaitu:

- (1) Kendaraan dinas operasional roda empat merek/type: Toyota/MAGA 10R-BRXMBD 2,0 CVT plat nomor DH 1134 WR yang dimanfaatkan oleh Kejaksaan Negeri Belu sesuai perjanjian nomor 21/000.1.7/BPKAD/PKS/ XII/2024, B-940/N.3.13/Cpl.2/7/2024; dan
- (2) 2 unit kendaraan operasional roda empat jenis nisan plat nomor B 9002 SWM dan jenis ford ranger plat nomor B 9878 HK yang dimanfaatkan oleh Perusahaan Daerah Belu Bhakti sesuai perjanjian Nomor BPKAD/030/18/XI/2023, 017/BB/XI/2023.

Pada tahun 2024 terdapat peralatan mesin dalam kondisi rusak berat, tidak diketahui keberadaannya, dan/atau hilang yang masih tercatat dalam aset tetap pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, DLHP, dan Puskesmas Silawan (Dinas Kesehatan) dan sampai dengan 31 Desember 2024 belum diterbitkan surat usulan ubah kondisi dari SKPD terkait sebesar Rp8.776.537.757,00. Rincian lebih lanjut aset peralatan mesin dalam kondisi rusak berat, tidak diketahui keberadaannya, dan/atau hilang yang masih tercatat dalam aset tetap diuraikan dalam **Lampiran 15**.

Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, terdapat 29 unit Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) yang telah dipinjam pakai oleh Masyarakat/Kelompok Tani melalui pemberian layanan Brigade Alsintan tanpa dipungut biaya berdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemkab Belu No. DPKP/521.1.21/03/V/2024 tanggal 3 Mei 2024 tentang Penetapan



Brigade Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) yang Bersumber dari Dana APBN dan APBD II di Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2024. Tujuan pemberian pinjam pakai ini untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional, panen, pasca panen dan Pengolahan hasil pertanian. Masyarakat/Kelompok Tani yang akan memanfaatkan layanan Brigade Alsintan, wajib memenuhi persyaratan administrasi maupun teknis sesuai SOP No. B/390/521/DPKP/V/2024 tanggal 21 Mei 2024. Daftar Alsintan yang telah dipinjam pakai oleh Kelompok tani dapat dilihat pada **Lampiran 16**.

Terdapat Aset Tetap Gedung dan Bangunan Rumah Dinas Direksi beralamat di Jl. Raya Atambua-Kupang, Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan pada Dinas PUPR sebesar Rp242.180.000,00 yang tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB), yang tercatat milik Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksana Jalan sesuai Nomor Ijin Bangunan dan Nomor Peta Bidang Tanah yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Belu, di mana Kementerian Pekerjaan Umum. Atas aset Rumah Dinas tersebut masih dalam proses koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksana Jalan untuk mengetahui status kepemilikan yang sebenarnya.

Atas aset-aset tersebut akan dilakukan penelusuran dan pelaporan kehilangan (jika diperlukan), serta penerbitan surat usulan ubah kondisi pada tahun 2025 untuk dapat diubah statusnya ke Aset Lain-lain - Aset Tetap Rusak Berat dan/atau dihapuskan.

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

31-Des-24	31-Des-23
<u>Rp825.881.045.951,19</u>	<u>Rp782.883.329.149,63</u>

Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada tahun 2024 sebesar Rp825.881.045.951,19, jika dibandingkan dengan saldo tahun 2023 maka terdapat kenaikan sebesar Rp42.997.716.801,56 atau 5,49%. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut.



Tabel 5.201

Gedung dan Bangunan

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal 1 Januari 2024	782.883.329.149,63
Mutasi Tambah	
Belanja Modal	57.919.660.357,02
Kapitalisasi KDP tahun 2023	624.086.354,00
Reklasifikasi dari barang dan jasa	251.917.275,00
Aset tetap yang bersumber dari utang	632.849.904,17
Mutasi antar SKPD	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	59.428.513.890,19
Mutasi Kurang	
Reklas antar aset	15.001.764.887,24
Reklasifikasi ke aset lain-lain	1.190.337.801,39
Reklasifikasi ke aset non lancar	0,00
Mutasi antar SKPD	0,00
Pelunasan hutang	238.694.400,00
Jumlah Mutasi Kurang	16.430.797.088,63
Saldo per 31 Desember 2024	825.881.045.951,19

Penjelasan mutasi aset tetap gedung dan bangunan tahun 2024 sebagai berikut.

1) Jumlah mutasi bertambah sebesar Rp59.428.513.890,19 terdiri dari:

a) Belanja Modal

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2024 Rp57.919.660.357,02;

b) Kapitalisasi KDP tahun 2023 pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp624.086.354,00;

c) Reklasifikasi dari belanja barang dan jasa BLUD sebesar Rp251.917.275,00; dan

d) Aset tetap gedung dan bangunan yang bersumber dari utang sebesar Rp632.849.904,17 yang terdapat pada:

(1) Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp245.641.404,17;

(2) Dinas Kesehatan sebesar Rp348.540.000,00; dan

(3) RSUD sebesar Rp38.668.500,00.

2) Jumlah mutasi berkurang sebesar Rp16.430.797.088,63 terdiri dari:

a) Reklasifikasi antar aset sebesar Rp15.001.764.887,24 dengan rincian sebagai berikut.

(1) Reklasifikasi aset tetap gedung dan bangunan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga ke KDP Rp50.923.079,00;



- (2) Reklasifikasi aset tetap gedung dan bangunan Dinas Kesehatan ke KDP Rp5.590.474.050,00
 - (3) Reklasifikasi aset tetap gedung dan bangunan RSUD ke KDP Rp1.900.446.300,00;
 - (4) Reklasifikasi aset tetap gedung dan bangunan DPMPSTP ke KDP Rp5.635.939.980,24;
 - (5) Reklasifikasi aset tetap gedung dan bangunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ke KDP Rp1.694.486.478,00; dan
 - (6) Reklasifikasi tetap gedung dan bangunan Bagian Umum Rp129.495.000,00 ke KDP.
- b) Reklasifikasi ke aset lain-lain Rp1.190.337.801,39 terdapat pada:
- (1) Dinas PMPSTP Rp354.715.000,00;
 - (2) Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Rp100.000.000,00;
 - (3) Dinas Kesehatan Rp282.711.000,00
 - (4) Kekurangan volume pekerjaan tahun 2024 pada Dinas Kesehatan Rp198.626.423,00
 - (5) Kekurangan volume pekerjaan tahun 2024 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Rp23.929.049,00
 - (6) Kekurangan volume pekerjaan tahun 2024 pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Rp33.443.154,08;
 - (7) Kekurangan volume pekerjaan tahun 2024 pada RSUD Rp93.814.270,31;
 - (8) Kelebihan pembayaran atas harga timpang pekerjaan tahun 2024 pada Dinas Kesehatan Rp62.163.439,00;
 - (9) Kelebihan pembayaran atas harga timpang pekerjaan tahun 2024 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Rp4.368.488,00;
 - (10) Jasa konsultan BLP tumpang tindih pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Rp14.624.250,00;
 - (11) Jasa konsultan BLP tumpang tindih pada RSUD Rp13.057.000,00;
 - (12) Jasa konsultan BLNP pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Rp2.692.778,00;
 - (13) Jasa konsultan BLNP pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Rp4.112.950,00; dan



(14) Jasa konsultan BLNP pada RSUD Rp2.080.000,00.

c) Pelunasan utang asal tahun 2023 pada DPMPSTP sebesar Rp238.494.400,00.

Jika dibandingkan dengan realisasi belanja modal gedung dan bangunan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2024 sebesar Rp57.919.660.357,02 sedangkan kenaikan saldo aset tetap gedung dan bangunan pada Neraca tahun 2024 sebesar Rp42.997.716.801,56 maka selisih sebesar Rp14.921.943.555,46. Selisih ini berasal dari:

- 1) Kapitalisasi KDP tahun 2023 Rp624.086.354,00 pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga;
- 2) Reklasifikasi dari belanja barang dan jasa RSUD Rp251.917.275,00;
- 3) Aset tetap yang bersumber dari utang Rp632.849.904,17;
- 4) Reklasifikasi antar aset Rp(15.001.764.887,24);
- 5) Reklasifikasi ke aset lain-lain Rp(1.190.337.801,39); dan
- 6) Pelunasan utang tahun 2023 Rp(238.694.400,00).

Selain itu terdapat aset tetap gedung dan bangunan yang dipinjam pakai pada tahun 2024 sebagai berikut.

- 1) Bangunan seluas 422 m² di jalan Moruk Pasunan yang dimanfaatkan oleh Pangkalan TNI AU sesuai perjanjian nomor BPKAD/030/19/XII/2023 | Nomor B/01/XII/2023;
- 2) Bangunan seluas 36 m² di Jalan Basuki Rahmat Kelurahan Atambua yang dimanfaatkan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur sesuai perjanjian Nomor 10/000.2.3.2/BPKAD/PKS/VIII/2024 | Nomor B/475/VIII/LOG.1/2024/RES Belu;
- 3) Bangunan seluar 270 m² di Jalan Suprpto,SH, Tubakioan yang dimanfaatkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu sesuai perjanjian Nomor 14/000.2.3.2/BPKAD/PKS/VIII/2024 | Nomor 242/RT.01/K.NT-02/08/2024;
- 4) Sebagian tanah dan bangunan berupa ruangan pada kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BP4D), yang digunakan sementara untuk kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Belu. Pinjam pakai tersebut telah diikat dengan perjanjian



Nomor BPKAD.05/000.2.3.2/BPKAD/PKS/ IV/2024, Nomor B/41/IV/KA/KP/2014/BNNK Belu;

- 5) Tanah dan bangunan eks Kantor Dinas Pendidikan yang sementara ini dimanfaatkan oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Belu. Atas pemanfaatan tersebut telah ditandatangani perjanjian pinjam pakai Nomor BPKAD.06/000.2.3/BPKAD/PKS/IV/2024.a/XII/201 | Nomor 127/RT.01/K.NT-02/04/2024; dan
- 6) Tanah dan bangunan gedung Dinas Kesehatan yang dimanfaatkan oleh Palang Merah Indonesia (PMI) sesuai dengan perjanjian pinjam pakai dengan nomor 07/000/2.3.2/BPKAD/PKS/V/2024 | Nomor 016/PKSM/03.03.05/V/ 2024.

5.3.1.3.4 Jalan, Jaringan dan Irigasi

31-Des-24	31-Des-23
<u>Rp1.115.151.854.646,13</u>	<u>Rp1.047.604.817.836,77</u>

Saldo Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi pada tahun 2024 sebesar Rp1.115.151.854.646,13. Jika dibandingkan dengan saldo aset tetap jalan, irigasi dan jaringan tahun 2023 sebesar Rp1.047.604.817.836,77, maka terdapat kenaikan sebesar Rp67.547.036.809,36 atau sebesar 6,45%.

Tabel 5.202

Jalan, Jaringan dan Irigasi

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
I	Saldo Awal 1 Januari 2024	1.047.604.817.836,77
II	Mutasi Tambah	
	Belanja Modal	63.698.929.366,30
	Reklas antar aset tetap	2.932.539.876,00
	Hibah	2.557.466.165,00
	Reklasifikasi dari barang dan jasa	199.807.770,00
	Mutasi antar SKPD	0,00
	Jumlah Mutasi Tambah	69.388.743.177,30
III	Mutasi Kurang	
	Koreksi ke beban	0,00
	Reklas antar aset	379.752.300,00
	Hapus	1.024.320.000,00
	Reklas ke aset lainnya	437.634.067,94
	Mutasi antar SKPD	0,00
	Koreksi ke aset lain-lain kurang volume	0,00
	Jumlah Mutasi Kurang	1.841.706.367,94
IV	Saldo per 31 Desember 2024	1.115.151.854.646,13

Penjelasan mutasi aset tetap jalan, irigasi dan jaringan tahun 2024 sebagai berikut.



- a. Mutasi bertambah sebesar Rp69.388.743.177,30 yang terdiri dari:
- 1) Belanja modal tahun 2024 Rp63.698.929.366,30 yang terdapat pada:
 - a) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp62.218.124.040,30;
 - b) Dinas Kesehatan Rp290.000.000,00;
 - c) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Rp123.080.680,00;
 - d) Kecamatan Kota Atambua Rp100.560.000,00;
 - e) Kecamatan Atambua Barat Rp471.754.500,00; dan
 - f) Kecamatan Atambua Selatan Rp495.410.146,00.
 - 2) Reklasifikasi antar aset tetap tahun 2024 sebesar Rp2.932.539.876,00 yang terdapat pada:
 - a) Dinas Kesehatan Rp1.427.039.700,00 yaitu reklas dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin;
 - b) Dinas PUPR Rp326.631.630,00 yaitu reklas dari reklas dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin; dan
 - c) Dinas Pariwisata dan kebudayaan Rp1.178.868.546,00 yaitu reklas dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan.
 - 3) Penerimaan hibah Penerangan Jalan Umum (PJU) sebesar Rp2.557.466.165,00 dari Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan sesuai Naskah Hibah Nomor 133/NH/BN.07/KPB/2024 dan BAST Nomor 133/BAST/BN.07/KPB/2024; dan
 - 4) Atribusi dari Belanja Barang dan Jasa tahun 2024 sebesar Rp199.807.770,00.
- b. Mutasi berkurang sebesar Rp1.841.706.367,94 terdapat pada:
- 1) Reklasifikasi antar aset Rp379.752.300,00 yang terdapat pada Dinas PUPR yaitu reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan;
 - 2) Penghapusan aset tetap Rp1.024.320.000,00 yakni koreksi aset tetap jaringan air bersih Klatun yang telah dihibahkan ke Kabupaten Malaka pada tahun 2019 sesuai BAST BPKAD.030/23/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 namun harga perolehan masih tercatat pada Jalan, Irigasi, dan Jaringan; dan



3) Reklasifikasi ke aset lainnya Rp437.634.067,94 terdapat pada:

- a) Dinas PUPR atas kekurangan volume pekerjaan tahun 2024 Rp355.777.150,50;
- b) Dinas PUPR atas kelebihan pembayaran harga timpang Rp5.157.807,44;
- c) Dinas PUPR atas jasa konsultan BLP tumpang tindih Rp64.661.610,00; dan
- d) Dinas PUPR atas jasa konsultan personil tidak terlibat Rp12.037.500,00

Jika dibandingkan dengan realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada laporan realisasi anggaran (LRA) tahun 2024 sebesar Rp63.698.929.366,30 dengan kenaikan saldo aset tetap jalan, irigasi dan jaringan pada neraca tahun 2024 sebesar Rp67.547.036.809,36 maka terdapat selisih sebesar Rp3.848.107.443,06 yang berasal dari:

- 1) Reklasifikasi antar aset tetap sebesar Rp2.932.539.876,00;
- 2) Penerimaan hibah aset tetap PJU sebesar Rp2.557.466.165,00;
- 3) Atribusi dari barang dan jasa sebesar Rp199.807.770,00;
- 4) Reklasifikasi ke KDP sebesar Rp (379.752.300,00);
- 5) Penghapusan atas aset tetap JIJ yang telah dihibahkan ke Kabupaten Malaka tahun 2019 Rp(1.024.320.000,00); dan
- 6) Reklasifikasi ke aset lainnya atas temuan pemeriksaan LKPD tahun 2024 sebesar Rp(437.634.067,94).

Selain informasi di atas, terdapat pula 5 unit aset tetap jalan irigasi dan jaringan yang belum dikapitalisasi ke aset induknya sebesar Rp284.000.000,00 yang diuraikan lebih lanjut dalam **Lampiran 17**.

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya	31-Des-24	31-Des-23
	<u>Rp23.806.844.633,00</u>	<u>Rp22.179.865.733,00</u>

Saldo Aset Tetap Lainnya tahun 2024 sebesar Rp23.806.844.633,00. Jika dibandingkan dengan saldo aset tetap lainnya tahun 2023, maka aset tetap lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp1.626.978.900,00 atau 7,34%.



Tabel 5.203

Aset Tetap Lainnya

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
I	Saldo Awal 1 Januari 2024	22.179.865.733,00
II	Mutasi Tambah	
	Belanja Modal	2.276.716.700,00
	Reklasifikasi antar aset	-
	Mutasi aset antar SKPD	-
	Jumlah Mutasi Tambah	2.276.716.700,00
III	Mutasi Kurang	
	Reklasifikasi antar aset	-
	Reklasifikasi ke aset lain-lain	49.000.000,00
	Ekstrakomptabel	600.737.800,00
	Mutasi aset antar SKPD	-
	Jumlah Mutasi Kurang	649.737.800,00
IV	Saldo per 31 Desember 2024	23.806.844.633,00

Penjelasan mutasi aset tetap lainnya tahun 2024 sebagai berikut.

- a. Mutasi bertambah sebesar Rp2.276.716.700,00 sebagai berikut.
 - 1) Belanja Modal tahun 2024 sebesar Rp2.154.816.700,00 yang terdapat pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga; dan
 - 2) Belanja modal sebesar Rp121.900.000,00 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- b. Mutasi berkurang sebesar Rp649.737.800,00 sebagai berikut.
 - 1) Reklasifikasi aset tetap lainnya rusak berat pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp49.000.000,00; dan
 - 2) Reklasifikasi aset tetap lainnya di bawah nilai kapitalisasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp92.640.000,00 dan pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Rp508.097.800,00.

Mutasi penambahan saldo aset tetap lainnya pada Neraca tahun 2024 sebesar Rp1.626.978.900,00 sedangkan belanja modal aset tetap lainnya tahun 2024 sebesar Rp2.276.716.700,00. Terdapat selisih sebesar Rp(649.737.800,00) yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Aset tetap di bawah nilai kapitalisasi sebesar Rp(600.737.800,00); dan
- 2) Reklasifikasi aset tetap lainnya rusak berat ke aset lainnya Rp(49.000.000,00).

**5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan**

31-Des-24	31-Des-23
<u>Rp16.697.509.267,66</u>	<u>Rp3.158.852.308,00</u>

Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tahun 2024 sebesar Rp16.697.509.267,66. Saldo ini mengalami peningkatan sebesar Rp13.538.656.959,66 atau 428,59% jika dibandingkan dengan saldo tahun 2023. Uraianannya sebagai berikut.

Tabel 5.204**Konstruksi Dalam Pengerjaan**

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
I	Saldo Awal 1 Januari 2024	3.158.852.308,00
II	Mutasi Tambah	
	Belanja Modal	13.687.030.709,24
	Atribusi dari Belanja Barang dan Jasa	208.236.000,00
	Bersumber dari Utang	454.372.759,42
	Mutasi aset antar SKPD	-
	Jumlah Mutasi Tambah	14.349.639.468,66
III	Mutasi Kurang	
	Reklasifikasi antar aset tetap	668.748.554,00
	Reklasifikasi ke aset lain-lain	142.233.955,00
	Mutasi aset antar SKPD	-
	Jumlah Mutasi Kurang	810.982.509,00
IV	Saldo per 31 Desember 2024	16.697.509.267,66

Penjelasan mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2024 sebagai berikut.

a. Mutasi bertambah sebesar Rp14.349.639.468,66 sebagai berikut.

- 1) KDP 2024 yang bersumber dari belanja modal Rp13.687.030.709,24 yang terdapat pada:
 - a) Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Rp50.923.079,00;
 - b) Dinas Kesehatan Rp5.590.474.050,00;
 - c) RSUD Rp1.900.446.300,00,00;
 - d) Dinas PMPST Rp5.635.939.980,24;
 - e) Bagian Umum Rp129.495.000,00; dan
 - f) Dinas PUPR Rp379.752.300,00.
- 2) Reklasifikasi dari beban barang dan jasa RSUD Rp208.236.000,00;
- 3) Utang Rp454.372.759,42 yang terdiri dari:
 - a) Utang atas bangunan gedung kesehatan Rp145.192.500,00; dan
 - b) Utang atas bangunan gedung kantor DPMPSTSP Rp309.180.259,42.



b. Mutasi berkurang sebesar Rp810.982.509,00 sebagai berikut.

- 1) Kapitalisasi KDP tahun 2023 pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Rp624.086.354,00;
- 2) Kapitalisasi KDP tahun 2023 pada Dinas PUPR Rp44.662.200,00; dan
- 3) Reklasifikasi ke aset lain-lain Rp142.233.955,00 terdiri dari:
 - a) Kekurangan volume pekerjaan tahun 2024 pada Dinas PMPTSP Rp53.066.479,00;
 - b) Kekurangan volume pekerjaan tahun 2024 pada RSUD Atambua Rp49.885.451,00;
 - c) Jasa konsultan BLNP pada RSUD Atambua Rp1.323.500,00; dan
 - d) Jasa konsultan personil tidak terlibat pekerjaan tahun 2024 pada Dinas PMPTSP Rp37.958.525,00.

Saldo KDP hasil belanja modal tahun 2024 sebesar Rp13.687.030.709,24. Sedangkan peningkatan saldo KDP tahun 2024 pada Neraca sebesar Rp13.538.656.959,66. terdapat selisih sebesar Rp(148.373.749,58). Selisih tersebut berasal dari:

- 1) Reklasifikasi dari beban barang dan jasa pada RSUD sebesar Rp208.236.000,00;
- 2) Utang KDP tahun 2024 Rp454.372.759,42;
- 3) Kapitalisasi KDP tahun 2023 Rp(668.748.554,00); dan
- 4) Reklasifikasi ke aset lain-lain atas hasil pemeriksaan LKPD tahun 2024 Rp(142.233.955,00).

Rincian KDP per SKPD disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.205

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Uraian	Saldo Awal 2024 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir 2024 (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.767.849.200,00	379.752.300,00	44.662.200,00	2.102.939.300,00
	- Jasa penilaian pembebasan tanah bawah jalan (jln Adisucipto - thn 2019)	272.700.000,00	0,00	0,00	272.700.000,00
	- perencanaan teknis jalan kabupaten 2020 Sp.Nenuk-Tala (SILPA -2019)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- perencanaan teknis irigasi 2020 DI. Maudemu (DAU)- 2019	63.900.000,00	0,00	0,00	63.900.000,00
	- Perencanaan teknis jembatan ta.2021 (DAU)	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00
	- Perencanaan teknis rehabilitasi jembatan ta.2021	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00
	- Perencanaan teknis jembatan pedesaan ta.2021	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00
	- Perencanaan rehabilitasi jalan ta.2021	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo Awal 2024 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir 2024 (Rp)
	- Penyusunan rencana induk drainase kota Atambua	840.587.000,00	0,00	0,00	840.587.000,00
	- Perencanaan teknis embung	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
	- Perencanaan database jembatan	51.000.000,00	0,00	0,00	51.000.000,00
	- Perencanaan teknis embung/waduk	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00
	- KDP Tahun 2023	44.662.200,00	0,00	44.662.200,00	0,00
	- Perencanaan jalan Kabupaten paket I, II, III, IV (2024)	0,00	379.752.300,00	0,00	379.752.300,00
2	Dinas Pemuda dan Olahraga	90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00
	- Jasa konsultan perencanaan rehap lapangan umum simpang lima (2020)	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00
	- Jasa konsultan perencanaan rehap lapangan dan stadion haliwen (2020)	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
3	Dinas Pariwisata	66.440.000,00	0,00	0,00	66.440.000,00
	- Konsultan perencanaan pembangunan homestay dan rest area DTW Fulan Fehan - (2020)	66.440.000,00	0,00	0,00	66.440.000,00
4	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	196.636.833,00	0,00	0,00	196.636.833,00
	- Perencanaan gedung puskesmas (2022)	196.636.833,00	0,00	0,00	196.636.833,00
5	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	166.395.000,00	0,00	0,00	166.395.000,00
	- Perencanaan bangunan terbuka lain-lain (kanopi pasar baru Atambua)- (2020)	15.130.000,00	0,00	0,00	15.130.000,00
	- Perencanaan bangunan terbuka lain-lain (perencanaan pasar) - (2021))	151.265.000,00	0,00	0,00	151.265.000,00
6	Bagian Umum	0,00	129.495.000,00	0,00	129.495.000,00
	- Perencanaan rumah jabatan Sekda (2024)	0,00	99.500.000,00	0,00	99.500.000,00
	- Perencanaan rumah halaman kantor Bupati (2024)	0,00	29.995.000,00	0,00	29.995.000,00
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	298.368.000,00	5.945.120.239,66	91.025.004,00	6.152.463.235,66
	- Konsultan perencanaan bangunan gedung kantor (2023)	298.368.000,00	0,00	37.958.525,00	260.409.475,00
	- Pekerjaan fisik gedung kantor Dinas Perijinan (2024)	0,00	5.945.120.239,66	53.066.479,00	5.892.053.760,66
8	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	573.163.275,00	50.923.079,00	624.086.354,00	0,00
	KDP pembangunan ruang kelas SMP Halibete	573.163.275,00	50.923.079,00	624.086.354,00	0,00
9	Dinas Kesehatan	0,00	5.735.666.550,00	0,00	5.735.666.550,00
	- Pekerjaan fisik gedung Puskesmas Atapupu (2024)	0,00	5.735.666.550,00	0,00	5.735.666.550,00
10	RSUD	0,00	2.108.682.300,00	51.208.951,00	2.057.473.349,00
	- Rehab penambahan ruang cathlab (2024)	0,00	1.784.700.000,00	49.885.451,00	1.734.814.549,00
	- Konsultan perencanaan (2024)	0,00	208.236.000,00	0,00	208.236.000,00
	- Konsultan pengawasan (2024)	0,00	77.077.800,00	1.323.500,00	75.754.300,00



No	Uraian	Saldo Awal 2024 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir 2024 (Rp)
	- Utang atas pekerjaan fisik (2024)	0,00	38.668.500,00	0,00	38.668.500,00
	Jumlah	3.158.852.308,00	14.349.639.468,66	810.982.509,00	16.697.509.267,66

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

31-Des-24	31-Des-23
<u>Rp(1.201.212.503.162,45)</u>	<u>Rp(1.094.105.488.414,70)</u>

Saldo akumulasi penyusutan tahun 2024 Rp (1.201.212.503.162,45) atau naik sebesar (9,79)% dari saldo akumulasi penyusutan tahun 2023.

Mutasi akumulasi penyusutan aset tetap tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.206

Akumulasi Penyusutan

No	Uraian	Saldo Awal 2024 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir 2024 (Rp)	%
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)		
1	Peralatan dan Mesin	(409.292.438.357,56)	(42.309.376.373,92)	(9.795.124.904,34)	(441.806.689.827,14)	7,94
2	Gedung dan Bangunan	(144.006.914.981,03)	(35.588.625.842,75)	(22.245.082.190,27)	(157.350.458.633,51)	9,27
3	Jalan Irigasi dan Jaringan	(540.806.135.076,11)	(253.871.561.497,84)	(192.622.341.872,15)	(602.055.354.701,80)	11,33
	Jumlah	(1.094.105.488.414,70)	(331.769.563.714,51)	(224.662.548.966,76)	(1.201.212.503.162,45)	9,79

5.3.1.3.7.1 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Saldo akhir akumulasi penyusutan peralatan dan mesin tahun 2024 sebesar Rp (441.806.689.827,14).

Mutasi bertambah akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp (42.309.376.373,92) terdiri dari beban penyusutan peralatan dan mesin tahun berjalan Rp(38.917.593.027,77) dan koreksi kurang catat saldo akumulasi penyusutan tahun 2023 Rp(3.391.783.346,15). Sedangkan mutasi berkurang akumulasi penyusutan sebesar Rp(9.795.124.904,34) merupakan koreksi lebih catat atas saldo awal akumulasi penyusutan peralatan dan mesin tahun sebelumnya.

5.3.1.3.7.2 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Saldo akumulasi penyusutan Gedung dan bangunan tahun 2024 sebesar Rp(157.350.458.633,51). Pada tahun 2024 terdapat mutasi bertambah sebesar Rp(35.588.625.842,75) yang terdiri dari beban tahun berjalan Rp(22.188.250.071,27) dan koreksi kurang catat saldo akumulasi penyusutan tahun sebelumnya Rp(13.400.375.771,48). Sedangkan mutasi berkurang sebesar Rp(22.245.082.190,27) merupakan



koreksi lebih catat atas saldo awal akumulasi penyusutan gedung dan bangunan tahun sebelumnya.

5.3.1.3.7.3 Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo akumulasi penyusutan jalan, irigasi dan jaringan tahun 2023 sebesar Rp(602.055.354.701,80). Selama tahun 2024 terdapat penambahan akumulasi penyusutan jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp(253.871.561.497,84) yang terdiri dari beban penyusutan tahun berjalan Rp(76.179.787.958,71) dan koreksi kurang catat akumulasi penyusutan tahun sebelumnya Rp(177.691.773.539,13). Pengurangan akumulasi penyusutan sebesar Rp(192.622.341.872,15) merupakan koreksi lebih catat atas akumulasi penyusutan jalan, irigasi dan jaringan tahun sebelumnya.

Akumulasi penyusutan per SKPD disajikan pada **Lampiran 18-1 s.d. 18-3**.

5.3.1.4 PROPERTI	31-Des-24	31-Des-23
INVESTASI	<u>Rp28.598.400.697,05</u>	<u>Rp27.939.053.513,82</u>

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau meningkatkan nilai aset atau keduanya. Pada tahun 2024, properti investasi pada Pemerintah Kabupaten Belu sebesar Rp28.598.400.697,05 atau naik sebesar 2,36% jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp27.939.053.513,82. Properti investasi pada Pemkab Belu berupa aset gedung dan bangunan yang disewakan dan menghasilkan pendapatan berupa retribusi daerah. Rincian mutasinya sebagai berikut.

Tabel 5.207
Properti Investasi

No.	Uraian	Saldo Awal 2024 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir 2024 (Rp)	%
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)		
1	Properti investasi - Gedung dan Bangunan	36.500.199.797,00	0,00	0,00	36.500.199.797,00	0,00
2	Akumulasi properti investasi - Gedung dan Bangunan	(8.561.146.283,18)	(702.761.816,31)	(1.362.108.981,54)	(7.901.799.117,95)	(7,70)
Jumlah		27.939.053.513,82	(702.761.816,31)	(1.362.108.981,54)	28.598.400.679,05	2,36

5.3.1.4.1 Properti Investasi - Gedung dan Bangunan

Properti investasi tahun 2024 sebesar Rp36.500.199.797,00 yang terdapat pada 3 (tiga) SKPD dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 5.208

Properti Investasi

No.	Nama SKPD	Jumlah
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	36.336.989.797,00
2	Bagian Umum	127.210.000,00
3	Kecamatan Lamaknen	36.000.000,00
	Jumlah	36.500.199.797,00

5.3.1.4.2 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi - Gedung dan Bangunan

Akumulasi penyusutan properti investasi-gedung dan bangunan tahun 2024 Rp(7.901.799.117,95) dengan rincian:

- 1) Akumulasi penyusutan properti investasi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp(7.799.792.117,95);
- 2) Akumulasi penyusutan properti investasi pada Bagian Umum Rp(89.047.000,00); dan
- 3) Akumulasi penyusutan properti investasi pada Kecamatan Lamaknen Rp(12.960.000,00).

Mutasi bertambah akumulasi penyusutan properti investasi Rp(702.761.816,31) berasal dari beban penyusutan tahun 2024. Mutasi berkurang Rp(1.362.108.981,54) merupakan koreksi atas lebih catat akumulasi penyusutan tahun sebelumnya.

Daftar aset properti investasi dan penyusutannya disajikan pada Lampiran 19-1 s.d. 19-2.

5.3.1.5 ASET**31-Des-24****31-Des-23****LAINNYA****Rp26.620.510.022,91****Rp58.012.187.541,02**

Aset Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp26.620.510.022,91. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar Rp(31.391.677.518,11) atau (54,11)% jika dibanding aset lainnya tahun 2023 Rp58.012.187.541,02. Mutasi aset lainnya dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini.

Tabel 5.209

Aset Lainnya

No.	Uraian	Saldo Awal 2024 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir 2024 (Rp)	%
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)		
1	Aset Tak Berwujud	225.429.900,00	0,00	76.138.800,00	149.291.100,00	(33,77)
2	Aset Lain-Lain	57.786.757.641,02	(20.749.780.140,81)	10.565.758.577,30	26.471.218.922,91	(54,19)
	Jumlah	58.012.187.541,02	(20.749.780.140,81)	10.641.897.377,30	26.620.510.022,91	(54,11)

Daftar Mutasi Aset Lainnya tahun 2024 disajikan pada Lampiran 20-1.

**5.3.1.5.1 Aset Tak Berwujud****31-Des-24****Rp149.291.100,00****31-Des-23****Rp225.429.900,00**

Aset Tak Berwujud yang dimiliki pemerintah Kabupaten Belu berupa aplikasi - aplikasi perangkat lunak yang cara perolehannya melalui pengadaan/pengembangan. Aset Tak Berwujud disajikan sebesar nilai bersih setelah dikurangi amortisasinya. Saldo Aset Tak Berwujud setelah dikurangi akumulasi amortisasi di tahun 2024 sebesar Rp149.291.100,00 turun sebesar Rp(76.138.800,00) atau (33,77)% dibanding tahun 2023 sebesar Rp225.429.900,00. Penurunan ini terjadi karena penambahan beban amortisasi aset tak berwujud tahun 2024 sebesar Rp(76.138.800,00). Mutasinya dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.210**Aset Tak Berwujud**

No	Uraian	Saldo Awal 2024 Rp	Mutasi		Saldo Akhir 2024 Rp	%
			Bertambah Rp	Berkurang Rp		
1	Aset tak berwujud	1.787.071.000,00	0,00	0,00	1.787.071.000,00	0,00
	Amortisasi aset tak berwujud	(1.561.641.100,00)	(76.138.800,00)	0,00	(1.637.779.900,00)	4,88
	Aset tak berwujud netto	225.429.900,00	(76.138.800,00)	0,00	149.291.100,00	(33,77)

Penjelasan rincian mutasinya adalah sebagai berikut.

1) Aset Tak Berwujud Bruto**Tabel 5.211****Aset Tak Berwujud Bruto**

No	Uraian	Saldo Awal 2024 Rp	Mutasi		Saldo Awal 2024 Rp
			Bertambah Rp	Berkurang Rp	
1	Software aplikasi V-Tax (PBB-P2)	192.333.000,00	0,00	0,00	192.333.000,00
2	Software aplikasi V-Tax (Pajak Daerah)	160.000.000,00	0,00	0,00	160.000.000,00
3	Software aplikasi perencanaan	377.149.000,00	0,00	0,00	377.149.000,00
4	Software aplikasi simbada	150.535.000,00	0,00	0,00	150.535.000,00
5	Software aplikasi simple-3	101.650.000,00	0,00	0,00	101.650.000,00
6	Software aplikasi pemetaan	29.700.000,00	0,00	0,00	29.700.000,00
7	Software aplikasi BPHTB	340.560.000,00	0,00	0,00	340.560.000,00
8	Software aplikasi ASB	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
9	Software aplikasi perijinan-Sicantik	14.932.500,00	0,00	0,00	14.932.500,00
10	Software aplikasi perijinan	19.450.000,00	0,00	0,00	19.450.000,00
11	Bapenda	99.521.500,00	0,00	0,00	99.521.500,00
12	Aset tidak berwujud (Dinas PU) Software Pendataan	84.360.000,00	0,00	0,00	84.360.000,00
13	Aset tidak berwujud (Kominfo) - software absensi	181.880.000,00	0,00	0,00	181.880.000,00
	Jumlah	1.787.071.000,00	0,00	0,00	1.787.071.000,00



2) Amortisasi Aset Tak Berwujud

Tabel 5.212

Amortisasi Aset Tak Berwujud

No.	Uraian	Saldo Awal 2024 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir 2024 (Rp)
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
1	Software aplikasi V-Tax (PBB-P2)	(192.333.000,00)	0,00	0,00	(192.333.000,00)
2	Software aplikasi V-Tax (Pajak Daerah)	(160.000.000,00)	0,00	0,00	(160.000.000,00)
3	Software aplikasi perencanaan	(377.149.000,00)	0,00	0,00	(377.149.000,00)
4	Software aplikasi simbada	(150.535.000,00)	0,00	0,00	(150.535.000,00)
5	Software aplikasi simple-3	(101.650.000,00)	0,00	0,00	(101.650.000,00)
6	Software aplikasi pemetaan	(29.700.000,00)	0,00	0,00	(29.700.000,00)
7	Software aplikasi BPHTB	(340.560.000,00)	0,00	0,00	(340.560.000,00)
8	Software aplikasi ASB	(35.000.000,00)	0,00	0,00	(35.000.000,00)
9	Software aplikasi perijinan - Sisantik	(8.959.500,00)	(2.986.500,00)	0,00	(11.946.000,00)
10	Software aplikasi perijinan	(19.450.000,00)	0,00	0,00	(19.450.000,00)
11	Bapenda	(39.808.600,00)	(19.904.300,00)	0,00	(59.712.900,00)
12	Aset tidak berwujud (Dinas PU) Software Pendataan	(33.744.000,00)	(16.872.000,00)	0,00	(50.616.000,00)
13	Aset tidak berwujud (Kominfo) - software absensi	(72.752.000,00)	(36.376.000,00)	0,00	(109.128.000,00)
	Jumlah	(1.561.641.100,00)	(76.138.800,00)	0,00	(1.637.779.900,00)

Perhitungan amortisasi untuk mendapatkan nilai buku Aset Tak Berwujud tersebut disesuaikan dengan kebijakan akuntansi aset tak berwujud di mana perhitungannya menggunakan metode garis lurus dengan umur ekonomis 5 tahun. Uraian sebagai berikut.

Tabel 5.213

Rincian Amortisasi Aset Tak Berwujud

No.	Uraian	Tahun Perolehan	Umur Aset (Tahun)	Harga Perolehan (Rp)	Akumulasi Amortisasi Awal 2024 (Rp)	Beban Amortisasi 2024 (Rp)	Akumulasi Amortisasi Akhir 2024 (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Software aplikasi V-Tax (PBB-P2)	2016	9	192.333.000,00	192.333.000,00	0,00	192.333.000,00	0,00
2	Software aplikasi V-Tax (Pajak Daerah)	2017	8	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	160.000.000,00	0,00
3	Software aplikasi perencanaan	2017	8	377.149.000,00	377.149.000,00	0,00	377.149.000,00	0,00
4	Software aplikasi simbada	2012	13	150.535.000,00	150.535.000,00	0,00	150.535.000,00	0,00
5	Software aplikasi simple-3	2018	7	101.650.000,00	101.650.000,00	0,00	101.650.000,00	0,00
6	Software aplikasi pemetaan	2009	15	29.700.000,00	29.700.000,00	0,00	29.700.000,00	0,00
7	Software aplikasi BPHTB	2012	13	340.560.000,00	340.560.000,00	0,00	340.560.000,00	0,00
8	Software aplikasi ASB	2019	6	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00
9	Software aplikasi perijinan - Sisantik	2021	4	14.932.500,00	8.959.500,00	2.986.500,00	11.946.000,00	2.986.500,00
10	Software aplikasi perijinan	2019	6	19.450.000,00	19.450.000,00	0,00	19.450.000,00	0,00
11	Bapenda	2022	3	99.521.500,00	39.808.600,00	19.904.300,00	59.712.900,00	39.808.600,00
12	Aset tidak berwujud (Dinas PU) Software Pendataan	2022	3	84.360.000,00	33.744.000,00	16.872.000,00	50.616.000,00	33.744.000,00
13	Aset tidak berwujud (Kominfo) - software absensi	2022	3	181.880.000,00	72.752.000,00	36.376.000,00	109.128.000,00	72.752.000,00
	Jumlah			1.787.071.000,00	1.561.641.100,00	76.138.800,00	1.637.779.900,00	149.291.100,00



3) Aset Tak Berwujud Netto

Tabel 5.214

Aset Tak Berwujud Netto

No.	Uraian	Saldo Awal 2024 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir 2024 (Rp)
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
1	<i>Software</i> aplikasi V-Tax (PBB-P2)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<i>Software</i> aplikasi V-Tax (Pajak Daerah)	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<i>Software</i> aplikasi perencanaan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<i>Software</i> aplikasi simbada	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<i>Software</i> aplikasi simple-3	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<i>Software</i> aplikasi pemetaan	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<i>Software</i> aplikasi BPHTB	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<i>Software</i> aplikasi ASB	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<i>Software</i> aplikasi perijinan - Sicantik	5.973.000,00	0,00	2.986.500,00	2.986.500,00
10	<i>Software</i> aplikasi perijinan	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Bapenda	59.712.900,00	0,00	19.904.300,00	39.808.600,00
12	Aset tidak berwujud (Dinas PU) <i>Software</i> Pendataan	50.616.000,00	0,00	16.872.000,00	33.744.000,00
13	Aset tidak berwujud (Kominfo) - <i>Software</i> absensi	109.128.000,00	0,00	36.376.000,00	72.752.000,00
	Jumlah	225.429.900,00	0,00	76.138.800,00	149.291.100,00

Selain itu ada pula beberapa *software* aplikasi gratis yang disediakan oleh instansi pemerintah pusat maupun pihak lain untuk pelayanan tertentu sehingga nilainya tidak dicatat dalam neraca, antara lain:

- 1) Simda Keuangan, Simda BMD, SIM Gaji Taspen dan *software* aplikasi persediaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- 2) *Software* aplikasi e-KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 3) *Software* aplikasi SPSE pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Belu;
- 4) *Software* aplikasi *billing* sistem farmasi pada BLUD RSUD Atambua;
- 5) *Software* aplikasi SIMRS pada BLUD RSUD Atambua; dan
- 6) *Software* aplikasi persediaan pada BLUD RSUD Atambua.

5.3.1.5.2 Aset Lain-lain

31-Des-24

Rp26.471.218.922,91

31-Des-23

Rp57.786.757.641,02

Aset Lain-lain terdiri atas inventarisasi aset tetap yang rusak berat, aset tetap yang sedang diproses administrasi penghapusannya, reklasifikasi dari akun konstruksi dalam pengerjaan atas pekerjaan yang tidak dilanjutkan lagi, piutang-piutang pendapatan daerah



yang macet dan sulit ditindaklanjuti, dan aset desa yang akan dihibahkan.

Jumlah saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp26.471.218.922,91 atau turun sebesar Rp(31.315.538.718,11) atau (54,19)% jika dibandingkan saldo aset lain-lain tahun 2023 sebesar Rp57.786.757.641,02.

Uraian mutasinya adalah sebagai berikut.

Tabel 5.215
Aset Lain-Lain

No	Uraian	Saldo Awal 2024 Rp	Mutasi		Saldo Akhir 2024 Rp	%
			Bertambah Rp	Berkurang Rp		
1	Aset lain-lain - Aset Tetap	51.730.782.297,00	2.005.798.375,00	9.576.693.694,00	44.159.886.978,00	(14,64)
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.649.867.519,71)	(24.392.628.745,29)	(1.537.142.360,00)	(24.505.353.905,00)	1.385,29
	Aset Lain-lain - Aset Tetap Netto	50.080.914.777,29	(22.386.830.370,29)	8.039.551.334,00	19.654.533.073,00	(60,75)
2	Aset Lain-lain - Piutang	3.969.379.450,00	17.274.000,00	2.110.054.700,00	1.876.598.750,00	(52,72)
	Penyisihan Piutang	(3.360.316.450,00)	0,00	(1.500.991.700,00)	(1.859.324.750,00)	(44,67)
	Aset Lain-lain - Piutang Netto	609.063.000,00	17.274.000,00	609.063.000,00	17.274.000,00	(97,16)
3	Aset Lain-lain Lainnya	2.114.179.737,29	1.574.511.862,70	1.819.277.858,94	1.869.413.741,05	(11,58)
4	Kas Yang Dibatasi Penggunaannya - Uang Jaminan	4.982.600.126,44	45.264.366,78	97.866.384,36	4.929.998.108,86	(1,06)
	Jumlah	57.786.757.641,02	(20.749.780.140,81)	10.565.758.577,30	26.471.218.922,91	(54,19)

Penurunan nilai Aset Lain-lain tahun 2024 dibanding tahun 2023 sebesar Rp(31.315.538.718,11) berasal dari:

- 1) Penambahan berasal dari mutasi masuk aset lain-lain sebesar Rp2.005.798.375,00 yang berasal dari reklasifikasi aset tetap rusak berat Rp1.981.172.375,00 dan mutasi aset lain-lain rusak berat antar SKPD sebesar Rp24.626.000,00.
- 2) Penambahan dari mutasi rekening uang jaminan Rp45.264.366,78;
- 3) Penambahan aset lain-lain lainnya berupa kekurangan volume pekerjaan Rp1.574.511.862,70;
- 4) Penambahan piutang rekening TDF tahun 2024 Rp17.274.000,00;
- 5) Pengurangan atas pelunasan piutang rekening *Treasury Deposit Facility* dana transfer tahun 2023 (Rp609.063.000,00);
- 6) Pengurangan aset lain-lain piutang karena sudah dihapus Rp(1.500.991.700,00);
- 7) Koreksi penyisihan aset-lain-lain piutang karena sudah dihapus Rp1.500.991.700,00;



- 8) Pengurangan aset lain-lain karena aset lainnya dihapus Rp(9.576.693.694,00);
- 9) Pengurangan atas pengembalian kekurangan volume pekerjaan tahun 2023 Rp(1.819.277.858,94);
- 10) Pengurangan atas mutasi rekening jaminan Rp(97.866.384,36); dan
- 11) Pengurangan atas koreksi akumulasi penyusutan aset lain-lain aset tetap sebesar Rp(22.855.486.385,29).

Uraian masing-masing komponen Aset Lain-lain untuk mendapatkan nilai bersih adalah sebagai berikut.

5.3.1.5.2.1 Aset Lain-lain - Aset Tetap

Aset Lain-lain - Aset Tetap tahun 2024 sebesar Rp19.654.533.073,00 atau turun sebesar (60,75)% dibandingkan tahun 2023.

Aset lain-lain-aset tetap terdiri dari:

- a) Aset tetap rusak berat sebesar Rp44.159.886.978,00

Aset tetap rusak berat tahun 2024 dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 5.216
Aset Tetap Rusak Berat

NO.	URAIAN	SALDO AWAL 2024 (Rp)	KENAIKAN (Rp)	PENURUNAN (Rp)	SALDO AKHIR 2024 (Rp)	%
	Aset Lain-Lain (Aset Rusak Berat dan Hibah)					
1	Rehabilitasi Tambak Rakyat	816.600.000,00	-	-	816.600.000,00	-
2	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	7.876.403.780,00	100.000.000	2.548.439.933,00	5.427.963.847,00	(31,09)
3	Dinas Kesehatan	1.199.809.610,00	282.711.000	282.711.000,00	1.199.809.610,00	-
4	Rumah Sakit Umum Daerah	6.578.408.001,00	-	4.919.895.901,00	1.658.512.100,00	(74,79)
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.109.601.000,00	-	-	3.109.601.000,00	-
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	40.507.000,00	-	-	40.507.000,00	-
7	Satuan Polisi Pamong Praja	12.500.000,00	-	-	12.500.000,00	-
8	Dinas Sosial dan PMD	219.325.500,00	-	-	219.325.500,00	-
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	1.340.821.400,00	594.684.875	-	1.935.506.275,00	44,35
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	3.966.314.353,00	-	-	3.966.314.353,00	-
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	-	-	-	-	-
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-	-
13	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	81.758.500,00	-	-	81.758.500,00	-
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	354.715.000	354.715.000,00	-	-
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	-	-

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

NO.	URAIAN	SALDO AWAL 2024 (Rp)	KENAIKAN (Rp)	PENURUNAN (Rp)	SALDO AKHIR 2024 (Rp)	%
16	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	222.016.000,00	-	-	222.016.000,00	-
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2.570.335.400,00	304.184.000	159.114.500,00	2.715.404.900,00	5,64
18	Dinas Peternakan dan Perikanan	244.483.500,00	174.292.500	-	418.776.000,00	71,29
19	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	175.000.000,00	-	-	175.000.000,00	-
20	Bagian Pemerintahan	8.790.302.200,00	-	-	8.790.302.200,00	-
21	Bagian Hukum	4.598.000,00	7.400.000	-	11.998.000,00	160,94
22	Bagian Perekonomian	6.500.000,00	-	-	6.500.000,00	-
23	Bagian Administrasi Pembangunan	104.107.100,00	-	24.626.000,00	79.481.100,00	(23,65)
24	Bagian Kesejahteraan Rakyat	33.388.000,00	-	-	33.388.000,00	-
25	Bagian Organisasi	1.715.000,00	-	-	1.715.000,00	-
26	Bagian Umum	241.003.500,00	-	-	241.003.500,00	-
27	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	54.397.400,00	-	-	54.397.400,00	-
28	Bagian Protokol dan Komunikasi Publik	201.398.000,00	-	-	201.398.000,00	-
29	Sekretariat DPRD	5.940.000,00	-	-	5.940.000,00	-
30	Badan Pengelola Perbatasan Negara	-	-	-	-	-
31	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.980.000,00	137.950.000	-	139.930.000,00	6.967,17
32	Kecamatan Kota Atambua	93.427.598,00	-	-	93.427.598,00	-
33	Kecamatan Tasifeto Barat	2.063.801.200,00	-	249.877.200,00	1.813.924.000,00	(12,11)
34	Kecamatan Tasifeto Timur	2.321.689.000,00	-	-	2.321.689.000,00	-
35	Kecamatan Raihat	1.296.067.000,00	-	-	1.296.067.000,00	-
36	Kecamatan Lamaknen	791.674.000,00	-	-	791.674.000,00	-
37	Kecamatan Kakuluk Mesak	1.386.994.000,00	-	-	1.386.994.000,00	-
38	Kecamatan Raimanuk	1.326.144.000,00	-	-	1.326.144.000,00	-
39	Kecamatan Lasiolat	464.880.000,00	-	-	464.880.000,00	-
40	Kecamatan Atambua Selatan	-	-	-	-	-
41	Kecamatan Atambua Barat	26.583.495,00	-	-	26.583.495,00	-
42	Kecamatan Lamaknen Selatan	947.697.600,00	-	240.609.000,00	707.088.600,00	(25,39)
43	Kecamatan Nanaet Dubesi	1.344.220.660,00	-	796.705.160,00	547.515.500,00	(59,27)
44	Inspektorat	-	-	-	-	-
45	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	90.200.000,00	-	-	90.200.000,00	-
46	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.607.184.000,00	49.861.000	-	1.657.045.000,00	3,10
47	Badan Pendapatan Daerah	71.006.500,00	-	-	71.006.500,00	-
48	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-	-
	Jumlah Aset Lain-Lain (Aset Rusak Berat dan Hibah)	51.730.782.297,00	2.005.798.375	9.576.693.694,00	44.159.886.978,00	(14,64)

Mutasi masuk aset tetap rusak berat sebesar
Rp2.005.798.375,00 berasal dari:

- 1) Mutasi masuk antar SKPD sebesar Rp24.626.000,00
yaitu pada Bagian Hukum sebesar Rp7.400.000,00
dan BPKAD sebesar Rp17.226.000,00;



- 2) Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.294.711.375,00 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Perikanan, BPBD, Dinas PKO dan BPKAD;
- 3) Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada DPMPSTP sebesar Rp637.461.000,00; dan
- 4) Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya berupa Induk ikan unggul (BBI Teun) sesuai surat usulan Nomor P/811/000.3.6/DPP/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024 dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp49.000.000,00.

Mutasi keluar aset tetap rusak berat sebesar Rp(9.576.693.694,00) berasal dari:

- 1) Mutasi keluar antar SKPD pada Bagian Administrasi Pembangunan sebesar Rp(24.626.000,00); dan
- 2) Penghapusan aset tetap rusak berat sebesar Rp(9.552.067.694,00).

Dalam akun aset lain-lain aset tetap terdapat aset tetap desa yang akan dihibahkan ke desa-desa sebesar Rp10.297.669.000,00.

Aset tetap desa yang tercatat pada Kecamatan dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.217
Aset Tetap Desa

No.	Kecamatan	Jumlah (Rp)
1	Kecamatan Tasifeto Barat	1.796.538.000,00
2	Kecamatan Tasifeto Timur	2.321.689.000,00
3	Kecamatan Raihat	1.296.067.000,00
4	Kecamatan Lamaknen	782.324.000,00
5	Kecamatan Kakuluk Mesak	1.350.630.000,00
6	Kecamatan Raimanuk	1.255.793.000,00
7	Kecamatan Lasiolat	441.920.000,00
8	Kecamatan Lamaknen Selatan	626.645.000,00
9	Kecamatan Nanaet Dubesi	426.063.000,00
	Jumlah	10.297.669.000,00

b) Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain - Aset Tetap

Saldo akumulasi penyusutan aset lain-lain - aset tetap tahun 2024 sebesar Rp(24.505.353.905,00) dengan rinciannya disajikan pada **Lampiran 20-2**.



c) Aset Lain-lain - Aset Tetap Netto

Aset Lain-lain - Aset Tetap Netto diperoleh dari pengurangan Aset Tetap bruto di kurangi akumulasi penyusutannya, dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 5.218

Aset Lain-Lain - Aset Tetap Netto

No	Uraian	Saldo Awal 2024 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir 2024 (Rp)	%
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)		
1	Aset Lain-lain - Aset Tetap	51.730.782.297,00	2.005.798.375,00	9.576.693.694,00	44.159.886.978,00	(14,64)
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(1.649.867.519,71)	(24.392.628.745,29)	(1.537.142.360,00)	(24.505.353.905,00)	1.385,29
Aset Lain-lain Aset Tetap Netto		50.080.914.777,29	(22.386.830.370,29)	8.039.551.334,00	19.654.533.073,00	(60,75)

5.3.1.5.2.2 Aset Lain-lain - Piutang

Aset lain-lain piutang terdiri dari piutang yang akan dihapuskan dan dana *Treasury Deposit Facility* (TDF). Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp17.274.000,00.

Uraian Aset Lain-lain Piutang bruto disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.219

Aset Lain-Lain - Piutang

No.	Uraian	Saldo Awal 2024 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir 2024 (Rp)	%
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)		
1	Piutang Atas Penjualan Angsuran Alat Bantu Penangkapan Ikan	592.324.750,00	0,00	0,00	592.324.750,00	0,00
2	Piutang Atas Penjualan <i>Hand Tractor</i>	1.085.750.000,00	0,00	0,00	1.085.750.000,00	0,00
3	Piutang Atas Penjualan Alsintan	62.050.000,00	0,00	0,00	62.050.000,00	0,00
4	Piutang Pengembalian	102.200.000,00	0,00	0,00	102.200.000,00	0,00
5	Piutang Lain-lain	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00
6	Piutang Dana Bergulir	1.500.991.700,00	0,00	1.500.991.700,00	0,00	(100,00)
7	Pokok Dana TDF	609.063.000,00	17.274.000,00	609.063.000,00	17.274.000,00	(97,16)
Jumlah		3.969.379.450,00	17.274.000,00	2.110.054.700,00	1.876.598.750,00	(52,72)

- a. Aset lain-lain - piutang yang akan dihapuskan merupakan piutang yang dipindahkan ke Aset Lainnya karena akan/dalam proses penghapusan. Dengan menempatkannya dalam kelompok aset lain-lain diharapkan dapat dilakukan proses penghapusan di masa-masa yang akan datang. Per 31 Desember 2024, piutang tersebut telah disisihkan penuh sebesar nilai piutangnya karena dalam kondisi macet dan telah



kedaluwarsa dalam penagihannya. Rinciannya adalah sebagai berikut:

- 4) Aset Lain-lain Piutang - Piutang atas Penjualan Angsuran Alat Bantu Penangkapan Ikan per 31 Desember 2024 sebesar Rp592.324.750,00 merupakan piutang Dinas Perikanan (sekarang Dinas Peternakan dan Perikanan) atas penjualan angsuran alat bantu penangkapan ikan berupa 16 unit Kapal Motor pada Kelompok Nelayan asal tahun 2007 dan 2009 yang tidak dapat ditagihkan akibat kualitas piutang yang macet. Rincian aset lain-lain piutang ini dapat dilihat pada **Lampiran 20-3**;
- 5) Aset Lain-lain Piutang - Piutang atas Penjualan *Hand tractor* per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.085.750.000,00 merupakan piutang Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultural (sekarang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan) atas penjualan aset *hand tractor* pada Kelompok Tani di 10 Kecamatan Kabupaten Belu dan 10 Kecamatan Kabupaten Malaka asal tahun 2011 yang tidak dapat ditagihkan akibat kualitas piutang yang macet. Rincian aset lain-lain piutang atas penjualan *hand tractor* dapat dilihat pada **Lampiran 20-4**;
- 6) Aset Lain-lain Piutang - Piutang atas Penjualan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultural (sekarang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan) per 31 Desember 2024 sebesar Rp62.050.000,00 merupakan piutang pada Kelompok Tani di 7 Kecamatan Kabupaten Belu asal tahun 2010 atas penjualan Alsintan berupa Hand Tractor, Pompa Air, Pemipil Jagung, dan Penggiling Jagung. Rincian aset lain-lain piutang atas penjualan alsintan dapat dilihat pada **Lampiran 20-5**;
- 7) Aset Lain-lain Piutang - Piutang Pengembalian Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat per 31 Desember 2024 sebesar Rp102.200.000,00 merupakan piutang atas temuan Denda Keterlambatan Paket Pekerjaan Rumah Sehat



Sederhana Kecamatan Malaka asal tahun 2009 di Dinas PUPR dengan penyedia PT Putra Unggul senilai Rp102.200.000,00. Piutang menjadi tidak tertagih akibat adanya Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Penyedia;

- 8) Aset Lain-lain Piutang - Piutang Lain-lain pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp17.000.000,00 merupakan piutang atas tunggakan retribusi Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) asal tahun 2007 dan 2008 yang tidak dapat tertagihkan dengan nilai awal sebesar Rp21.000.000,00. Atas tunggakan tersebut telah dilakukan penyetoran sebesar Rp4.000.000,00 pada tahun 2012 sehingga akhir piutang per 31 Desember 2012 senilai Rp17.000.000,00 dan tidak ada perubahan sampai dengan 31 Desember 2024. Lampiran atas aset lain-lain piutang SIUJK dapat dilihat pada **Lampiran 20-6**; dan
- 9) Aset Lain-lain Piutang - Piutang Dana Bergulir per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp0,00 dan Rp1.500.991.700,00. Pada tahun 2024 terdapat penurunan saldo lain Aset Lain-lain Piutang - Piutang Dana Bergulir karena penghapusbukuan piutang sebesar Rp1.500.891.700,00 atas piutang dana bergulir yang telah diterbitkan Surat Keputusan Bupati Belu Nomor 127/HK/2020 tanggal 3 Juni 2020 tentang Penghapusan Piutang Dana Bergulir Secara Bersyarat pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belu dari Daftar Piutang Daerah. Piutang ini dihapusbukukan dan dicatat secara Ekstrakomtabel. Pada tahun 2024 juga terdapat Aset Lain-lain - Piutang Dana Bergulir senilai Rp100.000,00 yang dikoreksi pada ekuitas awal piutang karena adanya piutang dari Maximus Taek/UKM Maksi yang telah dilunasi dengan STS Nomor 3853/R/PL tanggal 23



Desember 2020 yang oleh Pemda namun masih tercatat pada Aset Lain-lain - Piutang Dana Bergulir.

- b. Aset lainnya dana *Treasury Deposit Facility* (TDF) per 31 Desember 2024 sebesar Rp17.274.000,00 merupakan piutang pokok berupa dana TDF atas penyaluran dana bagi hasil dari pemerintah pusat yang masih ada pada rekening TDF Pemkab Belu di Bank Indonesia s.d. 31 Desember 2024. Sedangkan aset lainnya dana TDF asal tahun 2023 sebesar Rp609.063.000,00 telah dicairkan seluruhnya ke rekening RKUD pada tanggal 25 Maret 2024 dengan STS Nomor 582/DBH.

Uraian penyisihan Aset Lain-lain Piutang adalah sebagai berikut.

Tabel 5.220

Rincian Penyisihan Aset Lain-Lain - Piutang

No.	Uraian	Saldo Awal 2024 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir 2024 (Rp)	%
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)		
1	Penyisihan Piutang Atas Penjualan Angsuran Alat Bantu Penangkapan Ikan	(592.324.750,00)	0,00	0,00	(592.324.750,00)	0,00
2	Penyisihan Piutang Atas Penjualan <i>Hand Tractor</i>	(1.085.750.000,00)	0,00	0,00	(1.085.750.000,00)	0,00
3	Penyisihan Piutang Atas Penjualan Alsintan	(62.050.000,00)	0,00	0,00	(62.050.000,00)	0,00
4	Penyisihan Penyisihan Piutang Pengembalian	(102.200.000,00)	0,00	0,00	(102.200.000,00)	0,00
5	Penyisihan Piutang Lain-lain	(17.000.000,00)	0,00	0,00	(17.000.000,00)	0,00
6	Penyisihan Piutang Dana Bergulir	(1.500.991.700,00)	0,00	(1.500.991.700,00)	0,00	(100,00)
	Jumlah	(3.360.316.450,00)	0,00	0,00	(1.859.324.750,00)	(44,67)

Dengan demikian nilai bersih Aset Lain-lain - Piutang adalah sebagai berikut.

Tabel 5.221

Aset Lain-Lain - Piutang Netto

No.	Uraian	Saldo Awal 2024 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir 2024 (Rp)	%
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)		
1	Piutang Atas Penjualan Angsuran Alat Bantu Penangkapan Ikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Piutang Atas Penjualan <i>Hand</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Piutang Atas Penjualan Alsintan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Piutang Pengembalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Piutang Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Piutang Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pokok Dana TDF	609.063.000,00	17.274.000,00	609.063.000,00	17.274.000,00	(97,16)
	Jumlah	609.063.000,00	17.274.000,00	609.063.000,00	17.274.000,00	(97,16)

**5.3.1.5.2.3 Aset Lain-Lain TGR**

Aset lain-lain lainnya terdiri dari Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi (TGR), dan/atau Pihak Ketiga yang belum ada penetapan pembebanan.

Saldo aset lain-lain TGR per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.869.413.741,05. Jumlah ini turun sebesar (11,58)% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp2.114.179.737,29. Mutasinya disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.222**Aset Lain-Lain - Lainnya**

No.	Uraian	Saldo Awal 2024 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir 2024 (Rp)	%
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	530.706.747,80	0,37	303.126.420,56	227.580.327,61	(57,12)
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	1.235.041.307,41	0,00	1.235.041.307,41	0,00	(100,00)
3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	325.229.697,11	0,00	257.908.146,00	67.321.551,11	(79,30)
4	RSUD	23.201.984,97	0,00	23.201.984,97	0,00	(100,00)
5	Temuan BPK atas belanja gaji dan tunjangan DPRD tahun 2024	0,00	1.461.600,00	0,00	1.461.600,00	0,00
6	Temuan BPK atas belanja gaji dan tunjangan ASN tahun 2024	0,00	133.484.900,00	0,00	133.484.900,00	0,00
7	Temuan BPK atas belanja perjalanan dinas tahun 2024	0,00	118.333.538,00	0,00	118.333.538,00	0,00
8	Temuan BPK atas belanja jasa tahun 2024	0,00	252.350.000,00	0,00	252.350.000,00	0,00
9	Kekurangan volume pekerjaan tahun 2024	0,00	705.590.046,89	0,00	705.590.046,89	0,00
10	Potensi kekurangan volume pekerjaan tahun 2024	0,00	102.951.930,00	0,00	102.951.930,00	0,00
11	Kelebihan pembayaran atas harga timpang	0,00	71.689.734,44	0,00	71.689.734,44	0,00
12	Jasa konsultan BLP tumpang tindih	0,00	128.444.860,00	0,00	128.444.860,00	0,00
13	Jasa konsultan BLNP	0,00	10.209.228,00	0,00	10.209.228,00	0,00
14	Jasa konsultan personil tidak terlibat	0,00	49.996.025,00	0,00	49.996.025,00	0,00
	Jumlah	2.114.179.737,29	1.574.511.862,70	1.819.277.858,94	1.869.413.741,05	(11,58)

Rinciannya disajikan pada **Lampiran 21**.

Atas TGR temuan pemeriksaan LKPD 2024 perjalanan dinas tahun 2024 pada SD Negeri Matitis Baukoek sebesar Rp400.000,00 pada tanggal 15 Mei 2025 telah dilakukan penyetoran namun ke rekening BOS Sekolah, sehingga akan dilakukan revaluasi Inspektorat Daerah untuk dapat disetor kembali ke RKUN.

5.3.1.5.2.4 Kas Yang Dibatasi Penggunaannya - Uang Jaminan**31-Des-24****Rp4.929.998.108,86****31-Des-23****Rp4.982.600.126,44**

Akun ini digunakan untuk menampung rekening jaminan-jaminan. Saldo kas yang dibatasi pada tahun 2024 sebesar



Rp4.929.998.108,86. Jumlah ini turun sebesar Rp(52.602.017,58) atau (1,06)%. Uraianya sebagai berikut.

Tabel 5.223**Kas yang dibatasi Penggunaanya - Uang Jaminan**

No.	Uraian	Saldo Awal 2024 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir 2024 (Rp)	%
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)		
1	Jaminan Pemeliharaan	514.272.074,00	0,00	0,00	514.272.074,00	0,00
2	Jaminan IUP Produksi	3.058.754.395,26	15.321.277,13	3.304.255,43	3.070.771.416,96	0,39
3	Jaminan Kontrak Pasar	4.465.841,13	0,00	240.000,00	4.225.841,13	(5,37)
4	Jaminan Pembongkaran Media Reklame	93.764.543,05	3.450.127,65	89.023.534,93	8.191.135,77	(91,26)
5	Jaminan Kesungguhan	1.311.343.273,00	26.492.962,00	5,298,594,00	1.332.537.641,00	1,62
Jumlah		4.982.600.126,44	45.264.366,78	97.866.384,36	4.929.998.108,86	(1,06)

1) Jaminan Pemeliharaan sebesar Rp514.272.074,00 merupakan jaminan 5% atas pekerjaan konstruksi yang disetor oleh pihak ketiga yang disimpan di rekening pada PT BPD NTT Nomor 00301050002022, dan sampai 31 Desember 2024 belum dilakukan pengajuan kembali atas uang tersebut. Pada tahun 2024 tidak ada penambahan atas jaminan tersebut karena atas pekerjaan konstruksi diwajibkan menggunakan jaminan bank.

2) Jaminan Reklamasi IUP Produksi

Jaminan reklamasi Izin Usaha Pertambangan (IUP Produksi) tahun 2024 sebesar Rp3.070.771.416,96 atau naik 0,39% dibandingkan tahun 2023. Jaminan ini disimpan di PT BPD NTT dengan Nomor Rekening 00301150000044.

Jaminan reklamasi IUP Produksi merupakan jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga sejak tahun 2010 atas ijin usaha produksi mangan di Kabupaten Belu yang dibayarkan karena adanya peningkatan ijin dari eksplorasi ke produksi, dalam rangka menjamin pelaksanaan kegiatan reklamasi dan/atau pascatambang atas dampak kerusakan lingkungan yang timbul atas usaha tersebut, dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral serta Keputusan Bupati Belu Nomor 67/HK/2011 tentang Penetapan Biaya Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca IUP Mineral Logam di Kabupaten Belu sebagai pelaksanaan.



Pada tahun 2024 tidak ada mutasi keluar/pencairan atas sisa jaminan reklamasi IUP Produksi ini, dan tidak ada penambahan jaminan baru sehubungan sejak tahun 2016 dengan adanya Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara peralihan kewenangan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dialihkan dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Pusat yang dapat didelegasikan kepada Pemerintah Provinsi.

Penambahan sebesar Rp15.321.277,13 merupakan tambahan dari jasa giro atas uang jaminan yang ditempatkan pada rekening bank tersebut. Sedangkan pengurangan sebesar Rp3.304.255,43 merupakan biaya administrasi dan pajak yang dikenakan pada tahun 2024.

- 3) Jaminan Kontrak Pasar sebesar Rp4.225.841,13 merupakan jaminan atas sewa los pasar sejak tahun 2014 yang disimpan di PT BPD NTT dengan Nomor Rekening 00301150000032. Jumlah ini berkurang sebesar Rp240.000,00 pada tahun 2024 karena dikenakan biaya administrasi bank. Tidak ada pencairan maupun penambahan dalam tahun 2024.
- 4) Jaminan Pembongkaran Media Reklame sebesar Rp8.191.135,77 merupakan jaminan atas pemasangan reklame di Kabupaten Belu yang disimpan di PT BPD NTT dengan Nomor Rekening 00301150000080. Pada tahun 2024 terdapat penambahan sebesar Rp3.450.127,65 yang terdiri dari jasa giro tahun 2024 sebesar Rp154.227,65 dan penambahan jaminan dari perusahaan pemasang reklame selama tahun 2024 Rp3.295.900,00. Pengurangan sebesar Rp89.023.534,93 terdiri dari biaya administrasi bank tahun 2024 Rp270.239,93 dan pengalihan ke rekening kas umum daerah sebesar Rp88.753.295,00. Pengalihan tersebut berdasarkan surat permohonan pemindahbukuan uang jaminan pembongkaran reklame dari Badan Pendapatan Daerah dengan Nomor 216/900.1.13.1/Bapenda/VIII/2024 tanggal 13 Agustus



2024 atas hasil inventarisasi jaminan bongkar tahun 2015 s.d. 2023 yang telah berusia lebih dari 30 hari dan menjadi hak Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Belu Nomor 43.b Tahun 2012 tentang Penetapan Rekening dan Tata Cara Pengelolaan Uang Jaminan Bongkar Reklame.

Pada tanggal 11 April 2025 Kepala Bapenda melalui Surat Nomor 50/900.1.13.1/Bapenda/IV/2025 telah mengajukan permohonan pemindahbukuan sisa uang jaminan bongkar asal tahun sebelum 2024 sebesar Rp5.011.248,05 ke RKUD kepada BPKAD yang didasarkan dari hasil penelusuran, rekonsiliasi data, identifikasi, serta telaah hak dan kewajiban penyelenggaraan reklame terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame serta Penetapan Rekening dan Tata Cara Pengelolaan Uang Jaminan Bongkar Reklame. Selanjutnya nilai telah dipindahbukukan dari rekening jaminan pembongkaran media reklame ke RKUD dengan STS Nomor STS/1021/LLPAD tanggal 24 April 2025 sebesar Rp5.011.248,05.

- 5) Jaminan Kesungguhan sebesar Rp1.332.537.641,00 merupakan uang jaminan asal tahun 2010 yang disimpan pada rekening di PT BRI (Persero) Tbk. dengan Nomor 026701000412302. Dana ini merupakan jaminan yang diberikan perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada Pemda Belu atas izin eksplorasi mangan di Kabupaten Belu. Jaminan ini sebagai bentuk kepastian menjalankan kegiatan penambangan secara sungguh-sungguh dan sesuai rencana sebagai bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

Pada tahun 2024 tidak terdapat penambahan pokok jaminan karena sejak tahun 2016 pengelolaan pertambangan telah dilimpahkan ke Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan adanya Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jumlah bertambah sebesar



Rp26.492.962,00 bersumber dari jasa giro selama tahun 2024, sedangkan pengurangan sebesar Rp5.298.594,00 merupakan biaya administrasi bank yang dibebankan pada rekening tersebut.

Rincian mutasi aset lainnya kas yang dibatasi penggunaannya disajikan pada Lampiran 22.1-22.5.

5.3.2 KEWAJIBAN	31-Des-24	31-Des-23
	<u>Rp29.377.040.131,24</u>	<u>Rp18.618.235.597,04</u>

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2024 sebesar Rp29.377.040.131,24. Jika dibandingkan dengan saldo kewajiban tahun sebelumnya maka terdapat peningkatan sebesar Rp10.758.804.534,20 atau 57,79%. Uraian kewajiban per 31 Desember 2024 disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.224

Kewajiban

No.	Uraian	Saldo Awal 2024 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir 2024 (Rp)	%
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)		
1	Kewajiban Jangka Pendek	18.618.235.597,04	77.609.259.549,78	66.850.455.015,58	29.377.040.131,24	57,79
2	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		18.618.235.597,04	77.609.259.549,78	66.850.455.015,58	29.377.040.131,24	57,79

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

31-Des-24	31-Des-23
<u>Rp29.377.040.131,24</u>	<u>Rp18.618.235.597,04</u>

Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2024 sebesar Rp29.377.040.131,24. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp18.618.235.597,04 maka kewajiban jangka pendek tahun 2024 naik sebesar Rp10.758.804.534,20 atau 57,79%.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini.

Tabel 5.225

Kewajiban Jangka Pendek

No.	Uraian	Saldo Awal 2024 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir 2024 (Rp)	%
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)		
1	Utang Perhitungan Fihak Ketiga	8.679.979,00	53.098.013.760,62	53.072.398.379,62	34.295.360,00	295,11
2	Utang Belanja	13.371.092.847,60	24.465.981.422,38	13.424.327.607,60	24.412.746.662,38	82,58
3	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.238.462.770,44	45.264.366,78	353.729.028,36	4.929.998.108,86	(5,89)
Jumlah		18.618.235.597,04	77.609.259.549,78	66.850.455.015,58	29.377.040.131,24	57,79

**5.3.2.1.1 Utang Perhitungan**

	31-Des-24	31-Des-23
Fihak Ketiga (PFK)	Rp34.295.360,00	Rp8.679.979,00

Saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2024 sebesar Rp34.295.360,00. Saldo tersebut naik sebesar Rp25.615.381,00 atau 295,11% dibanding saldo per 31 Desember 2023.

Rinciannya sebagai berikut.

Tabel 5.226**Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)**

No.	Uraian	2024 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir 2024 (Rp)	%
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)		
1	PPH 21	490.500,00	8.388.421.838,00	8.388.912.338,00	0,00	(100,00)
2	PPH 22	0,00	658.362.024,00	658.362.024,00	0,00	0,00
3	PPH 23	841.075,00	361.658.322,00	362.499.397,00	0,00	0,00
4	PPH Pasal 4 ayat 2	0,00	2.378.133.643,00	2.378.133.643,00	0,00	0,00
5	PPN	0,00	18.559.444.321,00	18.559.444.321,00	0,00	0,00
6	Taperum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	IWP	0,00	17.596.570.590,00	17.596.570.590,00	0,00	0,00
8	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	0,00	3.433.335,00	3.433.335,00	0,00	0,00
9	Iuran BPJS Kesehatan DPRD	0,00	30.456.785,00	30.456.785,00	0,00	0,00
10	Utang PFK BLUD	0,00	4.098.393.367,00	4.098.393.367,00	0,00	0,00
11	Utang PFK JKN	0,00	425.452.517,00	391.157.157,00	34.295.360,00	100,00
12	Utang PFK BOS	7.348.404,00	389.793.040,62	397.141.444,62	0,00	(100,00)
13	Utang PFK BOK	-	207.893.978,00	207.893.978,00	0,00	0,00
Jumlah		8.679.979,00	53.098.013.760,62	53.072.398.379,62	34.295.360,00	295,11

5.3.2.1.2 Utang

	31-Des-24	31-Des-23
Belanja	Rp24.412.746.662,38	Rp13.371.092.847,60

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2024 sebesar Rp24.412.746.662,38 yang terdiri dari utang belanja pegawai, utang belanja barang dan jasa, dan utang belanja modal. Jika dibandingkan dengan saldo utang belanja 31 Desember 2023 sebesar Rp13.371.092.847,60, per 31 Desember 2024 naik sebesar Rp11.041.653.814,78 atau 82,58%.

Rincian mutasi Utang Belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.227**Utang Belanja**

No	SKPD	Uraian	Saldo Awal 2024 (Rp)	Mutasi Utang		Saldo Akhir 2024 (Rp)
				Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
I	Utang Belanja Pegawai					
	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Utang belanja gaji dan tunjangan an. Hyasintus A. Mau tahun 2019-2023		26.200.000,00		26.200.000,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	SKPD	Uraian	Saldo Awal 2024 (Rp)	Mutasi Utang		Saldo Akhir 2024 (Rp)
				Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					
2	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Utang insentif retribusi penjualan hasil produksi usaha	0,00	7.774.700,00	0,00	7.774.700,00
3	Badan Pendapatan Daerah	Utang insentif pemungutan pajak daerah - ASN	312.299.319,00	0,00	312.299.319,00	0,00
	Utang Belanja Tunjangan Profesi Guru PNSD					
4	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Utang beban TPG TW III dan IV an. Agustina Sipriani Soi	18.510.960,00	0,00	18.510.960,00	0,00
5	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Utang beban TPG TW III dan IV an. Basenti Ulu (SDN Fohomane)	0,00	33.695.376,00	0,00	33.695.376,00
	Utang Belanja Jaminan Kesehatan bagi DPRD					
6	BPKAD	Utang iuran jaminan kesehatan salah satu anggota DPRD	772.070,00	0,00	772.070,00	0,00
7	BPKAD	Utang belanja iuran BPJS 4% atas TPP kepada PNS Tahun 2024		988.668.032,00		988.668.032,00
	Utang Belanja Pegawai BLUD					
8	BLUD	Utang jasa layanan pasien umum bulan Sept sd Des 2023	369.006.455,60	0,00	369.006.455,60	0,00
9	BLUD	Utang jasa layanan pasien BPJS bulan Agustus sd Des 2023	6.623.050.520,00	0,00	6.623.050.520,00	0,00
10	BLUD	Utang jasa layanan pasien e-KTP Malaka bulan Januari sd Juli 2023	497.975.568,00	0,00	497.975.568,00	0,00
11	BLUD	Utang jasa layanan pasien HD (BPJS)	1.249.222.120,00	0,00	1.249.222.120,00	0,00
12	BLUD	Utang jasa layanan pasien umum bulan Sept sd Des 2024	0,00	222.428.436,80	0,00	222.428.436,80
13	BLUD	Utang jasa layanan pasien jasa raharja bulan Sept sd Des 2024	0,00	59.895.695,60	0,00	59.895.695,60
14	BLUD	Utang jasa layanan pasien BPJS bulan Mei sd Des 2024	0,00	11.611.058.498,00	0,00	11.611.058.498,00
15	BLUD	Utang jasa layanan pasien HD (BPJS) tahun 2024	0,00	2.271.411.224,00	0,00	2.271.411.224,00
	Sub Jumlah Utang Belanja Pegawai		9.070.837.012,60	15.221.131.962,40	9.070.837.012,60	15.221.131.962,40
II	Utang Belanja Barang dan Jasa					
	Utang Belanja Barang					
16	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Fisik 65% atas belanja barang yang diserahkan ke masyarakat an CV Keysvalta (UKS SMPS Karya Mandiri)	0,00	130.844.363,61	0,00	130.844.363,61
17	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Fisik 59,39% atas belanja barang yang diserahkan ke masyarakat an CV Keysvalta (RKB SMPS Karya Mandiri)	0,00	460.232.868,78	0,00	460.232.868,78
18	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	100% atas jasa konsultan pengawasan RKB SMPS Karya Mandiri an. CV Desakon	0,00	36.661.000,00	0,00	36.661.000,00
19	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	100% atas jasa konsultan pengawasan UKS SMPS Karya Mandiri an. CV Desakon	0,00	12.265.000,00	0,00	12.265.000,00
20	Dinas Kesehatan	Utang belanja obat an. PT Mathio Jaya Pharma	0,00	65.729.000,00	0,00	65.729.000,00
21	Dinas Kesehatan	Utang belanja obat an. PT Mathio Jaya Pharma	0,00	63.890.000,00	0,00	63.890.000,00
22	Dinas Kesehatan	Utang belanja obat an. PT Mathio Jaya Pharma	0,00	145.681.640,00	0,00	145.681.640,00
23	Dinas Kesehatan	Utang belanja obat an. PT Mathio Jaya Pharma	0,00	24.720.000,00	0,00	24.720.000,00
24	BLUD	Utang belanja obat	1.825.288.400,00	0,00	1.825.288.400,00	0,00
25	BLUD	Utang belanja makan minum pasien tahun 2023	90.967.550,00	0,00	90.967.550,00	0,00
26	BLUD	Utang belanja alat dan bahan penunjang pelayanan lainnya	75.906.000,00	0,00	75.906.000,00	0,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	SKPD	Uraian	Saldo Awal 2024 (Rp)	Mutasi Utang		Saldo Akhir 2024 (Rp)
				Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
27	BLUD	Utang belanja suku cadang alat kedokteran	23.899.182,00	0,00	23.899.182,00	0,00
28	BLUD	Utang belanja Suku cadang alat kesehatan PT Hospi Niaga Utama	55.742.274,00	0,00	55.742.274,00	0,00
29	BLUD	Utang belanja obat /BMHP/Reagen	0,00	5.733.650.235,00	0,00	5.733.650.235,00
30	BLUD	Utang belanja makanan pasien bulan Desember tahun 2024	0,00	99.693.300,00	0,00	99.693.300,00
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Utang belanja barang yang diserahkan ke masyarakat	200.000.000,00		200.000.000,00	0,00
Sub Jumlah			2.271.803.406,00	6.773.367.407,39	2.271.803.406,00	6.773.367.407,39
Utang Belanja Jasa						
32	Badan Pendapatan Daerah	Utang insentif pemungutan pajak daerah - Non ASN	105.675.000,00	0,00	105.675.000,00	0,00
33	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Utang beban cetak kuitansi no. PKO.934/TU/051/XII/2023 an. UD Angrek Mas, Yohanis Bitin Berek	2.036.554,00	0,00	2.036.554,00	0,00
34	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Utang belanja jasa nara sumber	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
35	Dinas Kesehatan	Utang beban jasa dokter jaga dan perawat jaga (JKN non Kapitasi) thn 2023	645.178.350,00	0,00	645.178.350,00	0,00
36	Dinas Kesehatan	Utang beban jasa dokter jaga dan perawat jaga (JKN non Kapitasi) thn 2024	0,00	594.248.910,00	0,00	594.248.910,00
37	Dinas Kesehatan	Utang belanja listrik	0,00	5.733.900,00	0,00	5.733.900,00
38	Dinas Kesehatan	Utang belanja internet	0,00	1.783.800,00	0,00	1.783.800,00
39	Dinas Kesehatan	an. BPJS Kesehatan atas utang belanja bantuan iuran bagi peserta pekerja menerima upah dan peserta bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yang didaftarkan oleh Pemkab Belu	0,00	59.421.600,00	0,00	59.421.600,00
40	BLUD	Utang belanja pemeliharaan bangunan rumah sakit	699.783.000,00	0,00	699.783.000,00	0,00
41	BLUD	Utang belanja perjalanan dinas (rujuk dan antar pasien)	20.890.000,00	0,00	20.890.000,00	0,00
42	BLUD	Utang pemeliharaan dan SC alat besar an. PT Kone	17.052.930,00	0,00	17.052.930,00	0,00
43	BLUD	Utang belanja uji emisi gas buang	125.818.102,00	0,00	125.818.102,00	0,00
44	BLUD	Utang penggantian darah PMI	50.590.000,00	0,00	50.590.000,00	0,00
45	BLUD	Utang jasa pemeriksaan lap pasien rujukan Desember 2023	28.458.250,00	0,00	28.458.250,00	0,00
46	BLUD	Utang iuran BPJS PNS atas jasa layanan TA.2023	331.010.243,00	0,00	331.010.243,00	0,00
47	BLUD	Utang belanja perjalanan dinas (rujuk dan antar pasien)	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	0,00
48	BLUD	Utang penggantian darah PMI tahun 2024	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
49	BLUD	Utang belanja alat dan bahan pembersih	0,00	89.604.750,00	0,00	89.604.750,00
50	BLUD	Utang belanja perjalanan dinas	0,00	19.460.000,00	0,00	19.460.000,00
51	BLUD	Utang belanja pemeliharaan dan perbaikan alkes	0,00	57.389.800,00	0,00	57.389.800,00
52	BLUD	Utang belanja iuran JKN atas jasa medis Januari sd Juli 2024	0,00	7.389.639,00	0,00	7.389.639,00
53	BLUD	Utang belanja pemeriksaan lab pasien rujukan bulan Desember	0,00	884.500,00	0,00	884.500,00
54	BLUD	Utang belanja obat an. PT. Merapi Utama Pharma	0,00	358.411.230,00	0,00	358.411.230,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No	SKPD	Uraian	Saldo Awal 2024 (Rp)	Mutasi Utang		Saldo Akhir 2024 (Rp)
				Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
55	BLUD	PT. Indofarma Global Medika	0,00	8.531.500,00	0,00	8.531.500,00
56	BLUD	Jasa Pelayanan Medis an. RSUD Prof DR. W.Z. Johannes Kupang	0,00	57.543.000,00	0,00	57.543.000,00
Sub Jumlah			2.028.452.429,00	1.286.402.629,00	2.028.452.429,00	1.286.402.629,00
Sub Jumlah utang belanja barang dan jasa			4.300.255.835,00	8.059.770.036,39	4.300.255.835,00	8.059.770.036,39
III	Utang Belanja Modal					
57	DPMTSP	CV Pondok Berlian (fisik bangunan gedung kantor DPMTSP)	0,00	309.180.259,42	0,00	309.180.259,42
58	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	CV Pembangunan (RKB SMPN Halibete tahun 2023)	0,00	245.641.404,17	0,00	245.641.404,17
59	Dinas Kesehatan	CV Desakon (jasa konsultan perencanaan bangunan labkesda)	0,00	348.540.000,00	0,00	348.540.000,00
60	Dinas Kesehatan	CV Putra Sulong (KDP atas bangunan kesehatan Puskesmas Atapupu)	0,00	145.192.500,00	0,00	145.192.500,00
61	Dinas Kesehatan	CV Disen Konsultan (jasa konsultan pengawasan pembangunan sumur bor)	0,00	44.622.000,00	0,00	44.622.000,00
62	RSUD	CV Mitra Sarana Mandiri (fisik bangunan gedung cathlab)	0,00	38.668.500,00	0,00	38.668.500,00
Sub Jumlah Utang Belanja Modal			0,00	1.131.844.663,59	0,00	1.131.844.663,59
Jumlah Utang Belanja			13.371.092.847,80	24.412.746.662,38	13.371.092.847,80	24.412.746.662,38

Peningkatan Utang Belanja tahun 2024 sebagian besar disebabkan oleh:

- 1) Pengakuan utang belanja modal atas selisih progres pekerjaan fisik dengan realisasi keuangan tahun 2024 pada akun utang belanja, yang pada tahun 2023 diakui pada utang jangka pendek lainnya;
- 2) Peningkatan utang belanja barang dan jasa atas selisih progres pekerjaan fisik dengan realisasi keuangan tahun 2024 yang sampai dengan 31 Desember 2024 belum selesai pekerjaannya; dan
- 3) Peningkatan utang belanja barang dan jasa BLUD yang disebabkan oleh menurunnya Pendapatan BLUD tahun 2024 khususnya pendapatan pengelolaan BLUD dari Layanan Kesehatan jika dibandingkan dengan tahun 2023. Hal ini meningkatkan utang belanja atas kebutuhan pengeluaran yang seharusnya dapat dibiayai oleh pendapatan BLUD.

Utang belanja modal tahun 2024 sebesar Rp1.131.844.663,59 merupakan utang atas selisih progres pekerjaan fisik dengan keuangan dari belanja modal, dengan rincian sebagai berikut:



- 1) Utang atas nama CV Pondok Berlian atas selisih pekerjaan fisik bangunan Gedung kantor DPMPSTSP dengan realisasi fisik keuangan tahun 2024 sebesar 5,03% (92,53%-87,50%) atau Rp309.180.259,42;
- 2) Utang kepada CV Pembangunan atas pekerjaan fisik SMPN Halibete tahun 2023 yang bersumber dari DAU *Specific Grant* yang penyerahan fisiknya baru dilaksanakan di tahun 2024 sebesar Rp245.641.404,17;
- 3) Utang kepada CV Desakon atas 100% jasa konsultan perencanaan pembangunan Gedung Labkesda pada Dinas Kesehatan yang sampai dengan 31 Desember 2024 belum dibayar sebesar Rp348.540.000,00;
- 4) Utang bangunan kesehatan yang sampai dengan 31 Desember 2024 belum dibayar kepada CV Putra Sulung sebesar Rp145.192.500,00;
- 5) Utang kepada CV Disen Konsultan atas pekerjaan jasa konsultan pengawasan pembangunan sumur bor pada Dinas Kesehatan sebesar Rp44.622.000,00; dan
- 6) Utang kepada CV Mitra Sarana Mandiri atas selisih progres pekerjaan fisik pembangunan gedung Cathlab RSUD Atambua dengan realisasi keuangan 1,95% (91,95%-90%) sebesar Rp38.668.500,00.

5.3.2.1.3 Utang Jangka Pendek Lainnya

31-Des-24	31-Des-23
<u>Rp4.929.998.108,86</u>	<u>Rp5.238.462.770,44</u>

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan kewajiban kepada pihak lain selain utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan utang belanja.

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.929.998.108,86. Jika dibandingkan dengan saldo 31 Desember 2023 sebesar Rp5.238.462.770,44, utang jangka pendek lainnya di tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp(308.464.661,58) atau (5,89)%.

Rincian mutasi utang jangka pendek lainnya disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.228

Utang Jangka Pendek Lainnya

No.	SKPD	Uraian	Saldo Awal 2024 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir 2024 (Rp)	%
				Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)		
1	PPKD - BPKAD	Uang Jaminan	4.982.600.126,44	45.264.366,78	97.866.384,36	4.929.998.108,86	(1,06)
2	PPKD - BPKAD	Uang titipan PAUD untuk Pemerintah Pusat	7.209.000,00	0,00	7.209.000,00	0,00	(100,00)
3	PPKD - BPKAD	Kelebihan transfer temuan BPK tahun 2022 - CV Diamond Mandiri	9.959.244,00	0,00	9.959.244,00	0,00	(100,00)
4	Dinas PMPTSP	CV Archilogic	238.694.400,00	0,00	238.694.400,00	0,00	(100,00)
Jumlah			5.238.462.770,44	45.264.366,78	353.729.028,36	4.929.998.108,86	(5,89)

1) Uang Jaminan

Uang sebesar Rp4.929.998.108,86 merupakan uang jaminan yang sampai tanggal neraca belum dicairkan/dikembalikan kepada pihak ketiga. Uang jaminan tersebut terdapat pada 5 rekening. Rekening-rekening tersebut untuk menampung jaminan yang dibayarkan pihak ketiga/rekanan kepada Pemkab Belu sebagai persyaratan dalam melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku. Jaminan tersebut selain jaminan pemeliharaan dapat dicairkan apabila perusahaan-perusahaan tersebut tidak melanjutkan lagi aktivitasnya dan mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati Belu setelah memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dalam perjanjian. Rincian uang jaminan sebagai berikut.

Uang sebesar Rp4.929.998.108,86 merupakan uang jaminan yang sampai tanggal neraca belum dicairkan/dikembalikan kepada pihak ketiga. Uang jaminan tersebut terdapat pada 5 rekening dan dicatat sebagai Kas yang Dibatasi Penggunaannya pada Akun Aset Lain-lain.

Rekening-rekening tersebut digunakan untuk menampung jaminan yang dibayarkan pihak ketiga/rekanan kepada Pemkab Belu sebagai persyaratan dalam melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku. Jaminan tersebut selain jaminan pemeliharaan dapat dicairkan apabila perusahaan-perusahaan tersebut tidak melanjutkan lagi aktivitasnya dan mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati Belu setelah memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dalam perjanjian.



Rincian uang jaminan sebagai berikut.

Tabel 5.229

Uang Jaminan

No	Uraian	Nomor Rekening	Nilai (Rp)
1	Jaminan Pemeliharaan	003.01.01-000202-1	514.272.074,00
2	Jaminan Reklamasi IUP Produksi	003.01.15-000004-4	3.070.771.416,26
3	Jaminan Kontrak Pasar	003.01.15-000003-2	4.225.841,13
4	Jaminan Pembongkaran Media Reklame	003.01.15-000008-0	8.191.135,77
5	Jaminan Kesungguhan	0267.01.000412-30-2	1.332.537.641,00
	Jumlah		4.929.998.108,86

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada pengungkapan Akun Kas yang Dibatasi Penggunaannya.

Penambahan uang jaminan pada tahun 2024 sebesar Rp45.264.366,78 berasal dari penambahan baru jaminan pembongkaran reklame tahun 2024 dan penambahan atas jasa giro dari rekening jaminan.

Pengurangan uang jaminan pada tahun 2024 sebesar Rp97.866.384,36 berasal dari pemindahbukuan jaminan pembongkaran reklame asal tahun 2015 s.d. 2023 yang telah menjadi hak Pemkab Belu ke RKUD, dan atas biaya administrasi rekening bank masing-masing rekening jaminan.

2) Uang Titipan PAUD

Saldo uang titipan PAUD tahun 2023 sebesar Rp7.209.000,00 telah dikembalikan pada tahun 2024 ke kas negara.

3) Kelebihan Transfer Temuan BPK tahun 2022

Dana atas kelebihan transfer atas temuan BPK tahun 2022 tahun sebesar Rp9.959.244,00 telah dikembalikan pada tahun 2024 atas nama CV Diamond Mandiri.

4) Utang atas nama CV Archilogic tahun 2023 sebesar Rp238.694.400,00 telah dilunasi pada tahun 2024 dengan SP2D Nomor 996/SP2D/LS/V/2024.

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

31-Des-24

Rp0,00

31-Des-23

Rp0,00

Tidak terdapat kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2024 pada Pemerintah Kabupaten Belu. Kondisi ini sama seperti tahun 2023.



5.3.3 EKUITAS

31-Des-24	31-Des-23
<u>Rp1.657.934.846.469,04</u>	<u>Rp1.659.250.988.290,89</u>

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.657.934.846.469,04. Jika dibandingkan dengan saldo ekuitas tahun 2023 sebesar Rp1.659.250.988.290,89 maka terdapat penurunan sebesar Rp(1.316.141.821,85) atau (0,08)%. Saldo ekuitas pada Neraca bersumber dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Uraianya sebagai berikut.

Tabel 5.230
Ekuitas

No	Uraian	Saldo		Kenaikan/ (Penurunan) Rp	%
		31-Des-24 Rp	31-Des-23 Rp		
1	Aset	1.687.311.886.600,28	1.677.869.223.887,93	9.442.662.712,35	0,56
2	Kewajiban	(29.377.040.131,24)	(18.618.235.597,04)	(10.758.804.534,20)	57,79
	Jumlah	1.657.934.846.469,04	1.659.250.988.290,89	(1.316.141.821,85)	(0,08)

5.4 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemkab Belu untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Dalam penjelasan LO ini akan disajikan unsur yang dicakup secara langsung dalam LO terdiri dari Pendapatan - LO, Beban, Transfer, dan Pos-pos Luar Biasa.

5.4.1 PENDAPATAN - LO

Tahun 2024	Tahun 2023
<u>Rp928.692.402.842,93</u>	<u>Rp884.441.239.626,96</u>

Pendapatan - LO merupakan pendapatan yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Belu untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Pendapatan - LO untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp928.692.402.842,93. Angka tersebut menunjukkan peningkatan sebesar Rp44.251.163.215,97 atau 5,00% jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp884.441.239.626,96.



Rincian pendapatan - LO tahun 2024 dengan perbandingan tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.230
Pendapatan - LO

No.	Pendapatan - LO	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenalkan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah - LO	94.915.569.718,15	101.287.298.156,65	(6.371.728.438,50)	(6,29)
2	Pendapatan Transfer - LO	806.871.221.446,30	767.927.352.283,31	38.943.869.162,99	5,07
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO	26.905.611.678,48	15.226.589.187,00	11.679.022.491,48	76,70
	Jumlah	928.692.402.842,93	884.441.239.626,96	44.251.163.215,97	5,00

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LO

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp94.915.569.718,15	Rp101.287.298.156,65

Pendapatan Asli Daerah - LO Kabupaten Belu adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp94.915.569.718,15, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.232
Pendapatan Asli Daerah - LO

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenalkan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	20.677.071.335,00	21.106.250.919,00	(429.179.584,00)	(2,03)
2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	5.435.794.172,81	5.465.405.935,88	(29.611.763,07)	(0,54)
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	3.480.688.664,00	6.529.604.943,00	(3.048.916.279,00)	(46,69)
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO	65.322.015.546,34	68.186.036.358,77	(2.864.020.812,43)	(4,20)
	Jumlah	94.915.569.718,15	101.287.298.156,65	(6.371.728.438,50)	(6,29)

Jumlah ini mengalami penurunan sebesar Rp(6.371.728.438,50) atau (6,29)% jika dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp101.287.298.156,65. Pengakuan Pendapatan - LO didasarkan pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan/atau dokumen lain yang disejajarkan yang diterbitkan pada tahun 2024.

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LO

Pendapatan Pajak Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh beberapa SKPD pengelola yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten



Belu tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2024, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang diterbitkan pada tahun 2024 ditambah dengan penerimaan pajak tanpa ketetapan tahun 2024.

Pendapatan Pajak Daerah - LO tahun 2024 sebesar Rp20.677.071.335,00 Jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp21.106.250.919,00, maka terjadi penurunan sebesar Rp(429.179.584,00) atau (2,03)%.

Rincian Pajak Daerah - LO dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.233**Pendapatan Pajak Daerah - LO**

No.	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%
1	PBJT-Hotel -LO	875.212.388,00	743.601.993,00	131.610.395,00	17,70
2	PBJT-Restoran-LO	4.447.208.918,00	3.681.221.488,00	765.987.430,00	20,81
3	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-LO	34.306.669,00	9.408.000,00	24.898.669,00	264,65
4	Pajak Reklame - LO	234.395.123,00	364.049.460,00	(129.654.337,00)	(35,61)
5	PBJT- Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain-LO	5.362.781.905,00	5.218.947.324,00	143.834.581,00	2,76
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	3.654.662.344,00	5.400.624.236,00	(1.745.961.892,00)	(32,33)
7	PBJT- Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir-LO	398.000,00	99.000,00	299.000,00	302,02
8	Pajak Air Bawah Tanah - LO	15.185.682,00	16.849.794,00	(1.664.112,00)	(9,88)
9	Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	4.731.485.556,00	3.992.765.324,00	738.720.232,00	18,50
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan - LO	1.321.434.750,00	1.678.684.300,00	(357.249.550,00)	(21,28)
	Jumlah	20.677.071.335,00	21.106.250.919,00	(429.179.584,00)	(2,03)



Terdapat selisih antara pendapatan Pajak Daerah - LRA dengan pendapatan Pajak Daerah - LO sebesar Rp1.484.983.685,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.234**Rincian Pendapatan Pajak Daerah - LO**

No	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%
1	PBJT-Hotel -LO	875.212.388,00	864.822.388,00	10.390.000,00	1,20
2	PBJT-Restoran-LO	4.447.208.918,00	4.413.357.117,00	33.851.801,00	0,77
3	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-LO	34.306.669,00	34.373.669,00	(67.000,00)	(0,19)
4	Pajak Reklame - LO	234.395.123,00	234.395.123,00	0,00	0,00
5	PBJT- Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain-LO	5.362.781.905,00	5.362.781.905,00	0,00	0,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	3.654.662.344,00	3.654.662.344,00	0,00	0,00
7	PBJT- Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir-LO	398.000,00	398.000,00	0,00	0,00
8	Pajak Air Bawah Tanah	15.185.682,00	13.638.820,00	1.546.862,00	11,34
9	Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	4.731.485.556,00	3.294.223.534,00	1.437.262.022,00	43,63
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	1.321.434.750,00	1.321.434.750,00	0,00	0,00
	Jumlah	20.677.071.335,00	19.194.087.650,00	1.482.983.685,00	7,73

Selisih sebesar Rp1.482.983.685,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Selisih PBJT-Hotel LO tahun Rp10.390.000,00 merupakan penambahan piutang pajak hotel tahun 2024;
- 2) Selisih PBJT-Restoran LO Rp Rp33.851.801,00 merupakan penambahan atas piutang pajak restoran tahun 2024;
- 3) Selisih pada PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan Rp(67.000,00) karena adanya pelunasan piutang tahun 2023;
- 4) Selisih pajak air tanah Rp1.546.862,00 merupakan penambahan atas piutang pajak air bawah tanah tahun 2024; dan
- 5) Selisih Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Rp1.437.262.022,00 terdiri dari pelunasan piutang PBB-P2 tahun 2023 Rp(224.724.612,00), dan penambahan piutang PBB-P2 atas penetapan tahun 2024 yang belum diterima pembayarannya sampai dengan 31 Desember 2024 Rp1.661.986.634,00.

**5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO**

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh beberapa SKPD pengelola yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Belu tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Retribusi Daerah pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2024, sehingga nilai pendapatan retribusi daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang diterbitkan pada tahun 2024 ditambah dengan penerimaan retribusi tanpa ketetapan tahun 2024.

Pendapatan Retribusi Daerah - LO di tahun 2024 sebesar Rp5.435.794.172,81, jumlah ini mengalami penurunan sebesar Rp(29.611.763,07) atau (0,54)% jika dibandingkan dengan Retribusi Daerah - LO di tahun 2023.

Pendapatan Rincian Retribusi Daerah - LO adalah sebagai berikut.

Tabel 5.235
Retribusi Daerah - LO

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%
Retribusi Jasa Umum	2.681.923.350,00	1.858.429.650,00	823.493.700,00	44,31
Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	1.091.772.350,00	1.189.443.250,00	(97.670.900,00)	(8,21)
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO	614.465.000,00	463.195.000,00	151.270.000,00	32,66
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	67.088.000,00	53.706.000,00	13.382.000,00	24,92
Retribusi PKB-Mobil Penumpang-Sedan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Pasar - LO	872.818.000,00	0,00	872.818.000,00	0,00
Penyediaan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO	35.780.000,00	0,00	35.780.000,00	0,00
Penyediaan Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya - LO	0,00	7.314.000,00	(7.314.000,00)	(100,00)
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	0,00	98.280.400,00	(98.280.400,00)	(100,00)
Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO	0,00	46.491.000,00	(46.491.000,00)	(100,00)
Retribusi Jasa Usaha	2.057.754.822,81	3.201.732.885,88	(1.143.978.063,07)	(35,73)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	623.958.422,81	604.362.685,88	19.595.736,93	3,24
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan - LO	1.139.050.000,00	2.269.073.200,00	(1.130.023.200,00)	(49,80)
Retribusi Terminal - LO	0,00	47.010.000,00	(47.010.000,00)	(100,00)
Retribusi Rumah Potong Hewan- LO	238.017.400,00	214.642.000,00	23.375.400,00	10,89
Retribusi Tempat Rekreasi & Olahraga- LO	15.729.000,00	47.925.000,00	(32.196.000,00)	(67,18)
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah- LO	41.000.000,00	18.720.000,00	22.280.000,00	119,02
Retribusi Perizinan Tertentu	696.116.000,00	405.243.400,00	290.872.600,00	71,78
Pemberian Izin Mendirikan Bangunan - LO	696.116.000,00	405.243.400,00	290.872.600,00	71,78
Pemberian Izin Trayek - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	5.435.794.172,81	5.465.405.935,88	(29.611.763,07)	(0,54)



Bila dibandingkan dengan realisasi pendapatan retribusi daerah - LRA tahun 2024 maka terdapat selisih antara pendapatan retribusi daerah - LO dan LRA sebesar Rp501.204.433,81, yang dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.236

Rincian Retribusi Daerah - LO

No.	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)	%
I	Retribusi Jasa Umum	2.681.923.350,00	2.229.003.350,00	452.920.000,00	20,32
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan -LO	1.091.772.350,00	1.091.772.350,00	0,00	0,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan -LO	614.465.000,00	614.465.000,00	0,00	0,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum -LO	67.088.000,00	67.088.000,00	0,00	0,00
4	Retribusi PKB-Mobil Penumpang-Sedan- LO	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Retribusi Pelayanan Pasar -LO	872.818.000,00	419.898.000,00	452.920.000,00	107,86
6	Penyediaan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus -LO	35.780.000,00	35.780.000,00	0,00	0,00
8	Penyediaan Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi -LO	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Retribusi Jasa Usaha	2.057.754.822,81	2.009.470.389,00	48.284.433,81	2,40
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	623.958.422,81	575.673.989,00	48.284.433,81	8,39
2	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan - LO	1.139.050.000,00	1.139.050.000,00	0,00	0,00
3	Retribusi Terminal- LO	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Retribusi Rumah Potong Hewan- LO	238.017.400,00	238.017.400,00	0,00	0,00
5	Retribusi Tempat Rekreasi & Olahraga- LO	15.729.000,00	15.729.000,00	0,00	0,00
6	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah- LO	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00
III	Retribusi Perizinan Tertentu	696.116.000,00	696.116.000,00	0,00	0,00
1	Pemberian Izin Mendirikan Bangunan - LO	696.116.000,00	696.116.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	5.435.794.172,81	4.934.589.739,00	501.204.433,81	10,16

Selisih Rp501.204.433,81 tersebut berasal dari:

- 1) Selisih retribusi pelayanan pasar Rp452.920.000,00 berasal dari pelunasan piutang tahun 2023 sebesar Rp(259.600.000,00), dan atas penetapan retribusi daerah tahun 2024 yang belum diterima pembayarannya per 31 Desember 2024 sebesar Rp712.520.000,00; dan
- 2) Selisih retribusi pemakaian kekayaan daerah Rp48.284.433,81 berasal dari pelunasan piutang retribusi piutang tahun 2023 Rp(15.340.000,00), pelunasan piutang retribusi Bapenda Rp(6.985.566,19), dan atas penetapan piutang retribusi tahun



2024 yang sampai dengan 31 Desember 2024 belum diterima pembayarannya sebesar Rp70.610.000,00.

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Realisasi pendapatan - LO ini sebesar Rp3.480.688.664,00 di tahun 2024. Terdapat penurunan sebesar Rp(3.048.916.279,00) atau (46,69)% dibandingkan realisasi tahun 2023.

Tabel 5.237

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)	%
1	Bagian Laba Atas Penyetoran Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD	3.480.688.664,00	6.529.604.943,00	(3.048.916.279,00)	(46,69)
	Jumlah	3.480.688.664,00	6.529.604.943,00	(3.048.916.279,00)	(46,69)

Realisasi ini sama dengan realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Laporan Realisasi Anggaran.

5.4.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO

Di tahun 2024 realisasi Lain-lain PAD yang Sah - LO ini sebesar Rp65.322.015.546,34. Terdapat penurunan sebesar Rp(2.864.020.812,43) atau (4,20)% jika dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp68.186.036.358,77. Rinciannya adalah sebagai berikut.

Tabel 5.238

Lain-Lain PAD Yang Sah- LO

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	8.913.000,00	0,00	8.913.000,00	0,00
2	Penerimaan Jasa Giro	777.776.352,54	666.957.875,99	110.818.476,55	16,62
3	Penerimaan Bunga Deposito	1.160.464.227,99	1.239.741.635,10	(79.277.407,11)	(6,39)
4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	977.065.561,35	431.308.637,51	545.756.923,84	126,54
5	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	457.399.501,52	1.295.713.156,98	(838.313.655,46)	(64,70)
6	Pendapatan Denda Pajak	105.989.515,00	272.202.268,00	(166.212.753,00)	(61,06)
7	Pendapatan Denda Retribusi	2.772.800,00	9.229.000,00	(6.456.200,00)	(69,96)
8	Pendapatan Dari Pengembalian	314.776.253,00	415.727.505,54	(100.951.252,54)	(24,28)
9	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Pendapatan BLUD	61.516.858.334,94	63.855.156.279,65	(2.338.297.944,71)	(3,66)
11	Pendapatan Bunga Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	65.322.015.546,34	68.186.036.358,77	(2.864.020.812,43)	(4,20)



Terdapat selisih antara Lain-lain PAD yang Sah - LO dengan Lain-lain PAD yang sah - LRA sebesar Rp4.860.748.324,06 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.239**Rincian Lain-Lain PAD yang Sah- LO**

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO	8.913.000,00	8.913.000,00	0,00	0,00
Penerimaan Jasa Giro - LO	777.776.352,54	777.776.352,54	0,00	0,00
Penerimaan Bunga - LO	1.160.464.227,99	1.169.748.162,99	(9.283.935,00)	(0,79)
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) - LO	977.065.561,35	3.010.683.070,29	(2.033.617.508,94)	(67,55)
Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	457.399.501,52	457.399.501,52	0,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak - LO	105.989.515,00	105.989.515,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Retribusi - LO	2.772.800,00	2.772.800,00	0,00	0,00
Pendapatan Dari Pengembalian - LO	314.776.253,00	349.303.826,00	(34.527.573,00)	(9,88)
Pendapatan BLUD - LO	61.516.858.334,94	54.578.680.993,94	6.938.177.341,00	12,71
Jumlah	65.322.015.546,34	60.461.267.222,28	4.860.748.324,06	8,04

Selisih Rp4.860.748.324,06 tersebut berasal dari:

- 1) Selisih Rp2.285,00 merupakan pendapatan bunga atas saldo rekening TDF Pusat sesuai Nota Dinas Direktur Pengelolaan Pemeriksaan VI.II No.35/ND/XIX.6/04/2025 dan SK S 35 PK 2025;
- 2) Selisih penerimaan bunga Rp(9.286.220,00) merupakan pelunasan piutang penjualan kendaraan kepada DPRD asal tahun 2019;
- 3) Selisih tuntutan ganti kerugian daerah Rp(2.033.617.508,94) berasal dari:
 - a) Reklasifikasi pelunasan temuan BPK atas kekurangan volume pada RSUD yang tercatat sebagai aset lainnya Rp(23.201.984,97);
 - b) Reklasifikasi pelunasan temuan BPK atas kekurangan volume pada Dinas PUPR yang tercatat sebagai aset lainnya Rp(1.235.041.307,41);
 - c) Reklasifikasi pelunasan temuan BPK atas kekurangan volume pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga yang tercatat sebagai aset lainnya Rp(303.126.420,56);



Terdapat selisih antara Lain-lain PAD yang Sah - LO dengan Lain-lain PAD yang sah - LRA sebesar Rp4.860.748.324,06 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.239**Rincian Lain-Lain PAD yang Sah- LO**

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO	8.913.000,00	8.913.000,00	0,00	0,00
Penerimaan Jasa Giro - LO	777.776.352,54	777.776.352,54	0,00	0,00
Penerimaan Bunga - LO	1.160.464.227,99	1.169.748.162,99	(9.283.935,00)	(0,79)
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) - LO	977.065.561,35	3.010.683.070,29	(2.033.617.508,94)	(67,55)
Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	457.399.501,52	457.399.501,52	0,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak - LO	105.989.515,00	105.989.515,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Retribusi - LO	2.772.800,00	2.772.800,00	0,00	0,00
Pendapatan Dari Pengembalian - LO	314.776.253,00	349.303.826,00	(34.527.573,00)	(9,88)
Pendapatan BLUD - LO	61.516.858.334,94	54.578.680.993,94	6.938.177.341,00	12,71
Jumlah	65.322.015.546,34	60.461.267.222,28	4.860.748.324,06	8,04

Selisih Rp4.860.748.324,06 tersebut berasal dari:

- 1) Selisih penerimaan bunga Rp(9.283.935,00) terdiri dari:
 - a) Sebesar Rp2.285,00 merupakan pendapatan bunga atas saldo rekening TDF Pusat sesuai Nota Dinas Direktur Pengelolaan Pemeriksaan VI.II No.35/ND/XIX.6/04/2025 dan SK S 35 PK 2025; dan
 - b) Sebesar Rp(9.286.220,00) merupakan pelunasan piutang penjualan kendaraan kepada DPRD asal tahun 2019.
- 2) Selisih tuntutan ganti kerugian daerah Rp(2.033.617.508,94) berasal dari:
 - a) Reklasifikasi pelunasan temuan BPK atas kekurangan volume pada RSUD yang tercatat sebagai aset lainnya Rp(23.201.984,97);
 - b) Reklasifikasi pelunasan temuan BPK atas kekurangan volume pada Dinas PUPR yang tercatat sebagai aset lainnya Rp(1.235.041.307,41);
 - c) Reklasifikasi pelunasan temuan BPK atas kekurangan volume pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga yang tercatat sebagai aset lainnya Rp(303.126.420,56);



- d) Reklasifikasi pelunasan temuan BPK atas kekurangan volume pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang tercatat sebagai aset lainnya Rp(257.908.146,00);
 - e) Pelunasan piutang TPTGR tahun 2023 Rp(216.019.650,00); dan
 - f) Piutang TPTGR tahun 2024 yang belum dilunasi sebesar Rp1.680.000,00.
- 3) Selisih pendapatan pengembalian Rp(34.527.573,00) berasal dari pelunasan piutang pengembalian tahun 2023; dan
 - 4) Selisih pendapatan BLUD pendapatan Rp6.938.177.341,00 berasal dari penulasan piutang BLUD tahun 2023 Rp(8.725.596.700,00) dan penetapan piutang BLUD tahun 2024 Rp15.663.774.041,00.

5.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp806.871.221.446,30	Rp767.927.352.283,31

Pendapatan Transfer - LO Kabupaten Belu adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp806.871.221.446,30 dan bertambah sebesar Rp38.943.869.162,99 atau 5,07% dibandingkan tahun 2023. Rincian pendapatan transfer - LO disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.240

Rincian Pendapatan Transfer - LO

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenalkan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan LO	768.708.955.079,30	717.903.709.512,31	50.805.245.566,99	7,08
2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	9.107.161.000,00	21.126.761.000,00	(12.019.600.000,00)	(56,89)
3	Transfer Antar Daerah - LO	29.055.105.367,00	28.896.881.771,00	158.223.596,00	0,55
Jumlah		806.871.221.446,30	767.927.352.283,31	38.943.869.162,99	5,07



Pendapatan Transfer - LO jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer - LRA terdapat selisih sebesar Rp(70.424.621.541,00) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.241**Rincian Selisih Pendapatan Transfer - LO**

No.	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	768.708.955.079,30	833.763.906.818,30	(65.054.951.739,00)
2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	9.107.161.000,00	9.107.161.000,00	0,00
3	Transfer Antar Daerah	29.055.105.367,00	34.424.775.169,00	(5.369.669.802,00)
	Jumlah	806.871.221.446,30	877.295.842.987,30	(70.424.621.541,00)

Penjelasan masing-masing pos Pendapatan - LO sebagai berikut.

5.4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan LO tahun 2024 sebesar Rp768.708.955.079,30. Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2023 maka terdapat kenaikan sebesar Rp50.805.245.566,99 atau 7,08%.

Tabel 5.242**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO**

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	4.104.954.000,00	5.271.827.000,00	(1.166.873.000,00)	(22,13)
	Bagi Hasil Pajak	2.813.023.600,00	3.736.627.000,00	(923.603.400,00)	(24,72)
	Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.291.930.400,00	1.535.200.000,00	(243.269.600,00)	(15,85)
2	Dana Alokasi Umum (DAU)	530.182.469.628,00	488.297.498.097,00	41.884.971.531,00	8,58
3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	234.421.531.451,30	224.334.384.415,31	10.087.147.035,99	4,50
	Jumlah	768.708.955.079,30	717.903.709.512,31	50.805.245.566,99	7,08

Terdapat selisih antara Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan LRA dengan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan LO sebesar Rp(592.789.000,00).

Tabel 5.243**Selisih Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO**

No.	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	768.708.955.079,30	769.300.744.079,30	(591.789.000,00)
	Jumlah	768.708.955.079,30	769.300.744.079,30	(591.789.000,00)



Selisih pendapatan transfer pemerintah pusat - dana perimbangan sebesar Rp(591.789.000,00) berasal dari pelunasan piutang *Treasury Deposit Facility (TDF)* tahun 2023 yang diterima tahun 2024 sebesar Rp(609.063.000,00) dan pengakuan atas piutang TDF tahun 2024 sebesar Rp17.274.000,00; dan

5.4.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO

Tabel 5.244

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya- LO

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenalkan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Dana Insentif Fiskal - LO	9.107.161.000,00	0,00	9.107.161.000,00	0,00
2	Dana Insentif Daerah - LO	0,00	21.126.761.000,00	(21.126.761.000,00)	(100,00)
	Jumlah	9.107.161.000,00	21.126.761.000,00	(12.019.600.000,00)	(56,89)

Transfer pemerintah pusat - lainnya - LO tahun 2024 adalah sebesar Rp9.107.161.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp21.126.761.000,00 maka terdapat penurunan sebesar Rp(12.019.600.000,00) atau (56,89)%.

Terdapat selisih antara transfer pemerintah pusat lainnya - LO sama dengan realisasi transfer pemerintah pusat lainnya pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp(64.463.162.739,00).

Tabel 5.243

Selisih Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO

No.	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)
1	Dana Insentif Fiskal	9.107.161.000,00	9.107.161.000,00	-
2	Dana Insentif Daerah	0,00	-	-
3	Dana Desa	0,00	64.463.162.739,00	(64.463.162.739,00)
	Jumlah	9.107.161.000,00	73.570.323.739,00	(64.463.162.739,00)

Selisih pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya - LO pada dana desa Rp(64.463.162.739,00) merupakan penerapan Buletin Teknis (Bultek) Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua di mana beban transfer dana desa (non-provinsi) tidak disajikan dalam Laporan Operasional, karena pendapatan dana desa bukan merupakan pendapatan operasional pemerintah daerah.

**5.4.1.2.3 Transfer Antar Daerah - LO****Tabel 5.245****Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO**

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	29.055.105.367,00	28.896.881.771,00	158.223.596,00	0,55
	Jumlah	29.055.105.367,00	28.896.881.771,00	158.223.596,00	0,55

Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO seluruhnya berasal dari pengakuan pendapatan bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi NTT untuk tahun 2024.

Transfer Antar Daerah - LO tahun 2024 sebesar Rp29.055.105.367,00. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar Rp158.223.596,00 atau 0,55% dibandingkan tahun 2023.

Terdapat selisih antara Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO dari Provinsi dengan realisasi LRA sebesar Rp(5.369.669.802,00) yang dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.246**Selisih Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO**

No	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)	%
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	29.055.105.367,00	34.424.775.169,00	(5.369.669.802,00)	(15,60)
	Jumlah	29.055.105.367,00	34.424.775.169,00	(5.369.669.802,00)	(15,60)

Selisih sebesar Rp(5.369.669.802,00) berasal dari:

- 1) Pelunasan piutang bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi NTT asal tahun 2023 sebesar Rp(8.202.584.310,00); dan
- 2) Pengakuan piutang DBH Provinsi tahun 2024 sebesar Rp2.832.914.508,00.

5.4.1.3 Lain - Lain Pendapatan Yang Sah - LO

Tahun 2024	Tahun 2023
<u>Rp26.905.611.678,48</u>	<u>Rp15.226.589.187,00</u>

Pada tahun 2024, saldo Lain - Lain Pendapatan yang Sah - LO sebesar Rp26.905.611.678,48. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka terdapat kenaikan sebesar Rp11.679.022.491,48 atau 76,70%.



Rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO adalah sebagai berikut.

Tabel 5.247**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lainnya - LO**

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Pendapatan Hibah - LO	14.595.151.353,40	3.850.213.055,00	10.744.938.298,40	279,07
2	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan - LO	12.310.460.325,08	11.376.376.132,00	934.084.193,08	8,21
	Jumlah	26.905.611.678,48	15.226.589.187,00	11.679.022.491,48	76,70

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah - LO

Pendapatan Hibah - LO tahun 2024 sebesar Rp14.595.151.353,40 atau naik Rp10.744.938.298,40 atau 279,07% dari tahun 2023.

Perbandingan antara pendapatan hibah LO dan pendapatan hibah LRA disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.248**Pendapatan Hibah - LO**

No	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)
1	Pendapatan Hibah	14.595.151.353,40	0,00	14.595.151.353,40
	Jumlah	14.595.151.353,40	0,00	14.595.151.353,40

Selisih Pendapatan Hibah - LO dan Pendapatan Hibah - LRA sebesar Rp14.595.151.353,40 dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Pendapatan hibah berupa barang obat-obatan dan vaksin dari Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi NTT kepada Dinas Kesehatan sesuai Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) Tahun 2024 sebesar Rp7.463.803.529,40;
- 2) Pendapatan hibah berupa barang obat-obatan dan vaksin dari Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) kepada Dinas Kesehatan sesuai SBBK Tahun 2024 sebesar Rp335.378.291,00;
- 3) Pendapatan hibah berupa Aset Tetap Peralatan dan Mesin *Mobile X-Ray* dari *Dropping* Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Nomor BA: KN.01.08/D.V/2024 tanggal 15 Januari 2024 sebesar Rp1.999.493.073,00;
- 4) Hibah dari Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan berupa 163 unit PJU Tenaga Surya dengan



- Nomor BA: 469/000.1.8/BPKAD/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024 sebesar Rp2.557.466.165,00;
- 5) Hibah persediaan dari BKKBN Provinsi Tahun 2024 di Dinas P3A dan KB Rp469.332.080,00;
 - 6) Hibah persediaan vaksin/obat dan peralatan kesehatan hewan dari Dinas Peternakan Provinsi Tahun 2024 di Dinas Peternakan dan Perikanan dengan Nomor BA: Disnak.524.03/09/Keswan-Kesmave/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 sebesar Rp6.044.500,00;
 - 7) Hibah persediaan blanko e-KTP dari Pemerintah Provinsi NTT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 20 November 2024 sebesar Rp40.728.000,00 dan hibah blanko e-KTP dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sesuai BAST 400.8.1.2/1373/SES, 400.8.1.2/3136/SES dan 400.8.1.2/316/SES sebesar Rp183.276.000,00;
 - 8) Hibah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2024 pada Dinas PKO sebesar Rp51.230.565,00 terdiri dari barang blanko ijazah SD dan SMP sebesar Rp11.745.305,00 dan barang ekstrakomptabel berupa Buku pada 10 SD Negeri sebesar Rp39.485.260,00 sesuai BAST barang tahun 2024;
 - 9) Hibah barang yang akan diserahkan ke masyarakat dari Dinas Sosial Provinsi NTT sesuai BAST Tahun 2024 Rp229.092.150,00; dan
 - 10) Hibah 3 unit traktor roda 4 dari Kementerian Pertanian Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sesuai Lampiran Naskah Hibah BMN dan BART No.LPPD-002A/BAP-STHP/TR4/40HP-I/2024 tanggal 6 Mei 2024 Rp1.259.307.000,00.

5.4.1.3.2 Pendapatan Lainnya - LO

Akun ini mencatat Pendapatan Dana Kapitasi JKN dan Dana dari BPJS untuk Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) pada FKTP yang pada tahun 2024 memiliki saldo sebesar Rp12.310.460.325,08. Jika dibandingkan dengan tahun 2023



pendapatan ini naik sebesar Rp934.084.193,08 atau 8,21%. Uraianya disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.249
Pendapatan Lainnya - LO

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO	12.080.841.325,08	11.376.376.132,00	704.465.193,08	6,19
2	Pendapatan Dana Prolanis - LO	229.619.000,00	0,00	229.619.000,00	0,00
	Jumlah	12.310.460.325,08	11.376.376.132,00	934.084.193,08	8,21

Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Lainnya pada LRA sebesar Rp12.080.841.325,08, terdapat selisih sebesar Rp229.619.000,00. Selisih ini berasal dari pengakuan Pendapatan Dana Prolanis di Laporan Operasional yang tidak dicatat pada LRA. Hal ini terjadi karena Pendapatan dan Belanja yang bersumber dari Dana Prolanis tidak dianggarkan dalam APBD TA 2024, sehingga pendapatan dan belanja tersebut tidak dapat disahkan oleh Bendahara Umum Daerah sesuai regulasi yang berlaku.

Pendapatan Prolanis tahun 2024 per Puskesmas dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.250
Pendapatan Prolanis - LO

No.	Nama Puskesmas	Nilai (Rp)
1	Puskesmas Halilulik	17.296.000,00
2	Puskesmas Laktutus	15.089.000,00
3	Puskesmas Kota Atambua	23.820.000,00
4	Puskesmas Haliwen	24.375.000,00
5	Puskesmas Atapupu	9.400.000,00
6	Puskesmas Umanen	82.365.000,00
7	Puskesmas Wedomu	43.121.000,00
8	Puskesmas Atambua Selatan	14.153.000,00
	Jumlah	229.619.000,00

5.4.2 BEBAN - LO

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp927.765.207.343,91	Rp885.296.741.328,62

Jumlah Beban - LO yang berasal dari Beban Operasi - LO untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp927.765.207.343,91. Dibandingkan dengan realisasi beban - LO tahun



2023, realisasi di tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp42.468.466.015,29 atau 4,80%. Rincian beban dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.251**Beban - LO**

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Beban Pegawai - LO	400.748.722.564,10	347.417.641.535,00	53.331.081.029,10	15,35
2	Beban Persediaan- LO	71.176.023.495,87	40.754.295.586,97	30.421.727.908,90	74,65
3	Beban Jasa - LO	165.141.635.048,56	160.531.103.367,67	4.610.531.680,89	2,87
4	Beban Perjalanan Dinas - LO	42.434.410.467,00	36.613.938.113,00	5.820.472.354,00	15,90
5	Beban Pemeliharaan - LO	1.492.151.646,00	2.089.215.936,00	(597.064.290,00)	(28,58)
6	Beban Hibah - LO	50.872.138.918,00	53.107.896.237,49	(2.235.757.319,49)	(4,21)
7	Beban Bantuan Sosial - LO	15.000.000,00	236.000.000,00	(221.000.000,00)	(93,64)
8	Beban Penyusutan dan Amortisasi	138.064.531.674,06	191.098.354.766,24	(53.033.823.092,18)	(27,75)
9	Beban Penyisihan Piutang - LO	1.540.811.905,32	1.076.737.261,25	464.074.644,07	43,10
10	Beban Transfer - LO	56.279.781.625,00	52.371.558.525,00	3.908.223.100,00	7,46
	Jumlah	927.765.207.343,91	885.296.741.328,62	42.468.466.015,29	4,80

5.4.2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai tahun 2024 sebesar Rp400.748.722.564,10 atau naik 15,35% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp347.417.641.535,00.

Perbandingan antara beban pegawai dan belanja pegawai pada LRA disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.252**Beban Pegawai - LO**

No	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	300.536.235.297,00	299.690.453.065,00	845.782.232,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	24.928.710.107,30	24.928.710.107,30	0,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	39.554.797.360,00	39.828.137.563,00	(273.340.203,00)
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	14.164.236.625,00	14.166.470.081,00	(2.233.456,00)
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	181.559.551,00	197.559.551,00	(16.000.000,00)
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	459.970.000,00	459.970.000,00	0,00
7	Beban Pegawai BLUD	20.923.213.623,80	14.517.344.839,00	6.405.868.784,80
	Jumlah	400.748.722.564,10	393.788.645.206,30	6.960.077.357,80

Terdapat selisih antara beban pegawai dengan belanja pegawai sebesar Rp6.960.077.357,80 yang berasal dari:

- 1) Selisih beban gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp845.782.232 terdiri dari:
 - a) Koreksi temuan belanja pegawai berdasarkan hasil pemeriksaan LKPD Tahun 2024 sebesar Rp(142.885.800,00); dan
 - b) Pengakuan utang belanja iuran BPJS 4% atas pembayaran TPP kepada PNS tahun 2024 sesuai BA rekonsiliasi nomor 310/800.1.12.1/BPKAD/V/2025 dan 299/BA/XI-11/0325 tanggal 19 Maret 2025 sebesar Rp988.668.032,00.



- 2) Selisih beban tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN Rp(273.340.203,00) terdiri dari:
 - a) Pelunasan utang insentif pajak daerah tahun 2023 Rp(296.299.319,00);
 - b) Pelunasan utang tambahan penghasilan guru tahun 2023 Rp(18.510.960,00);
 - c) Utang belanja tambahan penghasilan guru tahun 2024 Rp33.695.376,00; dan
 - d) Utang insentif retribusi daerah pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2024 Rp7.774.700,00; dan
- 3) Selisih beban gaji dan tunjangan DPRD Rp(2.233.456,00) terdiri dari:
 - a) Pelunasan utang jaminan kesehatan DPRD Rp(771.856,00)
 - b) Reklasifikasi beban gaji dan tunjangan DPRD Rp(1.461.600,00) ke piutang penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD tahun 2024.
- 4) Selisih beban gaji dan tunjangan KDH/WKDH Rp(16.000.000,00) merupakan pelunasan utang insentif pajak daerah tahun 2023 kepada KDH/WKDH
- 5) Selisih beban pegawai BLUD Rp6.405.868.784,80 terdiri dari:
 - a) Pelunasan utang belanja pegawai BLUD tahun 2023 Rp(7.758.925.069,60);
 - b) Koreksi pencatatan piutang klaim BPJS bulan September-Desember 2024 sesuai BAHV dan penyesuaian perhitungan utang jasa pelayanan pada BLUD Rp(53.234.760,00); dan
 - c) Utang belanja pegawai BLUD tahun 2024 Rp14.218.028.614,40,

5.4.2.2 Beban Persediaan

Realisasi beban persediaan tahun 2024 sebesar Rp71.176.023.495,87. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp40.754.295.586,97, beban persediaan tahun ini naik sebesar Rp30.421.727.908,90 atau 74,65%.

Perbandingan antara beban persediaan - LO dan belanja persediaan - LRA disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.253

Beban Persediaan - LO

No	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)
1	Beban Persediaan	71.176.023.495,87	89.188.244.655,81	(18.012.221.159,94)
	Jumlah	71.176.023.495,87	89.188.244.655,81	(18.012.221.159,94)



Terdapat selisih antara Beban Persediaan - LO dengan Belanja Barang - LRA sebesar Rp(18.012.221.159,94) yang terdiri dari:

- 1) Pemakaian persediaan 2023 di tahun 2024 Rp24.603.620.065,04;
- 2) Belanja Barang SKPD dan JKN 2024 yang masih berupa persediaan Rp(58.039.243.043,21);
- 3) Pelunasan utang beban cetak asal tahun 2023 pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp(2.036.554,00);
- 4) Penambahan barang yang diserahkan kepada masyarakat pada Dinas PKO tahun 2024 yang bersumber dari utang belanja dan sampai dengan 31 Desember 2024 belum dibayar sebesar Rp640.003.232,39;
- 5) Penambahan obat-obatan pada Dinas Kesehatan tahun 2024 yang bersumber dari utang belanja dan sampai dengan 31 Desember 2024 belum dibayar sebesar Rp300.020.640,00;
- 6) Pelunasan utang belanja barang diserahkan kepada masyarakat asal tahun 2023 pada Badan Kesbangpol Rp(199.700.000,00);
- 7) Lebih catat hutang belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat tahun 2023 pada Badan Kesbangpol Rp300.000,00;
- 8) Persediaan barang pakai habis yang bersumber dari belanja BOSP Rp107.209.770,00;
- 9) Persediaan BLUD yang bersumber dari beban barang dan jasa Rp4.666.685.271,44;
- 10) Persediaan JKN yang bersumber dari belanja barang dan jasa Rp160.701.513,00;
- 11) Hibah persediaan dari Dinas Sosial Provinsi NTT sesuai BAST dan BA pemeriksaan fisik Inspektorat Rp229.092.150,00
- 12) Penerimaan hibah barang berupa persediaan obat-obatan dan vaksin pada Dinas Kesehatan dari dari Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi NTT kepada Dinas Kesehatan sesuai SBBK Tahun 2024 sebesar Rp7.463.803.529,40;
- 13) Penerimaan hibah barang berupa persediaan obat-obatan dan vaksin pada Dinas Kesehatan dari Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) kepada Dinas Keseharan sesuai SBBK Tahun 2024 sebesar Rp335.378.291,00;
- 14) Penerimaan hibah barang berupa blangko ijazah SD dan SMP pada Dinas PKO sebesar Rp11.745.305,00 sesuai BAST Nomor 0078-TT/02/TSS/04/24 tanggal 8 April 2024 dan BAST Nomor 0296/KWU/III/2024 tanggal 2 Mei 2024 dan barang



ekstrakomptabel berupa Buku pada 10 SD Negeri sebesar Rp39.485.260,00 sesuai BAST Tahun 2024;

- 15) Penerimaan hibah barang berupa persediaan obat-obatan dan BMHP pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dari hibah Provinsi NTT tahun 2024 sebesar Rp469.332.080,00;
- 16) Penerimaan hibah barang berupa persediaan vaksin/obat dan peralatan kesehatan hewan dari Dinas Peternakan Provinsi Tahun 2024 di Dinas Peternakan dan Perikanan dengan Nomor BA: Disnak.524.03/09/Keswan-Kesmave/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 sebesar Rp6.044.500,00;
- 17) Koreksi kurang volume persediaan barang diserahkan kepada masyarakat dan direklasifikasi ke aset lain-lain sesuai hasil pemeriksaan BPK atas LKPD tahun 2024 Rp604.390.100,00;
- 18) Utang BLUD atas belanja barang persediaan tahun 2024 Rp366.942.730,00;
- 19) Penerimaan hibah barang berupa persediaan blanko e-KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tahun 2024 sebesar Rp183.276.000,00; dan
- 20) Penerimaan hibah barang berupa persediaan blanko e-KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari Pemerintah Provinsi NTT tanggal 20 November 2024 sebesar Rp40.728.000,00.

5.4.2.3 Beban Jasa

Realisasi beban jasa tahun 2024 sebesar Rp165.141.635.048,56, jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp160.531.103.367,67 realisasi ini naik sebesar Rp4.610.531.680,89 atau 2,87%. Rincian perbandingan beban jasa tahun 2024 dengan tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.254

Rincian Beban Jasa - LO

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Beban Jasa Kantor	59.951.004.228,00	61.937.062.401,00	(1.986.058.173,00)	(3,21)
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	27.100.608.224,00	23.821.611.850,00	3.278.996.374,00	13,76
3	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	691.959.600,00	909.856.000,00	(217.896.400,00)	(23,95)
4	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	219.411.500,00	294.500.000,00	(75.088.500,00)	(25,50)
5	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	101.092.200,00	12.400.000,00	88.692.200,00	715,26
6	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	1.024.644.330,00	1.779.963.100,00	(755.318.770,00)	(42,43)
7	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	191.186.400,00	0,00	191.186.400,00	0,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
8	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	346.500.000,00	462.000.000,00	(115.500.000,00)	(25,00)
9	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.133.089.600,00	260.833.000,00	872.256.600,00	334,41
10	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	19.400.000,00	0,00	19.400.000,00	0,00
11	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.088.850.000,00	4.177.390.000,00	4.911.460.000,00	117,57
12	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	85.000.000,00	(85.000.000,00)	(100,00)
13	Beban Barang dan Jasa BOS	20.085.183.367,00	12.194.375.025,00	7.890.808.342,00	64,71
14	Beban Barang dan Jasa BLUD	45.188.705.599,56	54.596.111.991,67	(9.407.406.392,11)	(17,23)
	Jumlah	165.141.635.048,56	160.531.103.367,67	4.610.531.680,89	2,87

Perbandingan antara beban jasa - LO dan belanja jasa - LRA tahun 2024 disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.255**Perbandingan Beban Jasa - LO**

No.	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih Lebih/(Kurang) (Rp)
1	Beban Jasa Kantor	59.951.004.228,00	59.789.546.968,00	161.457.260,00
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	27.100.608.224,00	27.041.186.624,00	59.421.600,00
3	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	691.959.600,00	691.959.600,00	0,00
4	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	219.411.500,00	219.411.500,00	0,00
5	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	101.092.200,00	101.092.200,00	0,00
6	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	1.024.644.330,00	1.251.802.100,00	(227.157.770,00)
7	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	191.186.400,00	191.186.400,00	0,00
8	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	346.500.000,00	346.500.000,00	0,00
9	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.133.089.600,00	1.133.089.600,00	0,00
10	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	19.400.000,00	125.075.000,00	(105.675.000,00)
11	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.088.850.000,00	9.308.450.000,00	(219.600.000,00)
12	Beban Barang dan Jasa BOS	20.085.183.367,00	20.192.693.137,00	(107.509.770,00)
13	Beban Barang dan Jasa BLUD	45.188.705.599,56	47.576.125.394,00	(2.387.419.794,44)
	Jumlah	165.141.635.048,56	167.968.118.523,00	(2.826.483.474,44)

Terdapat selisih antara Beban Jasa - LO dengan Belanja Jasa - LRA sebesar Rp(2.826.483.474,44) dengan penjelasan sebagai berikut.

a. Selisih beban jasa kantor Rp161.457.260,00 dengan rincian:



- 1) Penambahan utang atas belanja jasa narasumber pada Dinas PKO tahun 2024 yang sampai dengan 31 Desember 2024 belum dibayar sebesar Rp8.000.000,00;
 - 2) Penambahan utang belanja listrik Dinas Kesehatan tahun 2024 yang sampai dengan 31 Desember 2024 belum dibayar sebesar Rp5.733.900,00;
 - 3) Utang belanja internet Dinas Kesehatan tahun 2024 yang sampai dengan 31 Desember 2024 belum dibayar sebesar Rp1.783.800,00;
 - 4) Pelunasan utang jasa pelayanan kesehatan tahun 2023 Rp(645.178.350,00);
 - 5) Utang belanja jasa pelayanan kesehatan tahun 2024 Rp594.248.910,00;
 - 6) Pengakuan beban atas belanja prolanis pada Puskesmas tahun 2024 yang tidak dianggarkan dalam APBD Rp229.619.000,00; dan
 - 7) Koreksi atas temuan kelebihan pembayaran honorarium dari pemeriksaan LKPD tahun 2024 sebesar Rp(32.750.000,00).
- b. Selisih beban iuran jaminan asuransi Rp59.421.600,00 merupakan utang iuran dan bantuan iuran bagi peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belu dengan manfaat layanan di ruang perawatan kelas III bulan Desember 2024 yang dihitung di bulan Januari 2025 sesuai Surat Permintaan Pembayaran 283/XI-11/0225 tanggal 8 Februari 2025;
- c. Selisih beban jasa konsultasi konstruksi Rp(227.157.770,00) terdiri dari atribusi aset tetap JIJ yang bersumber dari belanja jasa konsultasi tahun 2024 pada Dinas PUPR Rp(199.807.770,00) dan pencatatan temuan kurang volume dan harga satuan timpang pekerjaan dari temuan BPK pada pemeriksaan LKPD Tahun 2024 Rp(27.350.000,00);
- d. Selisih beban jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah Rp(105.675.000,00) merupakan pelunasan utang insentif pajak daerah Bapenda tahun 2023;
- e. Selisih beban uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Rp(219.600.000,00) merupakan koreksi atas pengembalian belanja beasiswa yang diterima di tahun 2025;



- f. Selisih beban barang dan jasa BOSP Rp(107.509.770,00) merupakan persediaan BOSP tahun 2024 yang bersumber dari belanja barang dan jasa BOSP;
- g. Selisih beban barang dan jasa BLUD Rp(2.387.419.794,44) terdiri dari:
 - a. Belanja barang dan jasa BLUD yang menjadi persediaan tahun 2024 Rp(4.666.685.271,44);
 - b. Pelunasan utang belanja barang dan jasa BLUD tahun 2023 Rp(3.344.196.472,00);
 - c. Utang belanja barang dan jasa BLUD tahun 2024 Rp6.083.615.224,00; dan
 - d. Kapitalisasi belanja barang dan jasa BLUD ke aset tetap sebesar Rp(460.153.275,00) dengan rincian Rp(251.917.275,00) merupakan kapitalisasi ke aset tetap gedung dan bangunan serta Rp(208.236.000,00) merupakan kapitalisasi ke KDP.

5.4.2.4 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas tahun 2024 sebesar Rp42.434.410.467,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp36.613.938.113,00 realisasi ini naik sebesar Rp5.820.472.354,00 atau 15,90%.

Perbandingan antara Beban Perjalanan dinas - LO dan Belanja Perjalanan Dinas - LRA disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.256

Beban Perjalanan Dinas - LO

No.	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)	%
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	38.733.690.567,00	38.852.024.105,00	(118.333.538,00)	(0,30)
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.416.000,00	8.416.000,00	0,00	0,00
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.300.860.100,00	3.300.860.100,00	0,00	0,00
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Beban Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	391.443.800,00	391.443.800,00	0,00	0,00
	Jumlah	42.434.410.467,00	42.552.744.005,00	(118.333.538,00)	(0,28)

Terdapat selisih antara Beban Perjalanan Dinas - LO dan Belanja Perjalanan Dinas - LRA sebesar Rp(118.333.538,00) merupakan koreksi ke aset lainnya atas temuan BPK pada LKPD tahun 2024.

**5.4.2.5 Beban Pemeliharaan**

Beban pemeliharaan tahun 2024 diakui sebesar Rp1.492.151.646,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp2.089.215.936,00, saldo tahun 2024 turun sebesar Rp(597.064.290,00) atau (28,58)%.

Perbandingan antara Beban Pemeliharaan - LO dan Belanja Pemeliharaan - LRA disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.257**Beban Pemeliharaan - LO**

No	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)	%
1	Beban Pemeliharaan	1.492.151.646,00	1.492.151.646,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.492.151.646,00	1.492.151.646,00	0,00	0,00

Tidak ada selisih antara Beban Pemeliharaan - LO dan Belanja Pemeliharaan - LRA.

5.4.2.6 Beban Hibah

Beban Hibah tahun 2024 adalah sebesar Rp50.872.138.918,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp53.107.896.237,49, saldo tahun 2024 turun sebesar Rp(2.235.757.319,49) atau (4,21)%. Perbandingan antara Beban Hibah - LO dan Belanja Hibah - LRA disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.258**Beban Hibah - LO**

No.	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)	%
1	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	48.213.945.129,00	48.492.249.729,00	(278.304.600,00)	(0,57)
2	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00
3	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	0,00	0,00
4	Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	493.793.789,00	493.793.789,00	0,00	0,00
5	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	114.400.000,00	0,00	114.400.000,00	0,00
	Jumlah	50.872.138.918,00	51.036.043.518,00	(163.904.600,00)	(0,32)

Selisih antara Beban Hibah - LO dan Belanja Hibah - LRA Rp(163.904.600,00) dapat dijelaskan sebagai berikut.

a) Selisih Rp(278.304.600,00) terdiri atas :

- 1) Sisa dana hibah kegiatan Pemilihan Umum kepada BAWASLU sesuai NPHD Nomor BKBKBP-200/275/XI/2023 dan Nomor 348/KU.00.01/K.NT-2/11/2023 tanggal 10



Nopember 2023 yang telah disalurkan pada tahun 2024 sebesar Rp9.500.000.000,00 namun belum digunakan oleh penerima hibah per 31 Desember 2024 sebesar Rp28.304.600,00; dan

- 2) Sisa dana hibah kegiatan Pemilihan Umum kepada KPU sesuai NPHD Nomor BKBP-200/274/XI/2023 dan 651/KU.07/PKS/5304/2023 tanggal 10 November 2023 yang telah disalurkan pada Tahun 2024 sebesar Rp12.300.000.000,00 namun belum digunakan oleh penerima hibah per 31 Desember 2024 sebesar Rp250.000.000,00. Pada tanggal 15 Mei 2025 sisa dana hibah tersebut telah disetorkan kembali ke Kas Daerah dengan STS Nomor 1258/LLPAD sebesar Rp250.000.000,00.

- b) Selisih beban hibah kepada Pemerintah Pusat Rp114.400.000,00 merupakan koreksi hibah asset tetap tanah ke instansi lain (Kantor Pertanahan Kabupaten Belu-Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional) tahun 2024 BAST Nomor 13/000.2.3.2/BPKAD/XI/204 tanggal 25 November 2024.

5.4.2.7 Beban Bantuan Sosial

Beban bantuan sosial merupakan pengeluaran Pemkab Belu berupa bantuan uang yang direncanakan kepada individu.

Saldo Beban Bantuan Sosial tahun 2024 adalah sebesar Rp15.000.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp236.000.000,00, saldo ini turun sebesar Rp(221.000.000,00) atau (93,64)%.

Tidak ada selisih antara Beban Bantuan Sosial - LO dan Belanja Bantuan Sosial - LRA pada tahun 2024.

5.4.2.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi tahun 2024 adalah sebesar Rp138.064.531.674,06. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp191.098.354.766,24 realisasi ini turun sebesar Rp(53.033.823.092,18) atau (27,75)%.



Uraianya sebagai berikut.

Tabel 5.259

Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	38.917.593.027,77	46.135.216.981,24	(7.217.623.953,47)	(15,64)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	22.188.250.071,27	66.936.366.866,93	(44.748.116.795,66)	(66,85)
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	76.179.787.958,71	77.036.758.504,54	(856.970.545,83)	(1,11)
4	Beban Penyusutan Properti Investasi	702.761.816,31	902.983.613,53	(200.221.797,22)	(22,17)
4	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	76.138.800,00	87.028.800,00	(10.890.000,00)	(12,51)
	Jumlah	138.064.531.674,06	191.098.354.766,24	(53.033.823.092,18)	(27,75)

5.4.2.9 Beban Penyisihan Piutang

Realisasi beban penyisihan piutang tahun 2024 sebesar Rp1.540.811.905,32. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp1.076.737.261,25 realisasi ini naik sebesar Rp464.074.644,07 atau 43,10%.

Rincian beban penyisihan piutang disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.260

Beban Penyisihan Piutang- LO

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Beban Penyisihan Piutang PBB P2	975.905.939,20	416.046.935,08	559.859.004,12	134,57
2	Beban Penyisihan Piutang Pajak Hotel	124.700,00	2.795.250,00	(2.670.550,00)	(95,54)
3	Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	7.734,31	0,00	7.734,31	0,00
4	Beban Penyisihan Piutang Pajak Restoran dan sejenisnya	169.259,00	5.372.656,88	(5.203.397,88)	(96,85)
5	Beban Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	0,00	33.500,00	(33.500,00)	(100,00)
6	Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame Reklame Berjalan	382.561,07	54.694.471,18	(54.311.910,11)	(99,30)
7	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	481.238.695,62	366.405.357,26	114.833.338,36	31,34
8	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	52.389.416,19	23.903.339,44	28.486.076,75	119,17
9	Beban Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	481.430,25	111.268.691,85	(110.787.261,60)	(99,57)
10	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	30.112.169,68	55.204.138,00	(25.091.968,32)	(45,45)
11	Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak	0,00	41.012.921,56	(41.012.921,56)	(100,00)
	Jumlah	1.540.811.905,32	1.076.737.261,25	464.074.644,07	43,10

**5.4.2.10 Beban Transfer**

Saldo Beban Transfer tahun 2024 adalah sebesar Rp56.279.781.625,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp52.371.558.525,00, nilai ini naik sebesar Rp3.908.223.100,00 atau 7,46%. Uraianya adalah sebagai berikut.

Tabel 5.261**Beban Transfer - LO**

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.971.356.757,00	1.971.356.757,00	0,00	0,00
2	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	725.310.268,00	725.310.268,00	0,00	0,00
3	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	53.583.114.600,00	49.674.891.500,00	3.908.223.100,00	7,87
Jumlah		56.279.781.625,00	52.371.558.525,00	3.908.223.100,00	7,46

5.4.3 SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI

Tahun 2024	Tahun 2023
<u>Rp927.195.499,02</u>	<u>Rp(885.501.701,66)</u>

Surplus/Defisit dari Operasi merupakan selisih antara Pendapatan - LO dan Beban yang dihasilkan oleh kegiatan operasional. Surplus/Defisit Operasional tahun 2024 sebesar Rp927.195.499,02 atau naik sebesar Rp1.782.697.200,68 atau 208,38% dibandingkan tahun 2023.

Rincian Surplus/Defisit Operasional disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.262**Surplus/Defisit dari Operasi**

No.	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)	%
1	Pendapatan-LO	928.692.402.842,93	884.441.239.626,96	44.251.163.215,97	5,00
2	Beban-LO	927.765.207.343,91	885.296.741.328,62	42.468.466.015,29	4,80
	Surplus/(Defisit) dari Operasi	927.195.499,02	(885.501.701,66)	1.782.697.200,68	(208,38)

5.4.4 SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional berasal dari aktivitas penerimaan dan pengeluaran yang tidak terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi Pemkab Belu serta bersifat tidak rutin.

5.4.4.1 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp260.014.272,00 berasal dari hasil pengembalian piutang



pembiayaan tahun 2024. Jumlah ini turun sebesar Rp(210.487.744) atau (44,74)% dibandingkan tahun 2024. Jika dibandingkan dengan pendapatan pengembalian piutang pada LRA Rp321.922.432,00, terdapat selisih sebesar Rp(61.908.160,00) yang berasal dari pelunasan piutang atas penjualan kendaraan DPRD tahun 2023.

5.4.4.2 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tahun 2024 sebesar Rp(3.556.349.948,05) turun Rp75.600.663,95 atau 4,27% jika dibandingkan dengan tahun 2023.

Defisit dari Kegiatan Non Operasional lainnya tahun 2024 sebesar terdiri dari:

- Penghapusan aset lain-lain atas SK Nomor 368/HK/2024 Rp(9.552.067.694,00);
- Penghapusan akumulasi penyusutan atas aset lain-lain yang dihapuskan pada tahun 2024 sebesar Rp6.376.462.356,82; dan
- Bagian kerugian atas operasional PDAM tahun 2024 Rp(380.744.610,87).

5.4.4.3 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp(3.296.335.676,05)	Rp(3.161.448.596,00)

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari selisih Pendapatan - LO dan Beban yang sifatnya tidak rutin. Defisit Non Operasional tahun 2024 sebesar Rp(3.296.335.676,05) atau turun sebesar Rp(134.887.080,05) atau (4,27)% dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp(3.161.448.596,00). Rinciannya pada tabel berikut.

Tabel 5.263

Surplus/Defisit Non Operasional

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)	%
1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	260.014.272,00	470.502.016,00	(210.487.744,00)	(44,74)
4	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	(3.556.349.948,05)	(3.631.950.612,00)	75.600.663,95	(2,08)
	Surplus/(Defisit) Non Operasional	(3.296.335.676,05)	(3.161.448.596,00)	(134.887.080,05)	4,27

**5.4.5 SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA**

Tahun 2024	Tahun 2023
<u>Rp(2.369.140.177,03)</u>	<u>Rp(4.016.950.297,66)</u>

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa merupakan penjumlahan selisih lebih/(kurang) antara Surplus/Defisit Operasional dan Kegiatan Non Operasional.

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp(2.369.140.177,03). Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar Rp1.647.810.120,63 atau 41,02% dibandingkan tahun 2023.

Tabel 5.264**Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa**

No	Uraian	Realisasi 2024 (RP)	Realisasi 2023 (RP)	Lebih/Kurang (RP)	%
1	Surplus/Defisit dari Operasi	927.195.499,02	(855.501.701,66)	1.782.697.200,68	(208,38)
2	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(3.296.335.676,05)	(3.161.448.596,00)	(134.887.080,05)	4,27
	Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	(2.369.140.177,03)	(4.016.950.297,66)	1.647.810.120,63	(41,02)

5.4.6 POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa adalah pos yang menunjukkan kejadian atau transaksi yang bersifat tidak biasa, tidak diharapkan sering terjadi, dan berada di luar kendali Pemkab Belu. Pos ini disajikan terpisah dalam laporan keuangan untuk memberikan informasi yang lebih jelas mengenai dampak kejadian atau transaksi tersebut terhadap Pemkab Belu.

5.4.6.1 Pendapatan Luar Biasa - LO

Pendapatan Luar Biasa - LO tahun 2024 dan tahun 2023 sebesar Rp0,00. Hal ini karena tidak terdapat pendapatan dari kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan yang menimbulkan pendapatan luar biasa pada tahun 2024 dan 2023.

5.4.6.2 Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa tahun 2024 sebesar Rp0,00. Hal ini karena tidak terdapat beban dari kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan yang menimbulkan beban luar biasa pada tahun 2024. Sedangkan realisasi beban luar



biasa tahun 2023 Rp(2.542.350.217,00) berasal dari beban tak terduga.

5.4.6.3 SURPLUS/DEFISIT POS LUAR BIASA

<u>Tahun 2024</u>	<u>Tahun 2023</u>
<u>Rp0,00</u>	<u>Rp(2.542.350.217,00)</u>

Surplus/Defisit Pos Luar Biasa tahun 2024 sebesar Rp0,00 merupakan selisih Pendapatan Luar Biasa - LO dan Beban Luar Biasa - LO. Jika dibandingkan Defisit Pos Luar Biasa tahun 2023 sebesar Rp(2.542.350.217,00), Defisit Pos Luar Biasa tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp(2.542.350.217,00) atau (100,00)%. Rinciannya pada tabel berikut.

Tabel 5.265
Surplus/Defisit Pos Luar Biasa

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%
1	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Beban Luar Biasa - LO	0,00	2.542.350.217,00	(2.542.350.217,00)	(100,00)
	Surplus/Defisit Pos Luar Biasa	0,00	(2.542.350.217,00)	2.542.350.217,00	(100,00)

5.4.7 SURPLUS/DEFISIT - LO

<u>Tahun 2024</u>	<u>Tahun 2023</u>
<u>Rp(2.369.140.177,03)</u>	<u>Rp(6.559.300.514,66)</u>

Surplus/Defisit - LO adalah penjumlahan selisih lebih/(kurang) antara Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Defisit - LO Kabupaten Belu sampai dengan per 31 Desember 2024 sebesar Rp(2.369.140.177,03). Pemkab Belu mengalami penurunan Defisit sebesar Rp4.190.160.337,63 atau 63,88% jika dibandingkan dengan Defisit - LO tahun 2023. Rincian disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.266
Surplus/Defisit - LO

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%
Surplus/Defisit - Operasional	927.195.499,02	(855.501.701,66)	1.782.697.200,68	(208,38)
Surplus/Defisit - Non Operasional	(3.296.335.676,05)	(3.161.448.596,00)	(134.887.080,05)	4,27
Surplus/Defisit - Pos Luar Biasa	0,00	(2.542.350.217,00)	2.542.350.217,00	0,00
Surplus/(Defisit)-LO	(2.369.140.177,03)	(6.559.300.514,66)	4.190.160.337,63	(63,88)



5.5 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN ARUS KAS (LAK)

Laporan ini menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi baik keuangan maupun non keuangan, pembiayaan dan non anggaran.

5.5.1 Aktivitas Operasi	Tahun 2024	Tahun 2023
	<u>110.654.512.669,55</u>	<u>Rp194.856.615.777,36</u>

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi tahun 2024 sebesar Rp110.654.512.669,55 merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas bersih dari aktivitas operasi bernilai positif menunjukkan bahwa arus kas masuk dari aktivitas ini lebih besar dari arus kas keluarnya. Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2023, terdapat penurunan Rp(84.202.103.107,81) atau (43,21)%.

Arus kas dari aktivitas operasi dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.267

Aktivitas Operasi

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenalkan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi	977.438.404.587,66	962.945.480.794,95	14.492.923.792,71	1,51
2	Arus Kas keluar Aktivitas Operasi	866.783.891.918,11	768.088.865.017,59	98.695.026.900,52	12,85
	Saldo Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi	110.654.512.669,55	194.856.615.777,36	(84.202.103.107,81)	(43,21)

5.5.1.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

Tahun 2024	Tahun 2023
<u>Rp977.438.404.587,66</u>	<u>Rp962.945.480.794,95</u>

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Penerimaan Transfer - Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat - Dana Desa, Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya, Transfer Pemerintah Provinsi dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Selain diterima melalui BUD, arus kas masuk juga berasal dari penerimaan FKTP-JKN, BOS, BOK, BLUD, PAUD, Kesetaraan dan Dana Desa yang disahkan melalui Surat Pengesahan Pendapatan. Arus kas masuk dari aktivitas operasi tahun 2024 mencapai Rp977.438.404.587,66 naik sebesar



Rp14.492.923.792,71 atau 1,51% dibandingkan tahun 2023.

Uraianya dapat jelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.268

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenalkan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Penerimaan Pajak Daerah	19.194.087.650,00	20.563.777.908,00	(1.369.690.258,00)	(6,66)
2	Penerimaan Retribusi Daerah	4.934.589.739,00	5.112.694.483,00	(178.104.744,00)	(3,48)
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.480.688.664,00	6.529.604.943,00	(3.048.916.279,00)	(46,69)
4	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	60.452.354.222,28	81.118.712.401,64	(20.666.358.179,36)	(25,48)
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	3.382.792.600,00	4.099.513.703,00	(716.721.103,00)	(17,48)
6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.313.950.400,00	1.747.566.621,00	(433.616.221,00)	(24,81)
7	Penerimaan Dana Alokasi Umum	530.182.469.628,00	488.297.498.097,00	41.884.971.531,00	8,58
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	234.421.531.451,30	224.334.384.415,31	10.087.147.035,99	4,50
9	Penerimaan Dana Desa	64.463.162.739,00	64.370.256.000,00	92.906.739,00	0,14
10	Penerimaan Dana Insentif Fiskal	9.107.161.000,00	0,00	9.107.161.000,00	0,00
11	Penerimaan Dana Insentif Daerah	0,00	21.126.761.000,00	(21.126.761.000,00)	(100,00)
12	Penerimaan Dana Pendapatan Bagi Hasil Pajak	34.424.775.169,00	31.481.611.676,00	2.943.163.493,00	9,35
13	Penerimaan Hibah	-	2.977.700.415,00	(2.977.700.415,00)	(100,00)
14	Penerimaan Lainnya	12.080.841.325,08	11.185.399.132,00	895.442.193,08	8,01
	Jumlah	977.438.404.587,66	962.945.480.794,95	14.492.923.792,71	1,51

Jumlah tersebut jika dibandingkan jumlah pendapatan daerah pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2024 sebesar Rp977.447.299.518,66 maka terdapat selisih sebesar Rp(8.913.000,00).

Uraianya adalah sebagai berikut.

Tabel 5.269

Rincian Selisih Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

No.	Uraian	LAK (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
1	Penerimaan Pajak Daerah	19.194.087.650,00	19.194.087.650,00	0,00
2	Penerimaan Retribusi Daerah	4.934.589.739,00	4.934.589.739,00	0,00
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.480.688.664,00	3.480.688.664,00	0,00
4	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	60.452.354.222,28	60.461.267.222,28	(8.913.000,00)
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	3.382.792.600,00	3.382.792.600,00	0,00
6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.313.950.400,00	1.313.950.400,00	0,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Umum	530.182.469.628,00	530.182.469.628,00	0,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	234.421.531.451,30	234.421.531.451,30	0,00
9	Penerimaan Dana Desa	64.463.162.739,00	64.463.162.739,00	0,00
10	Penerimaan Dana Insentif Fiskal	9.107.161.000,00	9.107.161.000,00	0,00



No.	Uraian	LAK (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
11	Penerimaan Dana Insentif Daerah	-	-	0,00
12	Penerimaan Dana Pendapatan Bagi Hasil Pajak	34.424.775.169,00	34.424.775.169,00	0,00
13	Penerimaan Hibah	-	-	0,00
14	Penerimaan Lainnya	12.080.841.325,08	12.080.841.325,08	0,00
Jumlah		977.438.404.587,66	977.447.317.587,66	(8.913.000,00)

Selisih tersebut bersumber dari hasil penjualan peralatan dan mesin tahun 2024 yang dikelompokkan dalam Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi.

5.5.1.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp866.783.891.918,11	Rp768.088.865.017,59

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi digunakan untuk Belanja Operasi dan Belanja Transfer di tahun 2024 mencapai Rp866.783.891.918,11. Arus kas keluar ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp98.695.026.900,52 atau 12,85% yang digunakan untuk Belanja Operasi, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer.

Rinciannya dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.270

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Pembayaran Pegawai	393.788.645.206,30	347.841.205.142,00	45.947.440.064,30	13,21
2	Pembayaran Barang	301.201.258.829,81	281.186.397.065,59	20.014.861.764,22	7,12
3	Pembayaran Hibah	51.036.043.518,00	19.516.633.168,00	31.519.410.350,00	161,50
4	Pembayaran Bantuan Sosial	15.000.000,00	236.000.000,00	(221.000.000,00)	(93,64)
5	Pembayaran Tak Terduga	0,00	2.566.815.117,00	(2.566.815.117,00)	(100,00)
6	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	1.971.356.757,00	1.971.356.757,00	-	0,00
7	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	725.310.268,00	725.310.268,00	-	0,00
8	Pembayaran Bantuan Keuangan	118.046.277.339,00	114.045.147.500,00	4.001.129.839,00	3,51
Jumlah		866.783.891.918,11	768.088.865.017,59	98.695.026.900,52	12,85

Jumlah tersebut tersebut tidak terdapat selisih jika dibandingkan jumlah belanja daerah pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2024.



Uraianya dijelaskan pada tabel berikut di bawah ini.

Tabel 5.271

Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

No.	Uraian	LAK (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pembayaran Pegawai	393.788.645.206,30	393.788.645.206,30	-
2	Pembayaran Barang	301.201.258.829,81	301.201.258.829,81	-
3	Pembayaran Hibah	51.036.043.518,00	51.036.043.518,00	-
4	Pembayaran Bantuan Sosial	15.000.000,00	15.000.000,00	-
5	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	1.971.356.757,00	1.971.356.757,00	-
6	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	725.310.268,00	725.310.268,00	-
7	Pembayaran Bantuan Keuangan	118.046.277.339,00	118.046.277.339,00	-
	Jumlah	866.783.891.918,11	866.783.891.918,11	-

5.5.2 Aktivitas Investasi

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp(144.751.835.226,32)	Rp(165.068.785.414,32)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Arus kas bersih dari aktivitas investasi pada tahun 2024 mencapai Rp(144.751.835.226,32) yang mencerminkan arus kas keluar investasi lebih besar dari arus kas masuknya. Jumlah ini naik sebesar Rp20.316.950.188,00 atau 12,31% dibandingkan tahun 2023 yang mencapai Rp(165.068.785.414,32). Uraianya dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.272

Aktivitas Investasi

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Arus Kas Masuk Aktivitas Investasi	8.913.000,00	0,00	8.913.000,00	0,00
2	Arus Kas keluar Aktivitas Investasi	144.760.748.226,32	165.068.785.414,32	(20.308.037.188,00)	(12,30)
	Saldo Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi	(144.751.835.226,32)	(165.068.785.414,32)	20.316.950.188,00	(12,31)

5.5.2.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp8.913.000,00	Rp0,00

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi tahun 2024 sebesar Rp8.913.000,00 dan tahun 2023 sebesar Rp0,00. Uraian arus kas masuk dari aktivitas investasi adalah sebagai berikut.



Tabel 5.273

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenalkan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Penjualan atas Aset Tetap Gedung dan Bangunan	4.403.000,00	0,00	4.403.000,00	0,00
2	Penjualan atas Aset Lainnya	4.510.000,00	0,00	4.510.000,00	0,00
Jumlah		8.913.000,00	0,00	8.913.000,00	0,00

Penjualan peralatan dan mesin tahun 2024 bersumber dari:

- 1) Penjualan seng bekas dan terali besi dari pembongkaran bangunan gedung Puskesmas Atapupu Rp2.410.000;
- 2) Penjualan seng bekas dari pembongkaran bangunan gedung rumah jabatan Bupati Rp2.533.000,00;
- 3) Penjualan seng bekas hasil pembongkaran bangunan gedung kantor Kecamatan Lamaknen Selatan Rp2.100.000,00; dan
- 4) Penjualan seng bekas hasil pembongkaran rehap bangunan ruang kelas yang tidak dimanfaatkan pada SMPN 1 Tasifeto Timur Rp1.870.000,00.

5.5.2.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

Tahun 2024	Tahun 2023
<u>Rp144.760.748.226,32</u>	<u>Rp165.068.785.414,32</u>

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi tahun 2024 mencapai Rp144.760.748.226,32. Jika dibandingkan dengan jumlah tahun 2023 maka terdapat penurunan sebesar Rp(20.308.037,188,00) atau (12,30)%. Realisasi arus kas keluar dari aktivitas investasi tahun anggaran 2024 dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.274

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenalkan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Perolehan Tanah	-	393.232.906,00	(393.232.906,00)	(100,00)
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	20.865.441.803,00	32.163.997.252,55	(11.298.555.449,55)	(35,13)
3	Perolehan Gedung dan Bangunan	57.919.660.357,02	40.690.822.560,19	17.228.837.796,83	42,34
4	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	63.698.929.366,30	85.083.708.055,58	(21.384.778.689,28)	(25,13)
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	2.276.716.700,00	1.737.024.640,00	539.692.060,00	31,07
6	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	5.000.000.000,00	(5.000.000.000,00)	(100,00)
Jumlah		144.760.748.226,32	165.068.785.414,32	(20.308.037.188,00)	(12,30)



Jumlah tersebut tersebut sama jika dibandingkan jumlah belanja modal pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2024 yaitu sebesar Rp144.762.155.226,32. Uraianya dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.275**Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi**

No	Uraian	LAK (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
1	Perolehan Tanah	0,00	0,00	0,00
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	20.865.441.803,00	20.865.441.803,00	0,00
3	Perolehan Gedung dan Bangunan	57.919.660.357,02	57.919.660.357,02	0,00
4	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	63.698.929.366,30	63.698.929.366,30	0,00
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	2.276.716.700,00	2.276.716.700,00	0,00
6	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	144.760.748.226,32	144.760.748.226,32	0,00

5.5.3 Aktivitas Pendanaan

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp321.922.432,00	Rp470.502.016,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali oleh Pemkab Belu, yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang, dan utang pemerintah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran.

Arus kas bersih aktivitas pendanaan tahun 2024 sebesar Rp321.922.432,00 merupakan pengembalian pokok pembiayaan pembelian kendaraan roda empat kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD. Jumlah ini turun sebesar Rp(148.579.584,00) atau (31,58)% jika dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp470.502.016,00.

5.5.3.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp321.922.432,00	Rp470.502.016,00

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan tahun 2024 sebesar Rp321.922.432,00 atau turun sebesar Rp(148.579.584,00) atau (31,58)% dari tahun 2023 sebesar Rp470.502.016,00.



Arus kas masuk dari aktivitas pendanaan adalah sebagai berikut.

Tabel 5.276

Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Pendanaan

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya	321.922.432,00	470.502.016,00	(148.579.584,00)	(31,58)
Jumlah	321.922.432,00	470.502.016,00	(148.579.584,00)	(31,58)

Jumlah tersebut tersebut sama jika dibandingkan dengan jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2024.

5.5.3.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp0,00	Rp0,00

Arus kas keluar dari aktivitas pendanaan tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp0,00. Pada tahun 2024 tidak terdapat arus kas yang dikeluarkan untuk mendapatkan penerimaan kembali di masa depan. Uraianya dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.277

Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Pendanaan

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
1	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

5.5.4 Aktivitas Transitoris	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp8.447.137,00	Rp(650.331,00)

Saldo Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris tahun 2024 mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pengeluaran Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan Taspen, Askes, dan penerimaan utang jangka pendek lainnya. Jumlah arus kas bersih dari aktivitas transitoris tahun 2024 adalah sebesar Rp8.447.137,00 atau naik sebesar Rp9.097.468,00 jika dibandingkan tahun 2023. Arus kas bersih bernilai positif menunjukkan bahwa arus kas masuk lebih besar dari arus kas keluarnya.



Uraian arus kas dari aktivitas transitoris adalah sebagai berikut.

Tabel 5.278**Aktivitas Transitoris**

No	Uraian	Tahun 2024 Rp	Tahun 2023 Rp	Kenaikan/ (Penurunan) Rp	%
1	Arus Kas Masuk Aktivitas Transitoris	53.098.013.760,62	44.863.248.180,80	8.234.765.579,82	18,36
2	Arus Kas keluar Aktivitas Transitoris	53.089.566.623,62	44.863.898.511,80	8.225.668.111,82	18,33
	Saldo Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris	8.447.137,00	(650.331,00)	9.097.468,00	(1.398,90)

5.5.4.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

Tahun 2024	Tahun 2023
<u>Rp53.098.013.760,62</u>	<u>Rp44.863.248.180,80</u>

Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris berasal dari penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) yang pada tahun 2024 sebesar Rp53.098.013.760,62. Jumlah ini naik 18,36% atau sebesar Rp8.234.765.579,82 jika dibandingkan tahun 2023 yang mencapai Rp44.863.248.180,80. Uraianya dapat dijelaskan berikut ini.

Tabel 5.279**Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris**

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	PPh Pasal 21	8.388.421.838,00	7.270.475.684,00
2	PPh Pasal 22	658.362.024,00	681.760.581,00
3	PPh Pasal 23	361.658.322,00	378.456.352,00
4	PPh Pasal 4 ayat (2)	2.378.133.643,00	0,00
5	PPN	18.559.444.321,00	19.297.702.692,00
6	Taperum	0,00	0,00
7	IWP	17.596.570.590,00	12.799.093.700,00
8	Iuran Jaminan Kecelakaan	3.433.335,00	0,00
9	Iuran BPJS Kesehatan	30.456.785,00	0,00
10	PFK BLUD	4.098.393.367,00	3.718.310.986,00
11	PFK JKN	425.452.517,00	369.706.067,00
12	PFK BOS	389.793.040,62	243.916.375,49
13	PFK BOK	207.893.978,00	93.866.499,31
14	Penerimaan uang titipan pada utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	9.959.244,00
Jumlah		53.098.013.760,62	44.863.248.180,80

5.5.4.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

Tahun 2024	Tahun 2023
<u>Rp53.089.566.623,62</u>	<u>Rp44.863.898.511,80</u>

Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris berasal dari penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) yang pada tahun 2024 sebesar Rp53.089.566.623,62. Jumlah ini naik sebesar



Rp8.225.668.111,82 atau 18,33% jika dibandingkan jumlah tahun sebelumnya yang mencapai Rp44.863.898.511,80.

Realisasi arus kas keluar dari aktivitas transitoris tahun 2024 dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.280**Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris**

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	PPh Pasal 21	8.388.912.338,00	7.270.779.038,00
2	PPh Pasal 22	658.362.024,00	681.760.581,00
3	PPh Pasal 23	362.499.397,00	377.615.277,00
4	PPh Pasal 4 ayat (2)	2.378.133.643,00	0,00
5	PPN	18.559.444.321,00	19.297.702.692,00
6	Taperum	0,00	0,00
7	IWP	17.596.570.590,00	12.799.093.700,00
8	Iuran Jaminan Kecelakaan	3.433.335,00	0,00
9	Iuran BPJS Kesehatan	30.456.785,00	0,00
10	PFK BLUD	4.098.393.367,00	3.718.310.986,00
11	PFK JKN	391.157.157,00	369.706.067,00
12	PFK BOS	397.141.444,62	255.063.671,49
13	PFK BOK	207.893.978,00	93.866.499,31
14	Pengembalian uang titipan pada utang Jangka Pendek Lainnya	17.168.244,00	0,00
	Jumlah	53.089.566.623,62	44.863.898.511,80

Nilai arus kas keluar aktivitas transitoris pada tahun 2024 senilai Rp53.089.566.623,62,00 menunjukkan selisih Rp17.168.244,00 jika dibandingkan dengan mutasi kurang Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) tahun 2024. Selisih tersebut atas transaksi transitoris (tanpa melalui Laporan Realisasi Anggaran/non anggaran) yang dicatat pada Utang Jangka Pendek Lainnya 31 Desember 2023, yaitu uang titipan dari SKB Belu dan CV Diamond Mandiri atas kelebihan penerimaan uang PAUD dan kelebihan pembayaran temuan BPK tahun 2022, yang seluruhnya telah dikembalikan ke pihak ketiga pada tahun 2024. Atas transaksi ini telah dikembalikan ke pihak ketiga pada tahun 2024 dan telah terkoreksi.

5.5.5 SALDO AKHIR KAS	Tahun 2024	Tahun 2023
	Rp41.535.075.676,24	Rp75.302.015.822,53

Saldo Akhir Kas tahun 2024 sebesar Rp41.535.075.676,24. Jika dibandingkan dengan saldo akhir kas tahun 2023 yang mencapai Rp75.302.015.822,53 maka terdapat penurunan sebesar Rp(33.766.940.146,29) atau (44,84)%. Jumlah tersebut merupakan



penjumlahan dari arus kas bersih dari aktivitas operasi, arus kas bersih dari aktivitas investasi/investasi aset non keuangan, arus kas bersih dari aktivitas pendanaan/pembiayaan dan arus kas bersih dari aktivitas transitoris/ non anggaran, saldo akhir kas tahun sebelumnya, dan koreksi SILPA atas kesalahan pembukuan tahun sebelumnya. Uraian penurunan kas tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.281
Saldo Akhir Kas

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi	110.654.512.669,55	194.856.615.777,36	(84.202.103.107,81)	(43,21)
2	Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi	(144.751.835.226,32)	(165.068.785.414,32)	20.316.950.188,00	(12,31)
3	Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan	321.922.432,00	470.502.016,00	(148.579.584,00)	(31,58)
4	Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris	8.447.137,00	(650.331,00)	9.097.468,00	(1.398,90)
5	Saldo awal kas tahun 2024	75.302.015.822,53	45.044.274.042,14	30.257.741.780,39	67,17
6	Koreksi SILPA atas kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	12.841,48	59.732,35	(46.890,87)	(78,50)
	Jumlah	41.535.075.676,24	75.302.015.822,53	(33.766.940.146,29)	(44,84)

Jumlah Saldo Akhir Kas 31 Desember 2024 sebesar Rp41.535.075.676,24 terdiri dari:

	<i>(Dalam Rupiah)</i>
Kas di Kas Daerah	36.185.506.670,60
Kas di Bendahara Penerimaan	16.242.002,31
Kas di Bendahara Pengeluaran	422.600,00
Kas di BLUD	211.621.063,89
Kas di Bendahara FKTP	1.982.366.742,08
Kas di Bendahara BOSP	67.305.450,09
Kas di Bendahara BOK	3.036.958.398,00
Kas Lainnya	34.652.749,27
Jumlah	41.535.075.676,24



5.6 PENJELASAN AKUN - AKUN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.6.1 Ekuitas Awal

Jumlah ekuitas awal tahun 2024 sebesar Rp1.659.250.988.290,89 merupakan ekuitas akhir tahun 2023. Ekuitas awal tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp(190.384.325.553,79) atau (10,29)% jika dibandingkan dengan ekuitas awal tahun 2024 sebesar Rp1.849.635.313.844,68.

5.6.2 Penambahan Ekuitas dari Surplus/Defisit - Laporan Operasional (LO)

Penambahan/pengurangan Ekuitas yang bersumber dari Saldo Surplus/Defisit - LO pada akhir periode pelaporan untuk tahun 2024 sebesar Rp(2.369.140.177,03) yang merupakan defisit yang berasal dari Laporan Operasional. Nilai ini mengalami penurunan defisit 63,88% atau Rp4.190.160.337,63 jika dibandingkan dengan defisit tahun 2023 sebesar Rp(6.559.300.514,66).

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar berupa koreksi ekuitas sebesar Rp1.052.998.355,18.

Koreksi tersebut langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan.

1) Koreksi ekuitas awal atas saldo Kas sebesar Rp12.841,48

Koreksi ini bersumber dari koreksi SiLPA awal BOSP pada Kas di Bendahara BOSP dari selisih saldo awal rekening giro BOSP pada SDI Asulait sebesar Rp0,86 dan SMPN 1 Tasifeto Timur sebesar Rp12.840,62 sesuai saldo awal rekening koran 1 Januari 2024 kedua Sekolah Negeri.

2) Koreksi ekuitas atas saldo awal piutang pada tahun 2024 sebesar Rp(2.316.520.804,63) dengan rincian sebagai berikut.

a) Koreksi atas kelebihan pencatatan piutang BLUD karena gagal klaim BPJS sebesar Rp(2.315.230.900,00); dan



- b) Koreksi atas kelebihan pencatatan piutang pengembalian an. CV Terina karena sudah tercatat pada aset lainnya sebesar Rp(1.289.904,63).
- 3) Koreksi ekuitas awal - Penyisihan Piutang
Koreksi ekuitas atas saldo awal penyisihan piutang pada tahun 2024 sebesar Rp471.548.988,53 dengan rincian sebagai berikut.
 - a) Koreksi atas penghapusan penyisihan piutang atas pelunasan piutang pajak hiburan tahun 2017 pada tahun 2024 sebesar Rp67.000,00;
 - b) Koreksi untuk penghapusan penyisihan piutang jasa giro tahun 2023 karena sudah direklasifikasi ke kas lainnya Rp3.389,16;
 - c) Koreksi atas penghapusan penyisihan piutang DBH Provinsi tahun 2023 karena sudah lunas Rp41.012.921,56;
 - d) Koreksi atas kelebihan pencatatan penyisihan piutang PBB-P2 tahun 2023 hasil perhitungan kembali Rp66.938.823,00;
 - e) Koreksi atas kelebihan pencatatan penyisihan piutang retribusi daerah pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian tahun 2023 hasil perhitungan kembali Rp281.925.566,19;
 - f) Koreksi untuk penghapusan penyisihan piutang pendapatan BLUD karena telah diterima pembayarannya pada tahun 2024 Rp55.204.138,00;
 - g) Koreksi atas penghapusan penyisihan piutang TPTGR tahun 2023 karena telah diterima pembayarannya pada tahun 2024 Rp19.830.570,00; dan
 - h) Koreksi kurang catat piutang pajak dari penetapan tahun pajak dan koreksi penyisihan pajak per 31 Desember 2024 hasil perhitungan kembali Rp6.566.580,62.
- 4) Koreksi ekuitas awal - Persediaan
Koreksi ekuitas persediaan sebesar Rp160.701.513,00 merupakan koreksi atas kekurangan pencatatan persediaan puskesmas dari JKN tahun 2023 dan farmasi Dinas Kesehatan atas kuantitas yang belum tercatat sesuai BA Pemeriksaan Fisik Persediaan Inspektorat per 31 Desember 2024.
- 5) Koreksi ekuitas awal - Aset Tetap
Koreksi ekuitas atas saldo awal Aset Tetap sebesar Rp(529.120.000,00) dengan rincian sebagai berikut.
 - a) Koreksi atas penerimaan hibah mobil tangka air dari Kementerian Badan Nasional Penanggulangan Bencana



Tahun 2020 sesuai BAST Nomor BA.228.9/D V/RT.03.03/2020
Rp431.200.000,00;

- b) Koreksi atas penerimaan hibah dua unit motor dari Kementerian Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2023 BAST Nomor /D-V/RT.03.05/01/2023 Rp64.000.000,00;

Koreksi atas aset tetap jaringan air bersih Klatun yang telah dihibahkan ke Kabupaten Malaka pada tahun 2019 sesuai BAST BPKAD.030/23/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 Rp(1.024.320.000,00).

6) Koreksi ekuitas awal - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Koreksi ekuitas atas saldo awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp25.394.388.809,00 dengan rincian sebagai berikut.

- a) Koreksi atas kelebihan pencatatan akumulasi penyusutan aset tetap tahun 2023 Rp27.037.363.710,39;
- b) Koreksi atas kurang pencatatan akumulasi penyusutan aset tetap tahun 2023 Rp(1.537.251.187,10);
- c) Koreksi atas hibah mobil tangki air dari Kementerian Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020 BAST Nomor BA.228.9/D V/RT.03.03/3/2020 Rp(308.000.000,00);
- d) Koreksi atas hibah 2 unit motor dari Kementerian Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2023 BAST Nomor /D-V/RT.03.05/01/2023 Rp(18.285.714,29);
- e) Reklasifikasi peralatan dan mesin dari aset tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Rusak Berat atas aset tetap yang mengalami kerusakan berat sesuai surat ubah kondisi BMD Nomor BPKAD 360/88/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 dari Pelaksana BPBD Rp(137.950.000,00); dan
- f) Koreksi aset tetap Jaringan Bersih Air Klatun yang telah dihibahkan ke Kabupaten Malaka pada tahun 2019 sesuai BAST BPKAD.030/23/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 Rp358.512.000,00.

7) Koreksi ekuitas awal - Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Koreksi ekuitas akumulasi penyusutan properti investasi Rp1.362.108.981,54 merupakan koreksi kelebihan pencatatan akumulasi penyusutan properti investasi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

**8) Koreksi ekuitas awal - Aset Lainnya**

Koreksi Ekuitas Awal - Aset Lainnya sebesar Rp(24.447.721.240,74) terdiri dari:

- a) Koreksi ekuitas aset lainnya Rp0,37 merupakan koreksi kurang pencatatan aset lainnya tahun 2023 atas pengembalian kekurangan volume pekerjaan; dan
- b) Koreksi ekuitas atas saldo awal Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp(24.447.721.241,11) merupakan koreksi atas kurang pencatatan akumulasi penyusutan aset lainnya tahun sebelumnya Rp(24.501.279.153,11) dan koreksi lebih catat akumulasi penyusutan aset lainnya yang terhapuskan ke koreksi ekuitas di tahun-tahun sebelumnya Rp53.557.912,00.

9) Koreksi ekuitas awal - Kewajiban

Koreksi ekuitas atas saldo awal Kewajiban sebesar Rp957.599.267,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Koreksi atas kelebihan pencatatan utang belanja pegawai BLUD tahun 2023 sebesar Rp980.329.594,00;
- b) Koreksi atas kelebihan pencatat utang belanja jasa BLUD tahun 2023 tahun 2023 sebesar Rp3.169.459,00;
- c) Koreksi atas kelebihan pencatatan utang iuran jaminan kesehatan anggota DPRD tahun 2023 sebesar Rp214,00;
- d) Kelebihan pencatatan utang belanja yang diserahkan kepada pihak lain tahun 2023 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp300.000,00; dan
- e) Koreksi kekurangan pembayaran tunjangan fungsional/tunjangan umum atas nama Hyasinthus Agenius Mau tahun 2019-2023 sesuai Laporan Hasil Reviu Inspektorat Nomor 06/700.2.8/IRDA/LHR/IV/2025 tanggal 6 Mei 2025 Rp(26.200.000,00).

5.6.4 Ekuitas Akhir

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp1.657.934.846.469,04	Rp1.659.250.988.290,89

Saldo Ekuitas Akhir 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp1.657.934.846.469,04 dan Rp1.659.250.988.290,89 merupakan ekuitas awal ditambah Surplus/Defisit - LO ditambah dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar pada tahun yang bersangkutan. Saldo Ekuitas Akhir tahun 2024 turun sebesar



Rp(1.316.141.821,85) atau (0,08)% jika dibandingkan dengan tahun 2023.

Rincian perhitungan ekuitas akhir dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.282**Ekuitas**

No.	Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Ekuitas Awal	1.659.250.988.290,89	1.849.635.313.844,68	(190.384.325.553,79)	(10,29)
2	Surplus/Defisit - LO	(2.369.140.177,03)	(6.559.300.514,66)	4.190.160.337,63	(63,88)
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	1.052.998.355,18	(183.825.025.039,13)	184.878.023.394,31	(100,57)
	Koreksi Ekuitas - Kas	12.841,48	0,00	12.841,48	0,00
	Koreksi Ekuitas - Piutang	(2.316.520.804,63)	854.340.858,20	(3.170.861.662,83)	(371,15)
	Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang	471.548.988,53	0,00	471.548.988,53	0,00
	Koreksi Ekuitas - Persediaan	160.701.513,00	0,00	160.701.513,00	0,00
	Koreksi Ekuitas - Aset Tetap	(529.120.000,00)	1.562.014.857,00	(2.091.134.857,00)	(133,87)
	Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	25.394.388.809,00	(184.054.495.773,37)	209.448.884.582,37	(113,80)
	Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	1.362.108.981,54	174.410.035,51	1.187.698.946,03	680,98
	Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya	(24.447.721.240,74)	(2.236.825.160,00)	(22.210.896.080,74)	992,97
	Koreksi Ekuitas - Kewajiban	957.599.267,00	(124.469.856,47)	1.082.069.123,47	(869,34)
	Ekuitas Akhir	1.657.934.846.469,04	1.659.250.988.290,89	(1.316.141.821,85)	(0,08)

**BAB VI****PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN****6.1 Informasi Non Keuangan Lainnya**

- 1) Selama periode tahun anggaran 2024 terdapat beberapa permasalahan terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti di periode-periode mendatang yaitu *progress* penghapusan piutang. Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya terdapat beberapa jenis piutang daerah yang masuk dalam kualifikasi macet sehingga sulit untuk ditagih. Atas piutang-piutang tersebut pemerintah telah mengambil langkah untuk melakukan proses penghapusan. Pelaksanaannya telah dilimpahkan kepada Pejabat Urusan Piutang Negara (PUPN) pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kupang. Nilai yang diserahkan sebesar Rp3.261.899.900,00 yang terdiri atas:
 - a) Piutang dana bergulir pada Dinas Koperasi UKM sebesar Rp2.693.217.400,00 dan masih terus diproses di KPKNL Kupang;
 - b) Piutang dana bergulir pada Dinas Pemberdayaan Perempuan & KB sebesar Rp178.982.500,00 dan masih terus diproses di KPKNL Kupang; dan
 - c) Piutang penjualan aset daerah pada Dinas Perikanan sebesar Rp389.700.000,00. Dari jumlah tersebut, seluruhnya telah diusulkan Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).
- 2) Pemerintah Kabupaten Belu juga mencatat Aset Tetap di Bawah Nilai Kapitalisasi dan Aset Lainnya Piutang Dana Bergulir yang telah dihapusbukukan dengan Surat Keputusan Bupati Belu Nomor 127/HK/2020 tanggal 3 Juni 2020 tentang Penghapusan Piutang Dana Bergulir Secara Bersyarat pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belu dari Daftar Piutang Daerah. Nilai aset yang dicatat secara ekstrakomptabel per 31 Desember 2024 dapat diuraikan per SKPD sebagai berikut.



Tabel 6.1

**Rincian per SKPD Aset Tetap di Bawah Nilai Kapitalisasi dan Dana Bergulir yang
Dihapusbukukan dan dicatat secara Ekstrakomptabel per 31 Desember 2024**

No.	Nama SKPD	Nilai (Rp)
Aset Tetap di Bawah Nilai Kapitalisasi		13.995.179.914,45
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	9.399.627.008,05
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	327.265.290,00
3	Dinas Kesehatan	1.719.028.661,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah	675.176.229,00
5	Inspektorat Daerah	22.922.000,00
6	Sekretariat DPRD	41.129.375,00
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	158.990.810,00
8	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	55.233.560,00
9	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	67.380.775,00
10	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	133.977.700,00
11	Dinas Peternakan dan Perikanan	145.991.936,40
12	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	61.414.300,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.512.750,00
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	160.402.730,00
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	232.810.868,00
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15.740.500,00
17	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	45.108.750,00
18	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18.830.577,00
19	Bagian Pemerintahan	4.825.000,00
20	Bagian Kesejahteraan Rakyat	7.137.000,00
21	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	3.134.000,00
22	Bagian Umum	160.600.635,00
23	Bagian Pembangunan	1.674.000,00
24	Bagian Protokol dan Komunikasi Setda	7.639.080,00
25	Bagian Ekonomi	11.197.180,00
26	Bagian Hukum	5.672.625,00
27	Bagian Organisasi	3.955.500,00
28	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	76.508.380,00
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18.237.660,00
30	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	98.129.266,00
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16.827.843,00
32	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.676.400,00
33	Badan Pendapatan Daerah	3.621.000,00
34	Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sdm	16.899.550,00
35	Kecamatan Kota	32.546.500,00



No.	Nama SKPD	Nilai (Rp)
36	Kecamatan Atambua Selatan	61.509.826,00
37	Kecamatan Atambua Barat	4.966.917,00
38	Kecamatan Kakuluk Mesak	14.129.000,00
39	Kecamatan Lasiolat	14.029.900,00
40	Kecamatan Raimanuk	14.614.000,00
41	Kecamatan Tasifeto Timur	22.635.000,00
42	Kecamatan Nanaet Duabesi	14.477.500,00
43	Kecamatan Lamaknen	2.066.000,00
44	Kecamatan Tasifeto Barat	28.664.333,00
45	Kecamatan Raihat	22.301.000,00
46	Kecamatan Lamaknen Selatan	13.364.000,00
47	Satuan Polisi Pamong Praja	20.597.000,00
Dana Bergulir yang Dihapusbukan		1.500.891.700,00
48	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.900.000,00
49	Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.495.991.700,00
Jumlah		15.496.071.614,45

6.2 Profil Singkat Kabupaten Belu

Belu adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan langsung dengan Negara *Republic Democratic Timor Leste*. Kata “Belu” merupakan sapaan yang bermakna teman atau sahabat. Ini merupakan makna simbol yang mendeskripsikan bahwa pada jaman dahulu para penghuni Belu memang hidup saling memperhatikan dan bersahabat dengan siapa saja. Dari sisi administratif pemerintahan, Kabupaten Belu berdiri pada tanggal 20 Desember 1958 dengan Atambua sebagai ibu kota kabupatennya. Kabupaten Belu dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Sejak berdirinya, Pemerintah Kabupaten Belu telah dipimpin oleh Pejabat Bupati dengan masa kepemimpinannya sebagai berikut.

1. Alexander Bere Tallo, (1960 - 1969)
2. Drs. Markus Didoek, (1969 - 1977)
3. Marsel Adang Da Gomez, (1977 - 1978)
4. Drs. Servatius Berek, (1978 - 1982)
5. Drs. Jhon S. Letto, (1983 - 1988)
6. Letkol Art. Ignasius Sumantri, (1988 - 1993)



7. Drs. Servarius M. Pareira, MPH, (1993 - 1998)
8. Drs. Marsellus Bere, (1999 - 2004)
9. Drs. Joachim Lopez, (2004 - 2014)
10. Willybrodus Lay, S.H., (2016 - 2021)
11. dr. Taolin Agustinus, Sp.PD-KGEH, FINASIM (2021 - 2024)

Pada tahun 2013 sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 terjadi pemekaran wilayah Kabupaten Belu menjadi 2 yakni Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka sebagai daerah otonom baru hasil pemekaran.

1) Geografi dan Demografi

Posisi astronomis Kabupaten Belu terletak antara koordinat 124° - 40' 33" BT- 125° - 15' 23" BT dan 08° - 70' 30" LS-09° 23' 30" LS. Kabupaten Belu adalah salah satu kabupaten dari 6 (enam) kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak di daratan Pulau Timor. Posisi geografis Kabupaten Belu dalam daratan Timor Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah di bagian paling Timur dan berbatasan darat langsung sepanjang 149,1 km dan berada di jalur perlintasan internasional dengan Negara Republic Democratic Timor Leste. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur disebutkan jumlah desa yang berbatasan darat dan laut secara langsung dengan negara Republic Democratic Timor Leste adalah sebanyak 11 Kecamatan dan 44 Desa.

Luas wilayah administrasi Kabupaten Belu adalah 1.284,94 km² atau 128.494 ha dengan batas-batas administrasi sebagai berikut.

- | | | |
|-----------------|---|---|
| Sebelah Utara | : | berbatasan dengan Selat Ombai |
| Sebelah Selatan | : | berbatasan dengan Kabupaten Malaka |
| Sebelah Timur | : | berbatasan dengan negara <i>Republic Democratic</i> Timor Leste |
| Sebelah Barat | : | berbatasan dengan wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara |



Gambar 6.1
Peta Kabupaten Belu



Sumber: Belu Dalam Angka 2024

Kabupaten Belu terbagi atas 12 (dua belas) kecamatan, 69 (enam puluh sembilan) desa 12 (dua belas) kelurahan dan 18 (delapan belas) desa persiapan berdasarkan Peraturan Bupati Belu Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pembentukan Desa Persiapan di Kabupaten Belu. Desa persiapan di Kabupaten Belu adalah sebagai berikut.

Tabel 6.2
Luas Wilayah Desa Persiapan

No.	Kecamatan	Nama Desa Persiapan	Luas Wilayah (Km ²)	Pusat Pemerintahan
1	Lamaknen	Fulur Backhelin	316,49	Dusun Holgotok
		Hatulou	909,25	Dusun Olo Ema
		Weluli	1029,41	Dusun Weluli
2	Tasifeto Timur	Tukubesi	948,95	Dusun Motabenar
		Manleten Barat	1439,32	Dusun Bauatok B
		Manleten Timur	1439,32	Dusun Lamasi A
3	Raihat	Tohe Rai Ain	512	Dusun Kotakfau
		Tohe Fatukesi	512	Dusun Wekrame A
4	Tasifeto Barat	Manuaman Fatukbot	1759	Dusun Tabean B
		Manuaman Lidak	1759	Dusun Berkase
		Kubesi	1360	Dusun Mauulun
		Banameta	1360,02	Dusun Halituku
		Raidikur	1360,02	Dusun Naresa B
		Makerek Nen	1700	Dusun Tulama
5	Kakuluk Mesak	Welaka	635,05	Dusun Lianain
		Lakafehan	845,55	Dusun Lakaritirai
		Fatubesi Lalori	1347,87	Dusun Wehor
6	Lamaknen Selatan	Majo Rato	591,08	Dusun Piebulak

Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Tasifeto Barat dengan luas wilayah 224,19 km² atau 17,45% dari luas wilayah Kabupaten Belu. Sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Atambua



Barat dengan luas wilayah 15,55 km² atau 1,21% dari luas wilayah Kabupaten Belu seperti dijelaskan pada Tabel 6.3 berikut ini.

Tabel 6.3
Luas Wilayah Kabupaten Belu

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel.	Jumlah Desa Persiapan	Luas Wilayah (Km ²)	%
1	Raimanuk	9	-	179,42	13,96
2	Tasifeto Barat	8	7	224,19	17,45
3	Kakuluk Mesak	6	2	187,54	14,59
4	Nanaet Duabesi	4	-	60,25	4,69
5	Kota Atambua	4	-	24,90	1,94
6	Atambua Barat	4	-	15,55	1,21
7	Atambua Selatan	4	-	15,73	1,22
8	Tasifeto Timur	12	3	211,37	16,45
9	Raihat	6	2	87,20	6,79
10	Lasiolat	7	-	64,48	5,02
11	Lamaknen	9	3	105,90	8,24
12	Lamaknen Selatan	8	1	108,41	8,44
Jumlah		81	18	1.284,94	100,00

Sumber: Belu Dalam Angka, BPS (2024)

Jumlah penduduk Kabupaten Belu sampai dengan tahun 2024 sebanyak 232.788 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,37%. Penduduk Kabupaten Belu tersebar di 12 (dua belas) kecamatan dengan pola relatif tidak merata. Jumlah penduduk terbanyak ada di Kecamatan Kota Atambua yakni sebanyak 32.119 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 1,76% dan jumlah penduduk paling sedikit ada di Kecamatan Nanaet Duabesi sebanyak 5.441 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 4,78%.

Tabel 6.4
Populasi Penduduk Kabupaten Belu

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan (%)
1	Raimanuk	19.281	5,75
2	Tasifeto Barat	27.892	5,33
3	Kakuluk Mesak	23.140	1,1
4	Nanaet Duabesi	5.441	4,78
5	Kota Atambua	32.119	1,76
6	Atambua Barat	23.440	(3,18)
7	Atambua Selatan	26.699	1,04
8	Tasifeto Timur	27.979	3,23
9	Raihat	15.852	3,77
10	Lasiolat	7.863	3,2
11	Lamaknen	13.506	2,46
12	Lamaknen Selatan	9.576	3,78
Jumlah		232.788	2,37

Sumber: Belu Dalam Angka, BPS (2024)



2) Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Belu memiliki potensi pengembangan ekonomi yang sangat besar berbasis sumber daya alam terutama pada sub sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan serta perikanan dan kelautan yang menghasilkan komoditas khas yang menjadi unggulan di antaranya dari sektor tanaman pangan yaitu komoditi padi, jagung dan kacang hijau; komoditas hortikultura/sayuran antara lain bawang merah. Pada sub sektor perkebunan telah memberikan nilai ekonomi potensial adalah tanaman jambu mete dan pinang. Sedangkan dari sektor peternakan yaitu sapi dan babi. Sementara dari sektor industri di antaranya kelompok industri rumah tangga (tenun ikat) dan hasil hutan non kayu (lebah-madu) dan hasil hutan berupa asam yang sangat berkontribusi pada peningkatan ekonomi wilayah dan penyerapan tenaga kerja.

Namun dalam pengembangannya, peningkatan komoditas unggulan ini masih belum optimal karena masih belum didukung dengan ketersediaan prasarana produksi (industri), pasar dan tenaga kerja yang terampil.

Kawasan industri dan perdagangan antar Negara Republik Indonesia-Republic Democratic Timor Leste adalah kawasan yang merupakan pintu perbatasan Republik Indonesia-*Republic Democratic Timor Leste* dengan salah satu kawasan pengembangannya meliputi Kecamatan Tasifeto Timur dan Kecamatan Kakuluk Mesak dengan pusat pengembangan khusus perdagangan di Lakafehan dan Desa Kenebib, Kecamatan Kakuluk Mesak sebagai desa industri.

Kawasan Agropolitan Haekesak yang meliputi Kecamatan Raihat, Tasifeto Timur, Lasiolat, Lamaknen, Lamaknen Selatan, Tasifeto Barat dan Raimanuk dapat dikembangkan sebagai pusat produksi tanaman pangan dan hortikultura. Sedangkan kawasan peternakan difokuskan pada beberapa kawasan berikut ini.

1. Kawasan Sonis Laloran (Desa Bakustulama, Derok Faturene dan Naekasa) di Kecamatan Tasifeto Barat seluas 500 ha;
2. Kawasan Fahinuan Nuadato (Desa Bauho, Sarabau, Umaklaran dan Manleten) di Kecamatan Tasifeto Timur dengan luas 500 ha;
3. Kawasan Raimanuk seluas 500 ha; dan
4. Kawasan Sadi seluas 300 ha dapat dikembangkan sebagai pusat peternakan Sapi Bali.



Sedangkan kawasan minapolitan di Kabupaten Belu berupa minapolitan perikanan tangkap dan berada di sepanjang garis pantai utara 32,22 km yang terdiri atas Kecamatan Kakuluk Mesak dan Tasifeto Timur yang berpusat di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Atapupu di Desa Fatuketi.

Kabupaten Belu memiliki luas wilayah perairan laut 238,685 km² dengan panjang garis pantai 32,22 km². Kabupaten Belu memiliki potensi perikanan baik laut maupun darat, khususnya yang berasal dari tambak untuk dikembangkan. Hal ini diperkuat dengan jumlah rumah tangga perikanan yang ada di Kabupaten Belu yang kian meningkat.

Kabupaten Belu mempunyai bermacam-macam obyek dan daya tarik wisata berupa wisata bahari, wisata alam (Padang Fulan Fehan), budaya (tempat upacara, makam, benteng, gua alam, tari tradisional), religius (Gua Maria Lourdes, Gereja Tua Nualain, Gereja Laktutus, Patung Bunda Segala Bangsa di Teluk Gurita) dan wisata belanja (aneka kerajinan). Potensi-potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Belu perlu mendapat perhatian yang serius dan terus digali serta dikembangkan agar ke depan sektor pariwisata dapat menunjukkan kontribusi yang nyata pada kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.



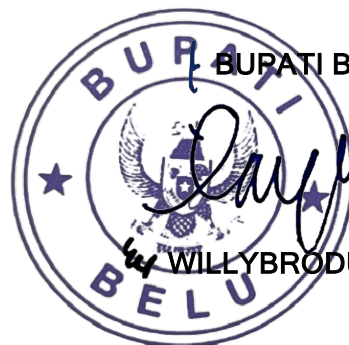
BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2024 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna meningkatkan *good governance*.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belu Tahun 2024 secara keseluruhan. Kami berharap prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan independensi pengelolaan keuangan daerah tetap terjaga sehingga tujuan akhir pembangunan berupa kesejahteraan masyarakat dapat kita gapai bersama.

Akhirnya, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa berkenan memberikan rahmat, bimbingan serta kemudahan-Nya dalam upaya bersama membangun Kabupaten Belu tercinta.

 BURATI BELU, SH

WILLYBRODUS LAY, SH